



PEMERINTAH
PROVINSI MALUKU

#AKHLAK
Berakhlak, Berprestasi, Berkeadilan, Berkompetensi, Berkeadilan, Berkeadilan

#bangga
melayani
bangsa

LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

TAHUN 2025



HENDRIK LEWERISA, SH.,LL.M

Gubernur Provinsi Maluku

ABDULLAH VANATH, S.Sos

Wakil Gubernur Provinsi Maluku

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur patutlah kami panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, atas segala limpahan rahmat, karunia serta hidayah-Nya, Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Provinsi Maluku Tahun Anggaran 2025 telah selesai disusun dan disampaikan kepada Presiden melalui Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Berdasarkan ketentuan perundang-undangan, yakni pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang ditindaklanjuti pelaksanaannya melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, dimana mengamanatkan LPPD disampaikan kepada Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Gambaran capaian kinerja Pemerintah Provinsi Maluku secara akumulatif telah tertuang dalam Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Provinsi Maluku ini, dan merupakan laporan capaian program dan kegiatan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan elemen penyelenggara pemerintahan di lingkup Pemerintah Provinsi Maluku. Dengan kata lain, LPPD menjadi dokumen resmi yang menggambarkan capaian kinerja kami sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku.

Oleh sebab itu, saya mesti memberikan apresiasi dan penghargaan atas koordinasi dan kerjasama yang sangat baik diantara seluruh OPD Pemerintah Provinsi Maluku. Saya ingatkan bahwa kerjasama dan koordinasi adalah instrumen kerja kunci yang mampu menggerakkan secara optimal segenap potensi sumberdaya di daerah, baik internal maupun eksternal.

Seluruh dinamika proses penyelenggaraan pemerintahan di Provinsi Maluku sepanjang tahun 2025 telah diupayakan semaksimal mungkin, sehingga dalam rentang waktu 1 (satu) tahun kepemimpinan kami sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku, Pemerintah Provinsi Maluku terus mengupayakan penyelenggaraan pemerintahan dengan memprioritaskan implementasi visi misi Pemerintah Provinsi Maluku Tahun 2025-2029,

yakni **“Transformasi Maluku Menuju Maluku yang Maju, Adil dan Sejahtera Menyongsong Indonesia Emas 2045”** .

Dalam kedudukan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Daerah, kami terus mendorong jajaran Pemerintah Kabupaten/Kota pada 11 (sebelas) Kabupaten/Kota Se-Maluku agar terus berkinerja menyelenggarakan urusan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah. Hal ini penting, sebab hakekat berotonomi daerah yang benar dan efektif adalah ketika setiap pemerintah daerah dapat menyelenggarakan urusan-urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya secara benar dan berkualitas.

Tersusunnya LPPD ini, selain menjadi media pelaporan atas periodisasi 1 (satu) tahun Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Provinsi Maluku, akan tetapi dipergunakan juga sebagai bahan evaluasi dan kajian oleh Pemerintahan Pusat, yang dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri sebagai bentuk pembinaan, pengawasan dan pengendalian pemerintah terhadap pemerintah provinsi. Dapat dipastikan bahwa laporan ini akan menjadi dokumen resmi bernilai strategis bagi penilaian penyelenggaraan pemerintahan yang berkelanjutan di Provinsi Maluku.

Demikian laporan ini disampaikan sebagai bahan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Semoga seluruh upaya yang dilaksanakan dapat bermanfaat dalam rangka meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah di Provinsi Maluku untuk dapat terus meningkatkan kesejahteraan masyarakat Maluku sehingga terwujudnya Maluku yang maju, adil dan sejahtera. Semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa senantiasa merahmati dan meridhoi seluruh tugas dan tanggung jawab serta pengabdian kita. Amin.

Ambon, 12 Maret 2026
GUBERNUR MALUKU

HENDRIK LEWERISSA, SH., LL.M



DAFTAR ISI

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

1. Latar Belakang	1
1.1 Penjelasan Umum	1
A. Undang-Undang Pembentukan Daerah.....	1
B. Data Geografis Wilayah.....	2
C. Jumlah Penduduk.....	6
D. Jumlah Kabupaten / Kota.....	7
E. Jumlah Perangkat Daerah dan Unit Kerja Perangkat Daerah dan Pegawai Pemerintah	8
F. Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	16
1.2 Perencanaan Pembangunan Daerah	17
A. Permasalahan Strategis Pemerintah Daerah	17
B. Visi dan Misi Kepala Daerah	27
C. Program Pembangunan Daerah Berdasarkan Dokumen Perencanaan Jangka Menengah	30
D. Kegiatan Pembangunan Daerah Berdasarkan Dokumen Perencanaan Tahunan	34
1.3 Penerapan Standarr Pelayanan Minimal	34

BAB II CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

2.1 Capaian Kinerja Makro.....	36
2.2 Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan	36
2.2.1 Indikator Kinerja Kunci Untuk Urusan Pemerintahan	37
2.2.2. Indikator Kinerja Kunci Untuk Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan.....	44
2.2.3 Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah.....	45

BAB III CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN

1. Dasar Hukum Penyelenggaraan Tugas Pembantuan	146
2. Gambaran Umum Pelaksanaan Tugas Pembantuan di Provinsi.....	147

3. Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan.....	148
3.1 Tugas Pembantuan Pusat yang Dilaksanakan oleh Pemerintah	
Provinsi Maluku	148
3.1.1 Target Kinerja	151
3.1.2 Realisasi	153
3.2 Permasalahan dan Kendala	160
3.3 Saran dan Tindak Lanjut.....	161

BAB IV PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

4.1 Urusan Pendidikan.....	163
4.1.1 Jenis Pelayanan Dasar	163
4.1.2 Target Pencapaian SPM oleh Daerah.....	163
4.1.3 Realisasi.....	165
4.1.4 Alokasi Anggaran	166
4.1.5 Dukungan Personil.....	167
4.1.6 Permasalahan dan Solusi	167
4.2 Urusan Kesehatan	168
4.2.1 Jenis Pelayanan Dasar	168
4.2.2 Target Pencapaian SPM oleh Daerah.....	168
4.2.3 Realisasi.....	171
4.2.4 Alokasi Anggaran	173
4.2.5 Dukungan Personil.....	174
4.2.6 Permasalahan dan Solusi	174
4.3 Urusan Pekerjaan Umum.....	175
4.3.1 Jenis Pelayanan Dasar	175
4.3.2 Target Pencapaian SPM oleh Daerah.....	175
4.3.3 Realisasi.....	176
4.3.4 Alokasi Anggaran	177
4.3.5 Dukungan Personil.....	178
4.3.6 Permasalahan dan Solusi	178
4.4 Urusan Perumahan Rakyat	179
4.4.1 Jenis Layanan Dasar	180



4.4.2 Target Pencapaian SPM.....	180
4.4.3 Realisasi.....	181
4.4.4 Alokasi Anggaran	181
4.4.5 Dukungan Personil.....	181
4.4.6 Permasalahan dan Solusi	182
4.5 Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat.....	182
4.5.1 Jenis Layanan Dasar	182
4.5.2 Target Pencapaian SPM oleh Daerah.....	183
4.5.3 Realisasi.....	184
4.5.4 Alokasi Anggaran	185
4.5.5 Dukungan Personil.....	186
4.5.6 Permasalahan dan Solusi	186
4.6 Urusan Sosial.....	187
4.6.1 Jenis Pelayanan Dasar	187
4.6.2 Target Pencapaian SPM oleh Daerah.....	187
4.6.3 Realisasi.....	187
4.6.4 Alokasi Anggaran.....	188
4.6.5 Permasalahan dan Solusi	188
4.7 Program dan Kegiatan	190
BAB V PENUTUP	
Penutup.....	195



BAB I

PENDAHULUAN

BAB I

P E N D A H U L U A N

1. Latar Belakang

1.1. Penjelasan Umum

A. Undang-undang Pembentukan Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Darurat Nomor 22 Tahun 1957 Tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I yang kemudian diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1958 sebagai dasar pembentukan Provinsi Maluku yang disahkan dan dinyatakan sebagai Provinsi pertama di Republik Indonesia bersama 7 (tujuh) daerah lainnya di Indonesia diantaranya Kalimantan, Sunda Kecil, Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Sulawesi dan Sumatera.

Dalam perkembangan waktu berdasarkan kondisi Geografis wilayah yang luas dan demi terwujudnya pemerataan di semua wilayah serta keadilan antara daerah satu dengan yang lainnya di Provinsi Maluku, maka lewat aspirasi dan tuntutan masyarakat menghendaki adanya pemekaran wilayah. Provinsi Maluku pertama kali dimekarkan menjadi 2 (dua) Provinsi antara lain Provinsi Maluku dan Provinsi Maluku Utara sesuai Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat. Sejak ditetapkan melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2008, secara administratif Provinsi Maluku terdiri dari 11 (sebelas) Kabupaten/Kota.

Otonomi Daerah diberikan kepada rakyat sebagai satu bentuk kepercayaan dari Pemerintah Pusat ke daerah untuk menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat sebagai satu perwujudan dari sistem demokrasi di Negara Republik Indonesia.

Masyarakat diberikan kewenangannya untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan yang diberikan oleh Pemerintah Pusat kepada daerah demi terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan transparan yang merupakan tujuan sebuah pemerintahan yang baik. Oleh sebab itu, untuk mewujudkan sebuah pemerintahan yang baik diperlukannya pembinaan dan evaluasi secara berjenjang dan terus menerus dalam penyelenggaraan pemerintahan.

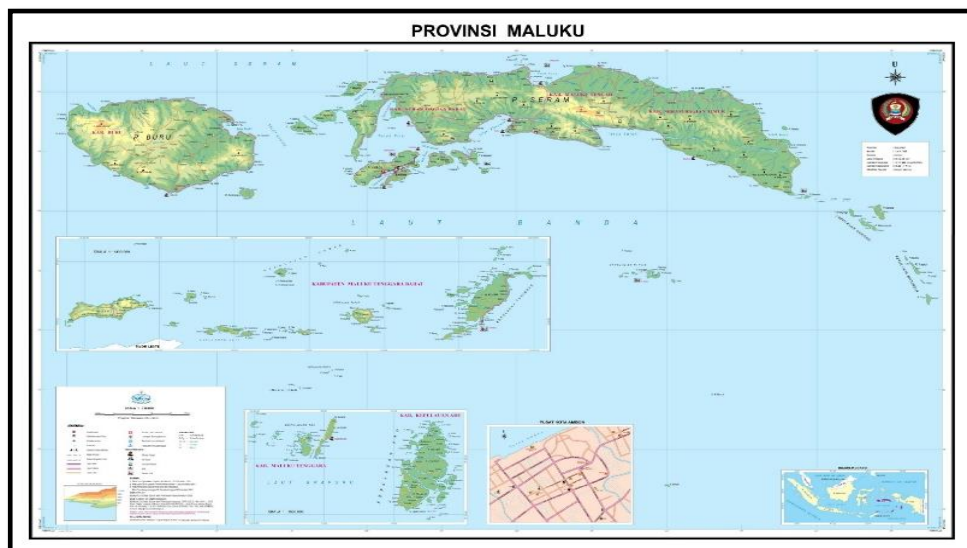
Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah pasal 69 sampai dengan pasal 70 mewajibkan Kepala Daerah untuk menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun yang disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir kepada Presiden Republik Indonesia melalui Menteri Dalam Negeri dan digunakan sebagai bahan evaluasi dan pembinaan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah oleh Pemerintah Pusat.

B. Data Geografis Wilayah

Provinsi Maluku merupakan salah satu Provinsi di Indonesia yang terletak di wilayah timur Indonesia. Secara keseluruhan, kondisi geografis Provinsi Maluku adalah wilayah darat dan laut yang meliputi pulau-pulau besar dan kecil. Secara keseluruhan Provinsi Maluku memiliki wilayah seluas 712.479,69 km². Sebagian besar wilayahnya merupakan perairan seluas 658.294,69 km² (92,4%), sedangkan luas wilayah daratan hanya sekitar 54.185 km² (7,6%). Provinsi Maluku merupakan wilayah Kepulauan dengan jumlah pulau besar dan kecil sebanyak 1.340 pulau dengan panjang garis pantai 10.630 km.

Gambar 1.1

Peta Administrasi Provinsi Maluku



Sejak ditetapkan melalui Undang-Undang Republik Indonesia No. 32 Tahun 2008, secara administratif Provinsi Maluku terdiri dari 11 kabupaten/kota. Nama kabupaten/kota, luas wilayah administratif, serta jumlah kecamatan, desa, dan kelurahan masing-masing kabupaten/kota

Tabel 1.1

Luas Area Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku

No	Kabupaten/Kota	Luas Area (km/sq.km)	Ibukota Kabupaten/Kota
1	Kepulauan Tanimbar	4.431,08	Saumlaki
2	Maluku Tenggara	1.061,92	Langgur
3	Maluku Tengah	8.253,92	Masohi
4	Buru	4.915,56	Namlea

5	Kepulauan Aru	8.096,72	Dobo
6	Seram Bagian Barat	5.017,14	Piru
7	Seram Bagian Timur	5.725,44	Bula
8	Maluku Barat daya	4.551,67	Tiakur
9	Buru Selatan	3.678,69	Namrole
10	Ambon	236,66	Ambon
11	Tual	234,41	Tual
Maluku		46.158,27	

Sumber : BPS Provinsi Maluku, 2025

Secara Geografis Provinsi Maluku terletak diantara $2^{\circ} 30' - 9^{\circ}$ Lintang Selatan dan $124^{\circ} - 136^{\circ}$ Bujur Timur yang sebagian besar wilayahnya merupakan wilayah kepulauan meliputi pulau-pulau besar dan kecil sebanyak 1.200 pulau. Pulau terbesar adalah Pulau Seram dengan luas 18.625 km^2 , Pulau Buru dengan luas 9.000 km^2 , Pulau Yamdena dengan luas 5.085 km^2 dan Pulau Wetar seluas 3.624 km^2 yang rinciannya dapatlah dilihat pada tabel 1.2 dibawah ini.

Selain itu, pada wilayah Maluku juga terdapat 4 (empat) gunung dimana gunung tertinggi yaitu Gunung Binaya dengan ketinggian mencapai 3.055 meter di atas permukaan laut, dan berada di Pulau Seram. Gunung tertinggi kedua adalah Gunung Kapala Madan yang berada di Pulau Buru, Kabupaten Buru dengan ketinggian mencapai 2.429 meter di atas permukaan laut. Selanjutnya adalah Gunung Salahutu yang berada di Pulau Ambon dengan ketinggian mencapai 1.036 meter di atas permukaan laut.

Selain terdapat gunung, di Provinsi Maluku juga terdapat 11 (sebelas) danau yang tersebar di 5 (lima) Kabupaten/Kota, diantaranya Danau Tihu di Pulau Wetar, Danau Abiel dan Danau Ngilngof di Kepulauan Kei Kecil, Danau Fan di Pulau Dullah, Danau Ohoillim di Kepulauan Kei Besar, Danau Telaga Raja di Pulau Seram, Danau Tihu Suli, Danau Kaitetu dan Danau Laha di Pulau Ambon serta Danau Rana di Pulau Buru.

Kondisi topografi Kepulauan Maluku meliputi dataran rendah, berbukit dan gunung. Wilayah Kabupaten/Kota dengan topografi dataran rendah yakni Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Kabupaten Maluku Tenggara, Kabupaten Maluku Tengah, Kabupaten Seram Bagian Barat, Kabupaten Seram Bagian Timur dan Kabupaten Buru serta Kabupaten Buru Selatan. Pada Tabel 1.3 dibawah ini dapatlah dilihat rincian luas wilayah dataran pada masing-masing kabupaten.

Tabel 1.2
Kondisi Dataran Rendah Provinsi Maluku

NO	KABUPATEN/KOTA	DATARAN RENDAH	LUAS (HA)	LOKASI
1	Kepulauan Tanimbar	Tanimbar	1.100	Pulau Tanimbar
2	Kepulauan Aru	Dataran Aru	1.200	Kepulauan Aru
3	Seram Bagian Timur	Masiwang	5.000	Pulau Seram
4	Maluku Tengah	Seran Selatan Pasahari	4.000 40.000	Pulau Seram Pulau Seram
5	Seram Bagian Barat	Dataran Kawa Eti Kairatu	10.000 600 1.300	Pulau Seram Pulau Seram Pulau Seram
6	Buru dan Buru Selatan	Waeapo Wai Kating Wai Kumu Wai Mala Rana Samalagi Wai Lo	14.000 1.500 1.250 1.250 1.250 1.000 500	Pulau Buru Pulau Buru Pulau Buru Pulau Buru Pulau Buru Pulau Buru Pulau Buru
JUMLAH			83.950	

Sumber : RTRW Provinsi Maluku 2013-2033

Topografi Kepulauan Maluku meliputi dataran rendah, berbukit dan gunung. Wilayah Kabupaten/Kota dengan topografi dataran rendah yakni Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Kabupaten Maluku Tenggara, Kabupaten Maluku Tengah, Kabupaten Seram Bagian Barat, Kabupaten Seram Bagian Timur dan Kabupaten Buru serta Kabupaten Buru Selatan.

1. Pulau Buru (Kabupaten Buru dan Kabupaten Buru Selatan)

Kondisi topografi di Wilayah Pulau Buru dan pulau-pulau di sekitarnya memiliki kemiringan 0-3%, 3-8%, 8-15% dan 15-30%. Untuk Pulau Buru daerah dengan kemiringan 0-3% tersebar di sekitar pesisir Utara. Ketinggian di Pulau Buru terdiri dari tiga klasifikasi yaitu 0-100 meter, 100-500 meter dan >500 meter. Kawasan dengan ketinggian 0-100 meter tersebar di pesisir sebelah utara dan selatan, ketinggian 100-500 meter banyak tersebar di sebelah barat Pulau Buru.

2. Pulau Seram (Kabupaten Seram Bagian Barat, Kabupaten Maluku Tengah, Kabupaten Seram Bagian Timur) dan Pulau Ambon (Kota Ambon)

Kondisi topografi di Pulau Seram dan Ambon mayoritas berada pada kemiringan 8-15%, 15-30% dan 30-45%. Daerah dengan kemiringan 3-8% banyak tersebar di wilayah Seram Bagian Barat dan Maluku Tengah. Ketinggian di Pulau Seram hampir serupa dengan ketinggian di Pulau Buru terdiri dari tiga klasifikasi yaitu 0-100 meter, 100-500 meter dan >500 meter. Kawasan dengan ketinggian 0-100 meter tersebar di pesisir sekeliling Pulau

Seram, sementara itu ketinggian 100-500 meter pada kawasan agak ke tengah Pulau Seram, sedangkan kawasan dengan ketinggian >500 meter terletak di tengah Pulau Seram.

3. Kepulauan Kei (Kabupaten Maluku Tenggara dan Kota Tual)

Kondisi topografi di wilayah Kepulauan Kei dibagi menjadi lereng datar (0-3%), landai (3- 8%), bergelombang (8-15%), agak curam (15-30%), curam (30-50%) dan sangat curam (>50%). Ketinggian dari muka laut dibagi menjadi 3 (tiga) kelas ketinggian, yaitu kelas rendah dengan ketinggian 0-100 meter, kelas tengah dengan ketinggian 100-500 meter dan kelas tinggi dengan ketinggian >500 meter.

4. Kepulauan Aru

Kondisi topografi di wilayah Kepulauan Aru dibagi menjadi dataran (0-3%), landai (3- 8%), bergelombang (8-15%), agak curam (15-30%), curam (30-50%) dan sangat curam >50%. Sedangkan kondisi ketinggian dari muka laut dibagi menjadi 3 (tiga) kelas ketinggian, yaitu ketinggian 0-100 meter, ketinggian 100-500 meter, dan ketinggian >500 meter.

5. Kepulauan di Kabupaten Kepulauan Tanimbar dan Kabupaten Maluku Barat Daya

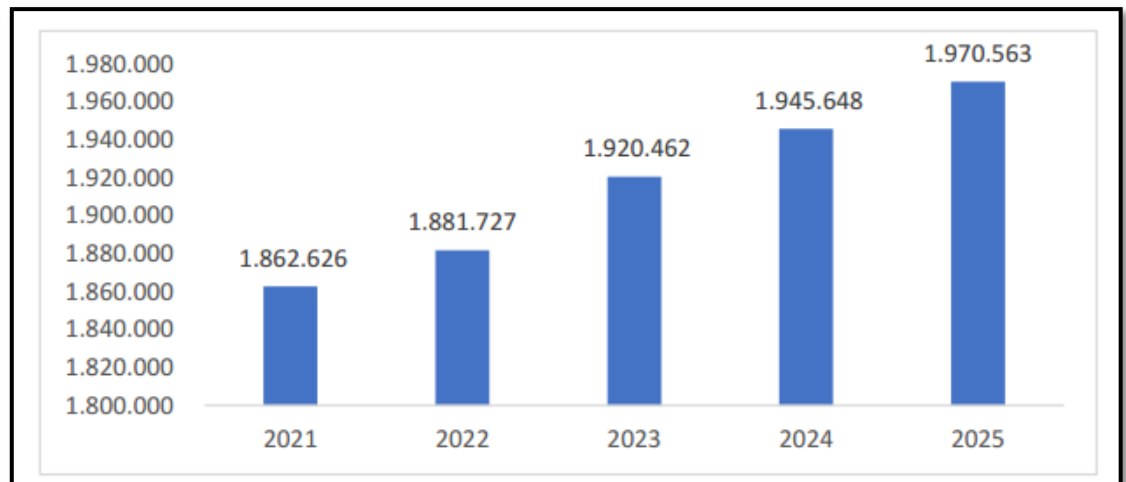
Kondisi topografi kepulauan di Wilayah Kepulauan Tanimbar dibagi menjadi 3 (tiga) gugus pulau, yaitu Gugus Pulau Tanimbar, Kepulauan Babar, dan Kepulauan Pulau-Pulau Terselatan dan Wetar. Bentuk lahan di Gugus Pulau Tanimbar terdiri atas dataran (plain), berbukit (hilly) dan bergunung (mountainous). Secara lebih rinci, bentuk lahan dibagi menjadi datar (0-3%), landai/berombak (3-8%), bergelombang (8-15%), agak curam (15-30%), curam (30-50%) dan sangat curam (>50%). Bentuk lahan di Kepulauan Babar secara makro (makro relief) terdiri atas: dataran (plain), berbukit (hilly) dan bergunung (mountainous), yang dibagi menjadi dataran (0-3%), landai/berombak (3-8%), bergelombang (8-15%), agak curam (15-30%), curam (30-50%), dan sangat curam (>50%). Bentuk lahan di Gugus Kepulauan Terselatan dan Wetar terdiri atas dataran (plain), berbukit (hilly) dan bergunung (mountainous), secara rinci bentuk lahan dibagi menjadi datar (0-3%), landai/berombak (3-8%), agak curam (15-30%), curam (30-50%) dan sangat curam (>50%). Kondisi bentuk lahan dan kemiringan lereng serta luasnya pada Gugus Pulau Terselatan dan Wetar.

C. Jumlah Penduduk

Perkembangan penduduk Provinsi Maluku pada tahun 2021 sampai dengan tahun 2025 menunjukkan adanya peningkatan sebagaimana tersaji pada grafik perkembangan laju pertumbuhan penduduk Provinsi Maluku yang dapat dilihat pada Gambar 1.2 di bawah sebagai berikut.

Gambar 1.2.

Perkembangan Penduduk di Provinsi Maluku Tahun 2021 - 2025



Sumber : BPS Maluku, 2025

Penambahan jumlah penduduk di Provinsi Maluku cukup signifikan dari tahun ke tahun dimana pada tahun 2021 jumlah penduduk sebanyak 1.862.626 jiwa dan meningkat hingga mencapai 1.970.563 jiwa pada tahun 2025. Dari keseluruhan total penduduk di Provinsi Maluku, sebagian besar tinggal di Kabupaten Maluku Tengah yang mencapai 445.618 jiwa. Adapun ibukota Provinsi Maluku yakni Kota Ambon memiliki jumlah penduduk sebanyak 366.301 jiwa. disajikan pada tabel berikut ini :

Tabel 1.3

Jumlah Penduduk Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku Tahun 2025

Kabupaten/Kota	TA 2021	TA 2022	TA 2023	TA 2024	TA 2025
Kepulauan Tanimbar	124.075	128.787	128.648	130.487	132.317
Maluku Tenggara	122.640	124.199	124.968	126.245	127.502
Maluku Tengah	424.730	472.050	436.090	440.848	445.618
Buru	136.393	137.990	140.462	142.304	144.124
Kepulauan Aru	102.916	103.860	107.367	109.159	110.930
Seram Bagian Barat	214.733	217.958	222.449	226.044	229.622
Seram Bagian Timur	140.271	143.438	144.818	147.139	149.475
Maluku Barat daya	82.187	82.560	85.807	87.197	88.571
Buru Selatan	76.715	78.515	9.455	80.842	82.219

Ambon	347.644	348.225	358.826	362.639	366.301
Tual	90.322	93.145	1.572	92.744	93.884
Maluku	1.862.626	1.930.727	1.920.462	1.945.648	1.970.563

Sumber : BPS Maluku Tahun 2025

D. Jumlah Kabupaten/Kota

Sejak ditetapkan melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2008, secara administratif Provinsi Maluku terdiri dari 11 (sebelas) Kabupaten dan Kota. Sesuai Surat Keputusan Gubernur Maluku Nomor 693 Tahun 2020 Tentang Penetapan Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Provinsi Maluku Tahun 2020, kemudia Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2021 serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 300.2.2-2138 Tahun 2025 Tentang Pemberian dan Pemutakiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan dan Pulau maka secara administratif Provinsi Maluku terbagi atas 11 (sebelas) Kabupaten/Kota, 119 Kecamatan dan 1.200 Desa dan 35 Kelurahan seperti yang tertera pada tabel 1.4 dibawah ini.

Tabel 1.4
Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku

No	Kabupaten/Kota	Luas Area (km/sq.km)	Ibukota Kabupaten/Kota	Jumlah		
				Kec.	Desa	Kel.
1	Kepulauan Tanimbar	4.431,08	Saumlaki	10	89	1
2	Maluku Tenggara	1.061,92	Langgur	11	193	1
3	Maluku Tengah	8.253,92	Masohi	19	196	6
4	Buru	4.915,56	Namlea	10	82	-
5	Kepulauan Aru	8.096,72	Dobo	10	119	2
6	Seram Bagian Barat	5.017,14	Piru	11	92	-
7	Seram Bagian Timur	5.725,44	Bula	15	198	-
8	Maluku Barat daya	4.551,67	Tiakur	17	118	-
9	Buru Selatan	3.678,69	Namrole	6	81	-
10	Ambon	236,66	Ambon	5	50	20
11	Tual	234,41	Tual	5	30	3
Maluku		46.158,27		119	1248	33

Sumber : BPS Provinsi Maluku, 2025

E. Jumlah Perangkat Daerah dan Unit Kerja Perangkat Daerah dan Pegawai Pemerintah

Perangkat Daerah merupakan lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Dasar utama penyusunan perangkat daerah dalam bentuk suatu organisasi adalah adanya urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Perangkat Daerah di Pemerintah Provinsi Maluku berjumlah 45 Perangkat Daerah. Unit Pelaksana Teknis adalah unsur pelaksana tugas teknis pada Dinas dan Badan. Berikut ini Jumlah Perangkat Daerah dan Unit Kerja Perangkat Daerah dan Pegawai Pemerintah yang berada di Setiap Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Maluku :

Tabel 1.5
Jumlah Perangkat Daerah dan Unit Kerja Perangkat Daerah dan Pegawai Pemerintah

No	Perangkat Daerah dan Unit Kerja Perangkat Daerah dan Pegawai Pemerintah	Jumlah
1	Sekretariat Daerah	5
2	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	30
3	Biro Kesejahteraan Rakyat	21
4	Biro Hukum	25
5	Biro Perekonomian	25
6	Biro Administrasi Pembangunan	18
7	Biro Pengadaan Barang dan Jasa	59
8	Biro Organisasi	33
9	Biro Umum	80
10	Biro Administrasi Pimpinan	33
11	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	144
12	Cabang Dinas Pendidikan Menengah Dan Pendidikan Khusus cabang Bula Kabupaten Seram Bagian Timur Kelas A	6
13	Cabang Dinas Pendidikan Menengah Dan Pendidikan Khusus kabupaten dobo	5
14	Cabang Dinas Pendidikan Menengah Dan Pendidikan Khusus langgur kab. Maluku Tenggara	11
25	cabang dinas pendidikan menengah dan pendidikan khusus masohi kab. Maluku tengah kelas A	7
16	cabang dinas pendidikan menengah dan pendidikan khusus namlea kab. Buru	6
17	cabang dinas pendidikan menengah dan pendidikan khusus namrole kab. Buru Selatan	3
18	cabang dinas pendidikan menengah dan pendidikan khusus saumlaki kab. Maluku tenggara barat	9
19	cabang dinas pendidikan menengah dan pendidikan khusus tiakur kab. Maluku barat daya	6



20	cabang dinas pendidikan menengah dan pendidikan khusus piru kab. Seram bagian barat	6
21	balai teknologi komunikasi dan informasi pendidikan dan kebudayaan kelas A	14
22	cabang dinas pendidikan menengah dan pendidikan khusus tual kota tual	8
23	UPTD Museum Siwa Lima provinsi Maluku	13
24	UPTD Taman Budaya kelas A	19
25	SMA Negeri 4 maluku tengah	4
26	SMA Negeri 15 Maluku Tengah	3
27	SMA Negeri 37 Maluku Tengah	3
28	SMA Negeri 23 Maluku Tengah	4
29	SMA Negeri 2 Maluku Tengah	2
30	SMA Negeri 24 Maluku Tengah	5
31	SMA Negeri 44 Maluku Tengah	3
32	SMA Negeri 17 Maluku Tengah	4
33	SMA Negeri 8 Maluku Tengah	3
34	SMA Negeri 9 Maluku Tengah	2
35	SMA Negeri 25 Maluku Tengah	4
36	SMA Negeri 32 Maluku Tengah	3
37	SMA Negeri 1 Maluku Tengah	5
38	SMA Negeri 30 Maluku Tengah	2
39	SMA Negeri 34 Maluku Tengah	1
40	SMA Negeri 12 Maluku Tengah	2
41	SMA Negeri 16 Maluku Tengah	3
42	SMA Negeri 31 Maluku Tengah	4
43	SMA Negeri 5 Maluku Tengah	7
44	SMA Negeri 18 Maluku Tengah	1
45	SMA Negeri 10 Maluku Tengah	4
46	SMA Negeri 6 Maluku Tengah	1
47	SMA Negeri 22 Maluku Tengah	5
48	SMA Negeri 3 Maluku Tengah	2
49	SMA Negeri 26 Maluku Tengah	1
50	SMA Negeri 50 Maluku Tengah	3
51	SMA Negeri 45 Maluku Tengah	1
52	SMA Negeri 48 Maluku Tengah	2
53	SMA Negeri 40 Maluku Tengah	4
54	SMA Negeri 61 Maluku Tengah	1
55	SMA Negeri 59 Maluku Tengah	2
56	SMA Negeri 11 Maluku Tengah	1
57	SMA Negeri 19 Maluku Tengah	2
58	SMA Negeri 43 Maluku Tengah	2
59	SMA Negeri 14 Maluku Tengah	1
60	SMA Negeri 35 Maluku Tengah	4
61	SMA Negeri 46 Maluku Tengah	4



62	SMA Negeri 47 Maluku Tengah	2
63	SMA Negeri 13 Maluku Tengah	2
64	SMA Negeri 33 Maluku Tengah	2
65	SMA Negeri 29 Maluku Tengah	1
66	SMA Negeri 21 Maluku Tengah	1
67	SMA Negeri 62 Maluku Tengah	1
68	SMA Negeri 3 Maluku Tenggara	6
69	SMA Negeri 1 Maluku Tenggara	1
70	SMA Negeri 2 Maluku Tenggara	3
71	SMA Negeri 4 Maluku Tenggara	3
72	SMA Negeri 1 Buru	2
73	SMA Negeri 2 Buru	5
74	SMA Negeri 7 Buru	2
75	SMA Negeri 3 Buru	2
76	SMA Negeri 8 Buru	2
77	SMA Negeri 6 Buru	1
78	SMA Negeri 4 Buru	1
79	SMA Negeri 1 tanimbar	1
80	SMA Negeri 4 tanimbar	1
81	SMA Negeri 8 tanimbar	1
82	SMA Negeri 9 tanimbar	2
83	SMA Negeri 10 tanimbar	1
84	SMA Negeri 11 tanimbar	1
85	SMA Negeri 12 tanimbar	5
86	SMA Negeri 13 tanimbar	2
87	SMA Negeri 5 tanimbar	1
88	SMA Negeri 16 tanimbar	1
89	SMA Negeri 3 kepulauan aru	2
90	SMA Negeri 1 kepulauan aru	1
91	SMA Negeri 4 kepulauan aru	2
92	SMA Negeri 5 kepulauan aru	4
93	SMA Negeri 7 kepulauan aru	1
94	SMA Negeri 8 kepulauan aru	1
95	SMA Negeri 1 Seram bagian Barat	3
96	SMA Negeri 22 Seram bagian Barat	1
97	SMA Negeri 11 Seram bagian Barat	5
98	SMA Negeri 7 Seram bagian Barat	2
99	SMA Negeri 5 Seram bagian Barat	4
100	SMA Negeri 3 Seram bagian Barat	9
101	SMA Negeri 12 Seram bagian Barat	6
102	SMA Negeri 2 Seram bagian Barat	3
103	SMA Negeri 14 Seram bagian Barat	2
104	SMA Negeri 20 Seram bagian Barat	2
105	SMA Negeri 19 Seram bagian Barat	3



106	SMA Negeri 10 Seram bagian Barat	3
107	SMA Negeri 6 Seram bagian Barat	2
108	SMA Negeri 15 Seram bagian Barat	7
109	SMA Negeri 4 Seram bagian Barat	2
110	SMA Negeri 21 Seram bagian Barat	2
111	SMA Negeri 24 Seram bagian Barat	1
112	SMA Negeri 28 Seram bagian Barat	1
113	SMA Negeri 1 Seram bagian Timur	2
114	SMA Negeri 5 Seram bagian Timur	2
115	SMA Negeri 4 Seram bagian Timur	2
116	SMA Negeri 12 Seram bagian Timur	1
117	SMA Negeri 2 Seram bagian Timur	5
118	SMA Negeri 8 Seram bagian Timur	1
119	SMA Negeri 3 Seram bagian Timur	3
120	SMA Negeri 10 Seram bagian Timur	1
121	SMA Negeri 4 Buru Selatan	4
122	SMA Negeri 3 Buru Selatan	3
123	SMA Negeri 10 Buru Selatan	1
124	SMA Negeri 11 Buru Selatan	1
125	SMA Negeri 7 Buru Selatan	2
126	SMA Negeri 14 Buru Selatan	1
127	SMA Negeri 19 Maluku Barat Daya	1
128	SMA Negeri 4 Maluku Barat Daya	5
129	SMA Negeri 13 Maluku Barat Daya	4
130	SMA Negeri 9 Maluku Barat Daya	2
131	SMA Negeri 1 Maluku Barat Daya	5
132	SMA Negeri 3 Maluku Barat Daya	3
133	SMA Negeri 2 Maluku Barat Daya	5
134	SMA Negeri 6 Maluku Barat Daya	1
135	SMA Negeri 8 Maluku Barat Daya	3
136	SMA Negeri 7 Maluku Barat Daya	3
137	SMA Negeri 1 Kota Ambon	2
138	SMA Negeri 2 Kota Ambon	4
139	SMA Negeri 3 Kota Ambon	7
140	SMA Negeri 4 Kota Ambon	3
141	SMA Negeri 5 Kota Ambon	2
142	SMA Negeri 6 Kota Ambon	4
143	SMA Negeri 7 Kota Ambon	2
144	SMA Negeri 8 Kota Ambon	2
145	SMA Negeri 9 Kota Ambon	2
146	SMA Negeri 10 Kota Ambon	3
147	SMA Negeri 11 Kota Ambon	4
148	SMA Negeri 12 Kota Ambon	2
149	SMA Negeri 13 Kota Ambon	4



150	SMA Negeri 14 Kota Ambon	3
151	SMA Negeri 15 Kota Ambon	2
152	SMA Negeri 5 tual	1
153	SMA Negeri 4 tual	1
154	SMK Negeri 1 Maluku Tengah	3
155	SMK Negeri 2 Maluku Tengah	2
156	SMK Negeri 3 Maluku Tengah	4
157	SMK Negeri 4 Maluku Tengah	5
158	SMK Negeri 5 Maluku Tengah	1
159	SMK Negeri 7 Maluku Tengah	1
160	SMK Negeri 8 Maluku Tengah	1
161	SMK Negeri 10 Maluku Tengah	1
162	SMK Negeri 11 Maluku Tengah	1
163	SMK Negeri 1 Maluku Tenggara	3
164	SMK Negeri 2 Maluku Tenggara	7
165	SMK Negeri 1 Buru	1
166	SMK Negeri 2 Buru	1
167	SMK Negeri 3 Buru	2
168	SMK Negeri 1 Kepulauan Tanimbar	2
169	SMK Negeri 6 Kepulauan Tanimbar	7
170	SMK Negeri 4 Kepulauan Tanimbar	8
171	SMK Negeri 5 Kepulauan Tanimbar	2
172	SMK Negeri 2 Kepulauan Tanimbar	1
173	SMK Negeri 2 Seram Bagian barat	4
174	SMK Negeri 3 Seram Bagian Barat	5
175	SMK Negeri 5 Seram Bagian Barat	1
176	SMK Negeri 8 Seram Bagian Barat	3
177	SMK Negeri 10 Seram Bagian Barat	4
178	SMK Negeri 1 Seram Bagian Barat	5
179	SMK Negeri 7 Seram Bagian Barat	1
180	SMK Negeri 11 Seram Bagian Barat	2
181	SMK Negeri 1 Seram Bagian Timur	2
182	SMK Negeri 3 Seram Bagian Timur	2
183	SMK Negeri 7 Seram Bagian Timur	1
184	SMK Negeri 6 Seram Bagian Timur	3
185	SMK Negeri 4 Buru Selatan	1
186	SMK Negeri 8 Buru Selatan	1
187	SMK Negeri 5 Buru Selatan	1
188	SMK Negeri 2 Maluku Barat Daya	4
189	SMK Negeri 3 Maluku Barat Daya	6
190	SMK Negeri 4 Maluku Barat Daya	1
191	SMK Negeri 5 Maluku Barat Daya	2
192	SMK Negeri 6 Maluku Barat Daya	1
193	SMK Negeri 7 Maluku Barat Daya	2

194	SMK Negeri 1 Ambon	5
195	SMK Negeri 2 Ambon	5
196	SMK Negeri 3 Ambon	2
197	SMK Negeri 4 Ambon	2
198	SMK Negeri 5 Ambon	2
199	SMK Negeri 6 Ambon	2
200	SMK Negeri 7 Ambon	5
201	SMK Kesehatan Ambon	2
202	SLB Negeri Batu merah	1
203	SLB Negeri Haruru	1
204	Dinas Kesehatan	94
205	UPTD Balai Pelatihan Kesehatan Kelas A	24
206	UPTD Balai Kesehatan Paru Kelas A	15
207	UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Dan Kalibrasi Alat Kesehatan Kelas A	15
208	Rumah Sakit Khusus Daerah	39
209	Rumah Sakit Khusus Daerah Dr. Ishak Umarella	57
210	Rumah Sakit Khusus Daerah Dr.M. Haulussy	80
211	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	190
212	UPTD Balai Keselamatan Kerja Dan Hiperkes Kelas A	14
213	UPTD Laboratorium Pengujian Bahan Dan Peralatan Berat	21
214	Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman	58
215	Satuan Polisi Pamong Praja	112
216	Dinas Sosial	55
217	UPTD Panti Sosial Asuhan Anak Huke Ina Kelas A	5
218	UPTD panti Sosial Bina Remaja Dan anak Berhadapan Dengan Hukum	16
219	UPTD Panti Sosial Tresna Werdha Ina Kaka Kelas A	16
220	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	28
221	UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak	6
222	Dinas Ketahanan Pangan	51
223	UPTD Balai Perlindungan Tanaman pangan hortikultura dan perkebunan Kelas A	77
224	UPTD Balai Pengawasan Mutu dan Keamanan pangan	7
225	Dinas Lingkungan Hidup	43
226	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	35
227	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	43
228	Dinas Perhubungan	68
229	Dinas Komunikasi Dan Informatika	50
230	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah	52
231	UPTD Balai Pengujian Sertifikasi Mutu Barang kelas A	8
232	UPTD Balai Pendidikan Dan Pelatihan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kelas A	9
233	UPTD Pengelola Dana Bergulir Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah Kelas A	11

234	UPTD Pusat Layanan Usaha Terpadu Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kelas A	9
235	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	44
236	Dinas Pemuda Dan Olahraga	44
237	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	52
238	Dinas Kelautan Dan Perikanan	78
239	Cabang Dinas Kelautan Dan Perikanan Gugus Pulau I Buru Dan Bursel Kelas A di Maserate	10
240	Cabang Dinas Kelautan Dan Perikanan Gugus Pulau II Sram Bagian Barat Kelas A Di Piru	9
241	Cabang Dinas Kelautan Dan Perikanan Gugus Pulau III Seram Utara Kelas B di Wahai	9
242	Cabang Dinas Kelautan Dan Perikanan Gugus Pulau IV Seram Bagian Timur Kelas A Di Bula	9
243	Cabang Dinas Kelautan Dan Perikanan Gugus Pulau IX Kep. Aru Kelas A Di Dobo	9
244	Cabang Dinas Kelautan Dan Perikanan Gugus Pulau V Seram Bagian Selatan Kls. A di Amahai	10
245	Cabang Dinas Kelautan Dan Perikanan Gugus Pulau VI Kepulauan Banda Kelas A di Banda	7
246	Cabang Dinas Kelautan Dan Perikanan Gugus Pulau VII Pulau Ambon Dan P.P Lease Kelas A	17
247	Cabang Dinas Kelautan Dan Perikanan Gugus Pulau VIII Kepulaun Kei Kelas A Di Tual	12
248	Cabang Dinas Kelautan Dan Perikanan Gugus Pulau X Kep. Tanimbar Kelas A Di Saumlaki	8
249	Cabang Dinas Kelautan Dan Perikanan Gugus Pulau XI P.P Babar Kelas A Di Tepa	9
250	Cabang Dinas Kelautan Dan Perikanan Gugus Pulau XII P.P Terselatan Kelas A Di Letti	7
251	UPTD Balai Budidaya Laut (BBL Dobo Kelas A)	6
252	UPTD Balai Budidaya Ikan Pantai (BBIP) masika Jaya kelas A	12
253	UPTD Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Banda Kelas A	9
254	UPTD Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Dobo Kelas A	15
255	UPTD Balai Budidaya Laut (BBL Tual Kelas A)	12
256	Dinas Pariwisata	50
257	Dinas Pertanian	126
258	UPTD Balai Pendidikan dan pelatihan Pertanian Kelas A	23
259	UPTD Balai Pengawasan Dan Sertifikasi Benih Bibit Pertanian Dan Peternakan	34
260	UPTD Sekolah Pertanian Pembangunan	20
261	UPTD balai Perbibitan Ternak dan Laboratorium Keswan Dan Kesmavet Kelas A	18
262	UPTD Balai Benih padi Palawija dan Hortilkurtural kelas A	17



263	Dinas Kehutanan	118
264	UPTD kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Ambon Kelas A	29
265	UPTD kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Buru Kelas A	55
266	UPTD kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Buru Selatan Kelas A	18
267	UPTD kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kepulauan Aru kelas A	8
268	UPTD kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Maluku Barat Daya Kelas A	16
269	UPTD kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Maluku Tengah Kelas A	23
270	UPTD kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Maluku Tenggara Barat kelas A	11
271	UPTD kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Maluku Tenggara Kelas A	9
272	UPTD kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Seram Bagian Barat Kelas A	31
273	UPTD kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Seram Bagian Timur Kelas A	18
274	UPTD kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Tual Kelas A	12
275	Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral	66
276	UPTD Balai pengujian Dan peralatan ESDM	4
277	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan	52
278	Balai Aneka Industri Dan kerajinan Kelas A	8
279	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	58
280	UPTD Balai Pengawasan Ketenagakerjaan Regional I Kelas A	10
281	UPTD Balai Pengawasan Ketenagakerjaan Regional II Kelas A	10
282	UPTD Balai Pengawasan Ketenagakerjaan Regional III Kelas A	8
283	UPTD Balai Pengawasan Ketenagakerjaan Regional IV Kelas A	8
284	UPTD Balai Pengawasan Ketenagakerjaan Regional V Kelas A	6
285	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	58
286	Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah	73
287	Badan Pendapatan Daerah Provinsi Maluku	55
288	Badan Pendapatan Daerah Ambon Kota Ambon kelas A	17
289	UPTD Pelayanan pendapatan Banda Kab. Malteng Kelas A	5
290	UPTD Pelayanan pendapatan Bula Kab. SBT kelas A	3
291	UPTD Pelayanan pendapatan Dobo Kab. Kepulauan Aru Kelas A	7
292	UPTD Pelayanan pendapatan langgur Kab. Maluku Tenggara Kelas A	6
293	UPTD Pelayanan pendapatan Masohi Kab. Seram Bagian Tengah Kelas A	5
294	UPTD Pelayanan pendapatan Namlea Kab. Buru Kelas A	7
295	UPTD Pelayanan pendapatan Namrole Kab. Buru Selatan Kelas A	5
296	UPTD Pelayanan pendapatan Piru Kab. Seram Bagian Barat Kelas A	6
297	UPTD Pelayanan pendapatan Saumlaki Kab. Maluku Tenggara kelas A	7
298	UPTD Pelayanan pendapatan Tiakur Kab. Maluku Barat Daya Kelas A	4
299	UPTD Pelayanan pendapatan Kota Tual Kls. A	6
300	Badan Kepegawaian Daerah	54
301	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	56
302	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	49
303	Badan Penghubung Provinsi	34
304	Sekretariat DPRD	96
305	Inspektorat Daerah	106

306	Badan Pengelola Perbatasan Daerah	24
307	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	30
Jumlah		4329

Sumber : BKD Promal Tahun 2025

F. Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Dalam memenuhi kewajiban sebagaimana yang sudah diatur di dalam undang-undang, pemerintah harus membuat laporan keuangan, salah satunya laporan realisasi anggaran berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran Unaudited.

Pemerintah Daerah Provinsi Maluku pada tahun 2025 melaksanakan setiap pelayanan berdasarkan anggaran dengan rincian Pendapatan sebesar Rp.3.005.907.591.007,38 dengan realisasi sebesar Rp.2.710.293.720.212,53 atau mencapai 90,17% dan anggaran belanja sebesar Rp.2.874.698.276.310,38 dengan realisasi sebesar Rp. 2.566.511.393.581,54 atau mencapai 89,28%. Berikut tabel data Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Provinsi Maluku Tahun 2025 :

Tabel 1.6
Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Pemerintah Provinsi Maluku Tahun 2025

No.	Uraian	Realisasi (Rp.)	Anggaran (Rp.)	Capaian (%)	Ket.
1	2	3	4	5	6
A.	PENDAPATAN DAERAH	2.710.293.720.212,78	3.005.907.591.007,38	90,17%	
1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH	627.644.845.092,78	846.271.289.007,38	74,17%	
-	Pajak Daerah	444.707.643.805,53	474.167.049.624,00	93,79%	
-	Retribusi Daerah	30.731.886.451,00	55.224.245.600,00	55,65%	
-	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	42.740.575.496,00	63.000.000.000,00	67,84%	
-	Lain-lain PAD yang Sah	109.464.739.340,25	253.879.993.783,38	43,12%	
2.	PENDAPATAN ASLI DAERAH	2.082.323.207.120,00	2.159.310.634.000,00		
-	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	2.082.323.207.120,00	2.159.310.634.000,00	96,43%	
3.	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	325.668.000,00	325.668.000,00	100,00%	
-	Pendapatan Hibah	325.668.000,00	325.668.000,00	100,00%	
B.	BELANJA DAERAH	2.566.511.393.581,54	2.874.698.276.310,38	89,28%	

1.	BELANJA OPERASI	2.151.711.590.909,73	2.371.524.381.647,54	90,73%	
-	Belanja Pegawai	1.184.179.890.621,00	1.260.056.177.736,54	93,98%	
-	Belanja Baran dan Jasa	760.547.150.298,73	879.011.095.333,00	86,52%	
-	Belanja Bunga	526.757.283,00	605.687.134,00	86,97%	
-	Belanja Subsidi	452.023.150,00	609.644.090,00	74,15%	
-	Belanja Hibah	199.130.296.505,00	224.334.288.577,00	88,76%	
-	Belanja Bantuan Sosial	6.875.473.052,00	6.907.488.777,00	99,54%	
2.	BELANJA MODAL	184.045.774.678,81	270.529.603.013,60	68,03%	
-	Belanja Modal Tanah	105.338.000,00	3.718.310.129,60	2,83%	
-	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	73.852.007.088,00	106.870.004.118,00	69,10%	
-	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	79.714.955.992,81	113.641.758.702,00	70,15%	
-	Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	27.658.976.868,00	43.376.483.613,00	63,76%	
-	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	1.470.566.350,00	1.673.046.400,00	87,90%	
-	Belanja Modal Aset Lainnya	1.243.930.380,00	1.250.000.051,00	99,51%	
3.	BELANJA TAK TERDUGA	3.748.128.096,00	5.500.000.000,00	68,15%	
-	Belanja Tidak Terduga	3.748.128.096,00	5.500.000.000,00	68,15%	
4.	BELANJA TRANSFER	227.005.899.897,00	227.144.291.649,24	99,94%	
-	Belanja Bagi Hasil	225.005.899.897,00	225.144.291.649,24	99,94%	
-	Belanja Bantuan Keuangan	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	100,00%	
Surplus/Defisit		143.782.326.630,99	131.209.314.697,00		

Sumber : Diolah dari Data BPKAD Tahun 2025

1.2. Perencanaan Pembangunan Daerah

A. Permasalahan Strategis Pemerintah Daerah

Permasalahan Daerah Provinsi Maluku diidentifikasi berdasarkan hasil analisis aspek kesejahteraan masyarakat, aspek daya saing, dan aspek pelayanan umum sebagai berikut :

- Belum optimalnya akses dan layanan kesehatan;
- Tingkat kemiskinan Provinsi Maluku masih tinggi;
- Masih tingginya tingkat pengangguran;
- Belum meratanya kualitas dan aksesibilitas Pendidikan
- Ekonomi Maluku masih mengandalkan sektor primer;
- Infrastruktur belum merata dan memadai serta konektivitas antar pulau yang masih rendah;

- g. Kesenjangan antara wilayah masih tinggi;
- h. Pencemaran dan kerusakan lingkungan serta ancaman bencana;
- i. Belum optimalnya penyelenggaraan tata kelola pemerintahan.

Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah

1. Bidang Pendidikan

Permasalahan pada Bidang Pendidikan adalah sebagai berikut:

- a. Penguatan efektifitas birokrasi melalui penguatan tata kelola pelayanan pendidikan;
- b. Peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan melalui pengembangan program dan kegiatan pelatihan, bimtek dan penilaian kinerja guru yang tepat sasaran serta memenuhi kebutuhan kompetensi guru;
- c. Perluasan akses melalui pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan secara merata serta pemenuhan kesejahteraan siswa;
- d. Rendahnya kualitas dan kuantitas tenaga pendidik /pengajar serta pemerataan pada semua jenjang pendidikan;
- e. Masih terbatasnya akses terhadap pelayanan pendidikan; dan
- f. Belum optimalnya tatakelola bidang Pendidikan

2. Bidang Kesehatan

Berdasarkan hasil evaluasi tingkat capaian indikator kesehatan tahun 2024 didapati Permasalahan kesehatan yang masih ditemui di Provinsi Maluku meliputi:

- a. Masih tingginya tingkat kematian ibu dan bayi;
- b. Perbaikan Gizi Masyarakat (stunting);
- c. Pengembangan dan Pencapaian indikator Program TB;
- d. Pengembangan dan Pencapaian indikator Program Malaria;
- e. Penanggulangan HIV/AIDS;
- f. Belum optimalnya kepesertaan dan layanan dalam jaminan kesehatan,
- g. Pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan;
- h. Akreditasi Rumah Sakit;
- i. Keterbatasan kapasitas, kuantitas dan distribusi tenaga medis dan paramedis;
- j. Pengelolaan BLUD dan pelayanan masyarakat pada Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi, Terbatasnya sarana dan prasarana pelayanan kesehatan;
- k. Status Gizi Masyarakat Buruk dan prevalensi balita pendek masih belum dapat dikendalikan;
- l. Pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan dan akses pelayanan kesehatan daerah dan rujukan yang berkualitas belum merata;
- m. Ketimpangan kualitas pelayanan kesehatan antar daerah di Provinsi Maluku

- disebabkan karena sumberdaya kesehatan masih belum merata memenuhi standar yang ditetapkan dan terjadi ketimpangan ketersediaan, pendistribusian dan penempatannya; dan
- n. Masih terbatasnya alat kesehatan dan obat-obatan dibandingkan dengan peningkatan kebutuhan

3. Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Permasalahan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang masih ditemui di Provinsi Maluku, meliputi:

- a. Masih rendahnya tingkat kemantapan jalan;
- b. Rendahnya luas layanan irigasi;
- c. Masih rendahnya akses air minum layak;
- d. Masih rendahnya akses masyarakat kepulauan terhadap air bersih;
- e. Belum optimalnya konektivitas infrastruktur ke kawasan prioritas (industri, pariwisata dan sumber pertanian) dan simpul pusat kegiatan
- f. Terbatasnya infrastruktur asset ke-PU-an dalam rangka mendukung sektor pelayanan dasar; dan
- g. Masih rendahnya tingkat kesesuaian pemanfaatan ruang terhadap RTRW

4. Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Permasalahan pembangunan Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, meliputi:

- a. Belum terintegrasinya pembangunan perumahan dengan Prasarana Sarana Utilitas Umum Permukiman (PSU);
- b. Masih rendahnya cakupan ketersediaan rumah layak huni baik di Kawasan perkotaan dan pedesaan; dan
- c. Belum terpenuhinya SPM perumahan.

5. Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Permasalahan pembangunan Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, meliputi:

- a. Masih banyaknya pelanggaran Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah, gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta belum maksimalnya penyelenggaraan perlindungan masyarakat di Kab/Kota;
- b. Belum optimalnya upaya-upaya penegakan Perda;
- c. Belum memadainya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana penunjang kegiatan penanggulangan bencana; dan
- d. Masih rendahnya implementasi daerah terkait dengan penganggaran SPM Bidang Trantibumlinmas dalam APBD.

6. Bidang Sosial

Permasalahan pembangunan Bidang Sosial, meliputi:

- a. Minimnya kepemilikan lembaga kesejahteraan sosial yang berfungsi untuk menampung anak-anak terlantar; dan
- b. Belum optimalnya keterpaduan penanganan PPKS dalam penanggulangan kemiskinan.

7. Bidang Tenaga Kerja

Permasalahan pembangunan Bidang Tenaga Kerja, meliputi:

- a. Rendahnya keahlian, ketrampilan, kompetensi dan produktivitas tenaga kerja;
- b. Terbatasnya kesempatan kerja di sektor formal;
- c. Akses pencari kerja terhadap informasi pasar kerja belum optimal;
- d. Kesejahteraan pekerja dan perlindungan tenaga kerja belum optimal;
- e. Pengawasan implementasi norma ketenagakerjaan masih lemah;
- f. Peningkatan pembinaan keselamatan dan kesehatan kerja;
- g. Pengujian lingkungan kerja dan pemeriksaan kesehatan tenaga kerja yang belum maksimal;

8. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Permasalahan pembangunan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, meliputi:

- a. Masih adanya Kabupaten/Kota yang belum konsisten dalam pelaksanaan pembangunan yang responsif gender;
- b. Belum semua Dinas/Instansi/Lembaga membuat data terpilah berdasarkan gender;
- c. Lemahnya kelembagaan dan jaringan pengarusutamaan gender dan anak;
- d. Perencanaan penganggaran berbasis gender belum optimal;
- e. Masih ada Anak jalanan, anak korban narkoba, anak terlantar dan anak putus sekolah;
- f. Tingginya bentuk kekerasan, penelantaran, dan perlakuan salah pada anak dan perempuan; dan Kurangnya pengembangan usaha ekonomi produktif perempuan.

9. Bidang Pangan

Permasalahan pembangunan Bidang Pangan, meliputi:

- a. Ketersediaan dan keterjangkauan sembilan bahan pokok serta distribusi dan pengawasan pangan belum terlaksana dengan baik dan terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat;
- b. Keamanan pangan yang masih memerlukan penanganan serius terutama bahan addiktif dan cemaran (bahan kimia, mikro organisme dan fisik) yang

- membahayakan bagi kesehatan masyarakat;
- c. Belum stabilnya harga bahan pangan strategis terutama beras pada saat panen raya. Pada saat menjelang Hari Besar Keagamaan dan Nasional harga beberapa komoditi pangan strategis mengalami kenaikan karena meningkatnya permintaan;
 - d. Belum optimalnya pengembangan pangan strategis melalui intensifikasi dan ekstensifikasi serta masih rendahnya diversifikasi produk pangan lokal; dan
 - e. Belum optimalnya dukungan sarana dan prasarana untuk meningkatkan produktifitas pangan strategis dan pangan lokal

10. Bidang Pertanahan

Permasalahan pembangunan Bidang Pertanahan, meliputi:

- a. Masih tingginya intensitas konflik dan sengketa pertanahan;
- b. Masih banyaknya tanah yang belum terdaftar; dan
- c. Masih rendahnya pemahaman masyarakat terhadap kebutuhan tanah untuk kepentingan umum dan Pembangunan

11. Bidang Lingkungan Hidup

Permasalahan pembangunan Bidang Lingkungan Hidup, meliputi:

- a. Belum dimilikinya dokumen rencana perlindungan dan pengolahan lingkungan hidup (RPPLH) Provinsi Maluku;
- b. Pengelolaan lingkungan hidup di Provinsi Maluku masih lemah. Hal ini diindikasikan oleh masih banyaknya masalah dalam perizinan dan pengawasan lingkungan seperti kasus AMDAL, laporan ketidaktaatan industri, keberadaan KPA di kabupaten/kota yang masih terbatas dan rendahnya kemampuan pengawasan lingkungan oleh kabupaten/kota;
- c. Belum optimalnya upaya-upaya penanganan sampah dan limbah di Provinsi Maluku masih terbatas; dan
- d. Indeks kualitas lingkungan hidup di Provinsi Maluku masih di bawah nasional. Pencemaran air dan udara di Provinsi Maluku masih terjadi. Air sungai di Provinsi Maluku rata-rata masih tercemar ringan sampai sedang, Dalam pengukuran kondisi lingkungan belum didukung oleh laboratorium lingkungan yang mumpuni di kabupaten/kota.

12. Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Permasalahan pembangunan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, meliputi:

- a. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Negeri belum berjalan secara optimal dikarenakan masih rendahnya SDM perangkat Desa/Negeri;
- b. Masih kurangnya Peran Lembaga Kemasyarakatan dalam pemberdayaan masyarakat;

- c. Masih kurangnya usaha ekonomi masyarakat dalam pemberdayaan masyarakat; dan
- d. Kurang optimalnya pembentukan dan pengembangan kawasan perdesaan.

13. Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Permasalahan pembangunan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Bencana, meliputi:

- a. Pertambahan penduduk yang cepat disebabkan oleh migrasi dan kelahiran;
- b. Persebaran penduduk yang tidak merata serta tidak seimbang antara jumlah penduduk dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan.

14. Bidang Perhubungan

Permasalahan pembangunan Bidang Perhubungan, meliputi:

- a. Masih rendahnya kualitas pelayanan transportasi, yang disebabkan oleh belum terbentuknya kelembagaan pelayanan transportasi yang baik, belum aksimalnya pemberian subsidi terhadap pelayanan transportasi;
- b. Belum optimalnya pengawasan standar pelayanan transportasi serta belum memadainya kualitas SDM dalam perencanaan dan pengelolaan layanan transportasi;
- c. Belum maksimalnya jangkauan pelayanan sarana transportasi dalam membangun konektivitas wilayah; dan
- d. Belum semua daerah kabupaten/kota memiliki transportasi publik, di samping itu belum adanya keterpaduan intra dan antar modal transportasi.

15. Bidang Komunikasi dan Informasi

Permasalahan pembangunan Bidang Komunikasi dan informatika, meliputi:

- a. Belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK);
- b. Masih rendahnya pemahaman OPD sebagai produsen data tentang data yang harus diserahkan OPD;
- c. Belum adanya aturan tentang statistik sektoral atau satu data Provinsi Maluku;
- d. Belum terbentuknya Forum Data Satu Maluku;
- e. Terbatasnya sarana dan prasarana teknologi informasi dan komunikasi.

16. Bidang Koperasi dan UMKM

Permasalahan pembangunan Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, meliputi:

- a. Persentase koperasi aktif yang masih rendah dikarenakan masih rendahnya kualitas manajemen kelembagaan koperasi;
- b. Masih terbatasnya penerapan IT dalam pengembangan Usaha dan pemasaran. Akses pemasaran yang masih menggunakan cara-cara

- konvensional masih merupakan salah satu permasalahan yang dihadapi oleh koperasi dan UMKM di Provinsi Maluku. Sebagian besar koperasi dan UMKM dapat memproduksi satu barang dan jasa, namun tidak mampu mengakses pasar atas komoditas tersebut secara online; dan
- c. Keterbatasan akses permodalan bagi koperasi dan UMKM.

17. Bidang Penanaman Modal

Permasalahan pembangunan Bidang Penanaman Modal Permasalahan Pembangunan meliputi:

- a. Sarana Prasarana penunjang pelaksanaan PTSP belum tersedia sesuai kebutuhan;
- b. Terhambatnya investasi yang disebabkan antara lain karena : ketertersediaan lahan untuk industri yang sesuai dengan rencana peruntukan ruang dan keterbatasan infrastruktur pendukung;
- c. Masih terdapat tumpang tindih regulasi penanaman modal antara pusat, provinsi dan kabupaten/kota; dan
- d. Masih terbatasnya data informasi mengenai peluang usaha/sektor/bidang usaha unggulan.

18. Bidang Kepemudaan dan Olah Raga

Permasalahan pembangunan Bidang Kepemudaan dan Olahraga, meliputi:

- a. Belum optimalnya peran pemuda dalam pembangunan;
- b. Rendahnya minat pemuda dalam pengembangan kewirausahaan;
- c. Belum meratanya penyebaran sarana prasarana olahraga dalam menunjang prestasi olahraga di Provinsi Maluku; dan
- d. Rendahnya peran dan partisipasi masyarakat dalam kegiatan pemuda dan olahraga.

19. Bidang Statistik

Permasalahan pembangunan Bidang Statistik, meliputi:

- a. Masih rendahnya ketersediaan dan layanan data/informasi statistik sektoral;
- b. Masih rendahnya komitmen perangkat daerah dalam menyediakan dan menyampaikan data tepat waktu; dan
- c. Belum optimalnya pemanfaatan data statistik bagi pembangunan.

20. Bidang Persandian

Permasalahan pembangunan Bidang Persandian, meliputi:

- a. Sistem keamanan informasi masih lemah;
- b. Kesadaran keamanan informasi masih rendah; dan
- c. Kurangnya sarana dan prasarana teknologi keamanan informasi.

21. Bidang Kebudayaan

Permasalahan pembangunan Bidang Kebudayaan, meliputi:

- a. Belum optimalnya nilai pemanfaatan ekonomi cagar dan objek pemajuan budaya;
- b. Keterbatasan kewenangan pengelolaan urusan kebudayaan di tingkat provinsi, berdampak terhadap optimalisasi pelestarian dan pengembangan cagar budaya di wilayahnya; dan
- c. Masih kurangnya tempat kesenian sebagai area untuk mengekspresikan dan pementasan seni budaya daerah.

22. Bidang Perpustakaan

Permasalahan pembangunan Bidang Perpustakaan, meliputi:

- a. Belum meratanya pelayanan perpustakaan keliling;
- b. Rendahnya minat baca siswa dan masyarakat; dan
- c. Terbatasnya sarana dan prasarana yang dapat mendukung peningkatan minat baca.

23. Bidang Kearsipan

Permasalahan pembangunan Bidang Kearsipan, meliputi: Terbatasnya Sarana dan Prasarana Kearsipan untuk mendukung pengolahan, penyelamatan, dan pelayanan kepada masyarakat.

24. Bidang Kelautan dan Perikanan

Permasalahan pembangunan Bidang Kelautan dan Perikanan, meliputi:

- a. Aspek Ekonomi :
 - Kontinuitas Produksi belum stabil (tergantung musim).
 - Pemahaman terhadap pengamanan kualitas ikan masih rendah.
 - Infrastruktur pendukung belum terpenuhi secara optimal.
 - Daya saing produksi yang masih rendah.
 - Akses Permodalan masih relative sulit dan bunga yang masih tinggi.
- b. Aspek Sosial :
 - Profesi nelayan masih dianggap sebagai pekerjaan informal.
 - Didominasi oleh nelayan skala kecil dan bersifat individual.
 - Kualitas nelayan masih rendah.
- c. Aspek Lingkungan :
 - Sistem pengawasan yang belum berjalan dengan baik.
 - Sebagian besar terfokus hanya daerah pantai/pesisir karena skala kecil mengakibatkan banyak kawasan yang telah mengalami padat tangkap (tingginya penangkapan di perairan pesisir).
 - Pencemaran perairan.

d. Aspek Kelembagaan :

- Kapasitas kelembagaan pengawas masih terbatas.
- Belum optimalnya koordinasi antar instansi terkait dalam pengendalian pemanfaatan sumber daya perikanan.
- Belum adanya system pengelolaan data perikanan tangkap.

25. Bidang Pariwisata

Permasalahan pembangunan Bidang Pariwisata, meliputi:

- a. Masih kurangnya keterlibatan masyarakat dalam industri pariwisata dan ekonomi kreatif; dan
- b. Terbatasnya kewenangan pemerintah provinsi dalam pengembangan objek wisata di daerah.

26. Bidang Pertanian

Permasalahan pembangunan Bidang Pertanian, meliputi:

- a. Belum optimalnya peningkatan Produksi dan produktivitas tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
- b. Produksi dan Produktifitas masih rendah;
- c. Nilai tambah dan daya saing produk masih rendah;
- d. Ketersediaan sarana dan prasarana belum mencukupi;
- e. Masih terjadi alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian;
- f. Belum optimalnya pemanfaatan teknologi dalam pertanian; dan
- g. Belum optimalnya akses ketersediaan modal usaha di tingkat peta.

27. Bidang Kehutanan

Permasalahan pembangunan Bidang Kehutanan, meliputi:

- a. Sumber daya hutan Provinsi Maluku belum terkelola secara optimal untuk meningkatkan perekonomian daerah;
- b. Klaim masyarakat adat atas hak ulayat pada kawasan hutan & penggunaan kawasan hutan non prosedural;
- c. Kerusakan ekosistem mangrove & lahan kritis yang luas tersebar di kab/kota;
- d. Belum optimalnya pengawasan penebangan liar & peredaran kayu ilegal; dan
- e. Belum optimalnya pemberdayaan masyarakat di sekitar hutan.

28. Bidang Energi dan Sumberdaya Mineral

Permasalahan pembangunan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral, meliputi:

- a. Belum tercapainya cakupan rasio elektrifikasi 100%;
- b. Belum optimalnya pemanfaatan potensi energi baru terbarukan (EBT);
- c. Minimnya data dan informasi potensi energy dan sumber daya mineral serta

- daerah rawan bencana geologi;
- d. Rendahnya ketaatan serta pemahaman pelaku usaha pertambangan terhadap regulasi di bidang energy dan sumber daya mineral;
 - e. Rendahnya pemahaman masyarakat terhadap pemanfaatan bahan bakar selain minyak;
 - f. Maraknya penambangan tanpa ijin; dan
 - g. Belum optimalnya pemanfaatan potensi air tanah.

29. Bidang Perdagangan

Permasalahan pembangunan Bidang Perdagangan, meliputi:

- a. Masih rendahnya tingkat kesadaran konsumen serta belum optimalnya pengawasan barang dan jasa;
- b. Ketersediaan sarana dan prasarana perdagangan yang belum memadai, seperti pasar tradiisonal yang perlu direhabilitasi, pusat kuliner dan lain-lain; dan
- c. Masih banyak ditemui barang beredar yang tidak memenuhi ketentuan.

30. Bidang Perindustrian

Permasalahan pembangunan Bidang Perindustrian, meliputi:

- a. Belum optimalnya pengembangan OVOP (One Village One Product);
- b. Daya saing produk IKM yang dihasilkan masih relatif rendah dari sisi kemasan, standar dan mutu produk;
- c. Inovasi dan diversifikasi produk industri kecil menengah masih rendah; dan
- d. Belum optimalnya pengembangan industri sesuai potensi daerah.

31. Bidang Transmigrasi

Permasalahan pembangunan Bidang Transmigrasi, meliputi:

- a. Rendahnya kemampuan anggaran baik di Provinsi dan Kabupaten/Kota terhadap pelaksanaan transmigrasi sehingga kegiatan yang merupakan kewenangan pemerintah daerah tidak dapat dilaksanakan secara maksimal; dan
- b. Terkait dengan penyelesaian permasalahan lahan transmigrasi adanya pembatasan kewenangan Provinsi yang hanya bisa mengintervensi Kawasan Transmigrasi yang lintas Kabupaten/kota dalam satu daerah provinsi.

B. Visi dan Misi Kepala Daerah

1. Visi

Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Maluku Tahun 2025-2029 menetapkan Visi Pemerintah Daerah Provinsi Maluku Tahun 2025 - 2029 sebagai berikut :

Transformasi Maluku Menuju Maluku Yang Maju, Adil dan Sejahtera Menyongsong Indonesia Emas 2045

2. Misi

Untuk mewujudkan Visi Pemerintah Daerah Provinsi Maluku 2025-2029 tersebut, maka ditetapkan Misi, yakni:

- ✚ Peningkatkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik secara adil, inklusif, transparan dan akuntabel
- ✚ Pengentasan kemiskinan dan penurunan tingkat kemiskinan melalui kebijakan yang tepat sasaran, efisien dan efektif
- ✚ Memperkuat pembangunan sumber daya manusia, sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender serta pemberdayaan perempuan, pemuda dan penyandang disabilitas
- ✚ Peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur dasar serta transportasi dan telekomunikasi untuk memperlancar konektivitas antar intra wilayah
- ✚ Pengelola Lingkungan kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil, sumber daya alam yang berkelanjutan, adaptasi dan mitigasi dampak perubahan iklim dan ketahanan bencana (Etis, Responsif dan Akuntabel)
- ✚ Peningkatan pertumbuhan ekonomi yang inklusif melalui hilirisasi komoditas unggulan, mengintensifkan bagi usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM), membuka aksesibilitas pasar dan mengurangi disparitas antar wilayah
- ✚ Penataan dan revitalisasi lembaga sosial kemasyarakatan dalam semangat hidup orang basudara, berbasis adat budaya dan kearifan lokal serta ketaatan dan kepatuhan terhadap hukum

3. Tujuan Provinsi Maluku

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Tata Cara Evaluasi Raperda Tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD, telah menyatakan tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) Tahunan.

Berdasarkan definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa untuk mengetahui keberhasilan/kegagalan entitas pemerintahan (Pemerintah Daerah) dalam mewujudkan visi dan misi yang telah dijanjikan adalah melihat pencapaian tujuan dengan membandingkan kondisi awal masa pemerintahan dengan kondisi akhir masa pemerintahan.

Berikut adalah kondisi awal serta kondisi akhir yang ingin dituju Provinsi Maluku berdasarkan Visi dan Misi RPJMD Perubahan tahun 2025-2029 :

4. Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Perjanjian kinerja adalah pernyataan komitmen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Perjanjian Kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja yang dijabarkan dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis, yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan yang dilaksanakan seiring dengan agenda penyusunan dari kebijakan anggaran serta merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapainya outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya. Berikut adalah Perjanjian Kinerja Pemerintah Provinsi Maluku Tahun 2025.

Tabel. 1.7
Perjanjian Kinerja Tahun 2025

No	Sasaran	Indikator	Target
1	Meningkatnya Askes Masyarakat Kepulauan Terhadap Pelayanan Pendidikan yang Berkualitas	Harapan Lama Sekolah	14,05 Tahun
		Rata-Rata Lama Sekolah	10,22 Tahun
2	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat Kepulauan yang Dilaksanakan secara Inklusif dan Terjangkau	Usia Harapan Hidup	70,85 Tahun
3	Meningkatnya Peran Pemuda dalam Pembangunan dan Peningkatan Prestasi Olahraga	Indeks Pembangunan Pemuda	58,11
		Indeks Pembangunan Olahraga	0,364
4	Mewujudkan Pembangunan Daerah Berbasis Kebudayaan	Indeks Pembangunan Kebudayaan	53,65
5	Meningkatnya Pembangunan SDM yang Berkeadilan	Indeks Pembangunan Gender	93,58
6	Meningkatnya Produktivitas dan Nilai Tambah Produk	LPE Sektor Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	5,81%

7	Meningkatnya Pertumbuhan Usaha dan Nilai Investasi	LPE Lapangan Usaha Sektor Industri Pengolahan dan Perdagangan	21,03%
		Nilai Investasi PMA/PMDN	2,6 Triliun
8	Meningkatnya Konektivitas antar Wilayah dan Pembangunan Infrastruktur yang Berkualitas dan Merata	Rasio Konektivitas	0,784
		Indeks Desa Membangun	0,7322
		Indeks Infrastruktur (Bidang Ke-PU-an)	90,41
9	Meningkatnya Pembangunan Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Berdaya Saing dan Berkelanjutan	Persentase PDRB Sektor Pariwisata	6,52%
10	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan dan Ketahanan Bencana	Persentase Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca	24,17%
		Indeks Resiko Bencana	159,90
11	Meningkatnya Ketahanan Pangan Daerah	Indeks Ketahanan Pangan	72,75
12	Berkurangnya Beban Pengeluaran Penduduk Miskin	Persentase Rumah Tangga Miskin (RTM) Penerima Bantuan Sosial	47%
13	Meningkatnya Kualitas dan Penyerapan Tenaga Kerja	Tingkat Pengangguran Terbuka	6,06
14	Terwujudnya Kerukunan antar Masyarakat yang Damai dan Harmonis	Indeks Modal Sosial	80,43
15	Terwujudnya Kesenjangan, Keselarasan, dan Keseimbangan Penduduk dengan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan dan Kondisi Sosial Budaya	Laju Pertumbuhan Penduduk	1,07%
16	Meningkatnya Penyelenggaraan Birokrasi Pemerintah yang Professional Karakteristik, Berintegritas Guna Mewujudkan Pelayanan Publik yang Berkualitas	Indeks Reformasi Birokrasi	BB (75,00)

C. Program Pembangunan Daerah Berdasarkan Dokumen Perencanaan Jangka Menengah

Prioritas pembangunan daerah Provinsi Maluku Tahun 2026 disusun berdasarkan isu strategis serta memuat pokok-pokok pikiran tahunan DPRD Tahun 2026 yang tertuang dalam prioritas pembangunan dan arah kebijakan RPJMD Tahun 2025-2029 sehingga keterkaitan prioritas pembangunan daerah dalam RKPD Tahun 2025 dengan arah kebijakan RKPD untuk Tahun 2026 sangat erat.

Perumusan prioritas 2026 disajikan dengan tetap menjaga keterkaitan antara prioritas pembangunan daerah, diantaranya :

1. Peningkatan layanan Pendidikan, Kesehatan, Peran Pemuda dan Pengarus tamaan Geds, strategi yang ingin dilakukan diantaranya :

1. Pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan
2. Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan

3. Pemberdayaan Sosial
4. Rehabilitasi Sosial

2. Peningkatan Daya Saing Ekonomi, Ketahanan Pangan, Energi dan Air yang berbasis sumber daya lokal, Strategi yang dilakukan antara lain :

1. Penguatan ketahanan pangan melalui peningkatan produktivitas sektor pertanian, perikanan, dan kelautan berbasis potensi lokal.
2. Pengembangan industri pengolahan dan hilirisasi produk perikanan serta pertanian untuk meningkatkan nilai tambah dan daya saing ekspor.
3. Pengembangan Energi Terbarukan (PLTS komunal, PLTA skala kecil, biomassa) di pulau-pulau kecil dan wilayah belum teraliri listrik.
4. Program Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) berbasis kepulauan dan desadesa terpencil,
5. Revitalisasi dan Pemberdayaan UMKM/IKM berbasis SDA lokal (sagu, pala, cengkeh, perikanan)
6. Penguatan Sistem Logistik Pangan dan Energi Antar Pulau dengan dukungan infrastruktur transportasi laut dan darat

3. Peningkatan Infrastruktur dan Konektivitas Wilayah, Strategi yang dilakukan antara lain :

1. Pembangunan dan perbaikan jalan provinsi strategis untuk konektivitas ekonomi dan wilayah
2. Revitalisasi dan pembangunan pelabuhan perikanan dan pelabuhan rakyat di pulau-pulau kecil.
3. Pemerataan akses telekomunikasi dan digital melalui pembangunan infrastruktur jaringan internet, BTS, dan sistem informasi publik digital.
4. Peningkatan jaringan telekomunikasi dan internet broadband di seluruh kecamatan, terutama pulau-pulau kecil

4. Peningkatan Kesempatan Kerja dan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat, Strategi yang dilakukan antara lain:

1. Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja
2. Penempatan Tenaga Kerja
3. Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)
4. Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian

5. Pengelolaan Lingkungan, Peningkatan Ketahanan Bencana dan Dampak Perubahan Iklim;

Dengan demikian, pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan, peningkatan kapasitas mitigasi bencana, dan strategi adaptasi perubahan iklim menjadi isu strategis untuk memastikan pembangunan Maluku tetap tangguh, aman, dan

berkelanjutan, sejalan dengan visi Gubernur Maluku “Transformasi Menuju Maluku Yang Maju, Adil dan Sejahtera Menyongsong Indonesia Emas 2045” strategi yang dilakukan melalui program :

1. Pengelolaan Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
2. Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
3. Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup
4. Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)
5. Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)
6. Pengelolaan Hutan
7. Pengelolaan Aspek Geologi
8. Program Penanggulangan Bencana
9. Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat
10. Penanganan Kerawanan Pangan

6. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif dan pelayanan Publik yang berkualitas;

Manajemen birokrasi yang baik dan dinamis serta yang melayani, diantaranya sangat ditentukan oleh kompetensi birokratnya dan atmosfer budaya kerja yang baik. Guna mewujudkan birokrasi yang dinamis, inovatif dan berprinsip *good governance* maka kebijakan yang akan ditempuh yakni :

1. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
2. Peningkatan penerapan inovasi daerah dalam pembangunan
3. Peningkatan kualitas perencanaan pembangunan
4. Peningkatan nilai hasil pengawasan kearsipan
5. Peningkatan Kematangan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)
6. Peningkatan Pelayanan Dukungan Pelaksanaan Fungsi DPRD
7. Konsistensi dokumen perencanaan dan penganggaran
8. Peningkatan Penerapan Manajemen ASN Peningkatan Kualitas Kompetensi Aparatur

7. Penguatan kapasitas lembaga sosial kemasyarakatan berbasis kearifan lokal serta ketaatan dan kepatuhan terhadap hukum

Program yang diharapkan dapat menunjang antara lain :

1. Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
2. Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Bangsa
3. Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik
4. Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial

5. Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat

Perumusan isu strategis Provinsi Maluku dalam perencanaan pembangunan daerah tahun 2026, masih relevan dengan isu strategis yang ada pada RPJMD 2025 - 2029 yang telah dikaji dan dianalisis permasalahan pembangunannya. Berkaitan dengan hal tersebut, berdasarkan hasil analisis terhadap permasalahan pembangunan dan tantangan pembangunan sebagaimana dijabarkan pada isu internasional, isu nasional, isu regional, maupun telaahan RTRW, maka dapat diindikasikan bahwa isu strategis pada rencana kerja pemerintah daerah Provinsi Maluku Tahun 2026 dijabarkan sebagai berikut:

Tabel 1.8

Keterkaitan Permasalahan dengan Isu Strategis dan Prioritas Daerah

No	Permasalahan Pembangunan	Isu Strategis	Prioritas Daerah
1	Belum optimalnya aksesibilitas dan layanan Kesehatan	Sumber Daya Manusia Yang Berdaya Saing	PENINGKATAN LAYANAN PENDIDIKAN, KESEHATAN, PERAN PEMUDA DAN PENGARUSTAMAAN GEDS
2	Belum meratanya kualitas dan aksesibilitas Pendidikan		
3	Belum Optimalnya pengembangan IPTEKIN dan riset	Belum Optimalnya pengembangan IPTEKIN dan riset	
4	Belum optimalnya pertumbuhan ekonomi daerah	Pembangunan Ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, khususnya hilirisasi komoditas unggulan	PENINGKATAN DAYA SAING EKONOMI, KETAHANAN PANGAN ENERGI DAN AIR YANG BERBASIS SUMBER DAYA LOKAL
5	Kesenjangan Antara Wilayah masih Tinggi	Kesenjangan Antar Wilayah	PENINGKATAN INFRASTRUKTUR DAN KONEKTIVITAS WILAYAH
6	Belum merata dan memadainya infrastruktur wilayah dan dasa	Belum Optimalnya Infrastruktur Dasar, serta infrastruktur transportasi, dan telekomunikasi untuk meningkatkan konektivitas antar pulau	
7	Tingkat Kemiskinan Provinsi Maluku Masih Tinggi	Masih tingginya angka kemiskinan dan prevalensi stunting	PENINGKATAN KESEMPATAN KERJA DAN PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT
	Masih Tingginya Tingkat Pengangguran		

8	Pencemaran Dan Kerusakan Lingkungan Serta Ancaman Bencana	Resiko Bencana, Ancaman Perubahan Iklim dan Kerentanan Daya Dukung Wilayah	PENGELOLAAN LINGKUNGAN, PENINGKATAN KETAHANAN BENCANA DAN DAMPAK PERUBAHAN IKLIM
9	Belum optimalnya penyelenggaraan tata kelola pemerintahan	Tata Kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik	PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG EFEKTIF DAN PELAYANAN PUBLIK BERKUALITAS
10	Belum Optimalnya Pelestarian Budaya dan Potensi Instabilitas Sosial	Pelestarian Budaya Belum Optimal dan Potensi Stabilitas Sosial	PENGUATAN KAPASITAS LEMBAGA SOSIAL KEMASYARAKATAN BERBASIS KEARIFAN LOKAL SERTA KETAATAN DAN KEPATUHAN TERHADAP HUKUM

D. Kegiatan Pembangunan Daerah Berdasarkan Dokumen Perencanaan Tahunan

Tujuan pembangunan daerah ditetapkan sebagai orientasi utama yang menjawab secara langsung berbagai isu strategis dan permasalahan nyata dalam pembangunan daerah. Tujuan adalah rumusan umum tentang apa yang ingin dicapai di tahun 2026 sebagai tahap awal RPJMD sehingga menjadi fondasi dalam menuntun pelaksanaan program-program prioritas pembangunan Provinsi Maluku Tahun 2025-2029. Tujuan Pembangunan RKPD 2026 dalam RPJMD 2025-2026 diarahkan untuk:

1. Meningkatnya kualitas birokrasi dan pelayanan publik
2. Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat
3. Meningkatnya kualitas SDM Maluku
4. Meningkatnya Infrastruktur Dasar, Telekomunikasi, Elektrifikasi dan wilayah serta konektivitas Antar dan Intra Wilayah
5. Meningkatnya Pengelolaan SDA, dampak perubahan Iklim dan ketahanan bencana
6. Mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif
7. Meningkatnya harmonisasi sosial, Budaya dan penegakan hukum.

1.3. Penerapan Standar Pelayanan Minimal

Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal, pengertian Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal. Pelayanan dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara. Pelaksanaan pelayanan dasar pada urusan pemerintahan wajib yang berkaitan

dengan pelayanan dasar berpedoman pada SPM yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

SPM yang telah ditetapkan Pemerintah Pusat sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021, menjadi salah satu acuan bagi Pemerintah Daerah dan merupakan bagian tidak terpisahkan dalam proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pelaporan dan pertanggung jawaban untuk menjamin akses dan mutu pelayanan dasar kepada masyarakat dalam rangka penyelenggaraan urusan wajib.

Adapun jenis pelayanan dasar yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi, meliputi SPM Bidang Pendidikan, Kesehatan, Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat serta Bidang Sosial yang masing-masingnya berpedoman pada Peraturan Menteri Teknis antara lain :

- 1) Untuk bidang pendidikan, Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 Tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan;
- 2) Untuk bidang kesehatan, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Minimal Kesehatan;
- 3) Untuk bidang Pekerjaan umum dan bidang perumahan rakyat, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2023 untuk Tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Bidang Perumahan Rakyat;
- 4) Untuk Bidang Trantibumlinmas, sub bidang ketentraman dan ketertiban umum, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 Tentang Penerapan Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum;
- 5) Untuk sub bidang bidang bencana, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 Tentang Penerapan Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Bencana;
- 6) Untuk sub bidang kebakaran, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 Tentang Penerapan Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran; dan
- 7) Untuk bidang sosial, Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Penerapan Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial.

Pelaksanaan urusan wajib pelayanan dasar yang dilaksanakan dengan SPM diharapkan akan menjamin terwujudnya hak-hak individu masyarakat, serta

dapat menjamin akses untuk mendapatkan pelayanan dasar yang wajib diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. SPM pada penerapannya diharapkan dapat dilakukan secara bertahap dengan mempertimbangkan kebutuhan, prioritas dan kemampuan keuangan nasional dan daerah serta kelembagaan dan personil. Dalam melaksanakan SPM yang merupakan bagian dari pelayanan dasar dalam urusan wajib, selain sosialisasi konsep penetapan dan petunjuk teknis pelaksanaannya yang dilakukan, tetapi juga diperlukan pemetaan kondisi awal SPM terkait di daerah, khususnya pada OPD pengampu masing-masing bidang untuk menentukan penetapan target pencapaian sasaran SPM pada tahun berjalan dan tahun berikutnya hingga memenuhi standar capaian SPM secara nasional, penghitungan rencana pembiayaan untuk sasaran capaian tiap tahunnya, dan mengintegrasikan SPM tersebut kedalam dokumen perencanaan. Langkah-langkah tersebut merupakan suatu prasyarat agar SPM dapat diterapkan secara utuh untuk kemudian dapat dianggarkan, dilaksanakan dan dievaluasi pencapaiannya sebagai bahan kajian pelaksanaan pelayanan dasar pada tahun berikutnya.

Dengan penetapan SPM beserta indikator dan tahun pencapaian, petunjuk teknis berisi kegiatan yang perlu dilakukan untuk pelaksanaan pencapaian sasaran SPM merupakan langkah awal yang harus disiapkan sehingga pemerintah daerah dapat memahami konsep dan indikator SPM guna terwujudnya pelayanan yang optimal dan terbaik kepada warga negara.



BAB II

CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

BAB II

CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN

PEMERINTAHAN DAERAH

2.1 CAPAIAN KINERJA MAKRO

Capaian kinerja makro merupakan capaian kinerja yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara umum. Capaian kinerja makro dihasilkan dari berbagai program yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah, pemerintah pusat, pihak swasta dan pihak terkait lainnya dalam pembangunan nasional. Capaian kinerja makro menggunakan indikator kinerja makro sebagai berikut :

Tabel 2.1
Capaian Kinerja Makro Atas Indikator-indikator Kinerja Makro
Provinsi Maluku Tahun 2025

No	Indikator Kinerja Makro	Capaian Kinerja Tahun 2024	Capaian Kinerja Tahun 2025	Perubahan (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Indeks Pembangunan Manusia	73,40	74,09	0,94
2	Persentase Penduduk Miskin	16,05	15,38	-4,17
3	Tingkat Pengangguran Terbuka	6,11	6,27	2,62
4	Pertumbuhan Ekonomi	5,34	4,56	-14,61
5	PDRB per kapita Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB)	32.199	33.652	4,52
6	Ketimpangan Pendapatan (Gini Ratio)	0,282	0,273	-3,19

Sumber : Data BPS Provinsi Maluku, Maluku Dalam Angka Tahun 2026

2.2 Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan

Capaian kinerja urusan pemerintahan merupakan gambaran dari keberhasilan Pemerintah Provinsi Maluku dalam mengatur dan mengurus urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Maluku berdasarkan peraturan perundang-undangan tentang pemerintahan daerah. Laporan capaian kinerja urusan pemerintahan Provinsi Maluku memuat data/informasi kinerja setiap urusan pemerintahan dan urusan penunjang.

2.2.1. INDIKATOR KINERJA KUNCI UNTUK URUSAN PEMERINTAHAN

Berikut ini memuat ukuran capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan Provinsi Maluku berdasarkan Indikator Kinerja Kunci Hasil (Outcome) pada masing-masing urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi Maluku.

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KET
1	2	3	4	5	6
1.	PENDIDIKAN	Persentase Anak Usia 16-18 Tahun yang Berpartisipasi Dalam Pendidikan Menengah	78,12%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
		Persentase Anak Usia 4-18 Tahun Penyandang Disabilitas yang Berpartisipasi Dalam Pendidikan Khusus	94,49%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
		Persentase Toilet Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, Sekolah Dasar Luar Biasa, Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa, Sekolah Menengah Atas Luar Biasa, Sekolah Menengah Kejuruan Luar Biasa Dalam Kondisi Baik	59,61%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
		Persentase Ruang Kelas Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, Sekolah Dasar Luar Biasa, Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa, Sekolah Menengah Atas Luar Biasa, Sekolah Menengah Kejuruan Luar Biasa Dalam Kondisi Baik	50,97%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
2.	KESEHATAN	Rasio Daya Tampung Rumah Sakit Rujukan	0,75%	Dinas Kesehatan dan Dinas Dukcapil	
		Persentase Rumah Sakit Rujukan Provinsi Yang Terakreditasi Paripurna	50%	Dinas Kesehatan	
		Persentase Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Provinsi	100%	Dinas Kesehatan	

		Persentase Pelayanan Kesehatan Bagi Orang Yang Terdampak dan Berisiko Pada Situasi Kejadian Luar Biasa Provinsi	100%	Dinas Kesehatan	
3.	PEKERJAAN UMUM	Persentase Kondisi Irigasi Kewenangan Provinsi	77,42%	Dinas PUPR	
		Tingkat Kemantapan Jalan Provinsi	61,84%	Dinas PUPR	
		Persentase Luas Kawasan Permukiman Rawan Banjir yang Terlindungi Oleh Infrastruktur Pengendalian dan Mitigasi Banjir	4,32%	Dinas PUPR	
		Persentase Peningkatan Kapasitas yang Terlayani Melalui Penyaluran Air Minum Curah Lintas Kabupaten/Kota Terhadap Kebutuhan Pemenuhan Kapasitas Yang Memerlukan Pelayanan Air Minum Curah Lintas Kabupaten/Kota	0%	Dinas PUPR	Suket
		Persentase Pelayanan Pengolahan Limbah Domestik Oleh SPALD Regional	0%	Dinas PUPR	Suket
		Rasio Tenaga Kerja Konstruksi yang Terlatih Di Wilayah Provinsi yang Dibuktikan Dengan Sertifikat Pelatihan Ahli	12,80%	Dinas PUPR	Suket
		Persentase Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Berdasarkan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang Sudah Diterbitkan Di Provinsi	0 %	Dinas PUPR	Suket
4	PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase Warga Negara Korban Bencana Provinsi yang Memperoleh Rumah Layak Huni	0 %	Dinas Perkim	Suket
		Persentase Warga Negara yang Terkena Relokasi Akibat Program Provinsi Yang Memperoleh Fasilitas Penyediaan Rumah yang Layak Huni	100%	Dinas Perkim	
		Persentase Luas Kawasan Kumuh 10-15 HA yang Ditangani	97,88%	Dinas Perkim	
5.	KETENTRAM, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Persentase Dokumen Kebencanaan yang Telah Ditetapkan dan Masih Berlaku	66,67%	BPBD	

		Persentase Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat yang Dilaksanakan Oleh Satuan Polisi Pamong Praja	100%	Satpol PP	
		Persentase Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah yang Ditegakkan	11,11%	Satpol PP	
		Persentase Penanganan Pra Bencana	100%	BPBD	
		Persentase Penanganan Tanggap Darurat Bencana	100%	BPBD	
		Persentase Penanganan Pasca Bencana	100%	BPBD	
6	SOSIAL	Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya Di Dalam Panti	47,15%	Dinas Sosial	
		Persentase Anak Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya Di Dalam Panti	88,89%	Dinas Sosial	
		Persentase Lanjut Usia Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya Di Dalam Panti	100%	Dinas Sosial	
		Persentase Gelandangan dan Pengemis yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya Di Dalam Panti	46,15%	Dinas Sosial	
		Persentase Korban Bencana Alam, Sosial dan/atau Non Alam yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana Provinsi	100%	Dinas Sosial	
		Persentase Penerima Manfaat yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar	0,01%	Dinas Sosial	
7	TENAGA KERJA	Persentase Kegiatan yang Dilaksanakan yang Mengacu Ke Rencana Tenaga Kerja	0%	Dinas Nakertrans	Suket
		Persentase Perusahaan yang Menerapkan Tata Kelola Kerja yang Layak (Peraturan Perusahaan/Peraturan Kerja Bersama, Lembaga Kerja Sama Bipartit, Struktur Skala Upah, dan Terdaftar Peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	0,01%	Dinas Nakertrans	
		Persentase Perusahaan yang Menerapkan Peraturan Perundangan Bidang Ketenagakerjaan	1,61%	Dinas Nakertrans	



		Persentase Pekerja Bukan Penerima Upah dan Atau Pekerja Rentan yang Mendapatkan Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	100%	Dinas Nakertrans	
8	PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	Persentase Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	100%	Dinas P3A	
		Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	100%	Dinas P3A	
9	PANGAN	Persentase Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi	83,18%	Dinas Ketahanan Pangan	
10	PERTANAHAN	Persentase Ditetapkannya Hak Atas Tanah Dalam Penguasaan dan Pengelolaan Pemerintah Daerah	75,87%	Biro Pemerintahan dan Otda	Suket
		Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Dengan Rencana Tata Ruang Wilayah	0%	Biro Pemerintahan dan Otda	
	LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Ketaatan Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan Terhadap Izin Lingkungan, Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) dan Peraturan Perundang-Undangan Lingkungan Hidup (PUU LH) yang Diterbitkan Oleh Pemerintah Daerah	14,29%	Dinas Lingkungan Hidup	
12	ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIIL	Jumlah Data Profil Kependudukan yang Disusun dan Dipublikasikan	100%	Dinas Dukcapil	
		Pemanfaatan Data Kependudukan	66,67%	Dinas Dukcapil	
13	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	Persentase Peningkatan Status Desa Mandiri	6,60%	Dinas Pemdes	
		Persentase Fasilitasi Kerjasama Desa	0%	Dinas Pemdes	Surat Keterangan

14	PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate/TFR) Per Wanita Usia Subur Usia 15-49 Tahun	88,64%	Dinas Dukcapil
		Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern/Modern Contraceptive Prevalence Rate (mCPR)	47,02%	Dinas Dukcapil
		Persentase Kebutuhan Ber-KB yang Tidak Terpenuhi (Unmet Need)	88,61%	Dinas Dukcapil
15	PERHUBUNGAN	Konektivitas Provinsi	0,89	Dinas Perhubungan
		Volume/Capacity Ratio diJalan Provinsi	0,47	Dinas Perhubungan
		Persentase Perusahaan Angkutan Umum yang Tersertifikasi Sistem Manajemen Keselamatan	100%	Dinas Perhubungan
16	KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Persentase Perangkat Daerah (PD) dan/atau Unit Pelaksana Teknis Daerah yang Terhubung Dengan Akses Internet yang Disediakan Oleh Dinas Kominfo	38,64%	Dinas Kominfo
		Persentase Layanan Publik yang Diselenggarakan Secara Online dan Terintegrasi	5%	Dinas Kominfo
		Persentase Masyarakat yang Menjadi sasaran Penyebaran Informasi Publik, Mengetahui Kebijakan dan Program Prioritas Pemerintah dan Pemerintah Daerah Provinsi	100%	Dinas Kominfo
17	KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	Persentase Pertumbuhan Volume Usaha Koperasi	-18,25%	Dinas Koperasi, UKM
		Persentase Usaha Kecil yang Bertransformasi Dari Informal ke Formal	0%	Dinas Koperasi, UKM
		Persentase Proporsi Ekspor Dari Usaha Kecil	0,93%	Dinas Koperasi, UKM
18	PENANAMAN MODAL	Persentase Peningkatan Investasi di Provinsi	-66,71%	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
		Persentase Realisasi Investasi Terhadap Target Investasi	29,92 %	Dinas Penanaman Modal dan PTSP

19	KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	Persentase Partisipasi Pemuda Dalam Kegiatan Ekonomi Mandiri	92,96%	Dinas Pemuda dan Olahraga
		Persentase Partisipasi Pemuda Dalam Organisasi Kepemudaan dan Organisasi Sosial Kemasyarakatan	3,77%	Dinas Pemuda dan Olahraga
		Persentase Atlet yang Masuk Pemusatan Latihan Nasional	25,81%	Dinas Pemuda dan Olahraga
		Persentase Jumlah Atlet Berprestasi	100%	Dinas Pemuda dan Olahraga
20	STATISTIK	Persentase Kepatuhan Daftar Data yang Dilaporkan Kepada Wali Data Berdasarkan Kesepakatan Forum Satu Data Daerah	100%	Bappeda/ Dinas Kominfo
21	PERSANDIAN	Persentase Tingkat Kematangan Keamanan Siber dan Sandi Pemerintah Daerah	29,08%	Dinas Kominfo
22	KEBUDAYAAN	Persentase Warisan Budaya yang Dilestarikan	62,50%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
23	PERPUSTAKAAN	Nilai Tingkat Kegemaran Membaca (TKM) Masyarakat	57,38%	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
		Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM)	39,16%	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
24	KEARSIPAN	Tingkat Ketersediaan Arsip Sebagai Bahan Akuntabilitas Kinerja, Alat Bukti yang Sah dan Pertanggungjawaban Nasional	62,02%	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
25	KELAUTAN DAN PERIKANAN	Persentase Produksi Perikanan Tangkap dan Budidaya	94,02%	Dinas Kelautan dan Perikanan
		Persentase Peningkatan Jumlah Pelaku Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Tangkap dan Budidaya di Wilayah Provinsi	-30,50%	Dinas Kelautan dan Perikanan
		Persentase Kepatuhan Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan	87,50%	Dinas Kelautan dan Perikanan
26	PARIWISATA	Persentase Pertumbuhan Jumlah Wisatawan Asing	8,63%	Dinas Pariwisata
		Persentase Peningkatan Perjalanan Wisatawan Nusantara yang Datang Ke Provinsi	1,71%%	Dinas Pariwisata
		Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi, Makan, Minum	1,48%%	Dinas Pariwisata

27	PERTANIAN	Persentase Peningkatan Produksi Tanaman Pangan	-81,80%	Dinas Pertanian	
		Persentase Peningkatan Produksi Hortikultura	-74,77%	Dinas Pertanian	
		Persentase Peningkatan Produksi Komoditi Peternakan	-47,81%	Dinas Pertanian	
28	KEHUTANAN	Persentase Luas Lahan Kritis yang Direhabilitasi	100%	Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Kehutanan	
		Persentase Luas Lahan Kawasan Hutan yang Dikelola Oleh Masyarakat Dalam Skema Hutan Desa, Hutan Kemasyarakatan, Hutan Tanaman rakyat dan Kemitraan Kehutanan	100%	Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Kehutanan	
		Persentase Penurunan Kerusakan hutan yang Menjadi Kewenangan Provinsi	67,24%	Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Kehutanan	
29	ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	Peraturan daerah/Peraturan Gubernur Terkait Izin Pengusahaan dan Persetujuan Penggunaan Air Tanah yang Menjadi Kewenangan Provinsi Telah Ditetapkan	Ada	Dinas ESDM	Surat Keterangan
		Persentase Usaha Tambang Sesuai Kewenangan Provinsi yang Tidak Melanggar Peraturan Perundang-Undangan	100%	Dispenda/ Dinas ESDM	
30	PERDAGANGAN	Persentase Penanganan Pengaduan Konsumen Provinsi	100%	Dinas Perindag	
		Nilai Ekspor Barang Per Provinsi	169,20%	Dinas Perindag	
31	PERINDUSTRIAN	Pencapaian sasaran Pembangunan Industri Daerah	0%	Dinas Perindag	Suket
		Persentase Kepatuhan Pelaku Usaha Industri Besar yang Melaporkan Informasi Melalui Sistem Informasi Industri Nasional	12,24%	Dinas Perindag	
		Persentase Pertambahan Jumlah Industri Besar di Provinsi	100%	Dinas Perindag	

	Persentase Realisasi Investasi Sektor Industri Dibandingkan Realisasi Investasi Seluruh Sektor	7,68%	Dinas Perindag
--	--	-------	----------------

2.2.2. INDIKATOR KINERJA KUNCI UNTUK FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN

Berikut ini memuat ukuran capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan Daerah Provinsi Maluku berdasarkan Indikator Kinerja Kunci Fungsi Penunjang pada masing-masing urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi Maluku.

NO	FUNGSI PENUNJANG	INDIKATOR KINERJA KUNCI	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KET
1	2	3	4	5	6
1.	PERENCANAAN	Persentase Kesesuaian Antara Rencana Kerja Pemerintah Dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)	94,12%	Bappeda	
2.	KEUANGAN	Persentase Belanja Pegawai Daerah Tidak Termasuk Belanja Untuk Tambahan Penghasilan Guru, Tunjangan Khusus Guru, Tunjangan Profesi Guru, dan Tunjangan Sejenis Lainnya yang Bersumber Dari Transfer Ke Daerah (TKD) yang Telah Ditentukan Penggunaannya	35,96%	BPKAD	
		Persentase Pendapatan Asli Daerah Terhadap Pendapatan Daerah	23,16%	BPKAD	
		Persentase Realisasi Anggaran Belanja Urusan Wajib Pelayanan Dasar Terhadap Total Belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun N	82,70%	BPKAD	
		Persentase Alokasi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik	3,25%	BPKAD	
3.	KELEMBAGAAN, KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	Persentase Aparatur Sipil Negara Pendidikan Perguruan Tinggi (Aparatur Sipil Negara Tidak Termasuk Guru dan Tenaga Kesehatan)	70,96%	BKD dan BPSDM	
4.	FUNGSI PENGAWASAN	Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	2,00	Inspektorat	

	Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	2,00	Inspektorat
	Manajemen Risiko Indeks	2,00	Inspektorat
	Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan Tahun Anggaran N-1	19,80%	Inspektorat
5. PENGADAAN	Tingkat Kematangan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ)	40	Biro Barjas
	Pemanfaatan Sistem Pengadaan	23,13	Biro Barjas
	Kualifikasi dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa (SDM PBJ)	20,83	Biro Barjas
6. HUBUNGAN DENGAN PERWAKILAN DAERAH	Ketepatan Waktu Penetapan Peraturan Daerah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun N	Tepat	BPKAD
	Persentase Penetapan Rancangan Peraturan Daerah Tahun N	100%	Setwan dan Biro Hukum
7. PELAYANAN PUBLIK	Penilaian Maladministrasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik	60,56	Biro Organisasi
8. PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	Persentase Perangkat Daerah yang Menerapkan Inovasi dan Telah Menjadi Bagian Dari Program Kegiatan	100%	Bappeda

2.2.3. AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH DAERAH

A. Capaian Kinerja

Pengukuran capaian kinerja oleh Pemerintah Provinsi Maluku pada Tahun 2025 dilakukan secara berkala serta telah mendasar pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014

tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, yaitu dengan cara membandingkan realisasi capaian kinerja sasaran dengan target kinerja sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja (PK) Pemerintah Provinsi Maluku Tahun 2025. Setelah dilakukan penghitungan akan diketahui selisih atau celah kinerja (*performance gap*), selanjutnya berdasarkan selisih kinerja tersebut dilakukan evaluasi guna menentukan strategi dan arah kebijakan yang tepat untuk peningkatan kinerja di masa yang akan datang (*performance improvement*). Adapun rumus yang digunakan dalam menentukan tingkat capaian setiap sasaran adalah:

a. Tingkat Capaian Positif

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

b. Tingkat Capaian Negatif

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Target})}{\text{Target}} \times 100\%$$

Adapun tujuan dilakukannya pengukuran kinerja adalah dalam rangka untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis pembangunan Pemerintah Provinsi Maluku. Guna mempermudah interpretasi atas capaian kinerja sasaran strategis, Pemerintah Provinsi Maluku menggunakan skala nilai peringkat kinerja, sebagai berikut:

Tabel 2.3.
Skala Nilai Peringkat Capaian Kinerja Sasaran Strategis

No	Rentang Capaian	Interpretasi
1.	>90-100	Sangat Memuaskan
2.	>80 – 90	Memuaskan
3.	>70 – 80	Sangat Baik
4.	>60 – 70	Baik
5.	>50 – 60	Cukup
6.	>30 – 50	Kurang

No	Rentang Capaian	Interpretasi
7.	0 – 30	Sangat Kurang

Berikut adalah kondisi pencapaian sasaran Pemerintah Provinsi Maluku Tahun 2025 berdasarkan RPD Provinsi Maluku Tahun 2025 -2026:

SASARAN 1
Meningkatnya Akses Masyarakat Kepulauan Terhadap Pelayanan Pendidikan yang Berkualitas

Sasaran Strategis ini merupakan penjabaran terhadap Tujuan “Meningkatkan Kualitas SDM yang Sehat, Produktif, Berdaya Saing dan Berkarakter Berbasis Budaya Inklusif”. Hasil pengukuran Sasaran Meningkatnya Akses Masyarakat Kepulauan Terhadap Pelayanan Pendidikan yang Berkualitas dapat dilihat pada tabel-tabel berikut:

Tabel 2.4.

Capaian Sasaran Meningkatnya Akses Masyarakat Kepulauan Terhadap Pelayanan Pendidikan yang Berkualitas Tahun 2025

Indikator Kinerja		Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Harapan Lama Sekolah	14,05 Tahun	14,10 Tahun	100
2	Rata-Rata Lama Sekolah	10,22 Tahun	10,51 Tahun	100
Rata-Rata Capaian Kinerja				100

Tabel 2.5.

Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Sasaran 1 antara Tahun 2024 s/d Tahun 2025

Kinerja		2024		2025	
		Real. Kinerja	Cap. Kinerja	Real. Kinerja	Cap. Kinerja
1	Harapan Lama Sekolah	14,09	100%	14,10	100%
2	Rata-Rata Lama Sekolah	10,26	100%	10,51	100%

Tabel 2.6.

Perbandingan Realisasi Sasaran 1 Tahun 2024 s/d 2025 dengan Tahun Akhir periode RPD

Kinerja	Realisasi 2024	Realisasi 2025	Target Tahun Akhir RPD
---------	----------------	----------------	------------------------

1	Harapan Lama Sekolah	14,09	14,10	14,07
2	Rata-Rata Lama Sekolah	10,26	10,51	10,37

Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) dan angka Harapan Lama Sekolah (HLS) merupakan pembentuk Indeks Pendidikan. Indeks Pendidikan adalah ukuran keberhasilan di bidang Pendidikan yang merupakan salah satu dari tiga (kesehatan, pendidikan, standar hidup layak) komponen pembentuk Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Rata-rata lama sekolah adalah jumlah tahun belajar penduduk 15 tahun ke atas yang telah diselesaikan dalam pendidikan formal, sedangkan harapan lama sekolah dapat didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Berikut adalah rumus untuk menghitung indeks pendidikan:

$$\text{Indeks Pendidikan} = \frac{\text{Indeks Harapan Lama Sekolah} + \text{Indeks Rata - rata Lama Sekolah}}{2}$$

$$\text{Indeks HLS} = \frac{\text{HLS} - \text{HLSmin}}{\text{HLSmaks} - \text{HLSmin}}$$

$$\text{Indeks RLS} = \frac{\text{RLS} - \text{RLSmin}}{\text{RLSmaks} - \text{RLSmin}}$$

Berikut adalah angka HLS dan angka RLS kabupaten/kota se-Provinsi Maluku:

Tabel 2.7.
Angka Harapan Lama Sekolah dan Angka Rata-Rata Lama Sekolah
Provinsi Maluku Tahun 2023-2025

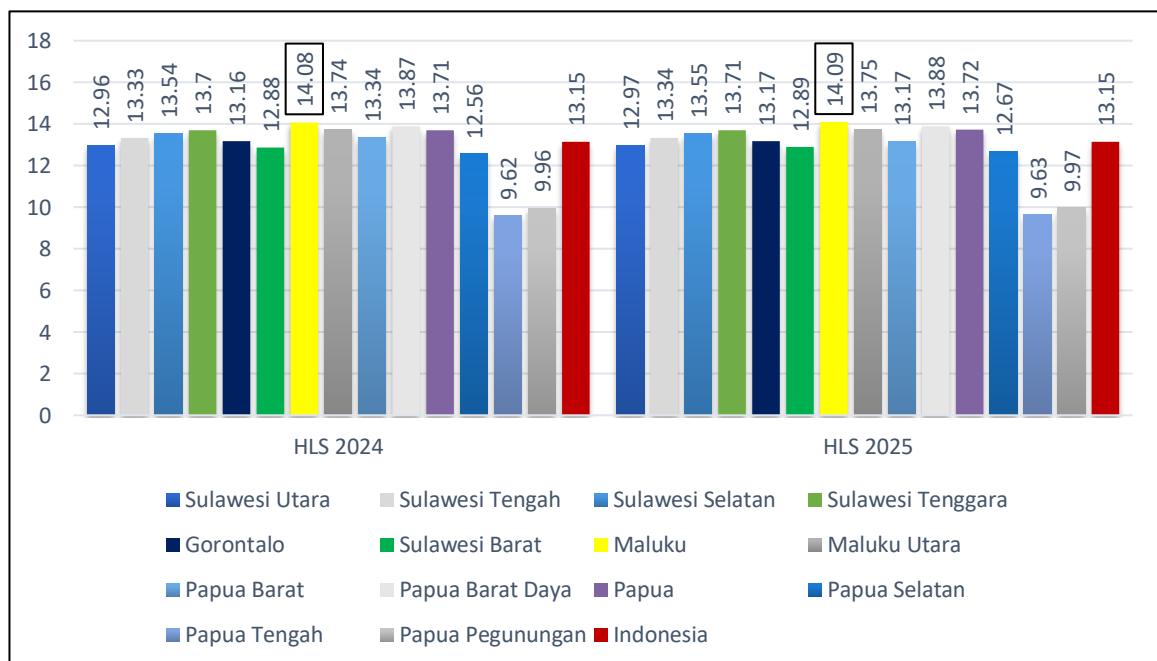
Kabupaten/Kota	Harapan Lama Sekolah			Rata-Rata Lama Sekolah		
	2023	2024	2025	2023	2024	2025
Maluku Tengah	14,37	14,67	14,68	9,01	9,79	10,06
Maluku Tenggara	12,90	12,91	13,11	9,79	9,84	9,85
Seram Bagian Timur	12,91	12,92	13,07	8,82	9,00	9,25
Seram Bagian Barat	13,69	13,70	13,71	9,35	9,59	9,60
Buru	13,23	13,24	13,25	9,01	9,02	9,28
Buru Selatan	12,84	12,85	13,01	8,23	8,48	8,74
Kepulauan Aru	12,36	12,37	12,51	8,97	9,21	9,46
Kepulauan Tanimbar	12,33	12,34	12,58	9,91	9,92	9,93
Maluku Barat Daya	12,70	12,70	12,94	8,92	9,13	9,39
Kota Ambon	16,07	16,07	16,09	12,22	12,24	12,37
Kota Tual	14,01	14,02	14,03	10,66	10,67	10,68
Maluku	14,08	14,09	14,10	10,20	10,26	10,51

Tabel diatas menunjukkan Angka Harapan Lama Sekolah tertinggi pada tahun 2025 terdapat di kota Ambon dengan angka 16,09 sedangkan angka HLS

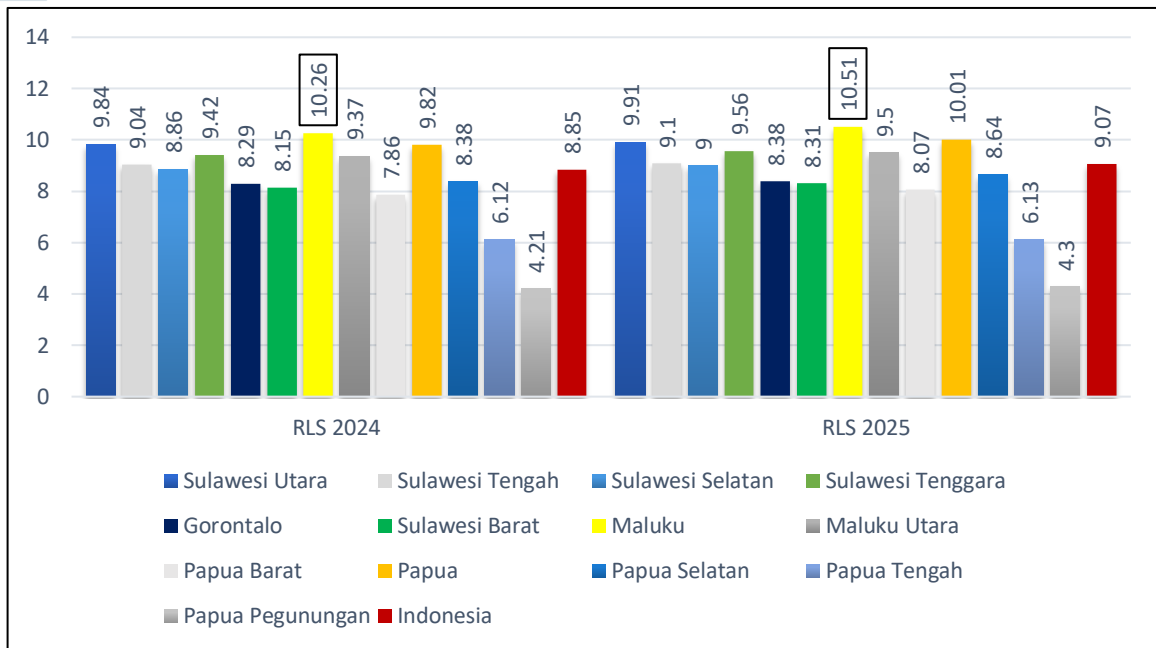
terendah terdapat di Kabupaten Kepulauan Aru dengan angka 12,51. Untuk angka Rata-Rata Lama Sekolah tertinggi juga berada di Kota Ambon dengan angka 12,37 dan terendah terdapat di Kabupaten Buru Selatan dengan angka 8,74.

Capaian Sasaran Meningkatnya Akses Masyarakat Kepulauan Terhadap Pelayanan Pendidikan yang Berkualitas telah memperoleh interpretasi "Sangat Memuaskan". Hal tersebut berdasarkan capaian Kinerja nya yang telah melebihi target kinerja yang ditetapkan. Akan tetapi untuk progres pendidikan di Provinsi Maluku ada baiknya kita juga melihat atau membandingkan capaian indeks pendidikan beberapa provinsi lainnya di wilayah Indonesia timur maupun rerata secara Nasional sehingga kita memiliki gambaran jelas terhadap posisi pendidikan Provinsi Maluku.

Berdasarkan rilis resmi BPS serta data olahan yang ada, Angka HLS dan RLS Provinsi Maluku dari tahun 2024 sampai dengan tahun 2025 merupakan yang tertinggi jika dibandingkan dengan beberapa provinsi di wilayah Indonesia Bagian Timur serta capaian tersebut juga telah melampaui rata-rata angka HLS dan RLS Nasional. Berikut adalah gambar angka HLS dan RLS di Indonesia serta beberapa provinsi di wilayah Indonesia timur.



Gambar 2.1. Angka Harapan Lama Sekolah di Beberapa Provinsi Wilayah Indonesia Bagian Timur dan Rerata Nasional Tahun 2024-2025



telah mengalokasikan anggaran yang melampaui ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yakni alokasi anggaran pendidikan minimal 20% dari total APBD. Untuk tahun 2024 alokasi anggaran pendidikan sebesar 37,94% meningkat 11,59% dari alokasi anggaran pendidikan tahun 2023 yakni sebesar 34%.

Selain aspek kebijakan tersebut, berikut adalah upaya teknis yang telah dilakukan Provinsi Maluku untuk meningkatkan angka Harapan Lama Sekolah dan angka Rata-Rata Lama Sekolah:

1. Penyelenggaraan Dana Daerah untuk melengkapi Pendanaan BOSP (nasional) yaitu Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan (BOPPD/Bosda) agar pemerintah daerah dapat meringankan beban dana operasional sekolah serta untuk pencegah pungutan liar;
2. Menyediakan Beasiswa BSM (beasiswa Miskin) dan KMC (kartu Maluku Cerdas) untuk mendorong siswa SMP/Sederajat melanjutkan sekolah ke Jenjang SMA/SMK/SLB serta mencegah Siswa Putus Sekolah (siswa aktif yg miskin);
3. Memberikan Peluang bagi siswa berprestasi untuk mendapat Beasiswa Juara;
4. Melaksanakan sosialisasi dan Perecepatan Pencairan Program PIP (Pusat) agar mencegah Siswa Putus Sekolah;
5. Melakukan sosialisasi ke masyarakat terkait kompetensi keahlian (Jurusan) bagi SMP/Sederajat yang ada di kabupaten/kota;
6. Menginstruksikan kepada sekolah untuk menganggarkan kegiatan sosialisasi serta orientasi Penerimaan Siswa Baru di SMP/MTS yang ada di kabupaten/kota masing-masing dengan dalam RKAS Dana BOSP guna melakukan penjangkaran siswa serta meningkatkan minat dan partisipasi masyarakat Usia Sekolah untuk melanjutkan sekolah ke Jenjang SMA/SMK/SLB;

7. Melakukan kajian kebutuhan guru bekerjasama dengan Kemendikbudristek melalui Aplikasi Kebutuhan Guru dan hal tersebut dipakai sebagai dasar data Seleksi PPPK Dari Tahun 2020 - 2023 (Seleksi Terakhir) dan di Tahun 2024 akan dilakukan seleksi untuk 188 Formasi;
8. Untuk menutupi Kebutuhan Guru yang mendesak maka Dinas Pendidikan berencana melakukan rekrutmen guru kontrak yang tahun ini direncanakan sekitar 537 formasi yang nantinya akan disebar sesuai kebutuhan sekolah jenjang SMA/SMK/SLB baik negeri maupun swasta.

Dalam rangka peningkatan kinerja, langkah selanjutnya yang perlu dilakukan adalah dengan memperbaiki target yang akan ditetapkan pada dokumen perencanaan periode selanjutnya. Target yang ditetapkan saat ini cenderung rendah karena realisasi HLS dan RLS telah melampaui target yang ditentukan. Perangkat daerah yang bertanggungjawab atas pencapaian sasaran strategis "Meningkatnya Akses Masyarakat Kepulauan Terhadap Pelayanan Pendidikan yang Berkualitas" adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku, dan Sekretariat Daerah Provinsi Maluku. Sedangkan anggaran Program penunjang sasaran strategis ini adalah:

Tabel 2.8.
Anggaran dan Realisasi Program Penunjang Sasaran
Meningkatnya Akses Masyarakat Kepulauan Terhadap Pelayanan
Pendidikan yang Berkualitas

No	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Program Pengelolaan Pendidikan	316,878,621,386.00	290,797,813,069.00	91.77
2	Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	21,793,588,817.00	11,161,743,800.00	51.22
3	Program Pembinaan Perpustakaan	1,130,842,200.00	952,931,909.00	84.27
Jumlah		339,803,052,403.00	302,912,488,778.00	89.14

(data sementara)

SASARAN 2

Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat Kepulauan yang Dilaksanakan secara Inklusif dan Terjangkau

Sasaran Strategis ini merupakan penjabaran terhadap Tujuan "Meningkatkan Kualitas SDM yang Sehat, Produktif, Berdaya Saing dan Berkarakter Berbasis

Budaya Inklusif". Hasil pengukuran Sasaran Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat Kepulauan yang Dilaksanakan secara Inklusif dan Terjangkau dapat dilihat pada tabel-tabel berikut:

Tabel 2.9.
Capaian Sasaran Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat Kepulauan yang Dilaksanakan secara Inklusif dan Terjangkau Tahun 2025

Indikator Kinerja		Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Usia Harapan Hidup	70,85 Tahun	71,02 Tahun	100
Rata-Rata Capaian Kinerja				100

Tabel 2.10.
Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Sasaran 2 antara Tahun 2024 s/d Tahun 2025

Kinerja		2024		2025	
		Real. Kinerja	Cap. Kinerja	Real. Kinerja	Cap. Kinerja
1	Usia Harapan Hidup	70,68 Tahun	100%	71,02 Tahun	100%

Tabel 2.11.
Perbandingan Realisasi Sasaran 2 Tahun 2024 s/d 2025 dengan Tahun Akhir periode RPD

Kinerja		Realisasi 2024	Realisasi 2025	Target Tahun Akhir RPD
1	Usia Harapan Hidup	70,68 Tahun	71,02 Tahun	71,82 Tahun

Tabel 2.12.
Perbandingan Realisasi Sasaran 2 dengan Realisasi Nasional Tahun 2025

Kinerja		Realisasi Provinsi Maluku 2025	Realisasi Nasional 2025
1	Usia Harapan Hidup	71,02 Tahun	74,47 Tahun

Usia Harapan Hidup (UHH) merupakan pembentuk Indeks Kesehatan, sedangkan indeks kesehatan sendiri adalah ukuran keberhasilan di bidang Kesehatan yang merupakan salah satu dari tiga (kesehatan, pendidikan, standar hidup layak) komponen pembentuk Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Usia Harapan Hidup (UHH) adalah rata-rata jumlah tahun yang diharapkan dapat dijalani oleh seseorang sejak lahir, berdasarkan kondisi kesehatan, sosial, dan

ekonomi saat ini. ini memberikan gambaran tentang kualitas hidup dan tingkat kesehatan masyarakat di suatu wilayah, sehingga semakin tinggi UHH pada suatu daerah menunjukkan bahwa masyarakat di wilayah tersebut memiliki akses yang baik ke layanan kesehatan, pendidikan, dan sumber daya lain yang mendukung kehidupan yang sehat. Berikut adalah beberapa faktor yang mempengaruhi UHH, antara lain:

1. Kualitas Layanan Kesehatan: Akses dan kualitas layanan kesehatan yang baik dapat meningkatkan usia harapan hidup dengan mencegah dan mengobati penyakit;
2. Gizi dan Nutrisi: Asupan gizi yang baik sangat penting untuk kesehatan dan perkembangan manusia;
3. Sanitasi dan Air Bersih: Akses ke air bersih dan sanitasi yang baik dapat mengurangi risiko penyakit menular;
4. Pendidikan: Pendidikan yang baik meningkatkan kesadaran akan pentingnya menjaga kesehatan;
5. Kondisi Ekonomi: Pendapatan yang memadai memungkinkan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, tempat tinggal, dan perawatan kesehatan; dan
6. Kondisi Lingkungan: Lingkungan yang bersih dan aman mendukung kesehatan masyarakat.

Indeks Kesehatan diperoleh berdasarkan perhitungan angka Usia Harapan Hidup (UHH) tiap kabupaten/kota di suatu provinsi. Berikut adalah rumus untuk menghitung indeks kesehatan:

$$\text{Indeks Kesehatan} = \frac{UHH - UHH_{\min}}{UHH_{\max} - UHH_{\min}}$$

Berikut adalah angka UHH kabupaten/kota se-Provinsi Maluku berdasarkan data yang dirilis oleh BPS Provinsi Maluku pada November 2025:

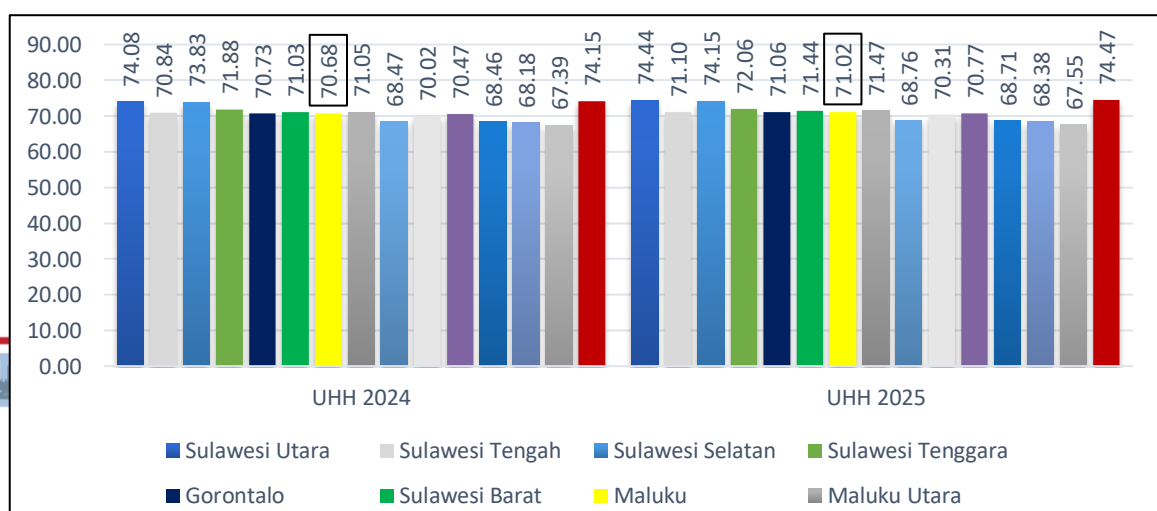
Tabel 2.13.
Angka Usia Harapan Hidup Provinsi Maluku Tahun 2021-2025

Kabupaten/Kota	Usia Harapan Hidup (LF SP2020)				
	2021	2022	2023	2024	2025
Maluku Tengah	70,36	70,58	70,83	71,01	71,28
Maluku Tenggara	70,14	70,43	70,71	70,93	71,24
Seram Bagian Timur	67,45	67,91	68,33	68,73	69,19

Seram Bagian Barat	70,10	70,51	70,88	71,18	71,58
Buru	69,73	69,95	70,19	70,34	70,56
Buru Selatan	69,54	69,85	70,11	70,28	70,54
Kepulauan Aru	69,67	69,99	70,27	70,40	70,60
Kepulauan Tanimbar	69,70	69,96	70,19	70,20	70,53
Maluku Barat Daya	68,48	68,90	69,30	69,65	70,11
Kota Ambon	72,22	72,54	72,86	73,14	73,56
Kota Tual	70,41	70,86	71,32	71,72	72,05
Maluku	69,85	70,16	70,45	70,68	71,02

Tabel diatas menunjukkan secara umum kabupaten/kota dengan Usia Harapan Hidup tertinggi dan terendah tidak mengalami perubahan sejak tahun 2021 sampai dengan tahun 2025, UHH tertinggi terdapat di kota Ambon dengan angka 73,56 sedangkan angka UHH terendah terdapat di Kabupaten Seram Bagian Timur dengan angka 69,19.

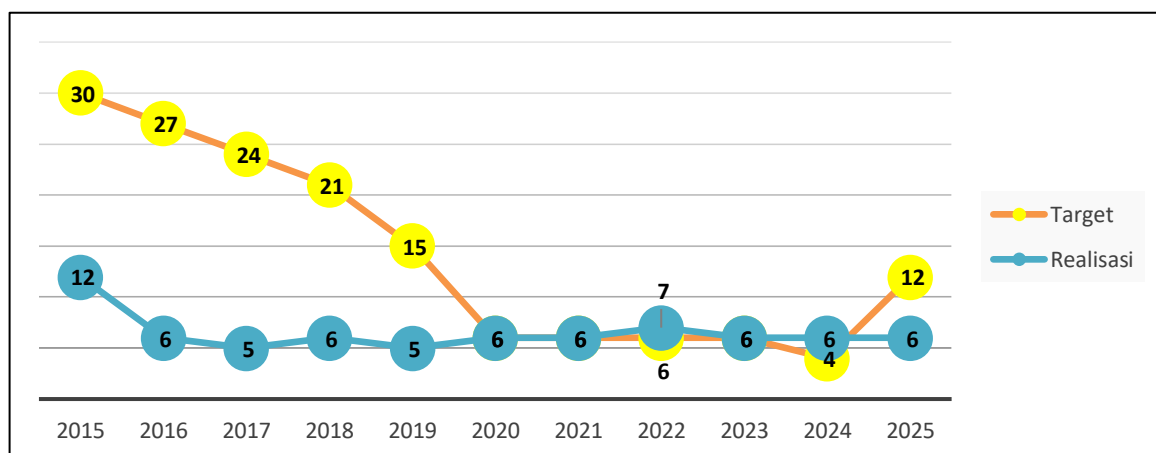
Capaian Kinerja "Usia Harapan Hidup" telah memperoleh interpretasi "sangat Memuaskan", akan tetapi untuk melihat kemajuan bidang kesehatan di Provinsi Maluku ada baiknya kita juga melihat atau membandingkan capaian indeks kesehatan beberapa provinsi lainnya di wilayah Indonesia timur sehingga kita memiliki gambaran jelas terhadap posisi bidang kesehatan Provinsi Maluku. Berikut adalah gambar UHH (LF SP2020) di Indonesia serta beberapa provinsi di wilayah Indonesia timur.



Gambar 2.3. Angka Usia Harapan Hidup di Beberapa Provinsi Wilayah Indonesia Bagian Timur Tahun 2024 dan 2025

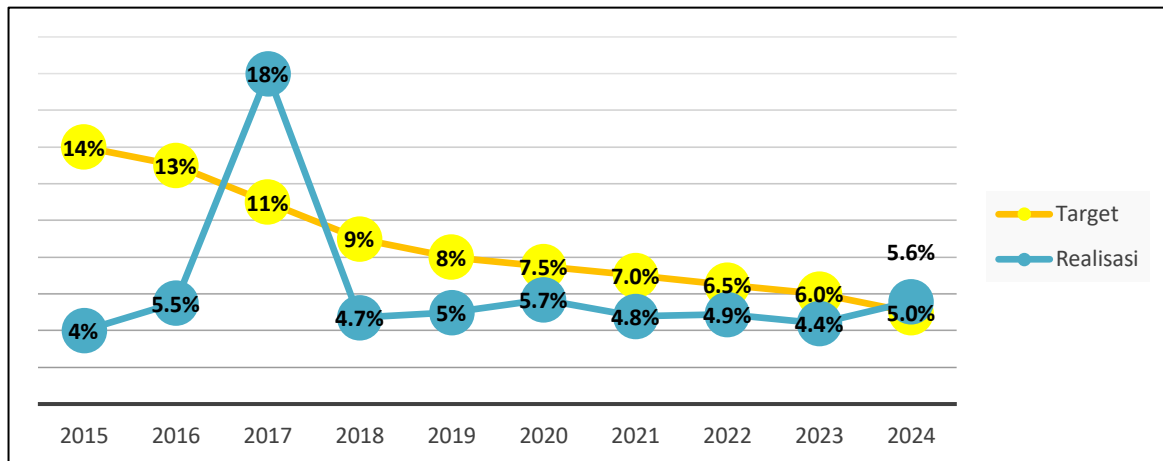
Meningkatnya Usia Harapan Hidup juga ditunjukkan melalui kesehatan lainnya yang menunjukkan tren kinerja yang lebih baik, berikut adalah beberapa kesehatan yang telah dicapai oleh Provinsi Maluku.

Angka Kematian Ibu per 100.000 Kelahiran Hidup dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2024 tidak dapat dihitung karena jumlah kelahiran hidup di Maluku belum mencapai 100.000 kejadian kelahiran dalam setahun, sehingga Angka Kematian Ibu hanya disajikan berupa jumlah kasus kematian ibu yang tercatat ditahun yang bersangkutan. Jumlah kematian ibu di Provinsi Maluku tahun 2021 sebanyak 63 kasus, tahun 2022 sebanyak 62 kasus, tahun 2023 sebanyak 76 kasus, tahun 2024 sebanyak 68 kasus, dan tahun 2025 sebanyak 59 kasus.

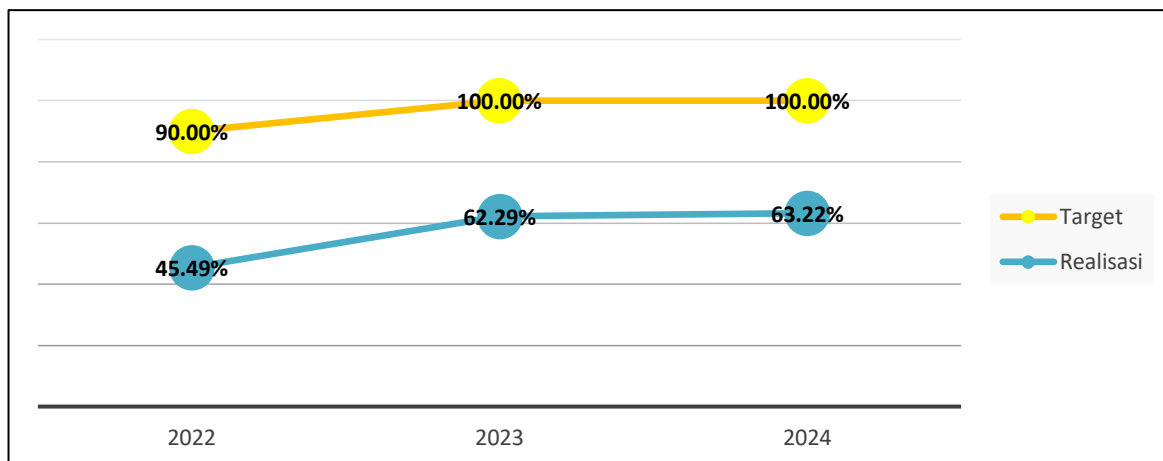


Gambar 2.4. Angka Kematian Bayi/1.000 Kelahiran Hidup di Provinsi Maluku Tahun 2015 - 2025

Angka Kematian Bayi per 1.000 Kelahiran Hidup dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2024 telah berhasil mencapai target yang ditetapkan, AKB Provinsi Maluku cenderung stabil diangka 6 kasus kematian pertahun sejak tahun 2017 lalu sampai dengan tahun 2025. Tahun 2025 sampai dengan tahun 2029, target AKB Provinsi Maluku menggunakan target yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat, sehingga terdapat lonjakan target jika dibandingkan capaian kinerja yang telah dicapai oleh Pemerintah Provinsi Maluku selama ini.



Gambar 2.5. Prevalensi Balita Gizi Kurang di Provinsi Maluku Tahun 2015 – 2024



Gambar 2.6. Cakupan Pelayanan Kesehatan Lanjut Usia di Provinsi Maluku Tahun 2022 – 2024

Dalam faktor kesehatan Pemerintah Provinsi Maluku telah berupaya untuk meningkatkan Angka Harapan Hidup, seperti Penguatan Pelayanan Kesehatan berbasis Siklus Hidup (Life Cycle) diantaranya Melakukan Penguatan Konseling, Informasi & Edukasi kepada Tenaga Kesehatan serta Masyarakat melalui Promosi Kesehatan, Peningkatan Kesehatan Ibu Hamil, Ibu Melahirkan dan Anak dalam rangka 1000 hari pertama kehidupan, Perbaikan Gizi Masyarakat guna pencegahan Stunting dan peningkatan status gizi masyarakat, Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit serta Pelayanan Kesehatan bagi Lanjut Usia.

Angka Harapan Hidup bisa berbeda dari masa ke masa, bahkan juga berbeda pada tiap daerah. Perbedaan angka harapan hidup ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, mulai dari lingkungan, status kesehatan, hingga status ekonomi (Angka Kemiskinan). Faktor lingkungan Provinsi Maluku masih tergolong baik hal ini dibuktikan melalui hasil pengukuran Indeks Lingkungan Hidup (IKLH) Provinsi Maluku di Tahun 2025 yang mendapat angka 78,83. Namun lain halnya jika

melihat faktor ekonomi di Provinsi Maluku yang mana angka penduduk miskin cenderung masih belum bisa ditekan sesuai dengan target yang diinginkan. Oleh karena itu, untuk meningkatkan Usia Harapan Hidup dibutuhkan kerjasama semua pihak terkhusus stakeholder bidang perekonomian, mengingat secara umum bidang kesehatan telah menunjukkan kinerja yang sangat memuaskan. Perangkat daerah yang bertanggungjawab atas pencapaian sasaran strategis “Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat Kepulauan yang Dilaksanakan secara Inklusif dan Terjangkau” adalah Dinas Kesehatan Provinsi Maluku. Sedangkan anggaran Program penunjang sasaran strategis ini adalah:

Tabel 2.14.

**Anggaran dan Realisasi Program Penunjang Sasaran
Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat Kepulauan yang Dilaksanakan
secara Inklusif dan Terjangkau**

No	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	147,589,377,054.00	40,896,337,664.00	27.71
2	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	18,335,778,181.00	0	-
3	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	808,220,200.00	670,464,152.00	82.96
4	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	295,524,200.00	165,904,096.00	56.14
5	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	30,917,000.00	24,737,000.00	80.01
Jumlah		167,059,816,635.00	41,757,442,912.00	25.00

(data sementara)

SASARAN 3

Meningkatnya Peran Pemuda dalam Pembangunan dan Peningkatan Prestasi Olahraga

Sasaran Strategis ini merupakan penjabaran terhadap Tujuan “Meningkatkan Kualitas SDM yang Sehat, Produktif, Berdaya Saing dan Berkarakter Berbasis Budaya Inklusif”. Hasil pengukuran Sasaran Meningkatkan Peran Pemuda dalam

Pembangunan dan Peningkatan Prestasi Olahraga dapat dilihat pada tabel-tabel berikut:

Tabel 2.15.
Capaian Sasaran Meningkatnya Peran Pemuda dalam Pembangunan dan Peningkatan Prestasi Olahraga Tahun 2025

Indikator Kinerja		Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Indeks Pembangunan Pemuda	58,11	54,67*	94,08
2	Indeks Pembangunan Olahraga	0,364	0,320*	87,91
Rata-Rata Capaian Kinerja				90,99

* Nilai Indeks Pembangunan Pemuda Tahun 2024

* Nilai Indeks Pembangunan Olahraga Tahun 2024

Tabel 2.16.
Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Sasaran 3 antara Tahun 2024 s/d Tahun 2025

Kinerja		2024		2025	
		Real. Kinerja	Cap. Kinerja	Real. Kinerja	Cap. Kinerja
1	Indeks Pembangunan Pemuda	54,67	94,08%	54,67*	94,08%
2	Indeks Pembangunan Olahraga	0,320	78,43%	0,320*	87,91%

Tabel 2.17.
Perbandingan Realisasi Sasaran 3 Tahun 2024 s/d 2025 dengan Tahun Akhir periode RPD

Kinerja		Realisasi 2024	Realisasi 2025	Target Tahun Akhir RPD
1	Indeks Pembangunan Pemuda	54,67	54,67*	58,97
2	Indeks Pembangunan Olahraga	0,320	0,320*	0,32

Tabel 2.18.
Perbandingan Realisasi Sasaran 3 dengan Realisasi Nasional Tahun 2025

Kinerja		Realisasi Provinsi Maluku 2025	Realisasi Nasional 2025
1	Indeks Pembangunan Pemuda	54,67*	58,33*

2	Indeks Pembangunan Olahraga	0,320*	0,334*
---	-----------------------------	--------	--------

Target kinerja “Indeks Pembangunan Pemuda (IPP)” yang ingin dicapai di tahun 2025 adalah 58,11, nilai IPP yang terkini adalah IPP Tahun 2024 yang dikeluarkan oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga pada Oktober 2025 oleh karena itu perhitungan capaian menggunakan data realisasi IPP tahun 2024 yakni sebesar 54,67 sehingga capaian kinerjanya adalah 87,91% atau dengan capaian kinerja masuk kedalam kategori “Memuaskan”.

Target kinerja “Indeks Pembangunan Olahraga (IPO)” yang ingin dicapai di tahun 2025 adalah 0,364, nilai IPO yang terkini adalah IPO Tahun 2024 yang dikeluarkan oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga pada Desember 2024 oleh karena itu perhitungan capaian menggunakan data realisasi IPO tahun 2024 yakni sebesar 0,320 sehingga capaian kinerjanya adalah 94,08% atau dengan capaian kinerja masuk kedalam kategori “Sangat Memuaskan”.

Berdasarkan rata-rata capaian kinerja kedua kinerja Sasaran Meningkatnya Peran Pemuda dalam Pembangunan dan Peningkatan Prestasi Olahraga maka capaian kinerja sasaran ini adalah sebesar 90,99% atau dengan capaian kinerja masuk kedalam kategori “Sangat Memuaskan”.

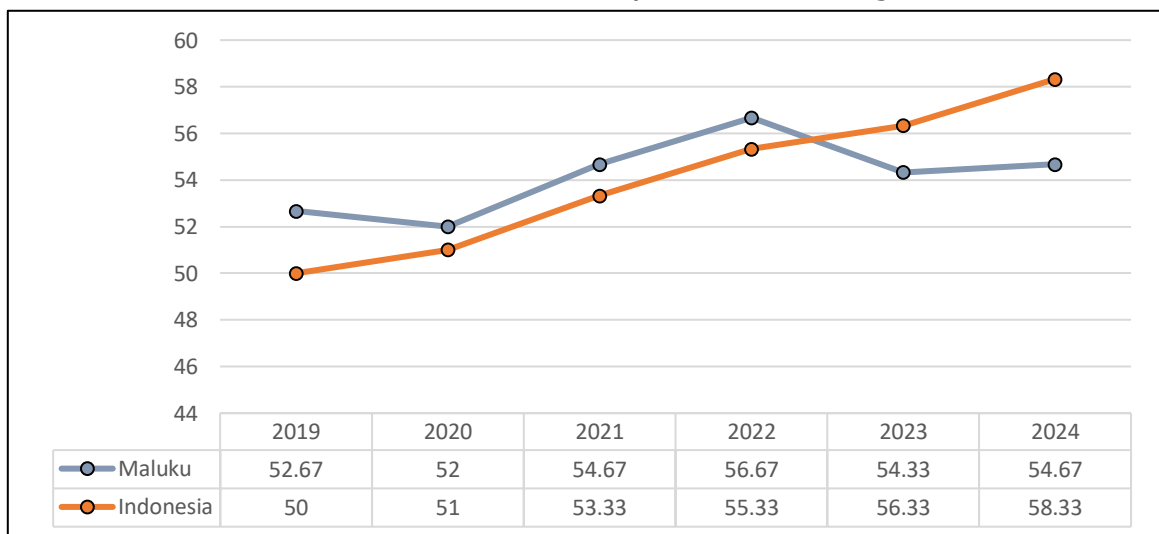
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan mengategorikan pemuda sebagai warga Negara berusia 16 hingga 30 tahun yang memasuki periode penting pertumbuhan dan perkembangan. Hal ini berarti bahwa rentang usia pemuda mencakup masa transisi mereka dari dunia pendidikan ke dunia kerja, serta transisi menuju kemandirian sosial dan politik. Secara demografis, rentang tersebut juga menjadikan pemuda masuk ke dalam kelompok usia produktif. Sebagai generasi yang dihimpit oleh generasi di bawah dan di atasnya, pemuda dituntut untuk menanggung beban kelompok usia tidak produktif. Untuk itu, sebagai bagian dari kelompok usia produktif, pemuda dituntut untuk tidak hanya unggul secara kuantitas, tetapi juga harus unggul secara kualitas dan berdaya saing.

Membangun pemuda tidak hanya berarti membangun individu pemuda, tetapi juga membangun lingkungan sekitar yang menjadi sumber penghidupan bagi mereka. Oleh karena itu, pembangunan pemuda harus bersifat lintas bidang yang menyentuh aspek pendidikan, kesehatan, kesejahteraan, pekerjaan, partisipasi, politik, dan kesetaraan gender. Pembangunan pemuda juga harus berpegang pada prinsip bahwa pemuda adalah objek dan sekaligus subjek pembangunan. Selain itu, mengingat kondisi antar individu atau kelompok pemuda tidak homogen, perlu dipastikan bahwa hasil dari pembangunan pemuda bisa dinikmati secara merata oleh setiap kelompok, baik laki-laki maupun perempuan.

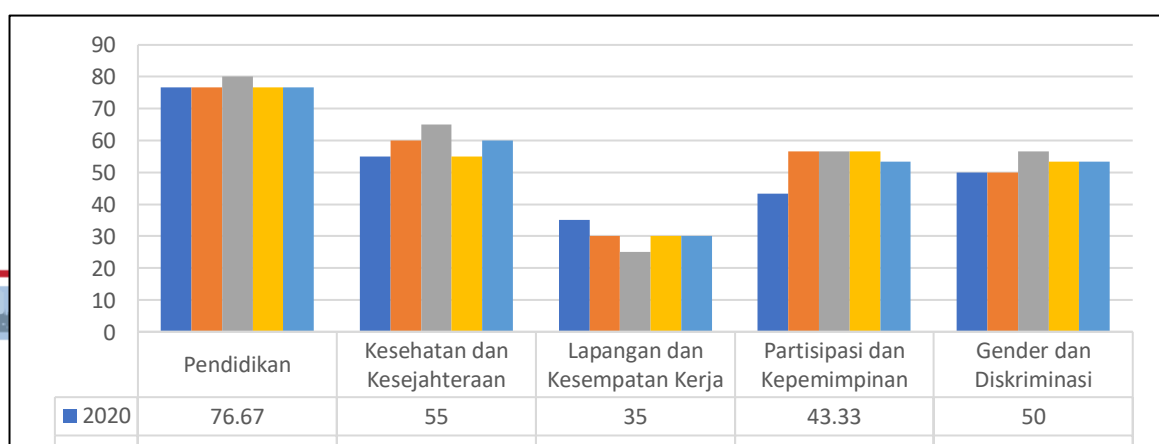
Nilai Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) didapat dari pengolahan data 5 domain utama yakni:

- Domain 1 Pendidikan yang terdiri dari X1 (rata-rata lama sekolah), X2 (APK sekolah menengah), X3 (APK perguruan tinggi);
- Domain 2 Kesehatan dan Kesejahteraan yang terdiri dari X4 (angka kesakitan pemuda), X5 (persentase pemuda korban kejahatan), X6 (persentase pemuda yang merokok), X7 (persentase remaja perempuan yang sedang hamil);
- Domain 3 Kesempatan dan Lapangan Kerja yang terdiri dari X8 (persentase pemuda wirausaha kerah putih), X9 (TPT pemuda);
- Domain 4 Partisipasi dan Kepemimpinan yang terdiri dari X10 (persentase pemuda yang mengikuti kegiatan sosial kemasyarakatan), X11 (persentase pemuda yang aktif dalam organisasi), X12 (persentase pemuda yang memberikan saran/pendapat dalam rapat);
- Domain 5 Gender dan Diskriminasi yang terdiri dari X13 (angka perkawinan usia anak), X14 (persentase pemuda perempuan yang sedang menempuh pendidikan tingkat SMA ke atas), X15 (persentase pemuda perempuan yang bekerja di sektor formal).

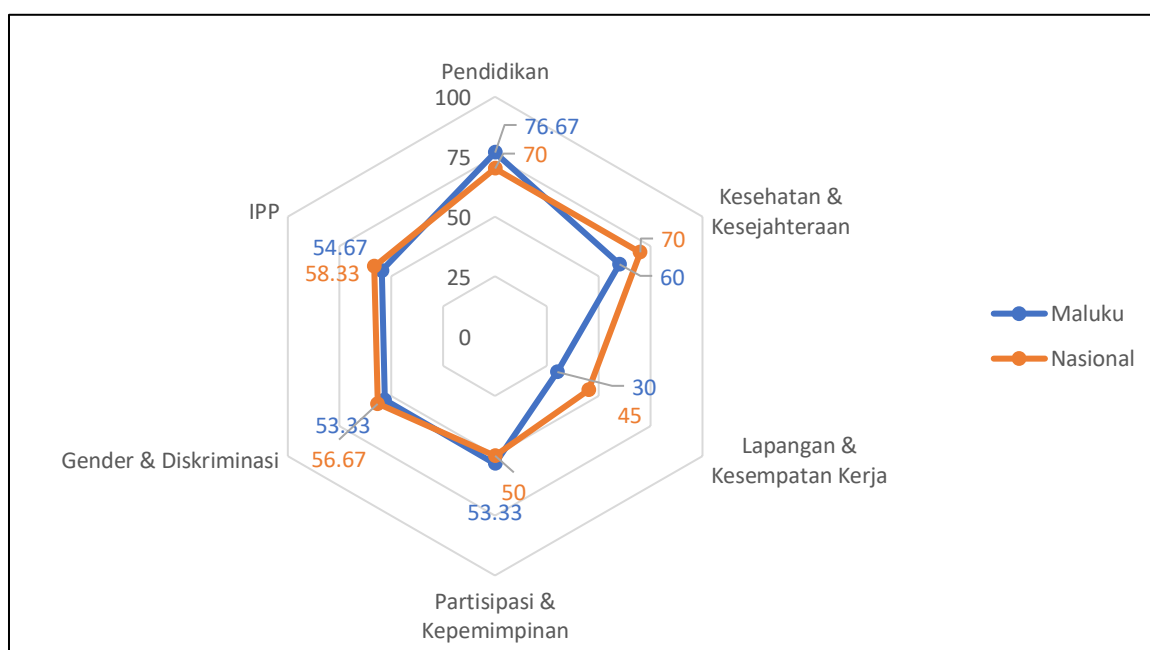
Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) Provinsi Maluku di tahun 2024 mengalami peningkatan 0,34 poin dari nilai IPP Tahun 2023 yakni sebesar 54,33, namun jika dibandingkan dengan rerata IPP Nasional Tahun 2024 yang sebesar 58,33 maka masih terdapat selisih 3,66 poin. Berikut adalah nilai IPP Provinsi Maluku dari tahun 2019-2024 dan IPP Provinsi wilayah Indonesia bagian timur:



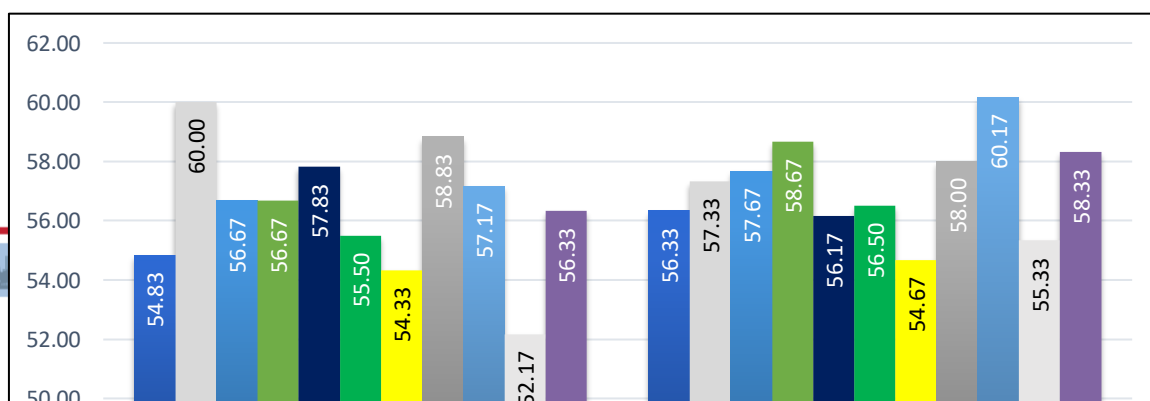
Gambar 2.7. Nilai Indeks Pembangunan Pemuda Provinsi Maluku dan Indonesia Tahun 2019-2024



**Gambar 2.8. Nilai Domain Indeks Pembangunan Pemuda
Provinsi Maluku Tahun 2020-2024**



**Gambar 2.9. Nilai Domain Indeks Pembangunan Pemuda
Provinsi Maluku Tahun 2024 dan Nasional 2024**



Gambar 2.10. Indeks Pembangunan Pemuda di Beberapa Provinsi Wilayah Indonesia Bagian Timur Tahun 2023 dan 2024

Profil Indeks Pembangunan Pemuda yang dirilis oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga pada Oktober 2025 menyatakan bahwa tantangan utama pembangunan pemuda di Provinsi Maluku terletak pada domain Kesehatan dan Kesejahteraan, domain Lapangan dan Kesempatan Kerja, dan domain Gender dan Diskriminasi yang secara nilai ketiga domain tersebut dibawah nilai rata-rata nasional.

Domain Kesehatan dan Kesejahteraan yang nilainya dibawah dari rata-rata nasional adalah Pemuda Korban Kejahatan, nilai Provinsi Maluku sebesar 0,6 sedangkan rata-rata nasional adalah 0,47; Persentase Remaja Hamil, nilai Provinsi Maluku sebesar nilai 32,79 rata-rata nilai nasional sebesar 10,77.

Domain Lapangan dan Kesempatan Kerja terdapat dua yang mana kedua tersebut memiliki nilai dibawah rata-rata nasional, yakni Persentase Pemuda Kerah Putih dengan nilai 0,19 sedangkan rata-rata nasional adalah 0,47; Tingkat Pengangguran Terbuka Pemuda dengan nilai 14,26 sedangkan rata-rata nasional adalah 14,26.

Domain Partisipasi dan Kepemimpinan yang nilainya dibawah dari rata-rata nasional adalah Pemuda Berpendapat dalam Rapat, nilai Provinsi Maluku adalah 7,26 sedangkan rata-rata nasional adalah 8,66.

Domain Gener dan Diskriminasi yang nilainya dibawah dari rata-rata nasional adalah Pemuda Perempuan Bekerja di Sektor Formal, nilai Provinsi Maluku adalah 15,76 sedangkan rata-rata nasional adalah 26,41.

Dengan melihat kondisi kekurangan pada beberapa domain tersebut maka langkah kebijakan yang akan dilakukan pada tahun-tahun mendatang adalah:

- 1) Penyediaan anggaran serta tenaga ahli untuk pendampingan kepada remaja/pemuda korban kejahatan, remaja/pemuda penyandang HIV/AIDS;
- 2) Pelayanan kepada remaja Perempuan yang sedang hamil dengan pelayanan kesehatan usia produktif dan pelayanan kesehatan penyakit menular dan tidak menular; dan

- 3) Pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja berdasarkan klaster kompetensi dengan sarana dan prasarana yang lebih memadai.

Meskipun pemerintah memiliki peran sentral dalam menciptakan lapangan kerja baru, namun disadari dengan sungguh bahwa menciptakan lapangan pekerjaan suatu pekerjaan yang berat sehingga memerlukan sinergitas seluruh stakeholder yang ada. Oleh karena itu, peran swasta, masyarakat serta individu juga sangat penting dalam menciptakan lapangan pekerjaan yang berkelanjutan terkhusus pada sektor unggulan di Provinsi Maluku seperti perikanan, perkebunan, dan pariwisata.

Indeks Pembangunan Olahraga (IPO) merupakan komposit yang terdiri dari 9 (sembilan) dimensi, yakni masing-masing sebagai berikut:

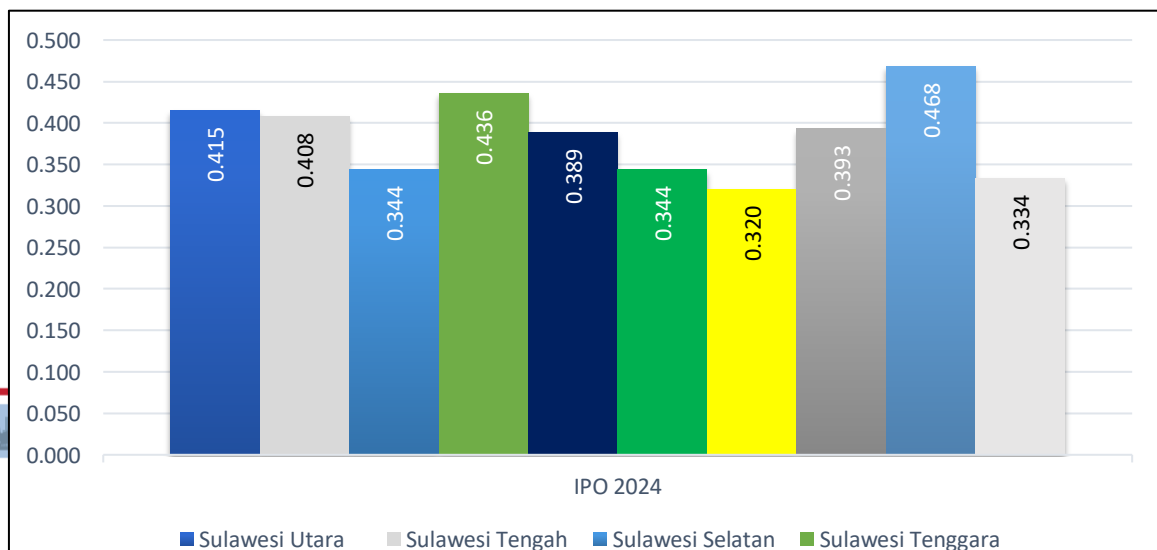
1. SDM olahraga merujuk pada pelatih, guru pendidikan jasmani, instruktur, dan relawan olahraga yang merupakan komponen utama dalam sistem pembinaan dan pengembangan olahraga. SDM olahraga di suatu wilayah adalah rasio jumlah pelatih, guru pendidikan jasmani, instruktur, dan relawan olahraga dengan jumlah penduduk usia 5 tahun ke atas di wilayah tersebut;
2. Ruang terbuka olahraga adalah suatu tempat yang digunakan untuk melakukan aktivitas olahraga, baik *indoor* maupun *outdoor*. ruang terbuka olahraga di suatu wilayah adalah rasio antara ketersediaan ruang terbuka dengan jumlah penduduk usia 5 tahun ke atas di wilayah tersebut;
3. Literasi fisik adalah serangkaian pengetahuan, keterampilan, keterlibatan dan tanggungjawab seseorang dalam melakukan aktivitas fisik untuk hidup yang berkualitas sepanjang hayat. utama literasi fisik adalah pengetahuan, sikap dan kompetensi fisik dari individu;
4. Parsipasi adalah keterlibatan individu dalam olahraga/aktivitas fisik dalam satu pekan terakhir. partisipasi aktif merujuk pada angka partisipasi anggota masyarakat berusia 10 – 60 tahun yang melakukan aktivitas olahraga minimal tiga kali tiap pekan;
5. Kebugaran didefinisikan sebagai kesanggupan tubuh untuk melakukan aktivitas tanpa mengalami kelelahan yang berarti. kebugaran adalah angka kebugaran yang ditunjukkan dengan V02Max, yakni berupa derajat kapasitas konsumsi aerobik maksimum, semakin tinggi V02Max seseorang menunjukkan tingkat kebugaran yang semakin tinggi;
6. Kesehatan mencakup sehat secara fisik dan psikis yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif. Seseorang dinyatakan sehat secara fisik jika terbebas dari penyakit dan mampu bekerja secara produktif. Sehat secara psikis yakni suatu kondisi dimana individu dapat bertindak secara otonom, dapat menerima kelebihan dan kekurangan dirinya, dan memiliki tujuan hidup yang jelas;
7. Perkembangan personal adalah aspek-aspek kepribadian yang dibutuhkan seseorang untuk menjalani kehidupan yang konstruktif, baik sebagai pribadi

maupun anggota masyarakat. Terdapat dua aspek yang diukur di ini yakni resilien dan modal sosial. Resilien adalah kemampuan untuk beradaptasi terhadap perubahan dan ketangguhan dalam menghadapi kesulitan (Connor & Davidson, 2003; Luthans et al., 2004). Modal sosial adalah perasaan bersama sebagai warga bangsa yang memungkinkan mereka percaya satu sama lain (Degenne, 2004; Forrest & Kearns, 2001);

8. Ekonomi adalah pengeluaran individu terkait aktivitas olahraga, baik dalam bentuk barang (raket, *stick* atau pemukul, *glove*, bola, dan sebagainya) maupun jasa (pembelian tiket, konsultan/jasa pelatih) dalam satu tahun; dan
9. Performa adalah capaian olahragawan atau sekelompok olahragawan termasuk penyandang disabilitas sebagai hasil dari pembinaan olahraga prestasi prioritas DBON pada suatu wilayah. Indikator performa diukur dengan 2 (dua) hal yakni, perolehan medali dalam suatu kejuaraan dan populasi atlet elit disuatu daerah.

Berikut adalah capaian IPO Provinsi Maluku Tahun 2024 dan IPO Provinsi wilayah Indonesia bagian timur:

Dimensi									IPO
SDM	RT	LT	PAR	KEB	KES	PP	EKO	PERF	
0,039	0,168	0,573	0,320	0,262	0,438	0,536	0,533	0,015	0,320



Gambar 2.11. Indeks Pembangunan Olahraga di Beberapa Provinsi Wilayah Indonesia Bagian Timur Tahun 2024

Indeks Pembangunan Pemuda merupakan salah satu komposit yang capaian butuh peran dari berbagai perangkat daerah lintas sektoral untuk mencapai target yang telah ditentukan, perangkat daerah yang bertanggungjawab atas pencapaian sasaran strategis “Meningkatnya Peran Pemuda dalam Pembangunan dan Peningkatan Prestasi Olahraga” adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan; Dinas Kesehatan; Dinas Koperasi dan UKM; Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa; Dinas Pemuda dan Olahraga; dan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Sedangkan anggaran Program penunjang sasaran strategis ini adalah:

Tabel 2.19.
Anggaran dan Realisasi Program Penunjang Sasaran
Meningkatnya Peran Pemuda dalam Pembangunan dan
Peningkatan Prestasi Olahraga

No	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Program Pengembangan Daya Saing Keolahragaan	12,643,636,620.00	11,159,992,732.00	88.27
2	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	19,284,597,900.00	19,099,792,000.00	99.04
3	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	31,285,000.00	31,000,000.00	99.09
Jumlah		31,959,519,520.00	30,290,784,732.00	94.78

(data sementara)

SASARAN 4

Muwujudkan Pembangunan Daerah Berbasis Kebudayaan

Sasaran Strategis ini merupakan penjabaran terhadap Tujuan “Meningkatkan Kualitas SDM yang Sehat, Produktif, Berdaya Saing dan Berkarakter Berbasis Budaya Inklusif”. Hasil pengukuran Sasaran Muwujudkan Pembangunan Daerah Berbasis Kebudayaan dapat dilihat pada tabel-tabel berikut:

Tabel 2.20.
Capaian Sasaran Muwujudkan Pembangunan Daerah Berbasis Kebudayaan Tahun 2025

Indikator Kinerja		Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Indeks Pembangunan Kebudayaan	53,65	57,27*	100
Rata-Rata Capaian Kinerja				100

* Nilai Indeks Pembangunan Kebudayaan Tahun 2024

Tabel 2.21.
Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Sasaran 4 antara Tahun 2024 s/d Tahun 2025

Kinerja		2024		2025	
		Real. Kinerja	Cap. Kinerja	Real. Kinerja	Cap. Kinerja
1	Indeks Pembangunan Kebudayaan	57,27	100%	57,27*	100%

Tabel 2.22.
Perbandingan Realisasi Sasaran 4 Tahun 2024 s/d 2025 dengan Tahun Akhir periode RPD

Kinerja		Realisasi 2024	Realisasi 2025	Target Tahun Akhir RPD
1	Indeks Pembangunan Kebudayaan	57,27	-	53,53

Tabel 2.23.
Perbandingan Realisasi Sasaran 4 dengan Realisasi Nasional Tahun 2025

Kinerja		Realisasi Provinsi Maluku 2025	Realisasi Nasional 2025
1	Indeks Pembangunan Kebudayaan	57,27*	59,98*

Target kinerja “Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)” yang ingin dicapai ditahun 2025 adalah 53,65, belum terdapat realisasi Indeks Pembangunan Kebudayaan Tahun 2025 sehingga realisasi kinerjanya menggunakan Indeks Pembangunan Kebudayaan Tahun 2024 yang dirilis oleh Kementerian Kebudayaan pada Desember 2025. Indeks Pembangunan Kebudayaan Provinsi Maluku Tahun 2024 adalah 57,27 sehingga capaiannya adalah 106,74%, untuk memudahkan interpretasi penilaian kinerja tersebut dibulatkan mendaji 100%

atau dengan skala nilai peringkat kinerja masuk kedalam kategori “Sangat Memuaskan”.

Walaupun nilai IPK Tahun 2024 telah dirilis oleh Pemerintah Pusat namun nilai masing-masing Dimensi IPK belum dapat diketahui dikarenakan salinan Keputusan Menteri Kebudayaan Nomor 215/M/2025 tertanggal 23 Desember 2025 belum dapat diakses secara luas.

Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) adalah suatu alat ukur yang digunakan untuk menilai kinerja pembangunan kebudayaan di Indonesia. IPK memberikan gambaran tentang bagaimana kebudayaan dikelola, dilestarikan, dan dikembangkan dalam suatu masyarakat serta untuk melihat kontribusi kebudayaan dalam pembangunan nasional dan kesejahteraan masyarakat.

Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) dirancang berdasarkan kerangka kerja Culture for Development Indicators (CDIs) yang dikembangkan oleh UNESCO. Dalam kerangka ini IPK terdiri dari 31 (tiga puluh satu) yang dikelompokkan ke dalam 7 (tujuh) dimensi yakni Dimensi Ekonomi Budaya (1) dengan bobot 10%; Dimensi Pendidikan (6) dengan bobot 12%; Dimensi Ketahanan Sosial Budaya (8) dengan bobot 20%; Dimensi Warisan Budaya (6) dengan bobot 25%; Dimensi Ekspresi Budaya (4) dengan bobot 10%; Dimensi Budaya Literasi (3) dengan bobot 10%; dan Dimensi Gender (3) dengan bobot 5%. Berikut adalah skor IPK Provinsi Maluku dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2024.

Tabel 2.24.
Indeks Pembangunan Kebudayaan Provinsi Maluku
Tahun 2018 s./d. Tahun 2024

Nama Dimensi	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Ekonomi Budaya	11,11	13,53	6,84	14,95	3,81	11,84	n.a.
Pendidikan	67,85	75,02	70,68	65,69	71,77	70,69	n.a.
Ketahanan Sosial Budaya	78,87	75,11	75,15	78,75	80,7	81,99	n.a.
Warisan Budaya	36,33	37,12	35,48	47,51	48,52	58,33	n.a.
Ekspresi Budaya	31,23	31,32	30,32	39,49	45,09	43,29	n.a.
Budaya Literasi	47,91	50,13	52,53	47,81	51,88	54,34	n.a.
Gender	65,26	65,96	64,61	64,85	63,39	66,36	n.a.
IPK Maluku	49,91	52,1	50,23	54,23	55,87	59,38	57,27

Secara umum nilai IPK Provinsi Maluku Tahun 2024 mengalami penurunan dibandingkan dengan IPK Tahun 2023, namun belum dapat diketahui Dimensi apa serta sebab penurunan tersebut. Oleh karena Pemerintah Provinsi Maluku

belum dapat merumuskan kebijakan yang perlu diambil untuk memperbaiki kinerja tersebut. Hal ini penting untuk dilakukan karena pembangunan kebudayaan merupakan salah satu penunjang utama dalam peningkatan sektor pariwisata.

Dimensi Ketahanan Sosial Budaya merupakan dimensi dengan nilai tertinggi diantara dimensi lainnya, hal ini dikarenakan masyarakat Maluku menekankan kekeluargaan yang didasari oleh hubungan darah, teritorial, dan ungkapan persaudaraan. Alhasil, di Maluku terdapat budaya pela gandong yang berarti semua bersaudara, warga Maluku memiliki hubungan darah, tetapi dipisahkan pada masa penjajahan. Faktor keberhasilan selanjutnya adalah kolaborasi dan komunikasi yang baik antara pemerintah daerah bersama aparat keamanan, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda serta seluruh stakeholder lainnya dalam mengantisipasi, memediasi masalah-masalah kantrantibmas yang muncul di masyarakat.

Sedangkan dimensi dengan nilai terendah adalah Dimensi Ekonomi Budaya dengan kinerja yakni adalah "Persentase penduduk 15 tahun ke atas yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukan seni yang menjadikan keterlibatannya itu sebagai sumber penghasilan". Ini menunjukkan bahwa, walaupun sektor pariwisata serta kebudayaan dan kesenian yang sangat beragam merupakan salah potensi utama perekonomian di Maluku, kenyataannya potensi tersebut belum terkelola secara maksimal. Akibatnya, sektor ini belum mampu menarik minat masyarakat untuk menjadikan bidang budaya maupun seni sebagai mata pencarian utama.

Oleh karena itu, diperlukan langkah strategis untuk memaksimalkan potensi yang ada, terutama melalui pengembangan pariwisata berbasis budaya dan kearifan lokal seperti penyelenggaraan event budaya yang dikemas menjadi daya tarik wisata unggulan dan penjadwalan serta promosi event seni budaya yang terkoordinasi sehingga menghindari penyelenggaraan seni budaya diwaktu yang bersamaan.

Perangkat daerah yang bertanggungjawab atas pencapaian sasaran strategis "Muwujudkan Pembangunan Daerah Berbasis Kebudayaan" adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Sedangkan anggaran Program penunjang sasaran strategis ini adalah:

Tabel 2.25.

**Anggaran dan Realisasi Program Penunjang Sasaran
Muwujudkan Pembangunan Daerah Berbasis Kebudayaan**

No	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Program Pengembangan Kebudayaan	1,215,449,500.00	420,660,720.00	34.61
2	Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	3,895,172,200.00	1,275,251,079.00	32.74

No	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
3	Program Pengembangan Kesenian Tradisional	1,384,211,060.00	1,055,483,060.00	76.25
4	Program Pembinaan Sejarah	258,484,000.00	8,660,000.00	3.35
5	Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno	36,600,000.00	11,659,000	31.86
6	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	136,539,260.00	136,539,260.00	100.00
Jumlah		6,926,456,020.00	2,908,253,119.00	41.99

(data sementara)

SASARAN 5**Meningkatnya Pembangunan SDM yang Berkualitas**

Sasaran Strategis ini merupakan penjabaran terhadap Tujuan “Meningkatkan Kualitas SDM yang Sehat, Produktif, Berdaya Saing dan Berkarakter Berbasis Budaya Inklusif”. Hasil pengukuran Sasaran Meningkatkan Pembangunan SDM yang Berkualitas dapat dilihat pada tabel-tabel berikut:

Tabel 2.26.
Capaian Sasaran Meningkatkan Pembangunan SDM yang Berkualitas Tahun 2025

Indikator Kinerja		Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Indeks Pembangunan Gender	93,58	93,79*	100
Rata-Rata Capaian Kinerja				100

* Nilai Indeks Pembangunan Gender Tahun 2024

Tabel 2.27.
Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Sasaran 5 antara Tahun 2024 s/d Tahun 2025

Kinerja		2024		2025	
		Real. Kinerja	Cap. Kinerja	Real. Kinerja	Cap. Kinerja
1	Indeks Pembangunan Gender	93,79	99,77%	93,79*	100%

Tabel 2.28.
Perbandingan Realisasi Sasaran 5 Tahun 2024 s/d 2025 dengan Tahun Akhir periode RPD

Kinerja		Realisasi 2024	Realisasi 2025	Target Tahun Akhir RPD
1	Indeks Pembangunan Gender	93,79	93,79*	93,70

Tabel 2.29.

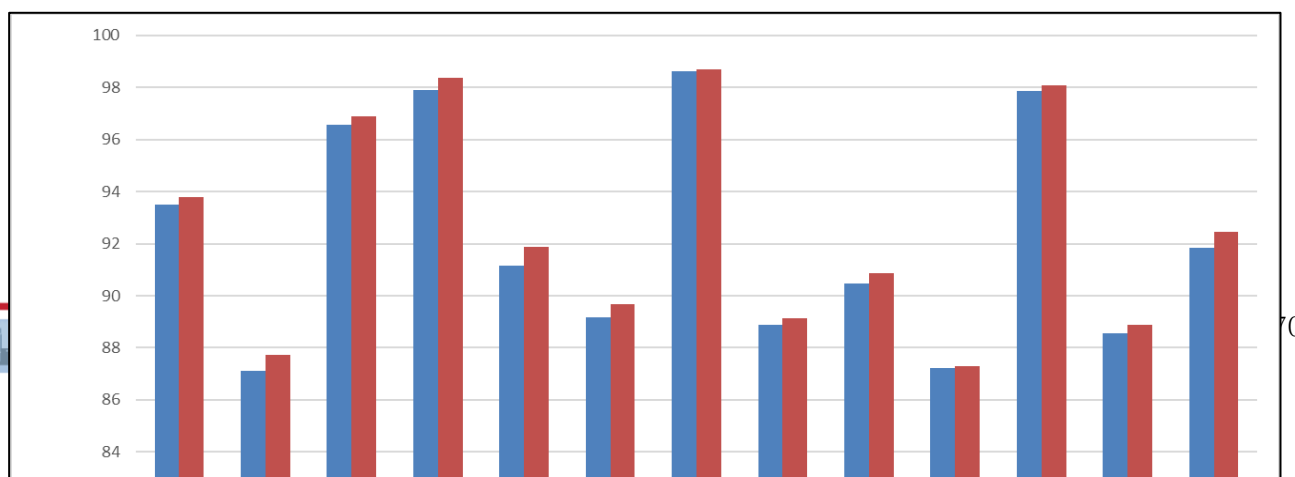
**Perbandingan Realisasi Sasaran 5
Tahun 2025 dengan Realisasi Nasional Tahun 2025**

Kinerja		Realisasi Provinsi Maluku	Realisasi Nasional
1	IPG (Indeks Pembangunan Gender)	93,79*	92,46*

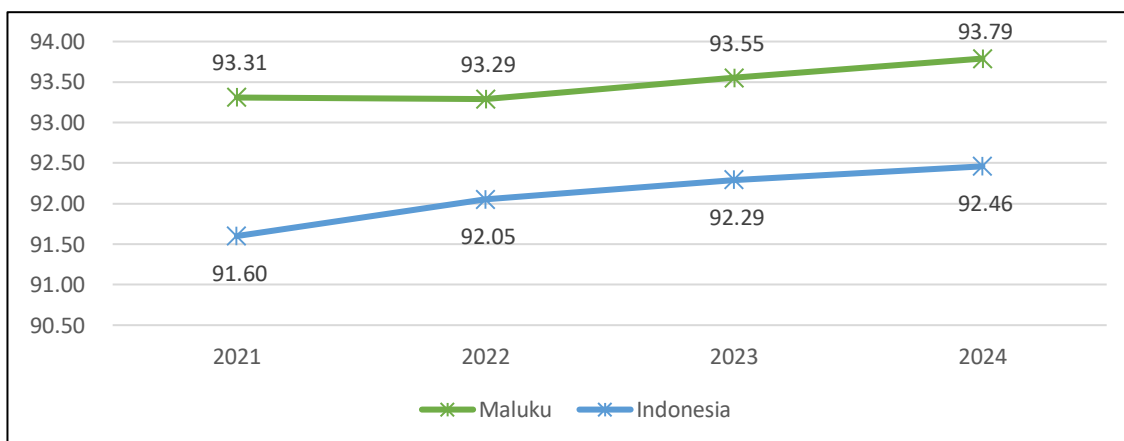
Target kinerja “Indeks Pembangunan Gender (IPG)” yang ingin dicapai di tahun 2025 adalah 93,58, nilai IPG yang terkini adalah IPG Tahun 2024 yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik pada Desember 2025 oleh karena itu perhitungan capaian menggunakan data realisasi IPG tahun 2024 yakni sebesar 93,79 sehingga capaian kinerjanya adalah 100,22%, untuk memudahkan interpretasi penilaian kinerja capaian kinerja tersebut dibulatkan menjadi 100% atau skala nilai peringkat kinerja masuk kedalam kategori “Sangat Memuaskan”. Indeks Pembangunan Gender (IPG) digunakan untuk mengukur pencapaian dimensi dan variabel yang sama seperti Indeks Pembangunan Manusia (IPM), tetapi mengungkapkan ketidakadilan pencapaian laki-laki dan perempuan. Dengan demikian IPG adalah perbandingan IPM Laki-Laki dengan IPM Perempuan, berikut adalah rumus dalam menghitung IPG:

$$IPG = \frac{IPM \text{ Perempuan}}{IPM \text{ Laki-Laki}}$$

Indeks Pembangunan Manusia (IPM), menurut United Nations Development Programme (UNDP), adalah indeks yang mengukur capaian pembangunan manusia berbasis pada komponen dasar kualitas hidup manusia. Komponen dasar kualitas hidup manusia dilihat melalui pendekatan 3 (tiga) dimensi dasar yang diukur dari 4 (empat). Tiga dimensi dasar dan empat tersebut adalah dimensi kesehatan dengan Angka Harapan Hidup (AHH); Dimensi pendidikan dengan Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) dan Harapan Lama Sekolah (HLS); Dimensi pengeluaran dengan Pengeluaran Perkapita. Berikut adalah capaian IPG dan capaian IPM Laki-Laki dan Perempuan Provinsi Maluku Tahun 2023 dan 2024:

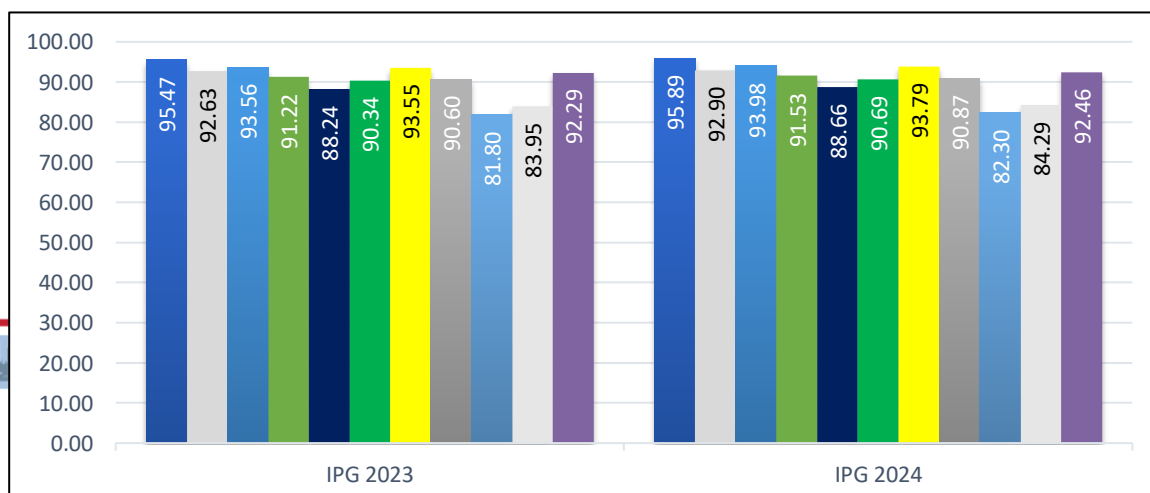


Gambar 2.12. Indeks Pembangunan Gender Provinsi Maluku Tahun 2023 – 2024

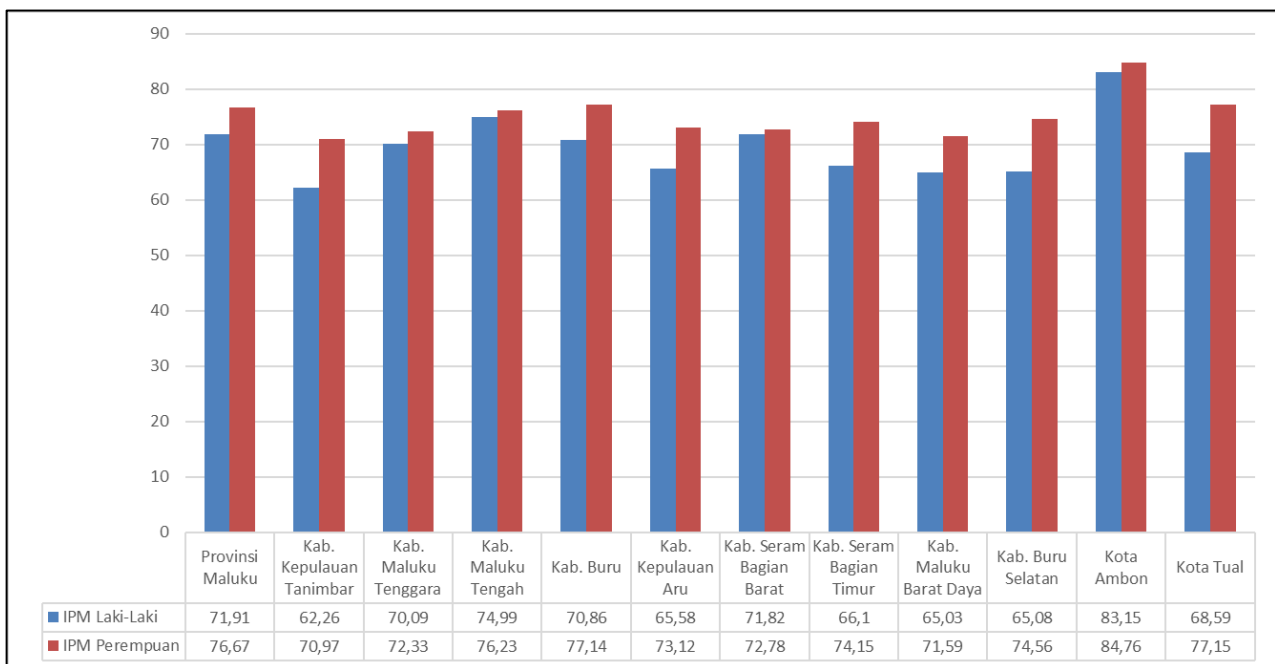


Gambar 2.13. Indeks Pembangunan Gender Provinsi Maluku dan Nasional Tahun 2021 – 2024

Interpretasi dalam hasil perhitungan IPG adalah semakin kecil gap angka IPG dengan nilai 100, maka semakin setara pembangunan antara perempuan dengan laki-laki. Namun semakin besar gap angka IPG dengan nilai 100, maka semakin terjadi ketimpangan pembangunan antara perempuan dan laki-laki. Angka 100 dijadikan patokan untuk menginterpretasikan angka IPG, karena angka tersebut merupakan nilai rasio paling sempurna.



Gambar 2.14. Indeks Pembangunan Gender di Beberapa Provinsi Wilayah Indonesia Bagian Timur Tahun 2023 dan 2024



Gambar 2.15. Indeks Pembangunan Manusia Laki-Laki dan Perempuan Provinsi Maluku Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2023-2024

Upaya utama dalam meningkatkan capaian IPG adalah dengan mewujudkan keadilan dan kesetaraan gender melalui strategi Pengarusutamaan Gender (PUG), PUG Merupakan strategi untuk mencapai keadilan dan kesetaraan gender melalui kebijakan, program, dan kegiatan yang memperhatikan pengalaman, aspirasi, kebutuhan serta permasalahan laki-laki dan perempuan dalam proses pemantauan dan evaluasi dari seluruh aspek kehidupan dan pembangunan. Berikut adalah beberapa langkah konkrit yang telah dibuat Pemerintah Provinsi Maluku terkait dengan Pengarusutamaan Gender (PUG):

1. Penetapan Peraturan Daerah Provinsi Maluku No 7 Tahun 2024 tentang Pengarusutamaan Gender;

2. Penetapan Keputusan Gubernur Maluku Nomor 1826 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Keputusan Gubernur Maluku Nomor 244 Tahun 2018 tentang Pembentukan Tim Focal Point Pengarusutamaan Gender;
3. Penetapan Keputusan Gubernur Nomor 1827 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Keputusan Gubernur Maluku Nomor 200 Tahun 2018 tentang Pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) Pengarusutamaan Gender;
4. Surat Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Maluku Nomor: 800.1.11.1/01 tentang Pembentukan Klinik Pengarusutamaan Gender (Klik PUG) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Maluku Tahun 2026 – 2027;
5. Pertemuan Rutin Tim Teknis PUG 3 bulan sekali yang terdiri dari Bappeda, DP3A, Inspektorat dan BPKD serta *stakeholder* terkait dalam membahas perkembangan pelaksanaan PUG di Provinsi Maluku; dan
6. Pertemuan Rutin Dinas P3A dalam memperkuat SDM internal mengenai Gender Analisis yang dapat memperkuat OPD di Provinsi Maluku.

Berbagai regulasi diatas tidak akan memberikan hasil yang maksimal apabila pihak-pihak yang tergabung dalam Kelompok Kerja PUG (POKJA PUG) tidak berperan aktif dan saling bersinergi, mengingat PUG membutuhkan koordinasi lintas sektor untuk itu dibutuhkan kerjasama dari semua pihak terkait.

Perangkat daerah yang bertanggungjawab atas pencapaian sasaran strategis “Meningkatnya Pembangunan SDM yang Berkualitas” adalah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Sedangkan anggaran Program penunjang sasaran strategis ini adalah:

Tabel 2.30.
Anggaran dan Realisasi Program Penunjang Sasaran
Meningkatnya Pembangunan SDM yang Berkualitas

No	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	123,557,600.00	122,604,000.00	99.23
2	Program Perlindungan Perempuan	389,970,000.00	347,455,610.00	89.10
3	Program Perlindungan Khusus Anak	79,242,500.00	74,350,000.00	93.83
4	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	499,999,950.00	239,927,260.00	47.99
Jumlah		1,092,770,050.00	784,336,870.00	71.78

(data sementara)

SASARAN 6

Meningkatnya Produktivitas dan Nilai Tambah Produk

Sasaran Strategis ini merupakan penjabaran terhadap Tujuan “Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi Daerah yang Inklusif, dan Pemerataan Pembangunan yang Berkelanjutan”. Hasil pengukuran Sasaran Meningkatkan Produktivitas dan Nilai Tambah Produk dapat dilihat pada tabel-tabel berikut:

Tabel 2.31.
**Capaian Sasaran Meningkatnya Produktivitas dan
Nilai Tambah Produk Tahun 2025**

Indikator Kinerja		Target	Realisasi	Capaian (%)
1	LPE Sektor Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	5,81%	6,42%	100%
Rata-Rata Capaian Kinerja				100

Tabel 2.32.
**Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Sasaran 6
antara Tahun 2024 s/d Tahun 2025**

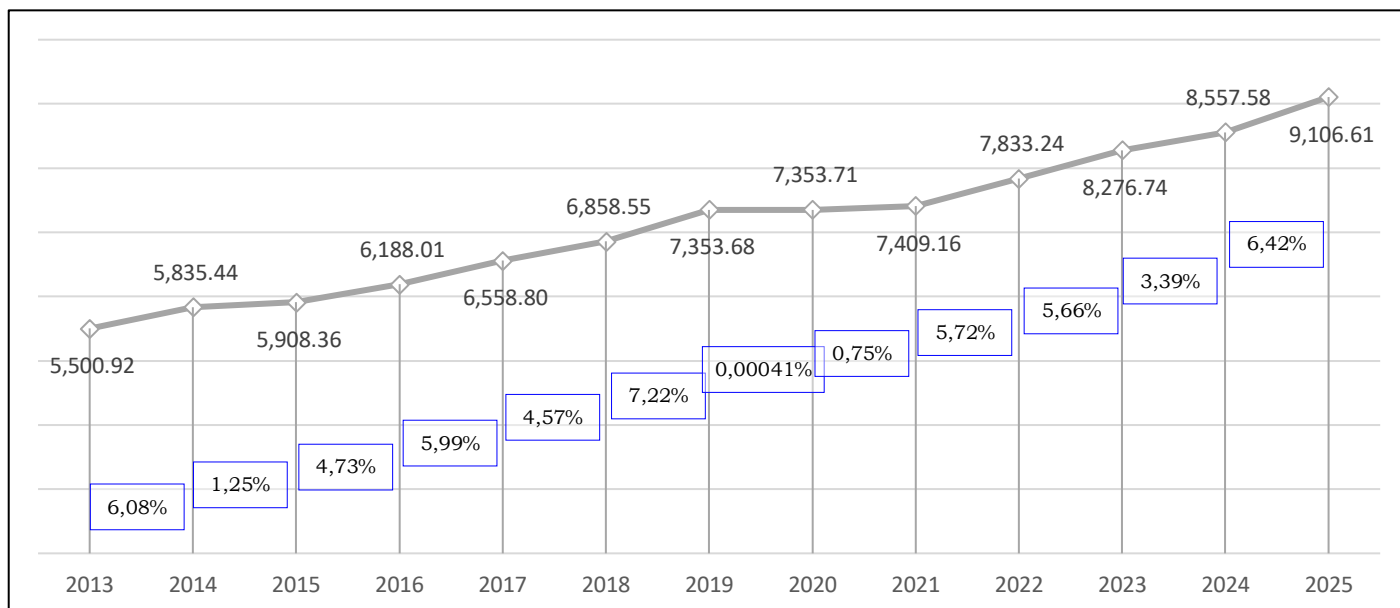
Kinerja		2024		2025	
		Real. Kinerja	Cap. Kinerja	Real. Kinerja	Cap. Kinerja
1	LPE Sektor Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	3,39%	14,51%	6,42%	100%

Tabel 2.33.
**Perbandingan Realisasi Sasaran 6
Tahun 2024 s/d 2025 dengan Tahun Akhir periode RPD**

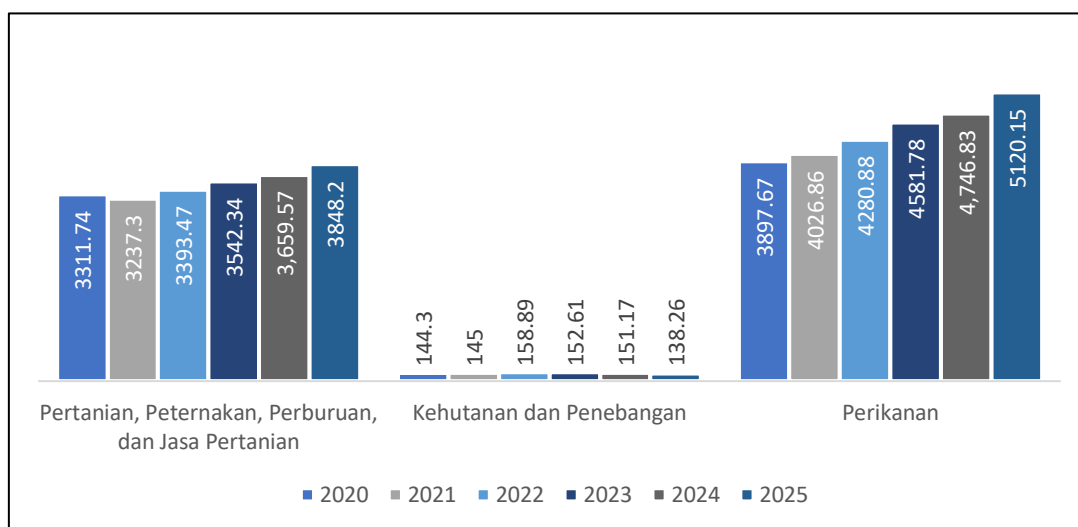
Kinerja		Realisasi 2024	Realisasi 2025	Target Tahun Akhir RPD
1	LPE Sektor Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	3,39%	6,42%	6,34%

Target kinerja “LPE Kategori Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan” yang ingin dicapai ditahun 2025 adalah 5,81% realisasi yang dicapai adalah 6,42% sehingga capaian kinerjanya adalah 110,49%, untuk memudahkan interpretasi penilaian kinerja capaian kinerja tersebut dibulatkan menjadi 100% atau skala nilai peringkat kinerja masuk kedalam kategori “Sangat Memuaskan”.

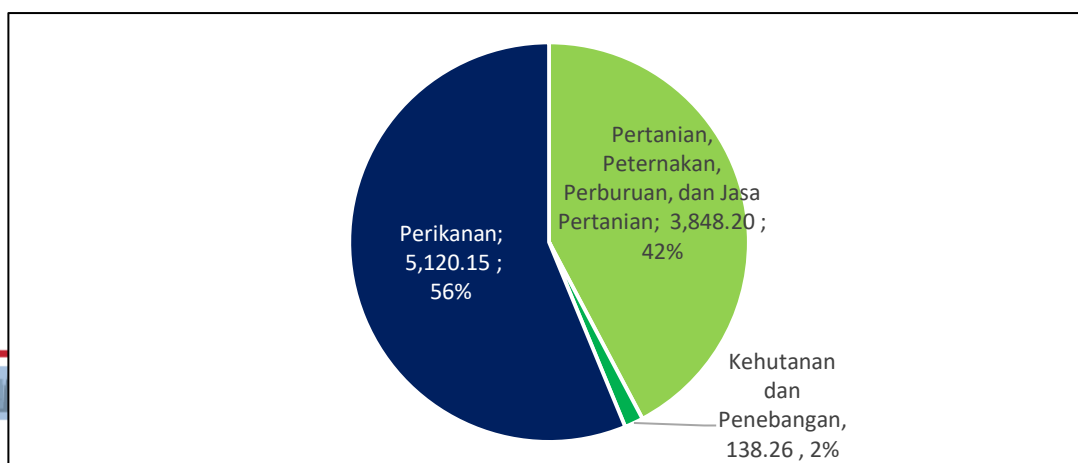
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan di Provinis Maluku dapat dilihat pada beberapa tabel atau gambar berikut.



Gambar 2.16. Persentase Kenaikan/Penurunan Laju Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 (Miliar Rupiah) Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan Provinsi Maluku Tahun 2013 - 2025



Gambar 2.17. Perkembangan Nilai PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 (Miliar Rupiah) Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan Provinsi Maluku Tahun 2020 - 2025



**Gambar 2.18. Distribusi Persentase PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010
(Miliar Rupiah) Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan
Provinsi Maluku Tahun 2025**

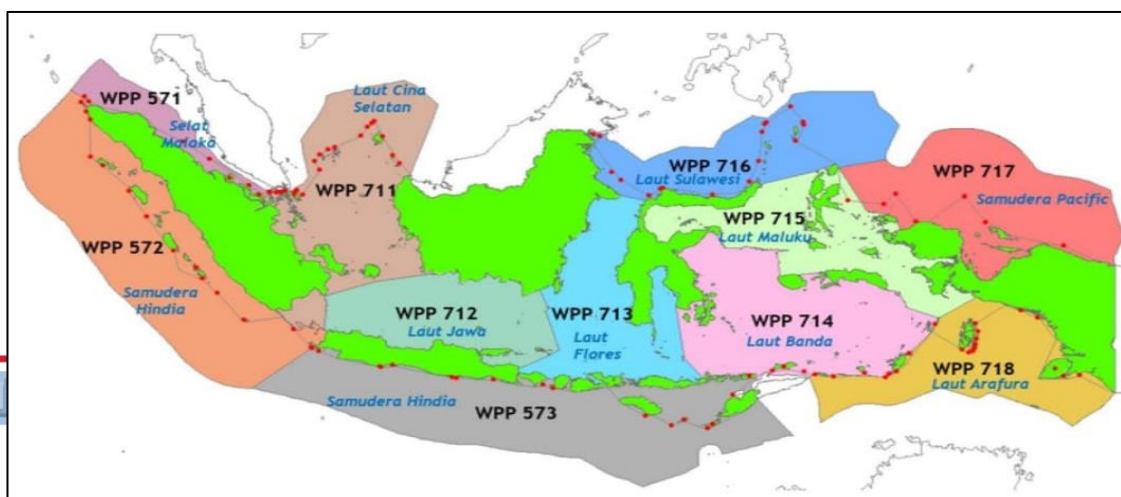
Gambar 3.24. menjelaskan bahwa dari total Rp.9,106,61 miliar PDRB lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 56% adalah kontribusi dari sub lapangan usaha Perikanan dengan nilai Rp.5.120,15 miliar, sub lapangan usaha Pertanian, Peternakan dan Jasa Perburuan berkontribusi sebesar 42% atau dengan nilai Rp.3.848,2 miliar, dan sub lapangan usaha Kehutanan dan penebangan sebesar 2% atau dengan nilai Rp.138,26 miliar.

Berdasarkan pemaparan beberapa data diatas menginformasikan bahwa PDRB lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan terus mengalami peningkatan, hal ini linier dengan produktifitasnya pertanian, kehutanan, dan perikanan yang dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan. Peningkatan produktivitas ini harus berdampak pada peningkatan kesejahteraan pelaku usaha serta pekerja pada lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan yang dapat terlihat secara sederhana pada angka Nilai Tukar Petani (NTP) dan Nilai Tukar Nelayan (NTN).

Berikut adalah gambaran produksi serta produktivitas sektor perikanan, pertanian, dan kehutanan Provinsi Maluku sampai dengan Tahun 2025.

❖ Sektor Perikanan

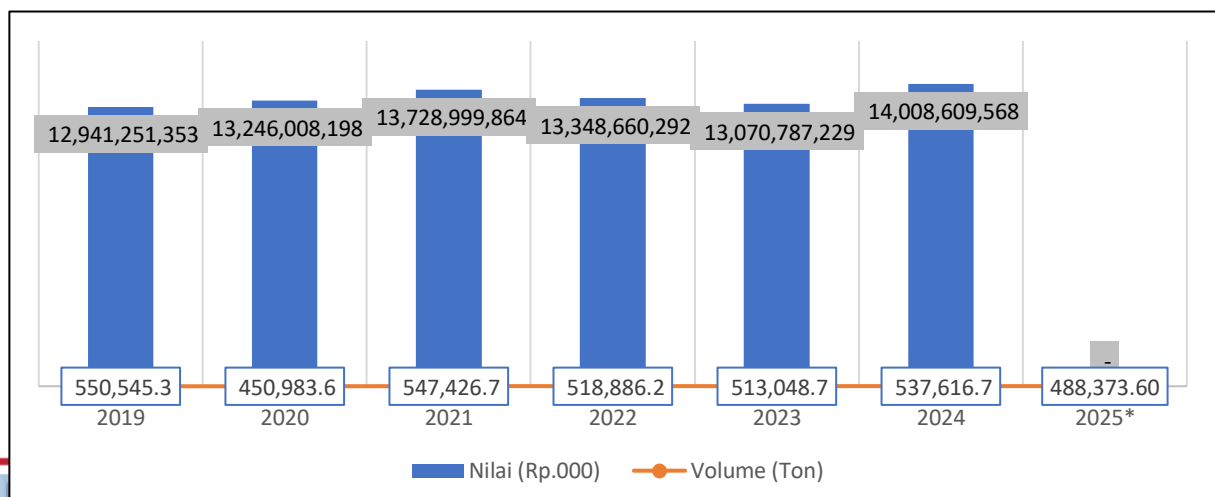
Perairan Indonesia memiliki potensi besar di sektor perikanan karena letaknya berada pada pusat segitiga emas terumbu karang dunia (centre of coral triangle), terkhusus Provinsi Maluku potensi perikanan menjadi jauh lebih spesial dikarenakan luas wilayahnya yang 92,4% adalah perairan dan letak geografisnya tepat berada pada Arus Lintas Indonesia (Arlindo) yang mana arus ini membawa massa air dari Samudra Pasifik ke Samudra Hindia. Dengan adanya Arlindo menjadikan perairan Maluku tempat berkumpulnya hayati laut dari dua sumber utama di Samudra Pasifik dan Samudra Hindia yang tidak ditemui di wilayah laut lainnya.



Gambar 2.19. Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Indonesia

Arlindo juga berperan penting menjadikan Laut Banda sebagai tempat feeding and spawning ground (tempat mencari makan dan berkembang biak) serta menjadikan Laut Arafura sebagai salah satu golden fishing ground terbaik di dunia. Adapun dari 11 (sebelas) Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) 3 (tiga) diantaranya berada di wilayah perairan Maluku, yakni WPP 714 dengan potensi 1.033.979Ton/tahun, WPP 715 dengan potensi 715.293Ton/tahun, dan WPP 718 dengan potensi 2.637.564Ton/tahun dari ketiga WPPRI memiliki potensi perikanan sebesar 4.386.836Ton/tahun (Potensi perikanan ditetapkan melalui SK Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 19 Tahun 2022). Oleh karenanya tidak berlebihan jika Provinsi Maluku harus ditetapkan sebagai Lumbung Ikan Nasional.

Berikut adalah gambar serta tabel produksi dan nilai produksi perikanan tangkap dan perikanan budidaya Provinsi Maluku Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2025* (data sementara).

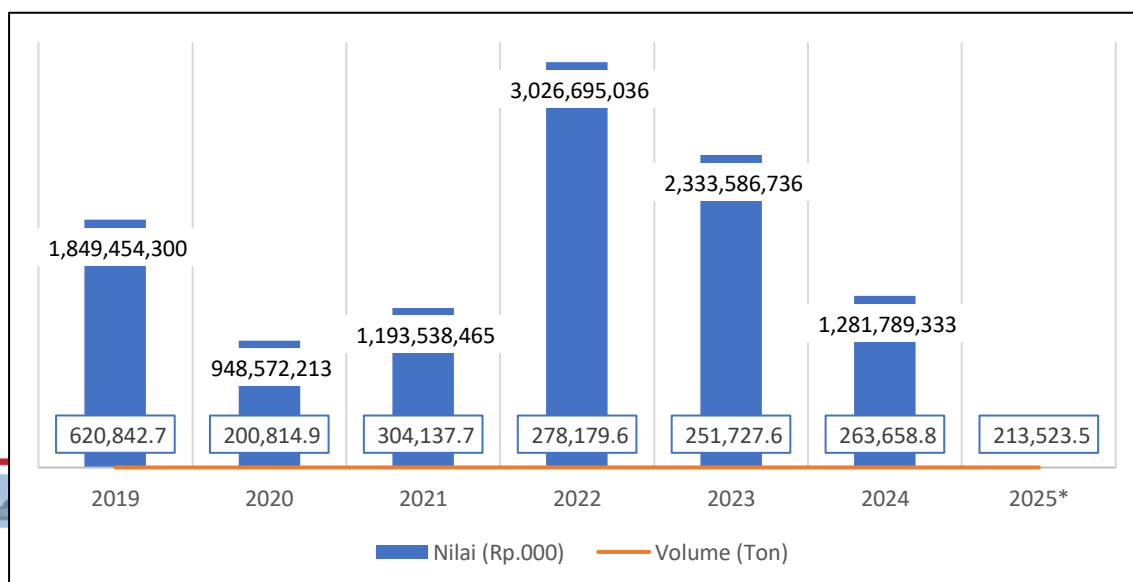


**Gambar 2.20. Produksi (Ton) dan Nilai Produksi (Rp.000)
Perikanan Tangkap Provinsi Maluku Tahun 2019 - 2025**

**Tabel 2.34.
Produksi (Ton) dan Nilai Produksi (Rp.000) Perikanan Tangkap
Kabupaten/Kota se-Provinsi Maluku Tahun 2024 - 2025**

Kabupaten/Kota	2024		2025*	
	Produksi (Ton)	Nilai Produksi (Rp.000)	Produksi (Ton)	Nilai Produksi (Rp.000)
Ambon	26.700,2	626.760.330	10.692,6	-
Maluku Tengah	156.917,7	2.200.402.387	148.672,9	-
Seram Bagian Barat	60.001,3	1.070.129.155	64.919,8	-
Seram Bagian Timur	22.422,9	310.934.540	22.816	-
Buru	12.860,5	259.623.930	8.701,6	-
Maluku Tenggara	97.649,2	5.113.013.520	97.733,3	-
Kepulauan Tanimbar	11.841,0	329.395.440	15.954,2	-
Kepulauan Aru	97.100,4	1.987.045.513	63.899,5	-
Maluku Barat Daya	4.109,2	102.434.810	5.286,3	-
Tual	35.173,9	1.410.610.082	36.622,8	-
Buru Selatan	12.840,6	373.161.837	13.074,2	-
Maluku	537.616,7	13.783.511.546	488.373,6	-

* Data sementara



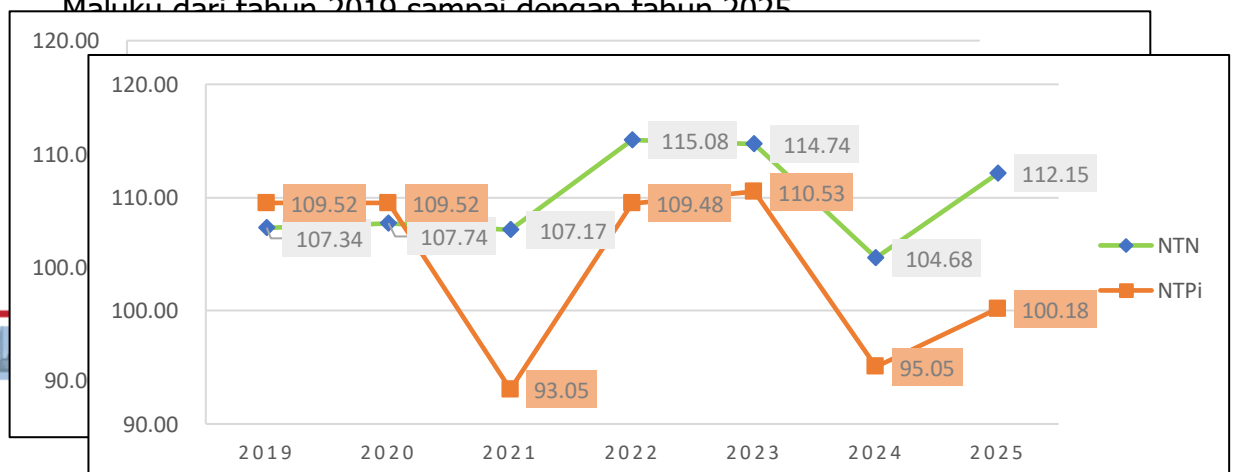
**Gambar 2.21. Produksi (Ton) dan Nilai Produksi (Rp.000)
Perikanan Budidaya Provinsi Maluku Tahun 2019 - 2025**

**Tabel 2.35.
Produksi (Ton) dan Nilai Produksi (Rp.000) Perikanan Budidaya
Kabupaten/Kota se-Provinsi Maluku Tahun 2024 - 2025**

Kabupaten/Kota	2024		2025*	
	Produksi (Ton)	Nilai Produksi (Rp.000)	Produksi (Ton)	Nilai Produksi (Rp.000)
Ambon	214,0	14.978.200	210,5	-
Maluku Tengah	5.273,3	526.053.945	14.266,4	-
Seram Bagian Barat	69,5	2.538.925	16,5	-
Seram Bagian Timur	168,1	9.033.654	116,8	-
Buru	326,4	12.369.600	284,8	-
Maluku Tenggara	46.796,3	70.940.640	28.209,7	-
Kepulauan Tanimbar	14.722,9	76.307.385	12.414,2	-
Kepulauan Aru	43.026,2	140.162.574	12.261	-
Maluku Barat Daya	26.843,7	44.912.622	22.904,6	-
Tual	126.216,1	384.378.858	122.837,5	-
Buru Selatan	2,3	112.930	1.011	-
Maluku	263.658,8	1.281.789.333	213.523,5	-

* Data sementara

Dari potensi perikanan yang mencapai $\pm 4,38$ juta Ton/tahun yang dapat ditangkap $\pm 3,73$ juta Ton/tahun baru sekitar ± 513 ribu Ton/tahun. Begitu pula perikanan budidaya, dari luas lahan yang dapat dimanfaatkan sebesar ± 183 ribu hektar baru sekitar ± 7 ribu hektar yang dimanfaatkan dengan produksi ± 270 ribu Ton/tahun. Pemanfaatan potensi sumber daya perikanan haruslah berdampak terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat Maluku terkhusus para pelaku usaha perikanan, salah satu tolok ukur peningkatan kesejahteraan pelaku usaha perikanan dapat tercermin dari tinggi rendahnya Nilai Tukar Nelayan (NTN) dan Nilai Tukar Pembudidaya Ikan (NTPi). Berikut adalah NTN dan NTPi di Provinsi Maluku dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2025



**Gambar 2.22. Nilai Tukar Nelayan dan
Nilai Tukar Pembudidaya Ikan Provinsi Maluku Tahun 2019 – 2025**

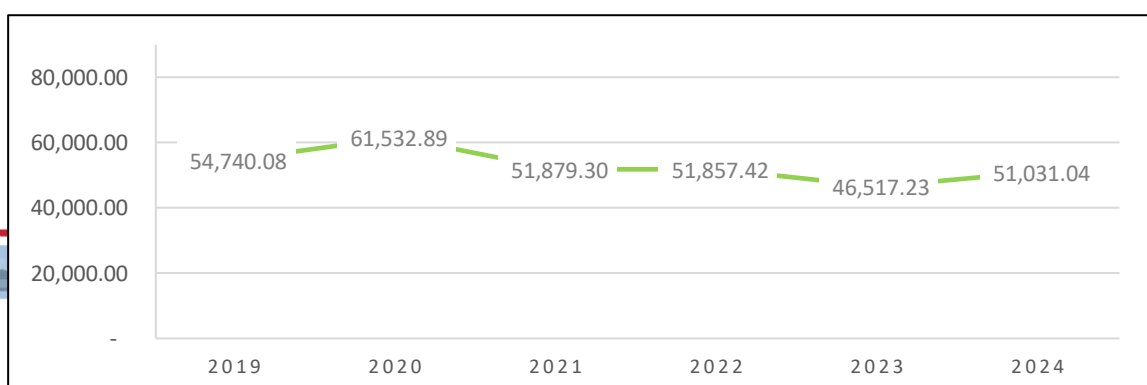
Membutuhkan sumber daya yang besar untuk dapat memaksimalkan potensi perikanan yang ada demi peningkatan kesejahteraan masyarakat Maluku, oleh karena itu akselerasi melalui kebijakan yang tepat adalah kunci utama dalam pengelolaan sumber daya perikanan di Maluku. Percepatan pelaksanaan Maluku Lumbung Ikan Nasional dan perhitungan luas perarian sebagai dasar penetapan Dana Alokasi Umum merupakan solusi yang paling tepat untuk memaksimalkan potensi perikanan di Maluku.

❖ Sektor Pertanian

Sebagai provinsi kepulauan dengan mayoritas pulau-pulau kecil membuat kegiatan pertanian padi tidak dapat dilakukan disetiap kabupaten/kota di Maluku, oleh karena itu Provinsi Maluku sangat bergantung dengan pasokan beras dari luar Maluku hal ini merupakan salah satu faktor penyebab inflasi di Maluku. Berikut adalah tabel produksi beras kabupaten/kota se-Provinsi Maluku.

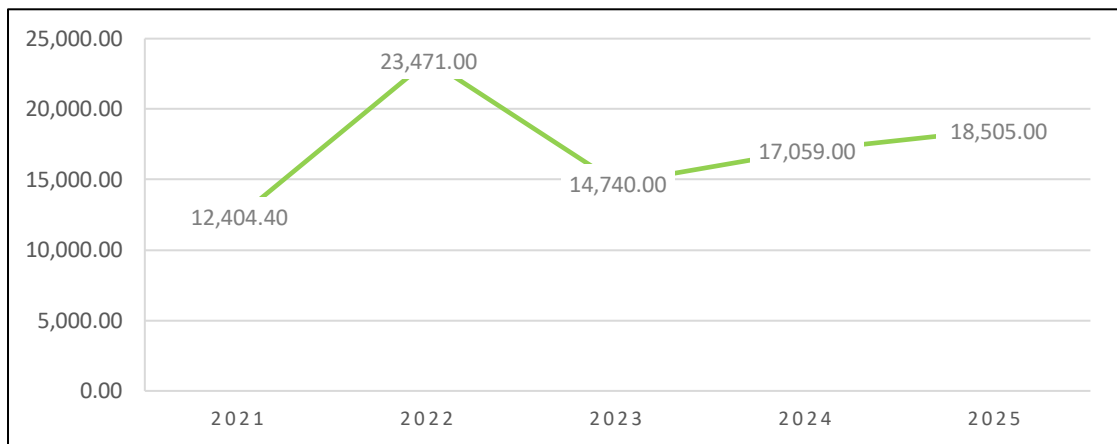
**Tabel 2.36.
Produksi Beras (Ton) Kabupaten/Kota se-Provinsi Maluku
Tahun 2020 - 2024**

Kabupaten/Kota	2020	2021	2022	2023	2024
Kepulauan Tanimbar	97,30	224,27	164,36	506,95	467,60
Maluku Tenggara	4,64	4,64	-	-	-
Maluku Tengah	28.065,03	22.299,16	18.724,01	16.462,69	20.009,21
Buru	25.579,97	33.921,25	25.452,88	22.503,42	24.609
Kepulauan Aru	-	-	-	-	-
Seram Bagian Barat	1.713,54	2.597,25	1.868,00	2.332,64	1.640,41
Seram Bagian Timur	6.072,29	6.364,63	5.647,87	4.711,29	4.304,82
Maluku Barat Daya	0,12	-	-	-	-
Buru Selatan	-	-	-	-	-
Ambon	-	-	-	-	-
Tual	-	0,3	0,3	0,24	-
Maluku	61.532,89	51.879,30	51.857,42	46.517,23	51.031,04

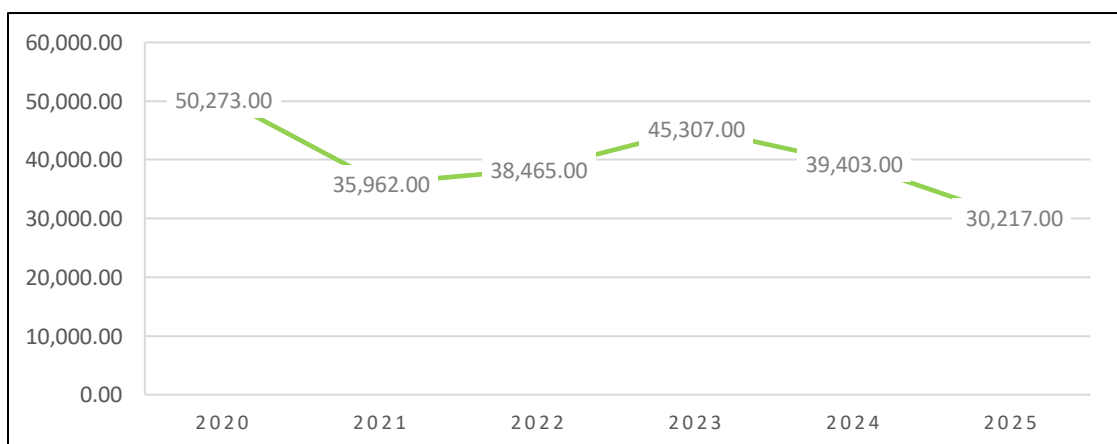


**Gambar 2.23. Produksi Beras (Ton) Provinsi Maluku
Tahun 2019 – 2024**

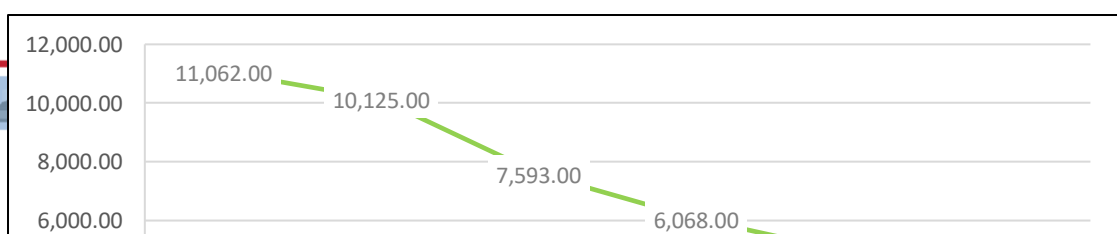
Produksi komoditas hortikultura penting seperti cabe keriting, cabe rawit, bawang merah, dan tomat di Provinsi Maluku Tahun 2020-2025 dapat dilihat pada gambar berikut.



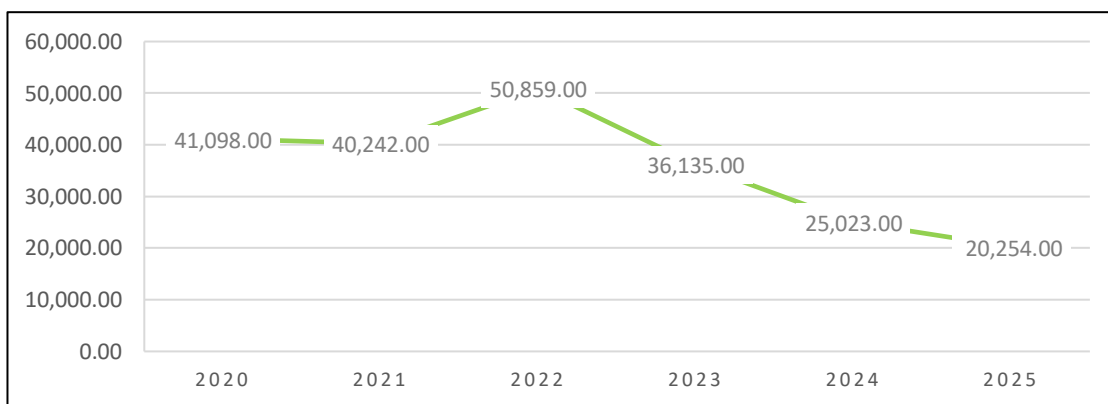
**Gambar 2.24. Produksi Cabe Keriting (Kuintal) Di Provinsi Maluku
Tahun 2021 – 2025**



**Gambar 2.25. Produksi Cabe Rawit (Kuintal) Di Provinsi Maluku
Tahun 2020 – 2025**



Gambar 2.26. Produksi Bawang Merah (Kuintal) Di Provinsi Maluku Tahun 2020 – 2025



Gambar 2.27. Produksi Tomat (Kuintal) Di Provinsi Maluku Tahun 2020 – 2025

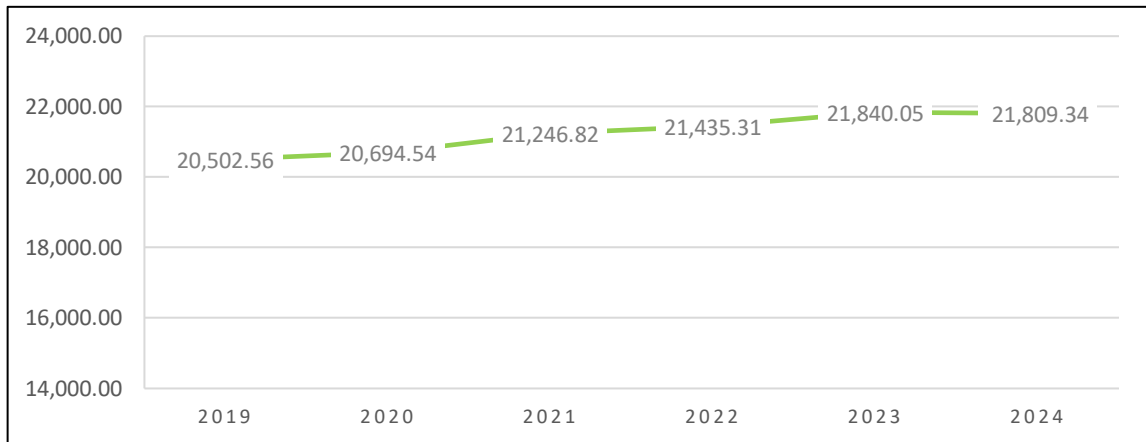
Adapun produksi perkebunan unggulan seperti cengkih, pala, kelapa, kopi, kakao dan sagu di Provinsi Maluku Tahun 2019-2024 dapat dilihat pada tabel dan gambar berikut.

**Tabel 2.37.
Produksi Cengkih (Ribuan Ton) Kabupaten/Kota
se-Provinsi Maluku Tahun 2020 - 2024**

Kabupaten/Kota	2020	2021	2022	2023	2024
Kepulauan Tanimbar	-	-	-	-	-
Maluku Tenggara	6,98	7,4	7,65	7,40	7,1
Maluku Tengah	9.603,70	9.858,15	9.905,23	10.230,2	10.253,5
Buru	435	460,45	450,05	512	506,87
Kepulauan Aru	-	0,34	0,03	0,1	0,02
Seram Bagian Barat	3.000	3.233	3.255,85	3.364,85	3.358,96
Seram Bagian Timur	4.963	4.995,2	5.046,2	5.025,24	5.003,81
Maluku Barat Daya	56,07	84,35	86,4	173	174,81
Buru Selatan	2.278,7	2.246,6	2.299,2	2.277,16	2.272,44
Ambon	340,25	349,75	373,4	233,4	214,43
Tual	10,84	11,9	11,3	16,7	17,4



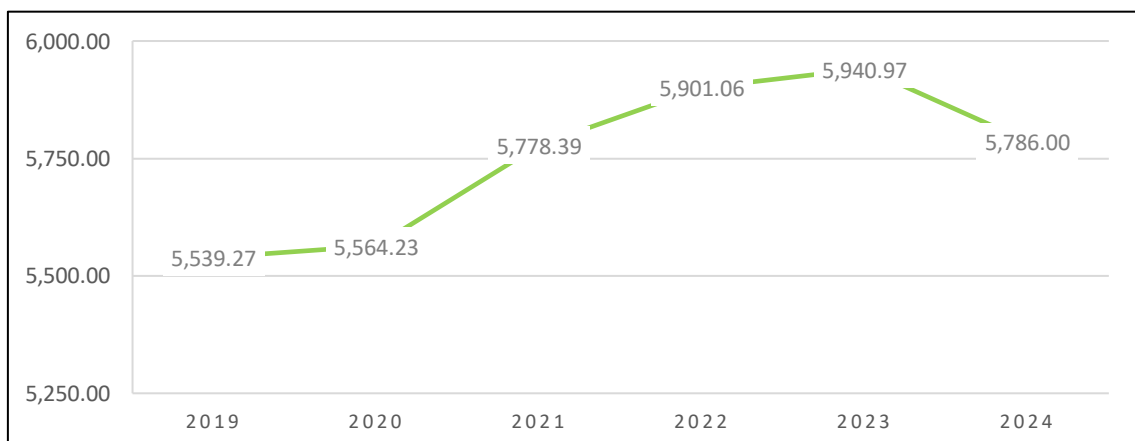
Kabupaten/Kota	2020	2021	2022	2023	2024
Maluku	20.694,54	21.246,82	21.435,31	21.840,05	21.809,34



Gambar 2.28. Produksi Cengkih (Ribuk Ton) Provinsi Maluku Tahun 2019 – 2024

**Tabel 2.38.
Produksi Pala (Ribuk Ton) Kabupaten/Kota
se-Propinsi Maluku Tahun 2020 - 2024**

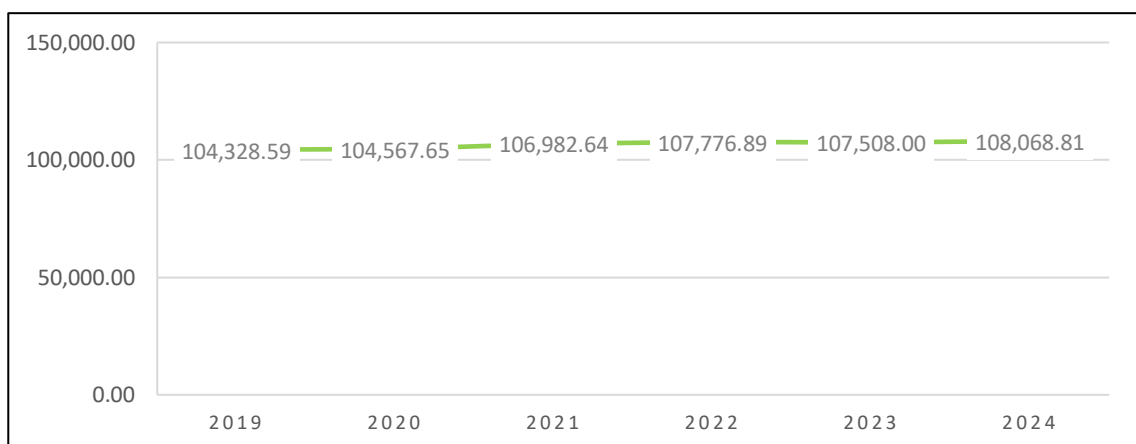
Kabupaten/Kota	2020	2021	2022	2023	2024
Kepulauan Tanimbar	1,65	1,82	1,82	1,97	2,4
Maluku Tenggara	419,03	419,35	416,65	419,35	425,65
Maluku Tengah	2.463	2.515,78	2.531,17	2.536,73	2.295,45
Buru	100,75	126,51	128,39	144,21	204,60
Kepulauan Aru	3,8	3,95	4,2	4,27	3,74
Seram Bagian Barat	253	311,18	322,88	322,88	426,82
Seram Bagian Timur	1.298,55	1.305,5	1.363,85	1.365	1.352,67
Maluku Barat Daya	166,7	226,9	231,18	352,39	245,7
Buru Selatan	507,35	515,85	537	509,2	528,29
Ambon	331	331,6	342,32	263,27	274,5
Tual	19,4	19,95	21,6	21,7	26,18
Maluku	5.564,23	5.778,39	5.901,06	6.068,81	5.786



**Gambar 2.29. Produksi Pala (Ribuan Ton) Provinsi Maluku
Tahun 2019 - 2024**

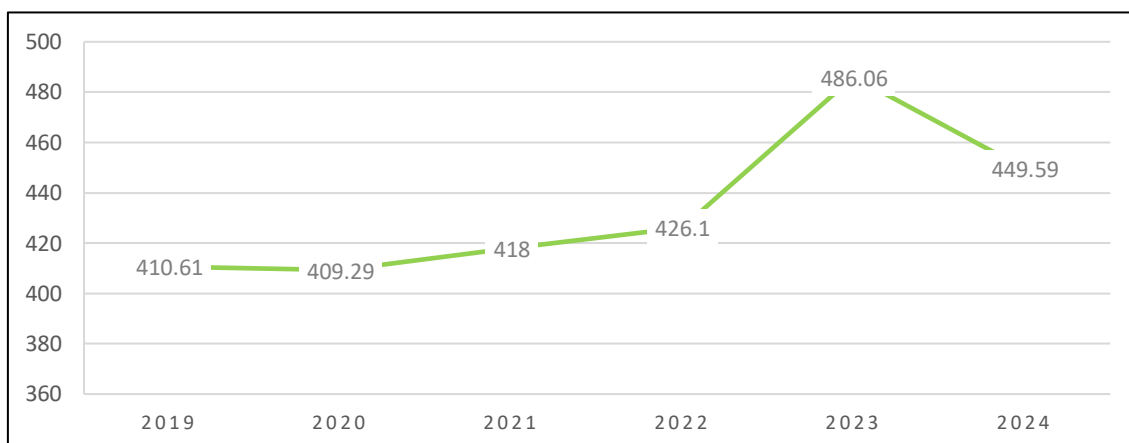
**Tabel 2.39.
Produksi Kelapa (Ribuan Ton) Kabupaten/Kota
se-Provinsi Maluku Tahun 2020 - 2024**

Kabupaten/Kota	2020	2021	2022	2023	2024
Kepulauan Tanimbar	19.139,90	19.393	19.399,8	20.073,50	20.112,83
Maluku Tenggara	20.917,70	21.315	21.364	21.793	21.813,25
Maluku Tengah	19.385,60	20.000,6	20.198,05	20.222	20.231,58
Buru	3.732,40	3.753,4	3.852,15	4.561,80	4.533,72
Kepulauan Aru	1.711	1.760	1.802,15	1.803	1.818,72
Seram Bagian Barat	7.829	8.200	8.416,1	8.363	8.349,57
Seram Bagian Timur	16.728,70	16.755,7	16.979,3	16.297	16.788
Maluku Barat Daya	5.436,55	5.695,55	5.777,4	5.818	5.820,77
Buru Selatan	7.782	7.847	8.066,4	8.090	8.103,52
Ambon	1.560	1.594	1.615,1	264,56	271,21
Tual	307,8	320	305,79	222,14	225,64
Maluku	104.567,65	106.982,64	107.776,89	107.508	108.068,81



**Tabel 2.40.
Produksi Kopi (Ribuan Ton) Kabupaten/Kota
se-Provinsi Maluku Tahun 2020 - 2024**

Kabupaten/Kota	2020	2021	2022	2023	2024
Kepulauan Tanimbar	0,4	0,8	0,8	0,1	0,3
Maluku Tenggara	1,99	2,13	2,44	2,13	2,87
Maluku Tengah	239,24	244,09	243,71	250,43	252,48
Buru	49,55	50,6	51,01	54,2	56,33
Kepulauan Aru	16,5	17,36	17,73	18,57	18,74
Seram Bagian Barat	3,07	2,9	2,95	2,95	3,15
Seram Bagian Timur	43,68	45,38	48,71	61,29	62,6
Maluku Barat Daya	10,24	8	8,23	8,84	9,2
Buru Selatan	14,15	16,02	19,27	56,83	15,17
Ambon	-	-	-	-	-
Tual	30,47	30,72	31,25	30,72	28,75
Maluku	409,29	418	426,1	486,06	449,59

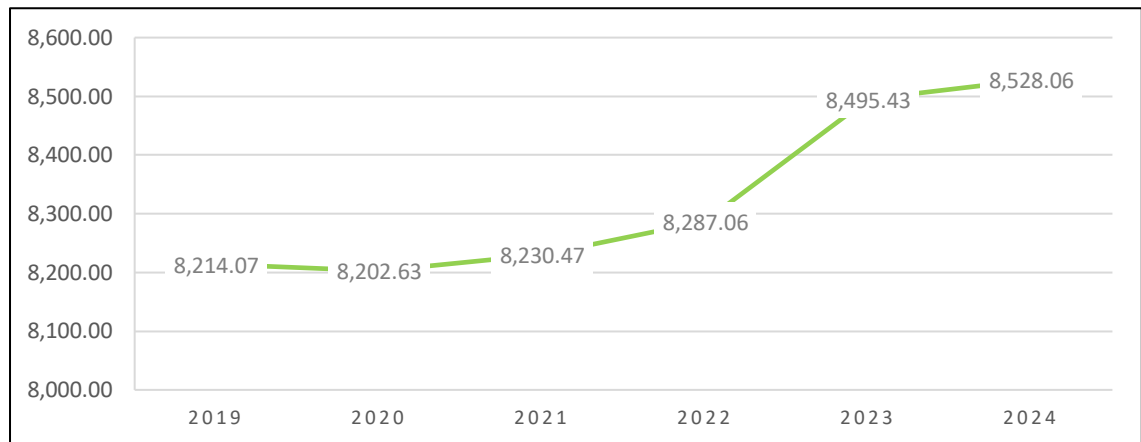


Gambar 2.31. Produksi Kopi (Ribuan Ton) Provinsi Maluku Tahun 2019 - 2024

**Tabel 2.41.
Produksi Kakao (Ribuan Ton) Kabupaten/Kota
se-Provinsi Maluku Tahun 2020 - 2024**

Kabupaten/Kota	2020	2021	2022	2023	2024
Kepulauan Tanimbar	6,08	6,73	6,63	7,34	7,73
Maluku Tenggara	1,23	1,25	1,32	1,25	1,13
Maluku Tengah	2.974,9	2.982,29	3.012,69	3.031,4	3.042,56
Buru	2.847	2.849,17	2.850,5	2.885,9	2.897,93
Kepulauan Aru	0,44	0,49	0,55	0,6	0,42
Seram Bagian Barat	1.358,7	1.360,75	1.363,93	1.363,93	1.374,34
Seram Bagian Timur	394,98	397,2	401,5	521,00	514,93
Maluku Barat Daya	15,25	15,36	15,71	15,88	16,46
Buru Selatan	554,9	582,4	596,4	612,55	616,28
Ambon	49,15	34,83	37,83	55,88	56,28
Tual	-	-	-	-	-

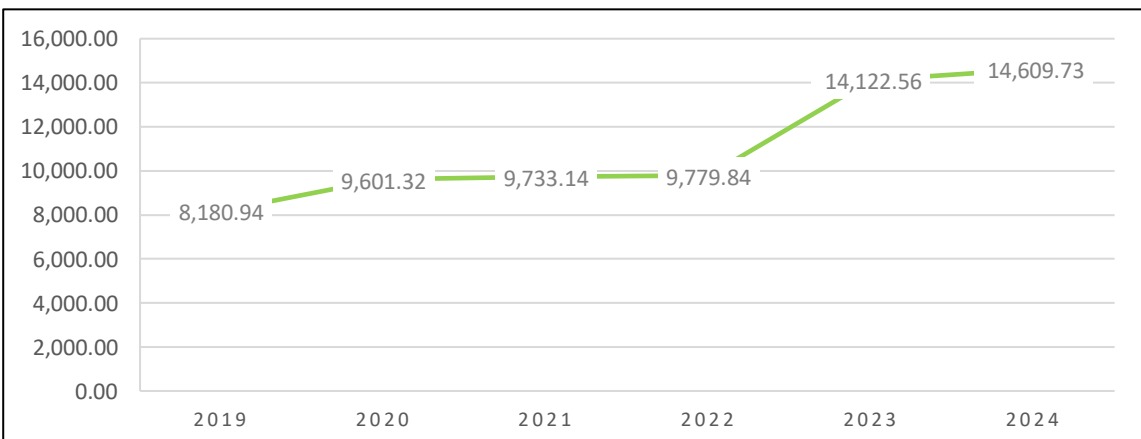
Kabupaten/Kota	2020	2021	2022	2023	2024
Maluku	8.202,63	8.230,47	8.287,06	8.497,43	8.528,06



Gambar 2.32. Produksi Kakao (Ribu Ton) Provinsi Maluku Tahun 2019 - 2024

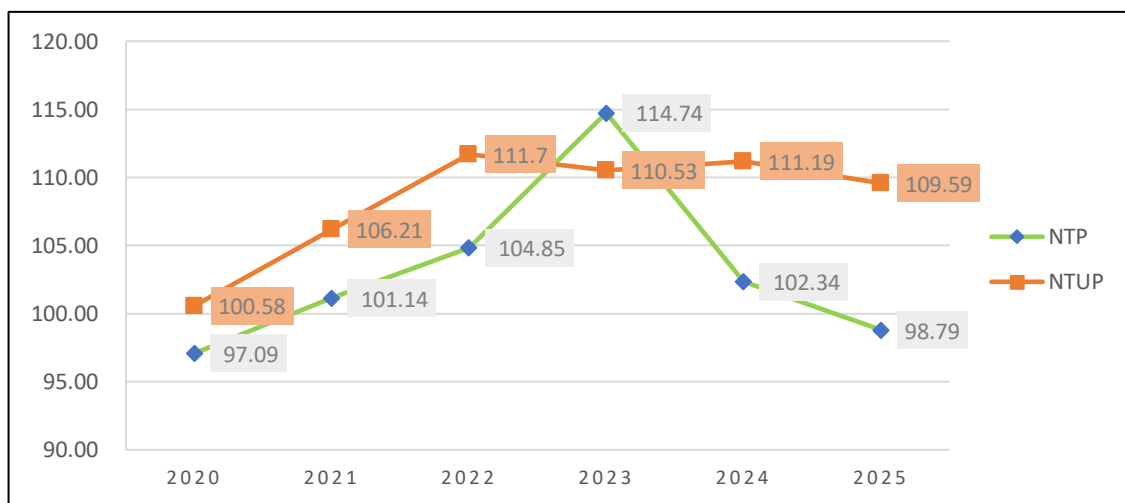
Tabel 2.42.
Produksi Sagu (Ribu Ton) Kabupaten/Kota se-Provinsi Maluku Tahun 2020 - 2024

Kabupaten/Kota	2020	2021	2022	2023	2024
Kepulauan Tanimbar	13,5	14,61	14,66	15,12	15,67
Maluku Tenggara	7,26	7,26	7,57	7,26	7,5
Maluku Tengah	120,13	119,38	119,83	124,1	124,5
Buru	2,56	2,98	3,49	2,43	2,73
Kepulauan Aru	121	133,15	137,4	142,48	162,45
Seram Bagian Barat	111,6	111,38	112,99	111,38	112,09
Seram Bagian Timur	9.182,48	9.302,43	9.339,6	13.675,22	14.139
Maluku Barat Daya	18,1	18,1	18,7	19,2	20,8
Buru Selatan	6,25	5,9	6,15	3,83	4,13
Ambon	9,6	9,65	11,4	11,82	12,3
Tual	8,3	8,3	8,05	9,72	8,56
Maluku	9.601,32	9.733,14	9.779,84	14.122,56	14.609,73



Gambar 2.33. Produksi Sagu (Ribuan Ton) Provinsi Maluku Tahun 2019 – 2024

Peningkatan produksi pertanian dan perkebunan diharapkan berdampak terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat Maluku terkhusus semua pelaku usaha dibidang pertanian/perkebunan, salah satu tolak ukur peningkatan kesejahteraan pelaku usaha dibidang pertanian/perkebunan terlihat dari tinggi rendahnya Nilai Tukar Petani (NTP) dan Nilai Tukar Usaha Pertanian (NTUP). Berikut adalah NTP dan NTUP di Provinsi Maluku dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2025.



Gambar 2.34. Rata-Rata Nilai Tukar Petani (NTP) dan Nilai Tukar Usaha Petani (NTUP) Provinsi Maluku Tahun 2020 – 2025

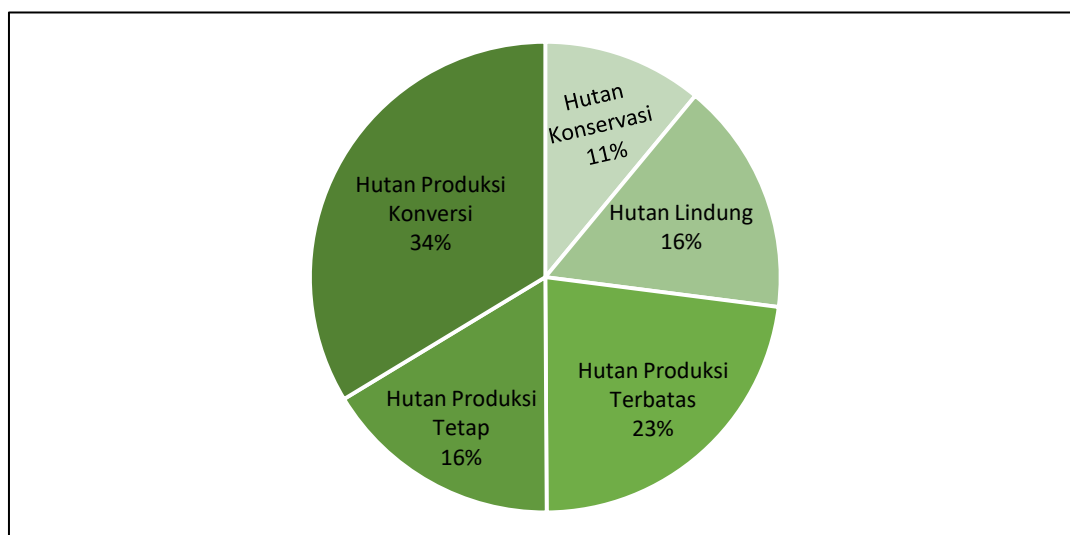
Berdasarkan data NTP dan NTUP diatas, kesejahteraan petani/pekebun harus ditingkatkan. Data diatas mengindikasikan bahwa hasil produk pertanian/perkebunan dari petani/pekebun cenderung terserap dengan harga yang rendah sedangkan penjualan ke konsumen dengan harga yang relatif tinggi, hal ini terlihat dari tingginya angka NTUP sedangkan angka NTP masih rendah. Oleh karenanya diperlukan perbaikan tata kelola niaga yang lebih baik agar para petani/pekebun selaku produsen utama tidak dirugikan serta masyarakat umum selaku konsumen dapat menjangkau produk pertanian/perkebunan dengan harga yang relatif wajar.

❖ Sektor Kehutanan

Secara umum perekonomian sektor kehutanan terbagi menjadi 3 (tiga) jenis yakni 1) Produksi Hasil Hutan Kayu 2) Produksi Hasil Hutan Bukan Kayu; dan 3) Jasa Lingkungan. Untuk provinsi Maluku saat ini yang masih menjadi penggerak utama perekonomian sektor kehutanan adalah produksi hasil

hutan kayu, namun seiring dengan masalah serta isu lingkungan yang sedang dihadapi dunia maka dimasa yang akan datang produksi hasil hutan bukan kayu serta jasa lingkungan akan mengambil alih sebagai penggerak utama ekonomi sektor kehutanan.

Luas Kawasan Hutan di Provinsi Maluku berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: 6604/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/10/2021 tanggal 27 Oktober 2021 adalah 3.906.326 Ha atau 72% dari luas daratan, yang terdiri dari Hutan Konservasi seluas 429.624 Ha (11%), Hutan Lindung 626.212 Ha (16,03%), Hutan Produksi Terbatas 893.642 Ha (22,88%), Hutan Produksi Tetap 641.606 Ha (16,42%) dan Hutan Produksi Konversi 1.315.241 Ha (33,67%). Berikut adalah gambar Luasan kawasan hutan berdasarkan fungsi dan tabel luas kawasan hutan per Kabupaten/Kota Provinsi Maluku.



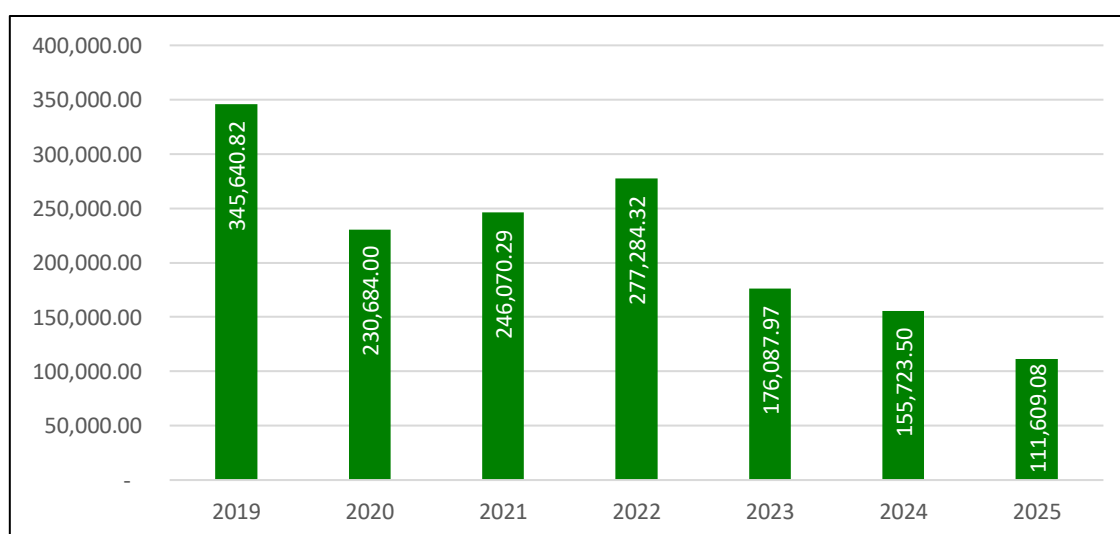
Gambar 2.35. Luasan Kawasan Hutan Berdasarkan Fungsi

Tabel 2.43.
Luas Kawasan Hutan Per Kabupaten/Kota Provinsi Maluku

Kabupaten/ Kota	Luas Fungsi Kawasan Hutan (HA)					Jumlah (HA)
	Hutan Konservasi	Hutan Lindung	Hutan Produksi Terbatas	Hutan Produksi Tetap	Hutan Produksi Konversi	
Ambon	-	5.933	-	-	-	5.933
Maluku Tengah	175.845	138.836	181.233	28.562	96.525	621.002
Buru	6.847	104.846	115.025	111.652	91.555	429.925
Buru Selatan	-	76.206	96.285	85.331	81.370	339.193
Maluku Tenggara	18.012	6.354	2.397	2.895	17.307	46.966
Tual	-	9.136	986	-	1.533	11.655
Kepulauan Tanimbar	77.107	13.077	78.112	111.770	138.062	418.129
Maluku Barat Daya	51.432	34.382	4.586	70.943	173.377	334.719

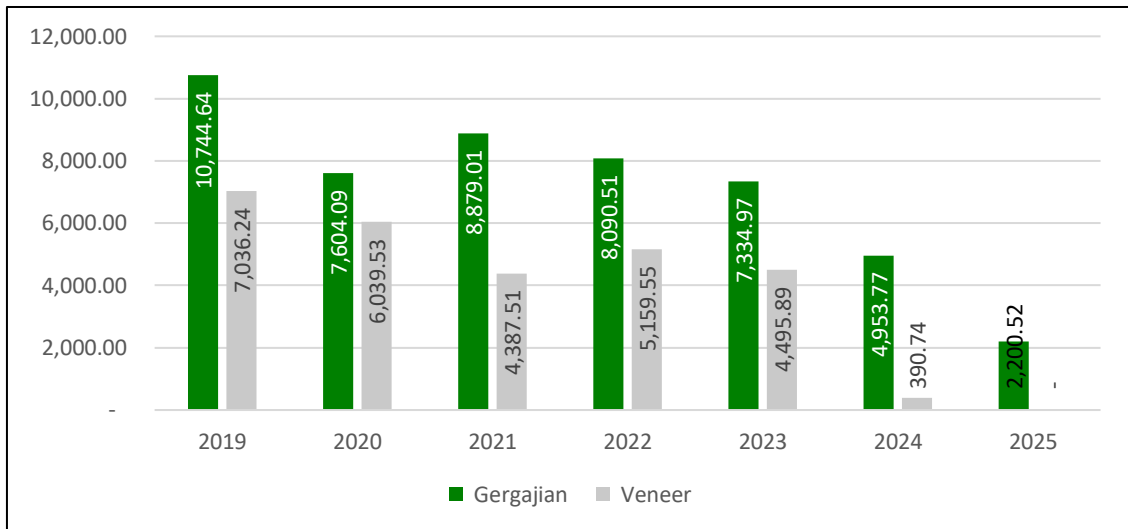
Seram Bagian Barat	32.404	124.616	156.318	9.816	91.801	414.955
Seram Bagian Timur	1.232	106.656	258.699	26.786	114.493	507.866
Kepulauan Aru	66.745	6.169	-	193.851	509.218	775.983
Maluku	429.624	626.212	893.642	641.606	1.315.241	3.906.326

Luas total seluruh kawasan hutan di provinsi Maluku adalah 3.906.326 Ha, dengan fungsi terluas adalah Hutan produksi Konversi (HPK) dengan 1.315.241 Ha atau sekitar 33,67% dari total luas, dan fungsi terkecil adalah Hutan Konservasi dengan luas 429.624 Ha atau sekitar 11% dari total luas. HPK yang luas menunjukkan adanya potensi tekanan alih fungsi lahan, sehingga perencanaan tata ruang dan perlindungan lingkungan harus menjadi perhatian. Berdasarkan Neraca Sumber Daya Hutan (NSDH) di Maluku, perkiraan potensi kayu dari kawasan hutan di Provinsi Maluku Tahun 2021 Hutan Konservasi 44.800.000m³, Hutan Lindung 71.200.000m³, Hutan Produksi tetap 105.300.000m³, Hutan Produksi 57.100.000m³, Hutan Produksi Konversi 80.300.000m³, dan non hutan sebesar 20.100.000m³ sehingga sampai Tahun 2021 total perkiraan potensi kayu di Maluku sebesar 378.800.000m³. Berikut adalah data produksi kayu bulat, produksi kayu olahan dan produksi hutan bukan kayu di Provinsi Maluku.



Gambar 2.36. Produksi Kayu Bulat (M³/Tahun) Provinsi Maluku

Tahun 2019 – 2025



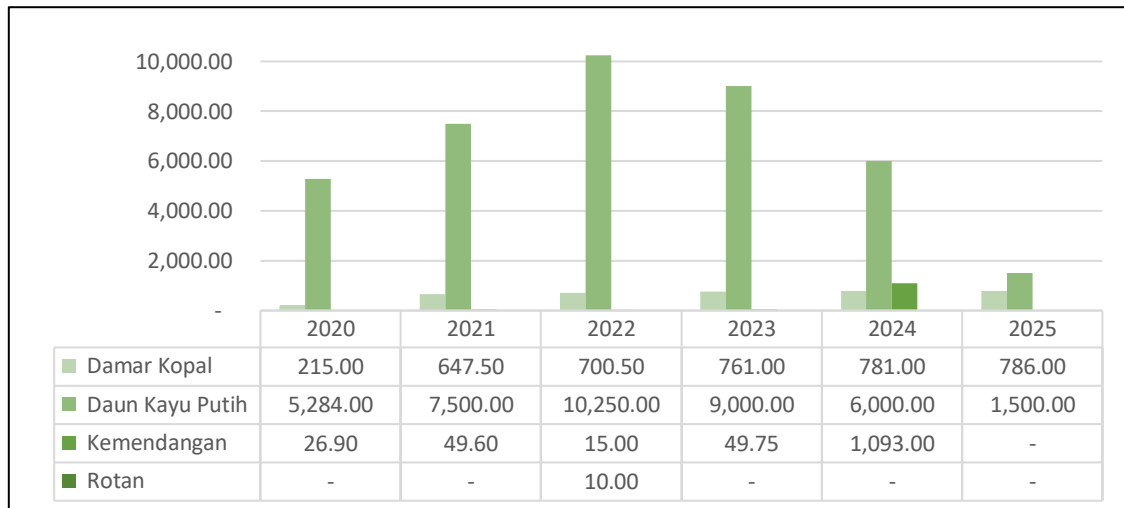
Gambar 2.37. Produksi Kayu Olahan (M³/Tahun) Provinsi Maluku Tahun 2019 – 2025

Potensi Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) di Provinsi Maluku cukup besar dan tersebar diseluruh kabupaten/kota baik itu HHBK yang bersifat nabati maupun HHBK yang bersifat hewani. Penyebaran dan jenis HHBK di Provinsi Maluku terdiri dari:

- Rotan tersebar di Kabupaten Buru, Kabupaten Seram Bagian Barat, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Kabupaten Maluku Tenggara (belum dimanfaatkan secara komersial/diperdagangkan);
- Damar tersebar di Kabupaten Buru, Kabupaten Seram Bagian Barat dan Kabupaten Seram Bagian Timur;
- Bambu tersebar di Kota Ambon, Kabupaten Seram bagian Barat dan Kabupaten Seram Bagian Timur (belum dimanfaatkan secara komersial/diperdagangkan);
- Minyak Kayu Putih tersebar di Kabupaten Buru dan Kabupaten Seram Bagian Barat;
- Minyak Lawang tersebar di Kabupaten Seram Bagian Timur dan Kabupaten Seram Bagian Barat dan Kabupaten Maluku Tenggara (baru diperdagangkan/dimanfaatkan secara terbatas);
- Madu tersebar di Kota Ambon, Kabupaten Seram Bagian Timur dan Kabupaten Maluku Barat Daya (baru diperdagangkan/dimanfaatkan secara terbatas);
- Pala Hutan di Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Seram Bagian Barat dan Kabupaten Maluku Barat Daya;

- Gaharu/Kemedangan tersebar di Kabupaten Seram Bagian Barat, Kabupaten Seram Bagian Timur dan Kabupaten Buru (telah dibudidayakan dan diperdagangkan secara terbatas); dan
- Satwa liar yang tidak dilindungi tersebar di Kabupaten Buru, Kabupaten Seram Bagian Barat, Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Kepulauan Aru dan Kabupaten Kepulauan Tanimbar.

Berikut adalah produksi Hasil Hutan Bukan Kayu yang terpantau sampai dengan tahun 2025.



Gambar 2.38. Produksi Hasil Hutan Bukan Kayu (Ton/Tahun) Provinsi Maluku Tahun 2020-2025

Secara umum hasil produksi kehutanan di Provinsi Maluku terus mengalami penurunan tiap tahunnya, adapun beberapa alasan penyebab penurunan ini adalah sebagai berikut:

- Perubahan kebijakan dan tata kelola kehutanan. Perubahan regulasi, evaluasi izin, atau pengetatan pengawasan terhadap penebangan hutan juga dapat menekan produksi kayu bulat agar lebih terkendali dan berkelanjutan.
- Menurunnya permintaan pasar dan harga kayu. Permintaan pasar yang menurun, menyebabkan perusahaan pemegang izin usaha pemanfaatan hasil hutan cenderung mengurangi volume produksi agar tidak mengalami kerugian
- Dukungan terhadap program mitigasi perubahan iklim global. Banyak negara, termasuk Indonesia, menjalankan kebijakan pengelolaan hutan yang lebih ketat untuk mendukung komitmen pengurangan emisi. Salah satu inisiatif internasional yang berkaitan langsung dengan sektor kehutanan adalah REDD+, yang mendorong negara untuk menekan laju deforestasi dan degradasi hutan. Ketika aktivitas penebangan berkurang, tutupan hutan dapat lebih terjaga. Hutan yang sehat berfungsi sebagai penyerap karbon alami sehingga membantu menurunkan konsentrasi karbon di atmosfer yang menjadi penyebab utama pemanasan global.

- Penerapan pengelolaan hutan berkelanjutan. Pembatasan kuota tebang, rotasi tebang yang lebih panjang, atau penetapan kawasan lindung merupakan bagian dari komitmen negara dalam perjanjian iklim global seperti *Paris Agreement*.

Khusus bidang kehutanan, penurunan produksi pasti mengakibatkan penurunan pendapatan perekonomian pelaku usaha kehutanan. Namun dilain sisi penurunan ini juga memiliki dampak positif terhadap ketahanan serta keberlanjutan lingkungan hidup. Oleh karenanya, untuk mendukung kepentingan yang lebih besar yakni kelestarian lingkungan hidup, Pemerintah Provinsi Maluku mendukung secara penuh kebijakan pengelolaan hutan berkelanjutan demi kelestarian lingkungan hidup dimasa yang akan datang.

Lapangan usaha perikanan dan pertanian merupakan lapangan usaha mayoritas penduduk Provinsi Maluku melihat capaian PDRB yang terus meningkat di tiap tahunnya namun belum berbanding lurus dengan pendapatan yang diterima pelaku usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan maka perlu dilakukan langkah kebijakan strategis yang tepat sasaran sehingga dapat memberikan nilai tambah terhadap produksi pertanian, kehutanan, dan perikanan.

Perangkat daerah Provinsi Maluku yang bertanggungjawab atas pencapaian sasaran strategis "Meningkatnya Produktivitas dan Nilai Tambah Produk" adalah Dinas Pertanian; Dinas Kehutanan; Dinas Kelautan dan Perikanan. Sedangkan anggaran Program penunjang sasaran strategis ini adalah:

Tabel 2.44.
Anggaran dan Realisasi Program Penunjang Sasaran
Meningkatnya Produktivitas dan Nilai Tambah Produk

No	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	11,029,435,800.00	9,079,159,921.00	82.32
2	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	4,348,206,096.00	4,224,404,544.00	97.15
3	Program Perizinan Usaha Pertanian	45,486,000.00	43,310,000.00	95.22
4	Program Pengelolaan Hutan	13,575,730,315.00	11,714,260,060.00	86.29
5	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	2,759,100,000.00	1,486,409,754.00	53.87
6	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	13,608,829,200.00	11,059,485,059.00	81.27
7	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	2,417,885,500.00	1,485,396,797.00	61.43
8	Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	466,818,500.00	408,539,213.50	87.52

No	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
9	Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	471,768,000.00	252,679,703.00	53.56
10	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	30,721,334,070.00	23,443,348,906.00	76.31
11	Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	132,500,000.00	131,377,000.00	99.15
12	Program Penyuluhan	778,668,700.00	777,391,278.00	99.84
13	Program Perizinan Pertanian	45,486,000.00	43,310,000.00	95.22
14	Program Pendidikan dan Pelatihan, Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat dibidang Kehutanan	2,122,150,100.00	2,012,917,241.00	94.85
Jumlah		82,523,398,281.00	66,161,989,476.50	80.17

(data sementara)

SASARAN 7**Meningkatnya Pertumbuhan Usaha dan Nilai Investasi**

Sasaran Strategis ini merupakan penjabaran terhadap Tujuan “Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi Daerah yang Inklusif, dan Pemerataan Pembangunan yang Berkelanjutan”. Hasil pengukuran Sasaran Meningkatkan Pertumbuhan Usaha dan Nilai Investasi dapat dilihat pada tabel-tabel berikut:

Tabel 2.45.
Capaian Sasaran Meningkatkan Pertumbuhan Usaha dan Nilai Investasi Tahun 2025

Indikator Kinerja		Target	Realisasi	Capaian (%)
1	LPE Lapangan Usaha Sektor Industri Pengolahan dan Perdagangan	21,03%	5,35%	25,43
2	Nilai Investasi PMA/PMDN	2,6 Triliun	1,1 Triliun	42,3
Rata-Rata Capaian Kinerja				33,86

Tabel 2.46.
Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Sasaran 7 antara Tahun 2024 s/d Tahun 2025

Kinerja	2024	2025
---------	------	------

		Real. Kinerja	Cap. Kinerja	Real. Kinerja	Cap. Kinerja
1	LPE Lapangan Usaha Sektor Industri Pengolahan dan Perdagangan	4%	66,44%	5,35%	25,43%
2	Nilai Investasi PMA/PMDN	3,3 Triliun	100%	1,1 Triliun	42,3%

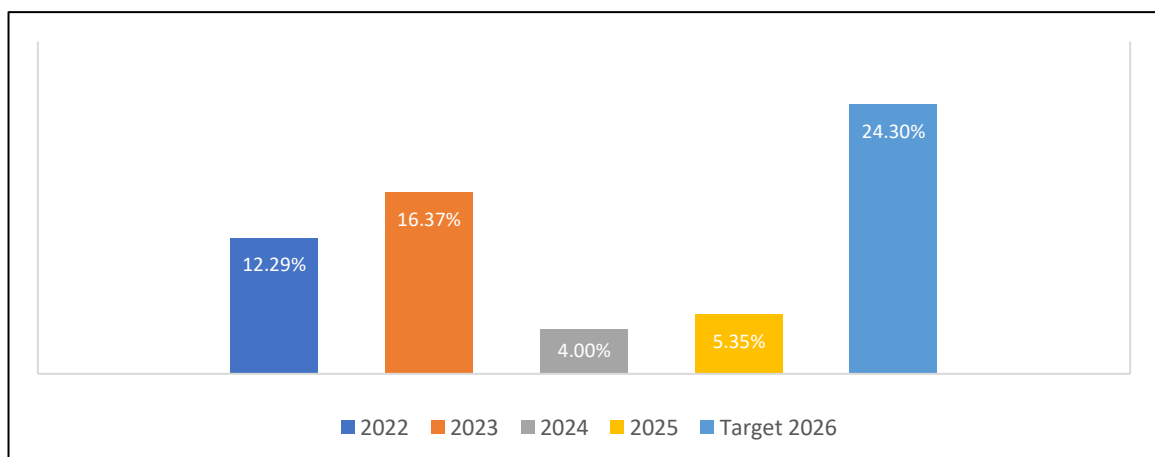
Tabel 2.47.
Perbandingan Realisasi Sasaran 7
Tahun 2024 s/d 2025 dengan Tahun Akhir periode RPD

	Kinerja	Realisasi 2024	Realisasi 2025	Target Tahun Akhir RPD
1	LPE Lapangan Usaha Sektor Industri Pengolahan dan Perdagangan	4%	5,35%	24,3%
2	Nilai Investasi PMA/PMDN	3,3 Triliun	1,1 Triliun	2,8 Triliun

Target kinerja "LPE Lapangan Usaha Sektor Industri Pengolahan dan Perdagangan" yang ingin dicapai di tahun 2025 adalah 21,03%, realisasi LPE Lapangan Usaha Sektor Industri Pengolahan Tahun 2025 sebesar 5,35% sehingga capaian kinerjanya adalah 25,43% atau dengan capaian kinerja masuk kedalam kategori "Sangat Kurang".

Target kinerja "Nilai Investasi PMA/PMDN" yang ingin dicapai di tahun 2025 adalah senilai Rp.2,6Triliun, realisasi investasi di Provinsi Maluku tahun 2025 adalah senilai Rp.1,1Triliun sehingga capaian kinerjanya adalah 42,3% atau dengan capaian kinerja masuk kedalam kategori "Kurang".

Berdasarkan rata-rata capaian kinerja kedua kinerja Sasaran Meningkatnya Pertumbuhan Usaha dan Nilai Investasi maka capaian kinerja sasaran ini adalah sebesar 33,86% atau dengan capaian kinerja masuk kedalam kategori "Kurang".



Gambar 2.39. Perbandingan Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Industri Pengolahan dengan Target Akhir Periode RPD

Laju pertumbuhan Ekonomi Kategori Industri Pengolahan tahun 2025 adalah sebesar 5,35% dari target 21,03% sehingga capaian kinerja adalah sebesar 25,43%. Jika dibandingkan dengan tahun 2024 Laju pertumbuhan industri pengolahan mengalami kenaikan yaitu sebesar 33,75% dari tahun 2024. Laju Pertumbuhan Ekonomi Kategori Lapangan Usaha Industri Pengolahan tertinggi terjadi ditahun 2023 yakni sebesar 16,37%.

Setidaknya terdapat 2 (dua) faktor non teknis dan faktor teknis yang diduga sebagai penyebab ketidak tercapainya target yang telah ditetapkan pemerintah Provinsi Maluku di akhir periode RPD 2025-2026. Faktor non teknis adalah diduga terjadi kekeliruan dalam menginterpretasi laju pertumbuhan PDRB dengan persentase kontribusi PDRB sehingga target yang ingin dicapai terlampau tinggi. Faktor teknis lebih disebabkan oleh adanya kondisi ekonomi global yang sedang mengalami penurunan sehingga kondisi tersebut berimbas pada pelambatan perekonomian Nasional sampai di Provinsi Maluku, dampak yang paling terlihat adalah penurunan realisasi investasi yang cukup signifikan di tahun 2025. Berikut adalah rincian PDRB Lapangan Usaha Industri Pengolahan di Provinsi Maluku.

Tabel 2.48.
Nilai PDRB Lapangan Usaha Industri Pengolahan
Provinsi Maluku Tahun 2022-2025

No	Sub Sektor	Nilai PDRB (Miliar Rupiah)		
		2023	2024	2025
1	Industri Batubara dan Pengilangan Migas	-	-	-
2	Industri Makanan dan Minuman	599,49	639,27	717,27
3	Industri Pengolahan Tembakau	-	-	-
4	Industri Tekstil dan Pakaian Jadi	7,60	8,35	9,05
5	Industri Kulit Barang dari Kulit dan Alas Kaki	-	-	-
6	Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus; dan Barang Anyaman dari Bambu, Rotan dan sejenisnya	402,16	401,49	394,53
7	Industri Kertas dan Barang dari Kertas; Percetakan dan Reproduksi Media Rekaman	3,21	3,50	3,78
8	Industri Kimia, Farmasi dan Obat Tradisional	1,32	1,34	1,37
9	Industri Karet; Barang dari Karet dan Plastik	717,92	723,97	794,13
10	Industri Barang Galian bukan Logam	11,73	12,34	14,33
11	Industri Logam Dasar	548,19	594,42	578,97
12	Industri Barang Logam; Komputer, Barang Elektronik, Optik; dan Peralatan Listrik	0,28	0,28	0,28

No	Sub Sektor	Nilai PDRB (Miliar Rupiah)		
		2023	2024	2025
13	Industri Mesin dan Perlengkapan	-	-	-
14	Industri Alat Angkutan	45,03	45,51	46,64
15	Industri Furnitur	6,72	6,89	7,47
16	Industri Pengolahan Lainnya; Jasa Reparasi dan Pemasangan Mesin dan Peralatan	6,52	6,72	7,12
Total		2.350,17	2.444,09	2.574,94

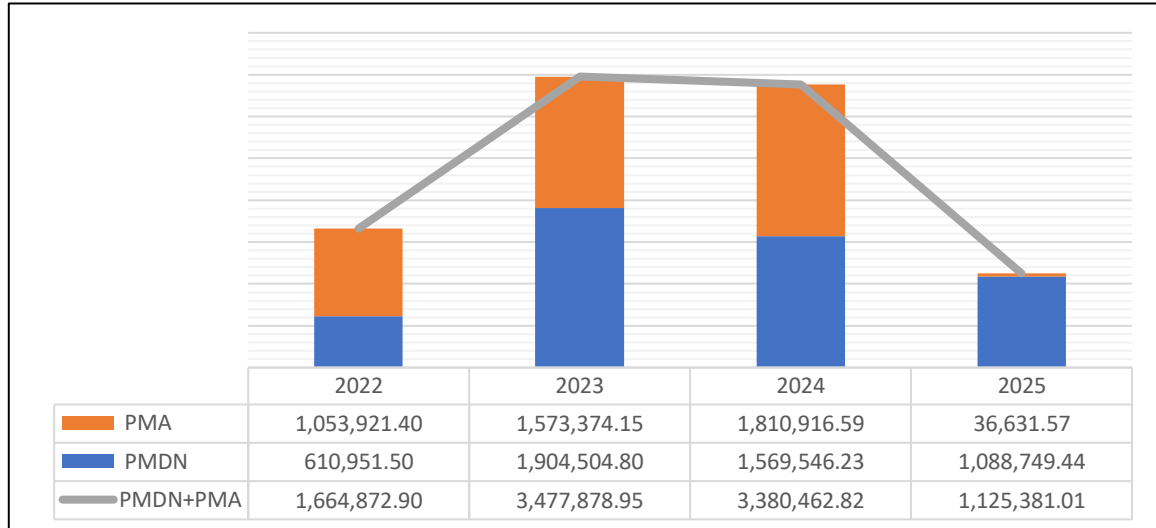
Berdasarkan perhitungan statistik pada tabel diatas, tercatat masih ada 4 (empat) sub sektor dari 16 (enam belas) sub sektor penunjang sektor industri pengolahan yang belum mampu memberikan kontribusi terhadap PDRB Provinsi Maluku sampai saat ini, sub sektor yang dimaksud adalah industri batubara dan pengilangan migas; industri pengolahan tembakau; industri kulit barang dari kulit dan alas kaki; dan industri mesin dan perlengkapan. Sedangkan sub sektor yang memberikan kontribusi terbesar adalah industri karet, Barang dari karet dan plastik dengan nilai produksi mencapai 794,13 Miliar Rupiah pada Tahun 2025, diikuti dengan sub sektor industri makanan dan minuman dengan nilai produksi 717,27 Miliar Rupiah. Selain itu industri Logam Dasar juga memberikan kontribusi yang besar dengan nilai produksi 578,97 Miliar Rupiah.

Secara total pada tahun 2025 industri pengolahan tercatat menghasilkan nilai produksi sebesar 2.574,94 Miliar Rupiah meningkat dari tahun 2024 yang mempunyai nilai produksi sebesar 2.444,09 Miliar Rupiah. Hal ini dapat diartikan bahwa pertumbuhan ekonomi Lapangan Usaha Industri Pengolahan di Provinsi Maluku masuk dalam kategori positif karena mengalami tiap tahunnya terus mengalami pertumbuhan.

Oleh sebab itu Pemerintah Provinsi Maluku akan mendukung upaya peningkatan pengembangan kedua sektor tersebut seperti pembangunan infrastruktur yang memadai, program KUR (Dana Bergulir) dan pembiayaan mikro, serta mendorong percepatan digitalisasi UMKM sesuai perkembangan teknologi. Hal ini tentu akan berdampak pada minat masyarakat untuk memulai dan terus mengembangkan usahanya, sehingga dapat berdaya saing dan menciptakan lapangan kerja seluas-luasnya bagi masyarakat di Provinsi Maluku. Selain itu adanya penyederhanaan prosedur perizinan yang terintegrasi secara elektronik guna peningkatan pelayanan penanaman modal yang dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Maluku.

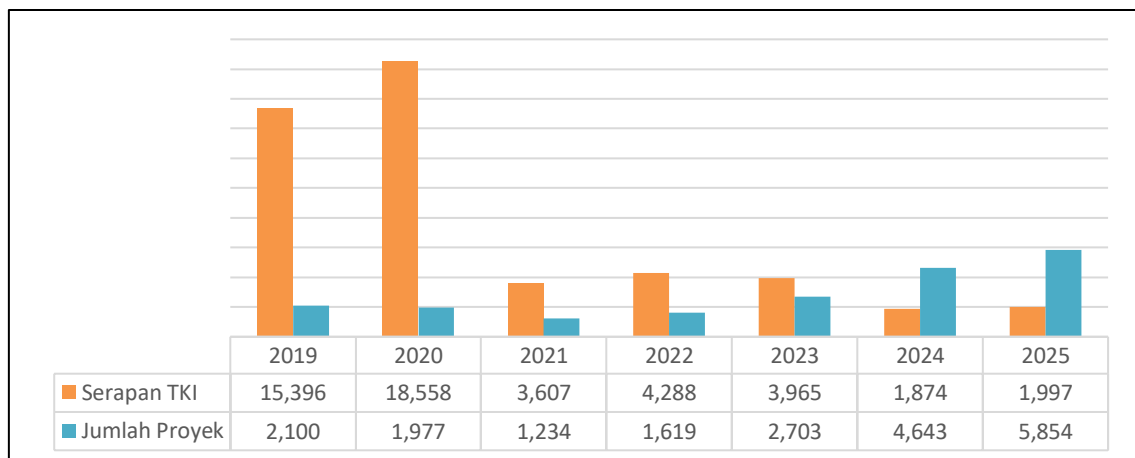
Realisasi investasi (PMDN & PMA) di Provinsi Maluku terus mengalami fluktuasi ditiap tahunnya, hal ini dipengaruhi oleh kondisi politik, kemananan serta ekonomi global yang akhir-akhir ini mengalami kondisi yang tidak stabil. Pada tahun 2025 realisasi investasi adalah sebesar Rp.1.125.381.010.000,- mengalami

penurunan 66,7% dari realisasi investasi tahun 2024 yang sebesar Rp.3.380.4622,82,-. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Gambar Nilai Realisasi Investasi (PMDN & PMA) di Provinsi Maluku Tahun 2022-2025 dibawah ini.



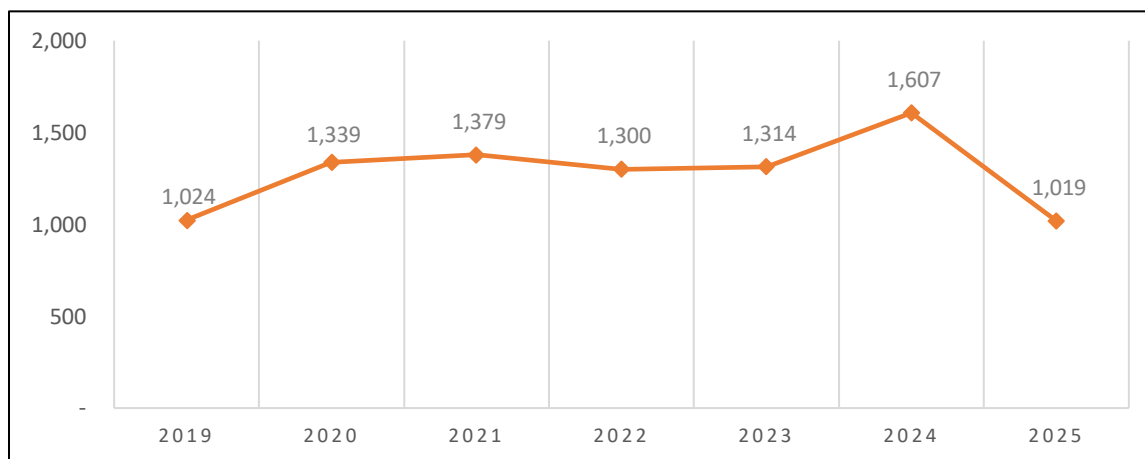
Gambar 2.40. Nilai Realisasi Investasi (PMDN & PMA) di Provinsi Maluku Tahun 2022 – 2025

Jumlah Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang akan terserap dari realisasi investasi tahun 2025 adalah sebanyak 1.997 orang tenaga kerja, meningkat 6,56% jika dibandingkan serapan TKI ditahun Tahun 2024 yang berjumlah 1.874. Sedangkan jumlah proyek yang akan dilaksanakan dari investasi tahun 2025 tercatat sebanyak 5.854 proyek, meningkat 26,08% jika dibandingkan dengan jumlah proyek ditahun 2024 yang berjumlah sebanyak 4.643 proyek. Untuk lebih jelasnya dapat melihat gambar berikut ini.



Gambar 2.41. Jumlah Serapan Tenaga Kerja dan Jumlah Proyek di Provinsi Maluku Tahun 2019 - 2025

Jumlah penerbitan izin usaha sebanyak ditahun 2025 adalah sebanyak 1.019, menurun 36,59% jika dibandingkan dengan jumlah izin usaha yang terbit ditahun 2024 yang sebanyak 1.607. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar dibawah ini.



Gambar 2.42. Jumlah Penerbitan Izin Usaha di Provinsi Maluku Tahun 2019 - 2025

Walaupun realisasi investasi tahun 2025 belum mencapai target yang ditentukan, namun upaya untuk meningkatkan investasi di Provinsi Maluku telah dilakukan melalui beberapa hal, antara lain:

- Melaksanakan promosi investasi secara *massive* dengan cara menyelenggarakan forum bisnis dan pameran serta publikasi berbasis digital melalui *youtube*, *website* dan media sosial lainnya.
- Memudahkan proses pemberian izin, dengan cara:
 - Menyusun Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi yang merupakan gabungan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan Rencana zonasi wilayah pulau-pulau kecil (RZWP3K);
 - Menyediakan layanan aplikasi untuk proses perizinan;
 - Menyediakan dan memaksimalkan fungsi ruang klinik konsultasi investasi (*Online Singel Submission-Riskbased Approach (OSS-RBA)* dan Laporan Kegiatan Penanaman Modal); dan
 - Melakukan pelayanan perizinan dengan “mobil pelayanan keliling” (jemput bola pelaku usaha dalam melakukan proses perizinan).

Yang tidak kalah pentingnya dari upaya-upaya peningkatan pada faktor teknis tersebut diatas adalah faktor non teknis yakni penentuan target pada dokumen perencanaan. Secara kinerja, PDRB Lapangan Usaha Industri Pengolahan terus menunjukkan tren positif, akan tetapi penentuan target yang terlampau tinggi menutupi keberhasilan pencapaian kinerja tersebut. Oleh sebab itu di periode perencanaan mendatang, kami akan lebih teliti dalam menentukan target kinerja yang akan dicapai.

Perangkat daerah yang bertanggung jawab atas pencapaian sasaran strategis “Meningkatnya Pertumbuhan Usaha dan Nilai Investasi” adalah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Maluku, Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Maluku dan Dinas Penanaman Modal dan PTSP. Sedangkan anggaran program penunjang sasaran strategis ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.49.
Anggaran dan Realisasi Program Penunjang Sasaran
Meningkatnya Pertumbuhan Usaha dan Nilai Investasi

No	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	5,372,071,000.00	4,766,763,694.00	88.73
2	Program Pengembangan Ekspor	250,000,000.00	248,335,000.00	99.33
3	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	150,000,000.00	140,281,000.00	93.52
4	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	150,000,000.00	140,281,000.00	93.52
5	Program Pengembangan UMKM	2,184,004,000.00	1,699,552,380.00	77.82
6	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	0.00	0	#DIV/0!
7	Program Hubungan Industrial	289,119,700.00	271,300,250.00	93.84
8	Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	32,001,000.00	32,001,000.00	100.00
9	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	32,001,000.00	32,001,000.00	100.00
10	Program Promosi Penanaman Modal	395,996,000.00	395,722,600.00	99.93
11	Program Pelayanan Penanaman Modal	468,135,400.00	440,750,780.00	94.15
12	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	30,000,000.00	27,419,500.00	91.40
13	Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	14,992,000.00	13,052,000.00	87.06
14	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	3,789,733,529.00	3,107,684,694.00	82.00
15	Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen	119,200,000.00	97,400,000.00	81.71
16	Program Pengelolaan Data dan system Informasi Penanaman Modal	20,000,000.00	19,908,000.00	99.54
Jumlah		13,297,253,629.00	11,432,452,898.00	85.98

(data sementara)

Sasaran Strategis ini merupakan penjabaran terhadap Tujuan “Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi Daerah yang Inklusif, dan Pemerataan Pembangunan yang Berkelanjutan”. Hasil pengukuran Sasaran Meningkatnya Konektivitas antar Wilayah dan Pembangunan Infrastruktur yang Berkualitas dan Merata dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.50.
Capaian Sasaran Meningkatnya Konektivitas antar Wilayah dan Pembangunan Infrastruktur yang Berkualitas dan Merata Tahun 2025

Indikator Kinerja		Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Rasio Konektivitas	0,784	0,704	89,79
2	Indeks Desa Membangun	0,7322	66	-
3	Indeks Infrastruktur (Bidang ke-PU-an)	90,41	56,47	62,45
Rata-Rata Capaian Kinerja				76,12

Tabel 2.51.
Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Sasaran 8 antara Tahun 2024 s/d Tahun 2025

Kinerja		2024		2025	
		Real. Kinerja	Cap. Kinerja	Real. Kinerja	Cap. Kinerja
1	Rasio Konektivitas	0,774	-	0,704	89,79%
2	Indeks Desa Membangun	0,6799	-	66	-
3	Indeks Infrastruktur (Bidang ke-PU-an)	85,98	-	56,47	62,45%

Tabel 2.53.
Perbandingan Realisasi Sasaran 8 Tahun 2024 s/d 2025 dengan Tahun Akhir periode RPD

Kinerja		Realisasi 2024	Realisasi 2025	Target Tahun Akhir RPD
1	Rasio Konektivitas	0,774	0,704	0,793
2	Indeks Desa Membangun	0,6799	66	0,7721
3	Indeks Infrastruktur (Bidang ke-PU-an)	85,98	56,47	94,84

Target kinerja “Rasio Konektivitas” yang ingin dicapai di tahun 2025 adalah 0,774, realisasi Rasio Konektivitas Tahun 2025 adalah 0,704 sehingga capaian kinerjanya adalah 89,79% atau dengan capaian kinerja masuk kedalam kategori “Memuaskan”.

Target kinerja “Indeks Desa Membangun (IDM)” yang ingin dicapai di tahun 2025 adalah 0,7322, ditahun 2025 IDM berubah menjadi Indeks Desa (ID) disertai perubahan metode perhitungannya. Dengan perubahan tersebut mengakibatkan perbedaan skala penilaian, jika sebelumnya nilai IDM menggunakan bilangan desimal (0,...) saat ini nilai ID menggunakan bilangan bulat. Oleh karena perbedaan skala penilaian tersebut, ini menjadi tidak bisa dihitung capaian kinerjanya.

Target kinerja “Indeks Infrastruktur (Bidang ke-PU-an)” yang ingin dicapai di tahun 2025 adalah 90,41 realisasi Indeks Infrastruktur (Bidang ke-PU-an) tahun 2025 yakni sebesar 56,47 sehingga capaian kinerjanya adalah 62,45% atau dengan capaian kinerja masuk kedalam kategori “Baik”.

Berdasarkan rata-rata capaian kinerja kedua kinerja Sasaran Meningkatnya Konektivitas antar Wilayah dan Pembangunan Infrastruktur yang Berkualitas dan Merata maka capaian kinerja sasaran ini adalah sebesar 76,12% atau atau dengan capaian kinerja masuk kedalam kategori “Sangat Baik”.

Indeks Desa Membangun (IDM) merupakan indeks yang digunakan dalam rangka mengukur status perkembangan dan kemandirian desa yang telah digunakan sejak tahun 2019. Indeks ini merupakan indeks komposit dari beberapa indeks, seperti Indeks Ketahanan Sosial, Indeks Ketahanan Ekonomi dan Indeks Ketahanan Lingkungan. Berdasarkan nilai IDM ini maka dapat ditentukan status perkembangan sebuah desa yang dikategorikan dalam 5 (lima) kategori yakni Mandiri, Maju, Berkembang, Tertinggal dan Sangat Tertinggal.

Jika IDM hanya menggunakan 3 dimensi pengukuran, akan tetapi ID menggunakan 6 dimensi pengukuran yakni Dimensi Sosial, Dimensi Ekonomi, Dimensi Lingkungan, Dimensi Layanan Dasar, Dimensi Aksesibilitas, dan Dimensi Tata Kelola Pemerintahan Desa. Sedangkan status kemandirian desa masih menggunakan 5 kategori yang sama yakni Mandiri, Maju, Berkembang, Tertinggal dan Sangat Tertinggal. Berikut adalah status kemandirian desa di Maluku Tahun 2024 – 2025.

Tabel 2.54.
Status Kemandirian Desa Menurut Kabupaten/Kota
di Provinsi Maluku Tahun 2024 - 2025

Kabupaten/ Kota	Jumlah Desa	Status Kemandirian Desa									
		Mandiri		Maju		Berkembang		Tertinggal		Sangat Tertinggal	
		2024	2025	2024	2025	2024	2025	2024	2025	2024	2025
Maluku Tengah	186	8	17	88	82	82	80	8	7	0	0

Kabupaten/ Kota	Jumlah Desa	Status Kemandirian Desa									
		Mandiri		Maju		Berkembang		Tertinggal		Sangat Tertinggal	
		2024	2025	2024	2025	2024	2025	2024	2025	2024	2025
Seram Bagian Barat	92	13	9	26	29	48	41	4	8	1	5
Seram Bagian Timur	198	6	7	23	31	92	68	75	77	2	15
Buru	82	6	7	23	31	92	68	75	77	2	15
Buru Selatan	81	1	2	7	10	38	49	35	19	0	1
Maluku Tenggara	190	10	17	50	52	124	112	6	9	0	0
Kepulauan Tanimbar	80	15	5	63	31	2	44	0	0	0	0
Kepulauan Aru	117	0	0	5	5	58	75	54	33	0	4
Maluku Barat Daya	117	3	7	28	24	60	70	26	16	0	0
Ambon	30	30	26	0	3	0	1	0	0	0	0
Tual	27	11	11	16	16	0	0	0	0	0	0
Total	1200	106	113	328	303	547	581	216	176	3	27

Tabel 2.55.
Status Kemandirian Desa di Provinsi Maluku Tahun 2024 - 2025

Status Kemandirian Desa	Tahun			
	2024		2025	
	Jumlah	%	Jumlah	%
Mandiri	106	8,83	113	9,42
Maju	328	27,33	303	25,25
Berkembang	547	45,58	581	48,42
Tertinggal	216	18,0	176	14,67
Sangat Tertinggal	3	0,25	27	2,25

Dengan adanya penambahan dimensi pengukuran kemandirian desa mengakibatkan terjadinya perubahan status kemandirian desa di beberapa kabupaten/kota di Maluku. Secara akumulasi status kemandirian desa yang mengalami penurunan terdapat pada status "Sangat Tertinggal" dan "Maju", sedangkan yang mengalami peningkatan status terdapat pada status kemandirian "Mandiri", "Berkembang", dan "Tertinggal".

Perubahan status kemandirian desa secara garis besar dipengaruhi oleh dimensi Tata Kelola Pemerintah Desa yang memang masih menjadi pekerjaan rumah yang sering dihadapi desa-desa di Maluku. Oleh karena itu fungsi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa menjadi hal yang sangat penting untuk ditingkatkan kinerjanya pada tahun-tahun mendatang.

Perangkat daerah yang bertanggungjawab atas pencapaian sasaran strategis "Meningkatnya Konektivitas antar Wilayah dan Pembangunan Infrastruktur yang Berkualitas dan Merata" adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Dinas Perhubungan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa, dan Dinas Energi Sumber

Daya Mineral. Sedangkan anggaran Program penunjang sasaran strategis ini adalah:

Tabel 2.56.
Anggaran dan Realisasi Program Penunjang Sasaran
Meningkatnya Konektivitas antar Wilayah dan Pembangunan Infrastruktur yang
Berkualitas dan Merata

No	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Program Administrasi Pemerintahan Desa	7,499,000.00	7,499,000.00	100.00
2	Program Penyelenggaraan Jalan	46,634,534,082.00	27,196,217,745.00	58.32
3	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	6,309,456,914.00	3,268,944,184.00	51.81
4	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	1,054,560,000.00	893,241,872.00	84.70
5	Program Pengelolaan Pelayaran	338,790,000.00	293,272,620.00	86.56
6	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	617,654,390.00	460,024,150.00	74.48
7	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	284,699,625.00	284,105,750.00	99.79
8	Program Penataan Bangunan Gedung	2,557,475,500.00	1,942,402,500.00	75.95
9	Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya	25,260,682,200.00	21,123,819,942.00	83.62
10	Program Pengelolaan Ketenagalistrikan	45,905,332,300.00	35,273,921,984.00	76.84
11	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	139,176,000.00	119,745,218.00	86.04
12	Program Pengelolaan Mineral dan Batubara	625,000,000.00	617,685,160.00	98.83
13	Program Pengelolaan Aspek Kegeologian	2,148,264,590.00	1,734,044,499.00	80.72
14	Program Pengembangan Permukiman	44,999,900.00	38,627,121.00	85.84
16	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	7,693,040,600.00	7,690,111,504.00	99.96
Jumlah		142,170,521,101.00	102,671,238,053.00	72.22

(data sementara)

SASARAN 9

Meningkatnya Perkembangan Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Berdaya Saing dan Berkelanjutan

Sasaran Strategis ini merupakan penjabaran terhadap Tujuan “Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi Daerah yang Inklusif, dan Pemerataan Pembangunan yang Berkelanjutan”. Hasil pengukuran Sasaran Meningkatnya Perkembangan Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Berdaya Saing dan Berkelanjutan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.57.
Capaian Sasaran Meningkatnya Perkembangan Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Berdaya Saing dan Berkelanjutan
Tahun 2025

Indikator Kinerja		Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Persentase PDRB Sektor Pariwisata	6,52%	1,45%	22,23
Rata-Rata Capaian Kinerja				22,23

Tabel 2.58.
Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Sasaran 9
antara Tahun 2024 s/d Tahun 2025

Kinerja		2024		2025	
		Real. Kinerja	Cap. Kinerja	Real. Kinerja	Cap. Kinerja
1	Persentase PDRB Sektor Pariwisata	1,45%	22,27%	1,45%	22,23%

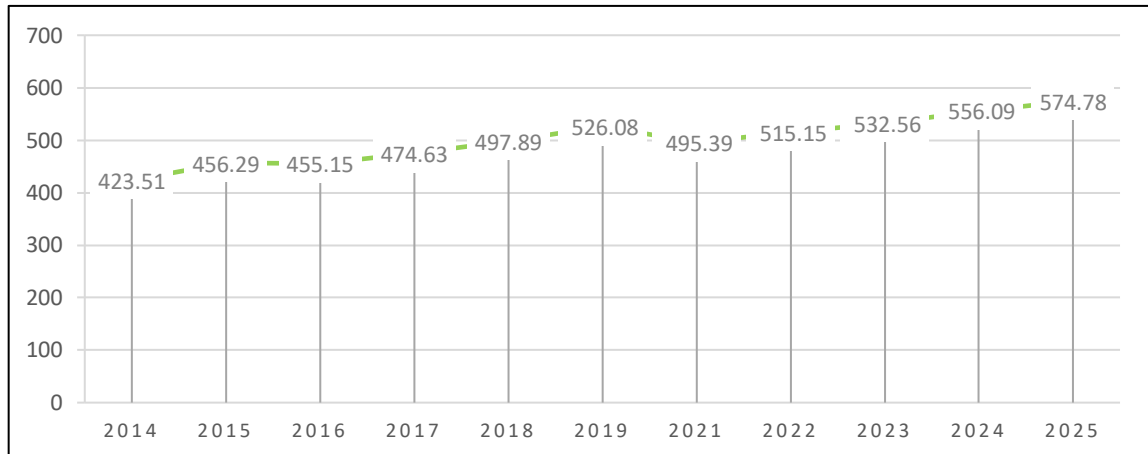
Tabel 2.59.
Perbandingan Realisasi Sasaran 9
Tahun 2024 s/d 2025 dengan Tahun Akhir periode RPD

Kinerja		Realisasi 2024	Realisasi 2025	Target Tahun Akhir RPD
1	Persentase PDRB Sektor Pariwisata	1,45%	1,45%	6,53%

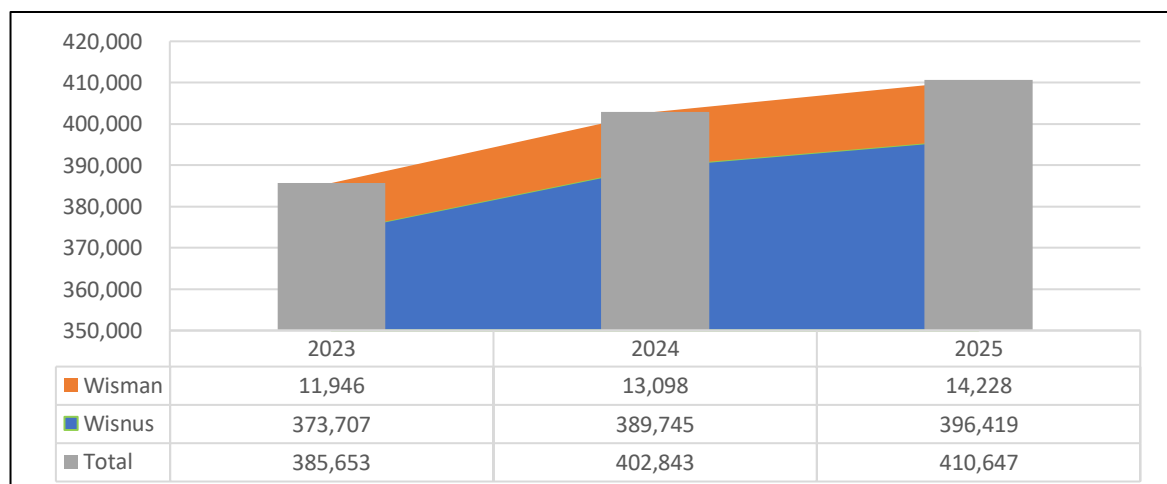
Kinerja Persentase PDRB Sektor Pariwisata target yang ditetapkan Pemerintah Provinsi Maluku tahun 2025 adalah sebesar 6,52% pada prosesnya realiasi persentase PDRB sektor pariwisata tahun 2025 adalah sebesar 1,45% sehingga capaian kinerjanya adalah sebesar 22,23% atau dengan kategori “Sangat Kurang”.

Target pemerintah Provinsi Maluku di akhir Tahun RPD untuk sektor pariwisata yaitu sebesar 6,53%. Dengan memperhatikan realisasi beberapa tahun terakhir target tersebut terlampaui tinggi untuk dicapai. Oleh karenanya, hal ini akan

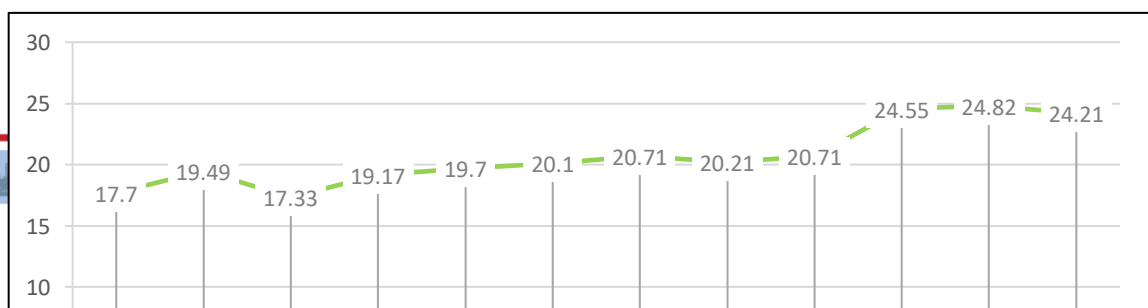
menjadi perhatian bagi Pemerintah Provinsi Maluku kedepan agar penentuan target kinerja memperhatikan realisasi kinerja beberapa tahun sebelumnya, serta lebih berupaya untuk menciptakan kemajuan pariwisata di Provinsi Maluku dengan menerapkan kebijakan skala prioritas berdasarkan kemampuan keuangan Daerah. Berikut adalah gambar perkembangan pertumbuhan PDRB Lapangan Usaha Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum (Pariwisata) Provinsi Maluku dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2025, data kunjungan wisatawan serta data Tingkat Penghunian Kamar (TPK) hotel di Provinsi Maluku.



Gambar 2.43. Pertumbuhan PDRB (Miliar Rupiah) Lapangan Usaha Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum (Pariwisata) Tahun 2014 - 2025



Gambar 2.44. Jumlah Kunjungan Wisatawan ke Provinsi Maluku Tahun 2023 - 2025



**Gambar 2.45. Tingkat Penghunian Kamar Hotel
Di Provinsi Maluku Tahun 2025**

Berdasarkan data-data yang ada, sektor pariwisata Provinsi Maluku terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahunnya hal ini terlihat dari peningkatan PDRB Lapangan Usaha Akomodasi dan Konsumsi dan jumlah kunjungan wisatawan tiap tahunnya.

Hal ini bisa terjadi karena adanya pengembangan kepariwisataan, pemeliharaan, pelestarian dan peningkatan daya tarik wisata melalui penataan ruang dan penyediaan sarana prasarana yang dibutuhkan secara bertahap, pemasaran promosi wisata Maluku yang terus menerus dilakukan diseluruh platform media sosial serta kerjasama dengan beberapa influencer dan stakeholder terkait, peluncuran kalender event, penyelenggaraan event/festival budaya daerah yang unik dan khas dari masing-masing kabupaten/kota di Maluku serta pengembangan Desa Wisata yang sampai dengan tahun 2025 telah menetapkan sebanyak 168 desa menjadi Desa Wisata beberapa hal diatas merupakan upaya yang telah dilakukan untuk menarik perhatian wisatawan agar memiliki alasan melakukan kunjungan wisatawan ke Maluku.

Menjadi alasan mengapa dibentuknya jumlah desa wisata harus terus bertambah karena selain menambah penghasilan dan penyediaan lapangan pekerjaan pun dengan adanya desa wisata secara otomatis menyadarkan masyarakat untuk menjaga lingkungan hidup agar tetap lestari dan menjadi salah satu pemikat bagi wisatawan, dapat merangsang pertumbuhan industri pariwisata dan mendorong perkembangan destinasi.

Perangkat daerah yang bertanggung jawab atas pencapaian sasaran strategis "Meningkatnya Ekonomi Pariwisata Daerah" adalah Dinas Pariwisata Provinsi Maluku. Sedangkan anggaran program penunjang sasaran strategis ini dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 2.60.
Anggaran dan Realisasi Program Penunjang Sasaran
Meningkatnya Ekonomi Pariwisata Daerah**

No	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	1,565,289,644.00	1,225,466,324.00	78.29
2	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	228,263,382.00	219,458,734.00	96.14
3	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	285,040,800.00	273,178,508.00	95.84
4	Program Pemasaran Pariwisata	189,392,900.00	185,423,464.00	97.90
Jumlah		2,267,986,726.00	1,903,527,030.00	83.93

(data sementara)

SASARAN 10

Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan dan Ketahanan Bencana

Sasaran Strategis ini merupakan penjabaran terhadap Tujuan “Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi Daerah yang Inklusif, dan Pemerataan Pembangunan yang Berkelanjutan”. Hasil pengukuran Sasaran Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan dan Ketahanan Bencana dapat dilihat pada tabel-tabel berikut:

Tabel 2.61.
Capaian Sasaran Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan dan Ketahanan Bencana Tahun 2025

Indikator Kinerja		Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Persentase Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca	24,17%	68,65%*	100
2	Indeks Resiko Bencana	159,90	161,50**	99
Rata-Rata Capaian Kinerja				99,5

* Realisasi 2023

** Realisasi 2024

Tabel 2.62.
Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Sasaran 10 antara Tahun 2024 s/d Tahun 2025

Kinerja		2024		2025	
		Real. Kinerja	Cap. Kinerja	Real. Kinerja	Cap. Kinerja
1	Persentase Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca	68,65%*	100%	68,65%*	100%
2	Indeks Resiko Bencana	161,50	99,03%	161,50**	99%

Tabel 2.63.
Perbandingan Realisasi Sasaran 10
Tahun 2024 s/d 2025 dengan Tahun Akhir periode RPD

Kinerja		Realisasi 2024	Realisasi 2025	Target Tahun Akhir RPD
1	Persentase Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca	68,65%*	68,65%*	23,77%
2	Indeks Resiko Bencana	161,50	161,50**	159,85

Target kinerja "Persentase Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK)" yang ingin dicapai di Tahun 2025 adalah 24,17%, perhitungan penurunan GRK yang terakhir dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku adalah perhitungan GRK tahun 2023 (untuk pelaporan tahun 2024) oleh sebab itu kinerja ini menggunakan realisasi tahun 2023. Realisasi penurunan GRK tahun 2023 adalah 68,65% atau sebesar 3.047,16 Gg CO₂eq sehingga capaian kinerjanya adalah 284,02%, untuk mempermudah interpretasi penilaian maka capaian tersebut dibulatkan menjadi 100% atau dengan skala nilai peringkat kinerja masuk kedalam kategori "Sangat Memuaskan".

Target kinerja "Indeks Risiko Bencana (IRB)" yang ingin dicapai di Tahun 2025 adalah menekan IRB diangka 159,90, belum terdapat nilai IRB Tahun 2025 sehingga perhitungan capaian kinerja menggunakan realisasi nilai IRB Provinsi Maluku Tahun 2024 yakni senilai 161,50 sehingga capaian kinerjanya adalah 99% atau dengan skala nilai peringkat kinerja masuk kedalam kategori "Sangat Memuaskan".

Berdasarkan rata-rata capaian kinerja kedua kinerja Sasaran Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan dan Ketahanan Bencana maka capaian kinerja sasaran ini adalah sebesar 99,5% atau atau dengan capaian kinerja masuk kedalam kategori "Sangat Memuaskan".

Inventarisasi Gas Rumah Kaca merupakan kegiatan sistematis untuk memperoleh data dan informasi berkala mengenai tingkat, status dan kecenderungan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) serta penyerapan (sink) yang digunakan oleh pemerintah daerah dalam mengidentifikasi sumber emisi dan merumuskan strategi pengurangan emisi yang efektif dan terukur melalui rencana aksi daerah. Kegiatan ini mengacu pada PERPRES 98 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon untuk Pencapaian Target Kontribusi yang di Tetapkan

Secara Nasional dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca dalam Pembangunan Nasional.

Sumber emisi dalam Inventarisasi Gas Rumah Kaca (IGRK) berasal dari lima sektor utama menurut pedoman IPCC yaitu Energi, Limbah, Pertanian, Kehutanan dan IPPU (industri). Gas utama yang dipantau meliputi Karbon Dioksida (CO₂), Metana (CH₄) dan Nitrogen Oksida (N₂O), Hydrofluorocarbons (HFCs), Perfluorocarbons (PFCs) dan Sulfur Hexafluoride (SF₆).

Tabel 2.64.
Rincian Target dan Realisasi Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca
Provinsi Maluku Tahun 2019 - 2024

No	Tahun	Target Penurunan (%)	Realisasi (%)
1	2019	20,12	27,10
2	2020	20,94	24,99
3	2021	21,76	24,20
4	2022	22,58	28,51
5	2023	23,40	68,65
6	2024	24,22	n.a

Pada tahun 2023 (pelaporan tahun 2024) emisi GRK di Provinsi Maluku adalah sebesar 3.360.490ton CO₂eq berdasarkan hasil inventarisasi GRK, sementara pada tahun 2024, emisi GRK di Maluku adalah sebesar 3.539.600ton CO₂eq. Berdasarkan data ini, terjadi peningkatan sebesar 179.110ton CO₂eq atau 5,33% dari tahun sebelumnya (2022). Emisi GRK untuk Provinsi Maluku ini disumbang berturut-turut dari yang tertinggi ke yang terendah adalah pada sektor energi sebesar 2.360.370ton CO₂eq atau 66,69%, diikuti oleh sektor limbah sebesar 587.970ton CO₂eq atau 16,61% dan sektor pertanian sebesar 436.400ton CO₂eq atau 12,33% selanjutnya pada sektor kehutanan dan penggunaan lahan yakni sebesar 149.810ton CO₂eq atau berkontribusi sebesar 4,23%, dan terakhir pada sektor IPPU sebesar 5.050ton CO₂eq atau 0,14%.

Sementara itu, dari hasil proyeksi kenaikan emisi GRK berdasarkan baseline, diprediksi estimasi emisi GRK tahun 2023 adalah sebesar 11.018.020ton CO₂eq. Dengan demikian proyeksi kenaikan terhadap data real inventarisasi terjadi penurunan sebesar 7.478.420ton CO₂eq dengan persentase sebesar 67,87% (berdasarkan hasil inventarisasi). Nilai persentase penurunan ini melebihi target yang ditetapkan pada tahun pelaporan 2024 yakni sebesar 24,22%. Perlu ditambahkan beberapa data yang diperoleh dalam realisasi ini merupakan data yang dinamis. Pada tahun ini data dari sektor IPPU sudah dapat input ke dalam sistem Sign-Smart Kementerian Lingkungan Hidup.

Secara keseluruhan Provinsi Maluku sampai dengan tahun 2024 masih merupakan provinsi yang menyerap emisi GRK dengan total serapan sebesar -

14.005,000ton CO₂eq atau meningkat 1,24% dari tahun sebelumnya yang serapannya -13.833.650ton CO₂eq. Jumlah ini diperoleh dari emisi yang dapat diserap dari sektor kehutanan yakni sebesar -17.544.600ton CO₂eq dikurangi emisi yang dilepaskan dari kelima sektor (kehutanan, energi, IPPU, limbah dan pertanian) yakni 3.539.600ton CO₂eq.

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) adalah nilai yang menggambarkan kualitas Lingkungan Hidup dalam suatu wilayah pada waktu tertentu, yang merupakan nilai komposit dari Indeks Kualitas Air (IKA) dengan pengukuran berdasarkan parameter-parameter Ph, DO, BOD, COD, TSS, Nitrat (NO³), Total Fosfat (TP) dan Fecal Coliform; Indeks Kualitas Udara (IKU) dengan pengukuran berdasarkan parameter SO₂ dan NO₂; Indeks Kualitas Lahan (IKL) dengan pengukuran berdasarkan luas tutupan hutan; dan Indeks Kualitas Air Laut (IKAL) dengan pengukuran berdasarkan parameter-parameter Residu Tersuspensi (TSS), Oksigen Terlarut (DO), Ammonia (N-NH³), Orto-fosfat (O-PO₄), serta Minyak dan Lemak. Adapun rumus serta kategori IKLH yang digunakan dalam perhitungan IKLH Provinsi adalah sebagai berikut:

$$\text{IKLH Provinsi} = (0,340 \times \text{IKA}) + (0,428 \times \text{IKU}) + (0,133 \times \text{IKL}) + (0,099 \times \text{IKAL})$$

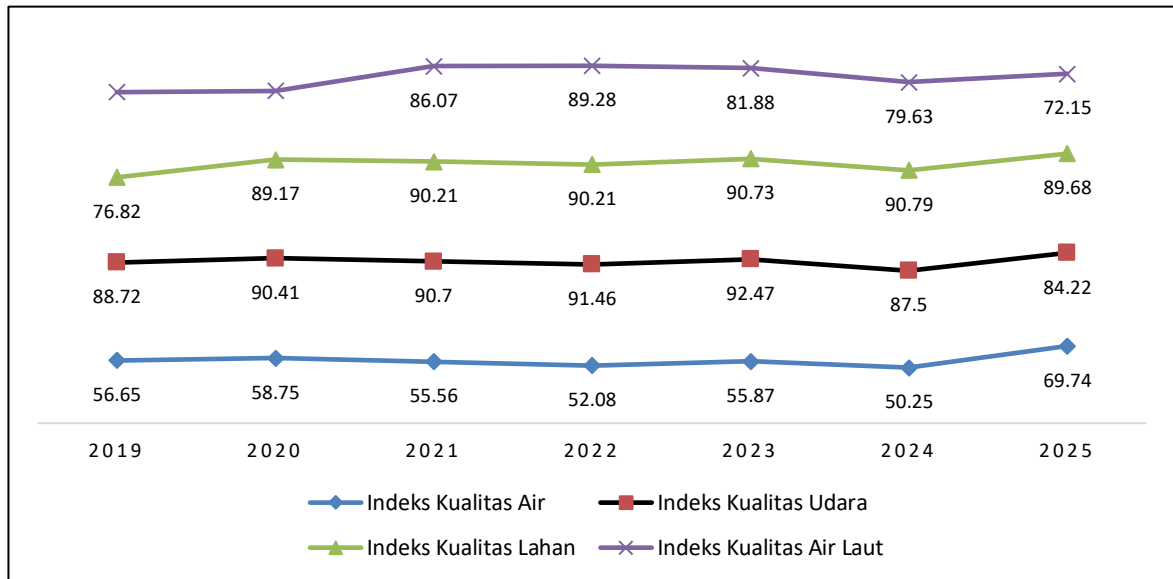
Tabel 2.65.
Kategori Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

No	Kategori	Angka Rentang
1	Sangat Baik	$90 \leq x \leq 100$
2	Baik	$70 \leq x < 90$
3	Sedang	$50 \leq x < 70$
4	Kurang	$25 \leq x < 50$
5	Sangat Kurang	$0 \leq x < 25$

Berikut adalah tabel serta grafik Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Provinsi Maluku dalam kurun waktu Tahun 2020 s/d 2025:

Tabel 2.66.
Indeks Indeks Kualitas Lingkungan Hidup
Provinsi Maluku Tahun 2020-2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Indeks Kualitas Air	58,75	55,56	52,08	55,87	50,25	69,74
Indeks Kualitas Udara	90,41	90,70	91,46	92,47	87,50	84,2
Indeks Kualitas Lahan	89,17	90,21	90,21	90,73	90,79	89,68
Indeks Kualitas Air Laut	62,14	86,07	89,28	81,88	79,63	72,15
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	76,68	78,23	77,69	78,75	78,71	78,83

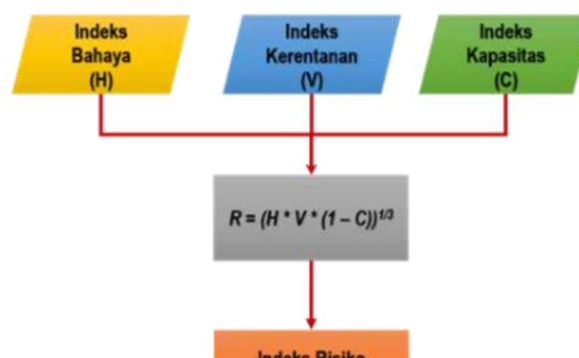


Gambar 2.46. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku Tahun 2019 – 2025

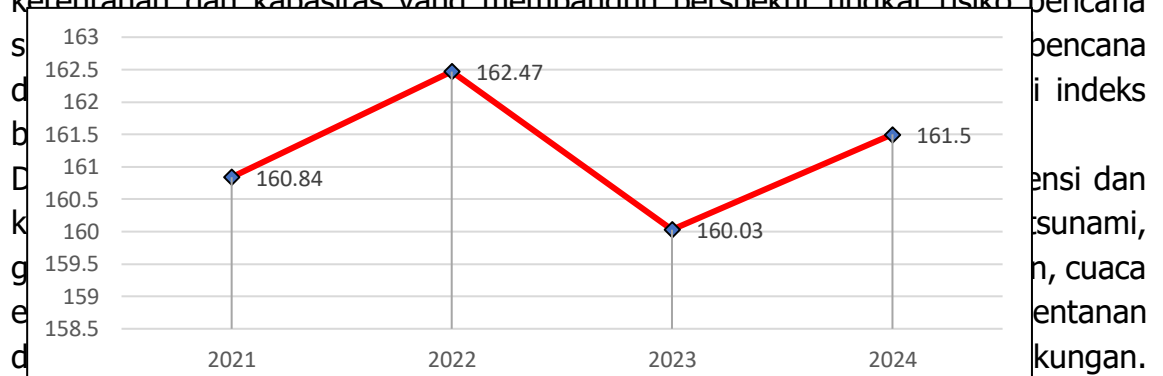
Melihat pemaparan data diatas, dapat disimpulkan bahwa dalam kurun waktu 5 tahun belakang ini semua data Indeks Melampaui target yang telah ditetapkan secara Nasional kecuali data Indeks Kualitas Air, untuk kategori “Baik”, atau range nilai $70 \leq x < 90$ adalah Indeks Kualitas Udara, Indeks Kualitas Air Laut dan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup dan untuk kategori “Sangat Baik”, atau range nilai $90 \leq x \leq 100$ adalah Indeks Kualitas Lahan.

Indonesia memiliki risiko bencana yang tinggi sebagai konsekuensi letak negara ini dari sisi geologis dan geografis. Secara geologis, Indonesia berada pada pertemuan empat lempeng utama yaitu Eurasia, Indo Australia, Filipina, dan Pasifik yang menjadikan Indonesia rawan bencana gempa bumi, tsunami, dan letusan gunung api. Disisi lain, kondisi geografis Indonesia yang berada di daerah tropis dan pada pertemuan dua samudera dan dua benua membuat wilayah ini rawan akan bencana banjir, tanah longsor, banjir bandang, cuaca ekstrim, gelombang ekstrim dan abrasi, dan kekeringan yang juga dapat memicu kebakaran hutan dan lahan.

Wilayah Provinsi Maluku sendiri termasuk dalam wilayah “ring of fire” atau cincin api dikarenakan adanya pertemuan tiga lempeng besar yaitu lempeng Pasifik, Indo Australia dan Eurasia sehingga kejadian gempa bumi cukup sering terjadi, selain itu Maluku juga rentan terhadap bencana tsunami, banjir, tsunami, tanah longsor, kebakaran hutan dan lahan, kekeringan, gelombang ekstrim dan abrasi. Indeks Risiko Bencana (IRB) ini dihitung berdasarkan rumus berikut:



Pendekatan ini digunakan untuk memperlihatkan hubungan antara bahaya, kerentanan dan kapasitas yang membangun perspektif tingkat risiko bencana



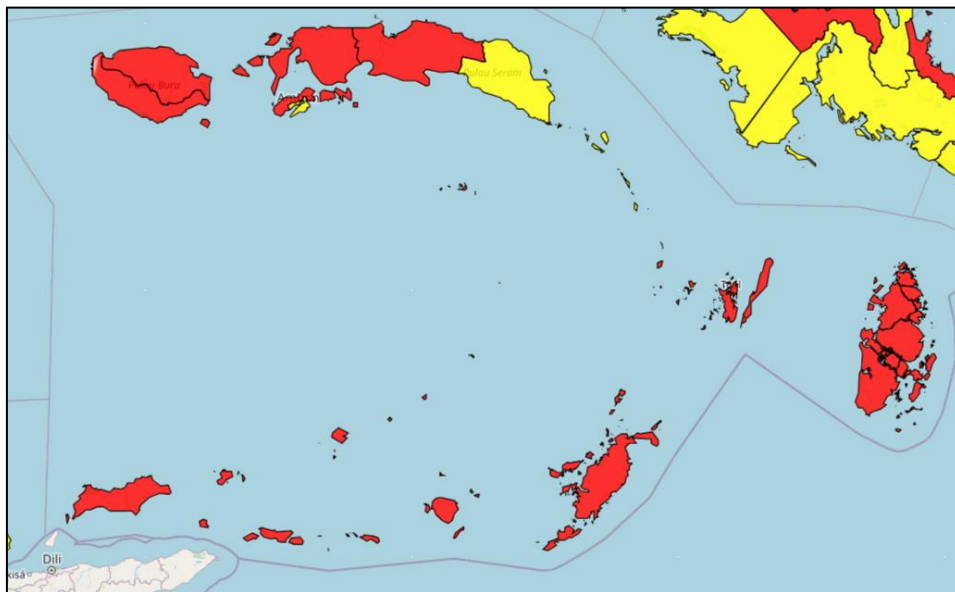
Indeks kapasitas dinilai dengan menggunakan pendekatan tingkat ketahanan daerah berdasarkan tujuh prioritas yaitu: (1) Perkuatan kebijakan dan kelembagaan; (2) Pengkajian risiko dan perencanaan terpadu; (3) Pengembangan sistem informasi, diklat dan logistik; (4) Penanganan tematik kawasan rawan bencana; (5) Peningkatan efektivitas pencegahan dan mitigasi bencana; (6) Perkuatan kesiapsiagaan dan penanganan darurat bencana; dan (7) Pengembangan sistem pemulihan bencana. Berikut adalah range nilai Indeks Resiko Bencana:

Nilai	Kategori/Kelas
<13	RENDAH
13-144	SEDANG
>144	TINGGI

Berdasarkan hasil pengukuran IRB Tahun dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2024 Provinsi Maluku termasuk kedalam provinsi yang memiliki kelas risiko "Tinggi".

**Gambar 2.47. Indeks Risiko Bencana Provinsi Maluku
Tahun 2021-2024**

Pengkajian IRB provinsi didapat berdasarkan penarikan kesimpulan kelas yang dimulai dari tingkat desa, tingkat kecamatan, hingga tingkat kabupaten/kota. Nilai indeks mayoritas digunakan untuk menentukan kelas per desa, kelas maksimal per desa digunakan untuk menentukan kelas di tingkat kecamatan. Selanjutnya kelas maksimal per kecamatan digunakan untuk menentukan kelas di tingkat kabupaten, sedangkan untuk menentukan kelas di tingkat provinsi menggunakan kelas maksimal per kabupaten/kota.



**Gambar 2.48. Peta Risiko Bencana Provinsi Maluku
Tahun 2024**

Tabel 2.67.
Indeks Risiko Bencana per Kabupaten/Kota se-Provinsi Maluku
Tahun 2019-2024

No	Kabupaten/Kota	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Maluku Barat Daya	223,20	223,20	223,20	216,64	211,39 (Tinggi)	212,91 (Tinggi)
2	Kepulauan Aru	114,73	114,73	125,19	125,19	125,19 (Sedang)	183,80 (Tinggi)
3	Kepulauan Tanimbar	154,81	154,81	154,81	163,60	160,59 (Tinggi)	180,60 (Tinggi)
4	Seram Bagian Barat	170,18	170,18	170,18	167,46	159,51 (Tinggi)	163,45 (Tinggi)
5	Maluku Tenggara	169,00	169,00	172,06	172,06	172,06 (Tinggi)	172,06 (Tinggi)
6	Tual	168,00	168,00	168,00	168,00	168,00 (Tinggi)	168,00 (Tinggi)
7	Buru Selatan	155,20	155,20	155,20	155,20	155,20 (Tinggi)	155,20 (Tinggi)
8	Maluku Tengah	181,20	181,20	181,20	181,20	180,60 (Tinggi)	162,48 (Tinggi)
9	Buru	136,55	136,55	135,08	148,44	143,28 (Sedang)	153,72 (Tinggi)
10	Seram Bagian Timur	186,00	186,00	186,00	186,00	183,25 (Tinggi)	125,19 (Sedang)
11	Ambon	105,02	105,02	98,33	103,40	101,38 (Sedang)	99,07 (Sedang)

Nilai Indeks Risiko Bencana (IRB) Provinsi Maluku tahun 2024 meningkat yakni 161,50 dibanding Indeks Risiko Bencana (IRB) tahun 2023 yakni 160,33. Artinya terjadi penurunan kinerja dikarenakan realisasi atau capaian IRB diatas target yakni 159,95. Nilai IRB didapat dari hasil penilaian mandiri Indeks Kapasitas Daerah (IKD) Provinsi Maluku pada Kabupaten/Kota se-Provinsi Maluku, hal ini dikarenakan Hasil IRB Nasional pada Provinsi Maluku belum dirilis. Adapun hasil dari penilaian mandiri Indeks Kapasitas Daerah (IKD) Provinsi Maluku adalah terdapat 6 kabupaten/kota dengan penilaian kategori "Rendah" yakni Kabupaten Kep. Aru, Kabupaten Tanimbar, Kabupaten Buru, Kabupaten Seram Bagian Barat, Kabupaten Maluku Barat Daya dan Kota Tual. sedangkan 2 Kabupaten/kota dengan penilaian "sedang" yakni Kabupaten Maluku Tengah dan Kota Ambon. selain itu terdapat 3 Kabupaten/kota yang tidak melakukan penilaian yakni Kabupaten Maluku Tenggara, Kabupaten Seram Bagian Timur dan Kabupaten Buru Selatan.

Untuk diketahui Indeks Kapasitas Daerah (IKD) merupakan bagian dari perhitungan Indeks Risiko Bencana (IRB), IKD dinilai setiap tahun untuk mengukur keberhasilan capaian kegiatan penanggulangan bencana, dengan demikian IKD dan IRB menjadi raport bagi Pemerintah Daerah di bidang penanggulangan bencana. oleh karena itu Badan Penanggulangan Bencana

Provinsi Maluku telah memfasilitasi penilaian mandiri Indeks Kapasitas Daerah (IKD) dan berkoordinasi dengan Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota untuk melakukan penilaian Indeks Kapasitas Daerah (IKD) Kabupaten/Kota terhadap 71 dan 284 pertanyaan dalam penilaian IKD.

Untuk meminimalisir risiko bencana maka Pemerintah Provinsi Maluku dan kabupaten/kota secara terus-menerus berupaya mengurangi risiko bencana dengan berfokus pada upaya peningkatan indeks kapasitas dengan cara sosialisasi, komunikasi, informasi, dan edukasi rawan bencana; pengelolaan risiko bencana; penyusunan dokumen rencana kontinjensi; penyusunan kajian risiko bencana; dan Table Top Exercise gempa bumi dan tsunami, banjir dan tanah longsor.

Perangkat daerah yang bertanggungjawab atas pencapaian sasaran strategis “Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan dan Ketahanan Bencana” adalah Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Maluku. Sedangkan anggaran Program penunjang sasaran strategis ini adalah:

Tabel 2.68.
Anggaran dan Realisasi Program Penunjang Sasaran
Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan dan
Ketahanan Bencana

No	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Program Penanggulangan Bencana	180,888,400.00	163,602,679.00	90.44
2	Program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan	1,337,550,000.00	1,038,439,081.00	77.64
3	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	8,711,300.00	8,710,400.00	99.99
4	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	59,999,600.00	56,499,600.00	94.17
5	Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	25,642,000.00	23,892,000.00	93.18
6	Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	267,990,000.00	243,096,271.00	90.71
7	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	20,784,000.00	17,844,000.00	85.85

No	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
8	Program Penanganan Bencana	255,000,000.00	249,933,240.00	98.01
Jumlah		2,156,565,300.00	1,802,017,271.00	83.56

(data sementara)

SASARAN 11**Meningkatnya Ketahanan Pangan Daerah**

Sasaran Strategis ini merupakan penjabaran terhadap Tujuan “Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi Daerah yang Inklusif, dan Pemerataan Pembangunan yang Berkelanjutan”. Hasil pengukuran Sasaran Meningkatkan Ketahanan Pangan Daerah dapat dilihat pada tabel-tabel berikut:

Tabel 2.69.
Capaian Sasaran Meningkatkan Ketahanan Pangan Daerah
Tahun 2025

Indikator Kinerja		Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Indeks Ketahanan Pangan	72,75	57,18	78,59
Rata-Rata Capaian Kinerja				100

Tabel 2.70.
Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Sasaran 11
antara Tahun 2024 s/d Tahun 2025

Kinerja		2024		2025	
		Real. Kinerja	Cap. Kinerja	Real. Kinerja	Cap. Kinerja
1	Indeks Ketahanan Pangan	62,68	87,48%	57,18	78,59%

Tabel 2.71.
Perbandingan Realisasi Sasaran 11
Tahun 2024 s/d 2025 dengan Tahun Akhir periode RPD

Kinerja		Realisasi 2024	Realisasi 2025	Target Tahun Akhir RPD
1	Indeks Ketahanan Pangan	62,68	57,18	79,03

Target Indeks Ketahanan Pangan yang ingin dicapai Provinsi Maluku ditahun 2025 adalah 72,75, realisasi yang dicapai adalah 57,18 sehingga capaian kinerjanya adalah 78,59% atau dengan skala nilai peringkat kinerja masuk kedalam kategori “Sangat Baik”.

Ketahanan Pangan merupakan suatu kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan. Dalam rangka mengetahui tingkat ketahanan pangan suatu wilayah beserta faktor-faktor pendukungnya, telah dikembangkan suatu sistem penilaian dalam bentuk IKP yang mengacu pada definisi ketahanan pangan dan subsistem yang membentuk sistem ketahanan pangan. Sembilan yang digunakan dalam penyusunan IKP merupakan turunan dari tiga aspek ketahanan pangan, yaitu ketersediaan, keterjangkauan dan pemanfaatan pangan. Pemilihan yang digunakan dalam IKP didasarkan pada: (i) hasil review terhadap indeks ketahanan pangan global; (ii) tingkat sensitivitas dalam mengukur situasi ketahanan pangan dan gizi; (iii) keterwakilan 3 pilar ketahanan pangan; dan (iv) ketersediaan data secara rutin untuk periode tertentu (tahunan) serta mencakup seluruh kabupaten/kota dan provinsi. Tiga Aspek dan Sembilan yang dipilih sebagai dasar penentuan IKP serta rumus perhitungan IKP dan klasifikasi warna IKP sebagai berikut:

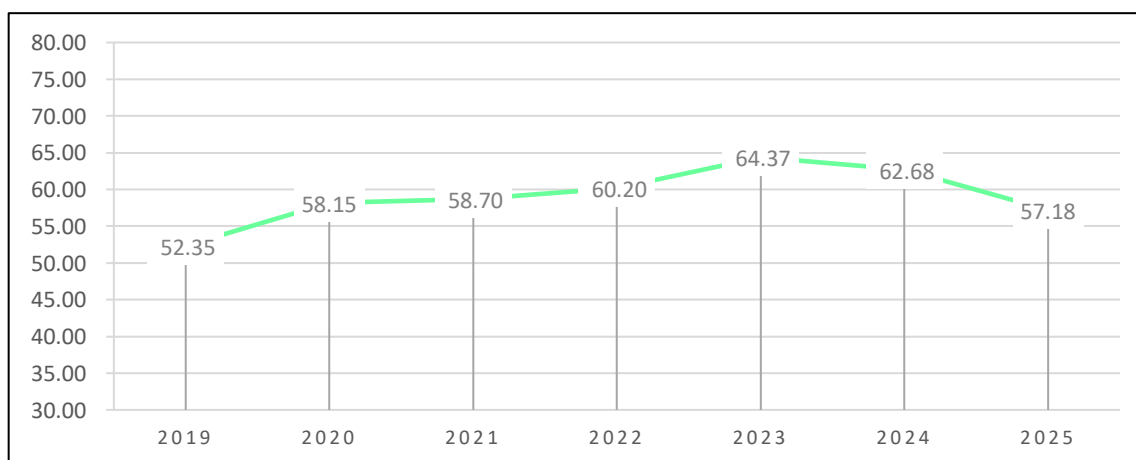
- Aspek Ketersediaan Pangan
 1. Rasio konsumsi normative terhadap produksi bersih beras, jagung, ubi jalar, ubi kayu dan sagu, serta stok pangan beras pemerintah daerah
- Aspek Keterjangkauan Pangan
 1. Persentase penduduk di bawah garis kemiskinan
 2. Persentase rumah tangga dengan proporsi pengeluaran untuk pangan lebih dari 65% terhadap total pengeluaran
 3. Persentase rumah tangga tanpa akses listrik
- Aspek Pemanfaatan Pangan
 1. Rata-rata lama sekolah Perempuan berusia di atas 15 tahun
 2. Persentase rumah tangga tanpa akses ke air bersih
 3. Rasio jumlah penduduk per tenaga kesehatan terhadap tingkat kepadatan penduduk
 4. Persentase balita *stunting*
 5. Angka harapan hidup pada saat lahir

$$Y(j) = \sum_{i=1}^9 a_i X_{ij}$$

Tabel 2.72.
Klasifikasi Indeks Ketahanan Pangan

Prioritas	Nilai IKP			Keterangan
	Kabupaten	Kota	Provinsi	
1	<=41,52	<=28,84	<=37,61	Sangat Rentan
2	>41,52 - 51,42	>28,84 - 41,44	>37,61 - 48,27	Rentan
3	>51,42 - 59,58	>41,44 - 51,29	>48,27 - 57,11	Agak Rentan
4	>59,58 - 67,75	>51,29 - 61,13	>57,11 - 65,96	Agak Tahan
5	>67,75 - 75,68	>61,13 - 70,64	>65,96 - 74,40	Tahan
6	>75,68	>70,64	>74,40	Sangat Tahan

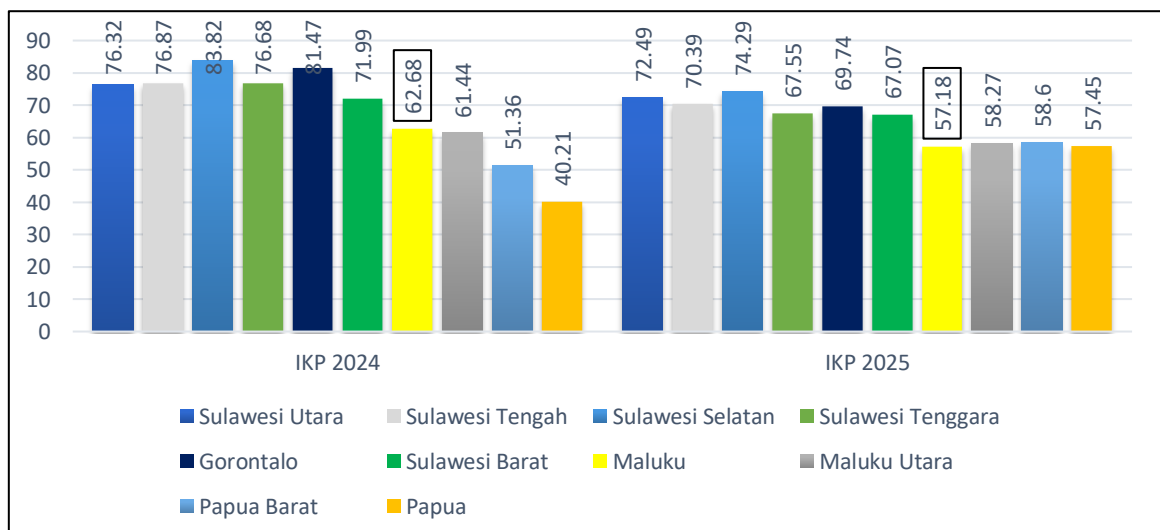
Berikut adalah nilai Indeks Ketahanan Pangan (IKP) Provinsi Maluku dari Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2025.



**Gambar 2.49. Indeks Ketahanan Pangan Provinsi Maluku
Tahun 2019 – 2025**

Indeks Ketahanan Pangan Provinsi Maluku di tahun 2025 masih berada pada posisi “Agak Tahan” dengan nilai 57,18, mengalami penurunan jika dibandingkan dengan IKP Tahun 2024 yang senilai 62,68 namun tetap pada posisi “Agak Tahan” dan secara umum IKP Provinsi Maluku cenderung stabil berada pada posisi “Agak Tahan” sejak tahun 2020 sampai dengan tahun 2025. Penurunan nilai IKP tahun 2025 juga dialami oleh beberapa provinsi lainnya hal ini disebabkan oleh adanya penambahan dalam perhitungan IKP.

Rata-rata nilai IKP Wilayah Indonesia bagian timur memiliki lebih rendah dibandingkan dengan provinsi-provinsi di wilayah Indonesia barat, hal ini disebabkan oleh produksi pangan wilayah lebih kecil dibanding kebutuhan (kurang), prevalensi balita stunting tinggi, akses air bersih yang terbatas, dan persentase penduduk hidup miskin tinggi. Berikut adalah Indeks Ketahanan Pangan (IKP) Provinsi Maluku dibandingkan dengan beberapa provinsi di wilayah Indonesia timur lainnya:



Gambar 2.50. Angka Indeks Ketahanan Pangan di Beberapa Provinsi Wilayah Indonesia Bagian Timur Tahun 2024-2025

Pembangunan ketahanan pangan dan gizi dilakukan secara sistemik dengan melibatkan lintas sektor serta penanganan yang komperhensif yang sesuai dengan faktor penyebabnya. Pendekatan ini diarahkan untuk mewujudkan ketersediaan pangan yang memadai melalui produksi pangan domestik dan perdagangan; tercapainya stabilitas ketersediaan dan akses pangan secara makro-meso dan mikro; tercukupinya kualitas (keragaman dan keamanan pangan) dan kuantitas konsumsi pangan yang didukung oleh perbaikan infrastruktur. Untuk mewujudkan kondisi tersebut, diperlukan dukungan kebijakan ekonomi makro yang mampu mewujudkan stabilitas ekonomi menjamin stabilitas pasokan dan harga pangan.

Perangkat daerah yang bertanggungjawab atas pencapaian sasaran strategis "Meningkatnya Ketahanan Pangan Daerah" adalah Dinas Ketahanan Pangan. Sedangkan anggaran Program penunjang sasaran strategis ini adalah:

Tabel 2.73.
Anggaran dan Realisasi Program Penunjang Sasaran
Meningkatnya Ketahanan Pangan Daerah

No	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	1,038,788,760.00	902,376,629.00	86.87
2	Program Penanganan Kerawanan Pangan	213,219,100.00	211,013,600.00	98.97
3	Program Pengawasan Keamanan Pangan	136,690,700.00	136,234,194.00	99.67
4	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan	24,386,000.00	24,110,000.00	98.87
Jumlah		1,413,084,560.00	1,273,734,423.00	90.14

SASARAN 12

Berkurangnya Beban Pengeluaran Penduduk Miskin

Sasaran Strategis ini merupakan penjabaran terhadap Tujuan "Mewujudkan Kesejahteraan Sosial Masyarakat Kepulauan secara Merata". Hasil pengukuran Sasaran Berkurangnya Beban Pengeluaran Penduduk Miskin dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.74.
Capaian Sasaran Berkurangnya Beban Pengeluaran Penduduk Miskin
Tahun 2025

Indikator Kinerja		Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Persentase Rumah Tangga Miskin (RTM) Penerima Bantuan Sosial	47%	-	-
Rata-Rata Capaian Kinerja				-

Tabel 2.75.
Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Sasaran 12
antara Tahun 2024 s/d Tahun 2025

Kinerja		2024		2025	
		Real. Kinerja	Cap. Kinerja	Real. Kinerja	Cap. Kinerja
1	Persentase Rumah Tangga Miskin (RTM) Penerima Bantuan Sosial	-	-	-	-

Tabel 2.76.
Perbandingan Realisasi Sasaran 12
Tahun 2024 s/d 2025 dengan Tahun Akhir periode RPD

Kinerja		Realisasi 2024	Realisasi 2025	Target Tahun Akhir RPD
1	Persentase Rumah Tangga Miskin (RTM) Penerima Bantuan Sosial	-	-	50%

Target kinerja "Persentase Rumah Tangga Miskin (RTM) Penerima Bantuan Sosial" yang ingin dicapai di Tahun 2025 adalah 47%, realisasi tahun 2025 tidak dapat dihitung disebabkan pada tahun 2025 bantuan sosial hanya diberikan kepada Kelompok Usaha Bersama (KUBE) sehingga perhitungan realisasi dan capaian kinerjanya tidak dapat dilakukan dengan demikian capaian kinerja sasaran ini belum dapat dikategorikan kinerjanya.

Penanganan masyarakat miskin ditahun 2025 yang dilakukan oleh Dinas Sosial Provinsi Maluku mengalami penurunan yang cukup signifikan hal ini disebabkan oleh pemotongan anggaran dari Pemerintah Pusat ke Daerah. Pemberian bantuan kepada masyarakat dilakukan dalam bentuk penyaluran bantuan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) kepada 5 Kelompok Usaha Bersama (KUBE) dengan total anggota berjumlah 75 orang.

Kondisi ini akan terus berlanjut ditahun mendatang jika tidak adanya perubahan kebijakan dari Pemerintah Pusat, oleh karena itu Pemerintah Provinsi Maluku akan berupaya mencari sumber pendanaan lain yang tentunya tidak bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku agar program pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin dapat terus dijalankan sehingga dapat menurunkan angka kemiskinan di Maluku.

Selain dari pada itu, penetapan yang lebih spesifik perlu diperhatikan disertai dengan penetapan definisi yang jelas terkait makna dan cara menghitung realisasi kinerjanya. Ini penting dilakukan mengingat banyaknya program-program bantuan kepada masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah daerah provinsi maupun kabupaten/kota, instansi vertikal maupun pihak ketiga yang belum terrekap dikarenakan ambiguitas dari memaknai kinerja.

Perangkat daerah yang bertanggungjawab atas pencapaian sasaran strategis “Meningkatnya Kualitas dan Penyerapan Tenaga Kerja” adalah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Maluku. Sedangkan anggaran Program penunjang sasaran strategis ini adalah:

Tabel 2.77.
Anggaran dan Realisasi Program Penunjang Sasaran
Meningkatnya Kualitas dan Penyerapan Tenaga Kerja

No	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Program Rehabilitasi Sosial	657,527,500.00	646,977,360.00	98.40
2	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	6,302,148,777.00	6,297,427,912.00	99.93
3	Program Kawasan Permukiman	7,514,503,725.00	6,942,869,376.00	92.39
4	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	525,814,800.00		-
5	Program Pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan. Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	2,259,788,000.00	1,934,720,684.00	85.62
6	Program Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	799,887,000.00	696,151,284.00	87.03
7	Program Penataan Desa	51,082,000.00	45,750,371.00	89.56
8	Program Peningkatan Kerjasama Desa	32,316,000.00	29,765,820.00	92.11
9	Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	70,637,500.00	70,527,500.00	99.84
10	Program Perekonomian dan Pembangunan	503,227,967.00	503,227,967.00	100.00
Jumlah		18,716,933,269.00	17,167,418,274.00	91.72

(data sementara)

SASARAN 13

Meningkatnya Kualitas dan Penyerapan Tenaga Kerja

Sasaran Strategis ini merupakan penjabaran terhadap Tujuan “Mewujudkan Kesejahteraan Sosial Masyarakat Kepulauan secara Merata”. Hasil pengukuran

Sasaran Meningkatnya Kualitas dan Penyerapan Tenaga Kerja dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.78.
Capaian Sasaran Meningkatnya Kualitas dan Penyerapan Tenaga Kerja
Tahun 2025

Indikator Kinerja		Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Tingkat Pengangguran Terbuka	6,06	6,11	99,17
Rata-Rata Capaian Kinerja				99,17

Tabel 2.79.
Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Sasaran 13
antara Tahun 2024 s/d Tahun 2025

Kinerja		2024		2025	
		Real. Kinerja	Cap. Kinerja	Real. Kinerja	Cap. Kinerja
1	Tingkat Pengangguran Terbuka	6,11%	99,01%	6,11%	99,17%

Tabel 2.80.
Perbandingan Realisasi Sasaran 13
Tahun 2024 s/d 2025 dengan Tahun Akhir periode RPD

Kinerja		Realisasi 2024	Realisasi 2025	Target Tahun Akhir RPD
1	Tingkat Pengangguran Terbuka	6,11%	6,11%	5,84%

Tabel 2.81.
Perbandingan Realisasi Sasaran 13
dengan Realisasi Nasional Tahun 2025

Kinerja		Realisasi Provinsi Maluku 2025	Realisasi Nasional 2025
1	Tingkat Pengangguran Terbuka	6,11%	4,74%

Target kinerja "Tingkat Pengangguran Terbuka" yang ingin dicapai di Tahun 2025 adalah 6,06%, realisasi tahun 2025 adalah 6,11% maka capaian kinerjanya adalah 99,17% atau dengan skala nilai peringkat kinerja masuk kedalam kategori "Sangat Memuaskan".

Penduduk usia kerja adalah penduduk yang berusia 15 tahun ke atas, terdiri atas Angkatan Kerja dan Bukan Angkatan Kerja. Angkatan Kerja adalah penduduk usia

kerja yang bekerja atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja, dan pengangguran. Bukan Angkatan Kerja adalah penduduk usia kerja yang sedang bersekolah, mengurus rumah tangga atau melakukan kegiatan lainnya. Pengangguran adalah penduduk yang tidak bekerja tetapi sedang mencari pekerjaan, atau sedang mempersiapkan suatu usaha baru atau penduduk yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapat pekerjaan, atau penduduk yang tidak mencari pekerjaan karena tidak mencari pekerjaan karena sudah diterima/mempunyai pekerjaan tetapi belum mulai bekerja.

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah penduduk usia kerja yang termasuk dalam kelompok pengangguran. Tingkat pengangguran terbuka diukur sebagai persentase pengangguran terhadap jumlah penduduk yang termasuk Angkatan kerja. Berikut adalah rumus perhitungan TPT dan tabel penduduk Provinsi Maluku menurut Jenis Kegiatan Utama.

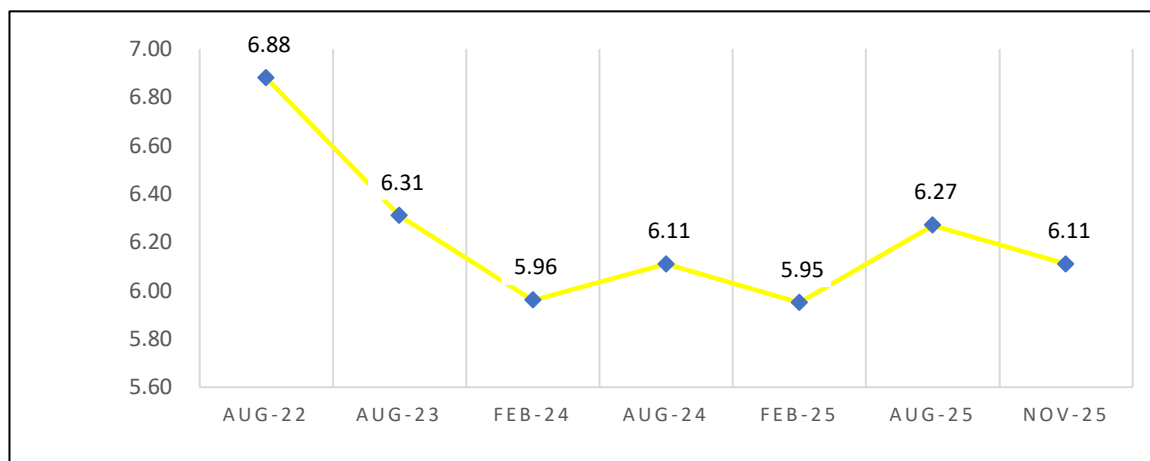
$$TPT = \frac{\text{Jumlah Penduduk Angkatan Kerja Menganggur}}{\text{Jumlah Penduduk Angkatan Kerja}}$$

Tabel 2.82.
Penduduk Provinsi Maluku Menurut Jenis Kegiatan Utama

No.	Jenis Kegiatan Utama	Agustus 2023	Agustus 2024	November 2025
1	Penduduk Usia Kerja (15 tahun ke atas)	1.432.063	1.453.486	1.481.940
2	Angkatan Kerja	910.758	966.813	996.759
	a. Bekerja	853.253	907.713	935.829
	b. Penganggur	57.504	59.100	60.930
3	Bukan Angkatan Kerja	458.259	486.673	485.181
4	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%)	63,60	66,52	67,26
5	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	6,31	6,11	6,11

Sumber BPS

Tingkat Pengangguran Terbuka di Provinsi Maluku dari tahun ketahun mengalami fluktuasi, periode Agustus 2022 merupakan jumlah penduduk menganggur tertinggi sebanyak 59.737 jiwa hal ini merupakan dampak dari pandemi global covid-19. Angka pengangguran berangsur membaik menjadi 5,96% di periode Februari 2024 dan selanjutnya fluktuatif sampai periode November 2025 menjadi 6,11% dengan jumlah penganggur sebanyak 60.930 jiwa. Berikut adalah gambar TPT Provinsi Maluku dari tahun 2022 sampai dengan tahun 2025 serta sebaran pekerjaan utama masyarakat Provinsi Maluku.



**Gambar 2.51. Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi Maluku
Periode Februari 2024 – November 2025**

**Tabel 2.83.
Penduduk Usia Kerja yang Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan Utama**

No	Lapangan Usaha	Agustus 2024	November 2025
A	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	288.342	307.876
B	Pertambangan dan Penggalian	18.111	31.843
C	Industri Pengolahan	105.403	105.960
D;E	Pengadaan Listrik dan Gas; Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah dan Daur Ulang	6.564	2.181
F	Konstruksi	36.208	39.286
G;I	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum	184.931	179.348
H;J	Pengangkutan dan Pergudangan; Informasi dan Komunikasi	60.484	54.448
K;L; M;N	Aktivitas Keuangan dan Asuransi; Real Estate; Aktivitas Profesional dan Perusahaan	19.665	12.372
O;P; Q;R;S; T;U	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib; Pendidikan; Aktivitas Kesehatan dan Kegiatan Sosial; Jasa Lainnya	188.005	202.515
Jumlah		907.713	935.829

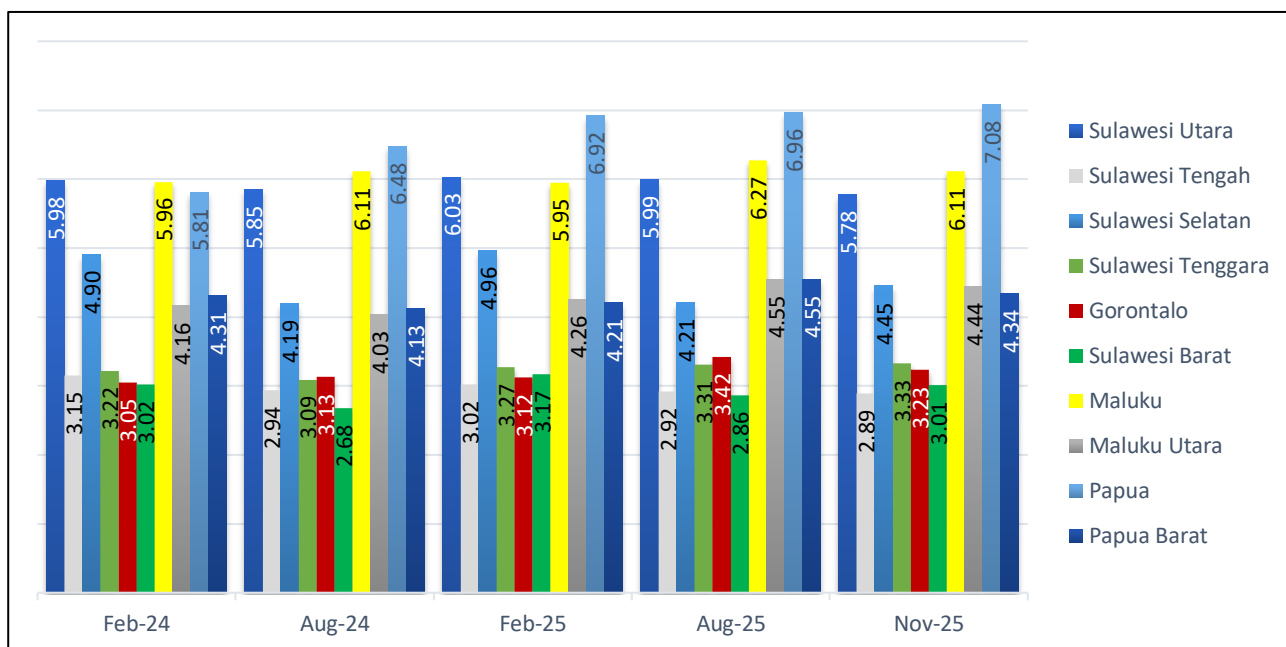
Sumber BPS

Tabel 2.84.
Penduduk Usia Kerja yang Bekerja Menurut Status Pekerjaan Utama

Status Pekerjaan Utama	Agustus 2024		November 2025	
	Jumlah	%	Jumlah	%
Berusaha Sendiri	278.567	30,69	232.094	24,80
Berusaha Dibantu Buruh Tidak Tetap/Buruh Tidak Dibayar	125.301	13,80	176.273	18,84
Berusaha Dibantu Buruh Tetap/Dibayar	17.086	1,88	13.523	1,45
Buruh/Karwayan/Pegawai	300.290	33,08	311.472	33,28
Pekerja Bebas di Pertanian	13.144	1,45	3.022	0,32
Pekerja Bebas di Nonpertanian	16.453	1,81	25.793	2,76
Pekerja Keluarga/Tidak Dibayar	156.872	17,28	173.652	18,56
Jumlah	907.713	100	935.829	100

Sumber BPS

Berikut adalah gambar perbandingan TPT Provinsi Maluku dengan Beberapa Provinsi Wilayah Indonesia Bagian Timur.



Gambar 2.52. Perbandingan Tingkat Pengangguran Terbuka di Beberapa Provinsi Wilayah Indonesia Bagian Timur Periode Februari 2024 – November 2025

Dari gambar diatas menunjukkan Provinsi Maluku memiliki TPT yang berada diposisi tertinggi jika dibandingkan dengan beberapa provinsi lainnya, hal tersebut sejalan dengan kondisi kesejahteraan masyarakat yang telah diuraikan pada Sasaran 8 sebelumnya.

Upaya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat Maluku diperlukan sinergitas semua pihak, baik pemerintah daerah (provinsi/kabupaten/kota), pemerintah pusat, pihak swasta dan tidak lupa peran serta masyarakat luas. Beberapa kebijakan yang dapat dilakukan antara lain mendorong Pemerintah Pusat untuk percepatan penyusunan kebijakan penyertaan luas laut dalam perhitungan Dana Alokasi Umum; pengembangan kreativitas masyarakat dalam memanfaatkan sumber daya alam khususnya sektor unggulan Maluku (perikanan dan perkebunan rempah-rempah); pemberdayaan masyarakat di pedesaan seperti peningkatan kapasitas Badan Usaha Milik Desa (BUMDES); pelatihan pengolahan produk unggulan kawasan pedesaan; pembinaan pengolahan pangan lokal; pendampingan pengembangan UMKM; menjaga stabilitas keamanan, ketertiban dan kepastian hukum untuk mendorong percepatan investasi; pendidikan dan pelatihan tenaga kerja dalam rangka peningkatan kompetensi; memperkuat ketahanan sosial dan budaya masyarakat berdasarkan nilai luhur budaya lokal dalam rangka peningkatan pariwisata; dan lain sebagainya.

Perangkat daerah yang bertanggungjawab atas pencapaian sasaran strategis "Meningkatnya Kualitas dan Penyerapan Tenaga Kerja" adalah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Maluku. Sedangkan anggaran Program penunjang sasaran strategis ini adalah:

Tabel 2.85.
Anggaran dan Realisasi Program Penunjang Sasaran
Meningkatnya Kualitas dan Penyerapan Tenaga Kerja

No	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Program Penempatan Tenaga Kerja	34,982,000.00	34,982,000.00	100.00
2	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	205,771,000.00	204,219,000.00	99.25
3	Program Perencanaan Tenaga Kerja	78,123,000.00	78,098,100.00	99.97
4	Program Pengawasan Ketenagakerjaan	179,482,000.00	179,381,887.00	99.94
Jumlah		498,358,000.00	496,680,987.00	99.66

(data sementara)

SASARAN 14

Terwujudnya Kerukunan antar Masyarakat yang Damai dan Harmonis

Sasaran Strategis ini merupakan penjabaran terhadap Tujuan “Mewujudkan Kesejahteraan Sosial Masyarakat Kepulauan secara Merata”. Hasil pengukuran Sasaran Terwujudnya Kerukunan antar Masyarakat yang Damai dan Harmonis dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.86.
Capaian Sasaran Terwujudnya Kerukunan antar Masyarakat yang Damai dan Harmonis Tahun 2025

Indikator Kinerja		Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Indeks Modal Sosial	80,43	77,73*	96,64
Rata-Rata Capaian Kinerja				100

* Realisasi 2021

Tabel 2.87.
Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Sasaran 14 antara Tahun 2024 s/d Tahun 2025

Kinerja		2024		2025	
		Real. Kinerja	Cap. Kinerja	Real. Kinerja	Cap. Kinerja
1	Indeks Modal Sosial	77,73*	97,4%	77,73*	96,64%

Tabel 2.88.
Perbandingan Realisasi Sasaran 14 Tahun 2024 s/d 2025 dengan Tahun Akhir periode RPD

Kinerja		Realisasi 2024	Realisasi 2025	Target Tahun Akhir RPD
1	Indeks Modal Sosial	77,73*	77,73*	82,33

Tabel 2.89.
Perbandingan Realisasi Sasaran 14 dengan Realisasi Nasional Tahun 2021

Kinerja		Realisasi Provinsi Maluku 2021	Realisasi Nasional 2021
1	Indeks Modal Sosial	77,73*	72,05

Target kinerja “Indeks Pembangunan Pemuda (IPP)” yang ingin dicapai di tahun 2025 adalah 58,11, nilai IPP yang terkini adalah IPP Tahun 2024 yang dikeluarkan oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga pada Oktober 2025 oleh karena itu perhitungan capaian menggunakan data realisasi IPP tahun 2024 yakni sebesar

54,67 sehingga capaian kinerjanya adalah 87,91% atau dengan capaian kinerja masuk kedalam kategori “Memuaskan”.

Indeks modal sosial pada dasarnya adalah cara untuk mengukur kualitas hubungan sosial dalam suatu masyarakat. Ia berangkat dari gagasan bahwa kepercayaan, jaringan, dan norma sosial merupakan “modal” yang bisa memperkuat kerja sama, memperlancar koordinasi, dan menurunkan biaya sosial maupun ekonomi.

Dalam kerangka konseptual, modal sosial mencakup tiga unsur utama: kepercayaan (trust), jaringan (networks), dan norma serta nilai bersama. Kepercayaan memungkinkan individu atau kelompok saling bergantung tanpa rasa curiga berlebihan; jaringan sosial menyediakan wadah untuk interaksi dan kolaborasi; sementara norma dan nilai bersama menjadi pedoman perilaku yang menjaga solidaritas. Ketiganya membentuk fondasi kohesi sosial yang dapat diukur melalui indeks.

Indeks modal sosial biasanya dirancang dengan seperti tingkat partisipasi warga dalam organisasi komunitas, keterlibatan dalam kegiatan gotong royong, kepatuhan pada aturan sosial, keterbukaan terhadap perbedaan, serta rasa percaya terhadap sesama maupun institusi. Dengan menggabungkan - ini, indeks memberikan gambaran kuantitatif tentang seberapa kuat ikatan sosial dalam suatu wilayah.

Fungsinya tidak sekadar akademis. Indeks modal sosial membantu pemerintah dan peneliti menilai kesiapan masyarakat untuk mendukung pembangunan, memperkuat demokrasi lokal, dan menjaga stabilitas sosial. Ia juga relevan dalam konteks ekonomi, karena modal sosial yang tinggi dapat mengurangi biaya transaksi dan meningkatkan efisiensi kerja sama.

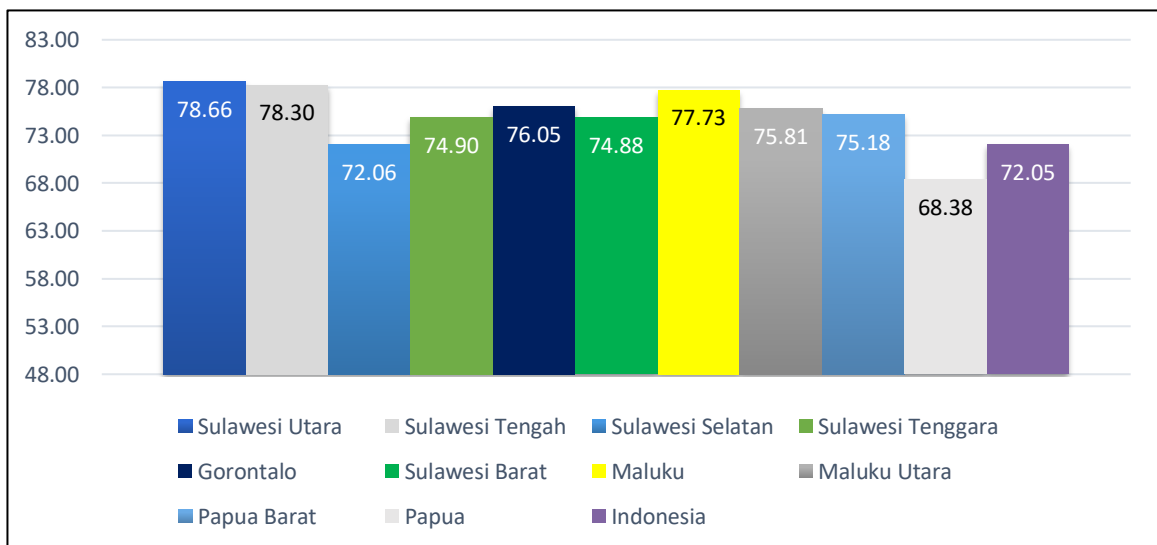
Namun, pengukuran modal sosial bukan tanpa tantangan. Kepercayaan dan norma bersifat subjektif, sehingga sulit ditangkap secara presisi. Selain itu, setiap daerah memiliki karakter budaya dan sejarah yang berbeda, sehingga indeks harus disesuaikan dengan konteks lokal. Ada pula risiko bahwa jaringan sosial yang kuat justru menutup diri dari kelompok lain, menciptakan eksklusivitas.

Singkatnya, indeks modal sosial adalah instrumen analitis yang menyatukan dimensi kepercayaan, jaringan, norma, dan partisipasi sosial untuk menilai kualitas kohesi masyarakat. Ia menjadi jembatan antara analisis akademis dan kebijakan praktis, terutama dalam wilayah kepulauan seperti Maluku, di mana tradisi gotong royong, sejarah perdagangan, dan keberagaman etnis membentuk modal sosial yang khas dan strategis bagi pembangunan berkelanjutan.

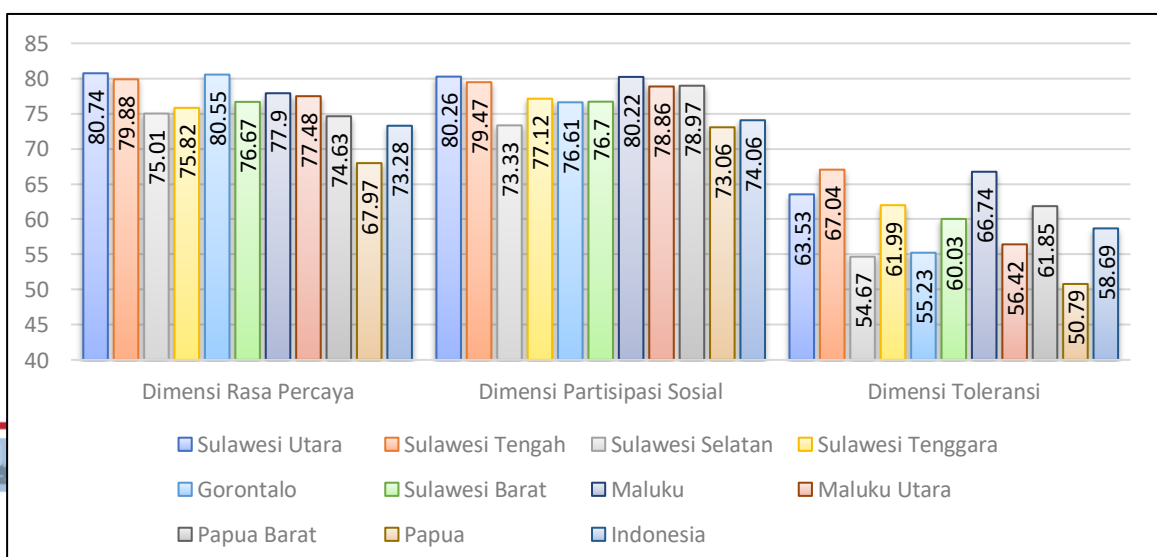
Versi BPS tentang Indeks Modal Sosial dirumuskan sebagai alat ukur resmi untuk menilai kualitas hubungan sosial masyarakat Indonesia. Ia dipandang sebagai modal pembangunan mendasar, karena kepercayaan, jaringan, dan norma sosial menjadi fondasi kebersamaan, mobilitas ide, serta kerja sama yang menguntungkan semua pihak.

BPS menekankan tiga dimensi utama: kepercayaan, yang mencerminkan rasa percaya antarwarga maupun terhadap institusi; jaringan, yang terlihat dari partisipasi dalam organisasi sosial, kelompok komunitas, dan kegiatan gotong royong; serta norma sosial, berupa kepatuhan terhadap aturan, solidaritas, dan nilai kebersamaan. Indeks ini berfungsi sebagai pembangunan sosial, penguat kohesi masyarakat, serta dasar analisis kebijakan di tingkat nasional maupun daerah.

Berikut adalah hasil pengukuran Indeks Modal Sosial Provinsi Maluku Tahun 2021 dan beberapa Provinsi lainnya di wilayah Indonesia bagian timur:



Gambar 2.53. Indeks Modal Sosial di Beberapa Provinsi Wilayah Indonesia Bagian Timur Tahun 2021



Gambar 2.54. Nilai Dimensi Indeks Modal Sosial di Beberapa Provinsi Wilayah Indonesia Bagian Timur Tahun 2021

Indeks Modal Sosial merupakan salah satu komposit yang capaian butuh peran dari berbagai perangkat daerah lintas sektoral untuk mencapai target yang telah ditentukan, perangkat daerah yang bertanggungjawab atas pencapaian sasaran strategis “Terwujudnya Kerukunan antar Masyarakat” adalah Biro Kesejahteraan Rakyat, Satuan Polisi Pamong Praja dan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Sedangkan anggaran Program penunjang sasaran strategis ini adalah:

**Tabel 2.90.
Anggaran dan Realisasi Program Penunjang Sasaran
Terwujudnya Kerukunan antar Masyarakat**

No	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	215,894,824.00	209,311,000.00	96.95
2	Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	5,768,475,470.00	5,667,968,383.00	98.26
3	Program Kesejahteraan Rakyat	141,483,009,571.00	130,768,207,310.00	92.43
4	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	3,731,805,900.00	3,646,868,422.00	97.72
5	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	2,056,574,950.00	1,870,021,115.00	90.93
6	Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	14,521,937,000.00	14,218,113,000.00	97.91
7	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial	242,412,500.00	242,100,500.00	99.87
8	Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	79,695,000.00	55,146,968.00	69.20

No	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
	Jumlah	25.286.051.255	25.076.005.869	99,17

(data sementara)

SASARAN 15

Terwujudnya Keserasian, Keselarasan, dan Keseimbangan Penduduk dengan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan dan Kondisi Sosial Budaya

Sasaran Strategis ini merupakan penjabaran terhadap Tujuan “Mewujudkan Kesejahteraan Sosial Masyarakat Kepulauan secara Merata”. Hasil pengukuran Sasaran Terwujudnya Keserasian, Keselarasan, dan Keseimbangan Penduduk dengan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan dan Kondisi Sosial Budaya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.91.
Capaian Sasaran Terwujudnya Keserasian, Keselarasan, dan Keseimbangan Penduduk dengan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan dan Kondisi Sosial Budaya Tahun 2025

Indikator Kinerja		Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Laju Pertumbuhan Penduduk	1,07%	1,36%	100
Rata-Rata Capaian Kinerja				100

Tabel 2.92.
Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Sasaran 15 antara Tahun 2024 s/d Tahun 2025

Kinerja		2024		2025	
		Real. Kinerja	Cap. Kinerja	Real. Kinerja	Cap. Kinerja
1	Laju Pertumbuhan Penduduk	1,24%	100%	1,36%	100%

Tabel 2.93.
Perbandingan Realisasi Sasaran 15 Tahun 2024 s/d 2025 dengan Tahun Akhir periode RPJMD

Kinerja		Realisasi 2024	Realisasi 2025	Target Tahun Akhir RPD
1	Laju Pertumbuhan Penduduk	1,24%	1,36%	1,09%

Target kinerja “Laju Pertumbuhan Penduduk” yang ingin dicapai di Tahun 2025 adalah 1,07%, realisasi tahun 2025 adalah 1,36% maka capaian kinerjanya adalah 127,1%, untuk mempermudah interpretasi penilaian maka capaian tersebut dibulatkan menjadi 100% sehingga dengan skala nilai peringkat kinerja masuk kedalam kategori “Sangat Memuaskan”.

Jumlah penduduk Provinsi Maluku Tahun 2025 berdasarkan Data Konsolidasi Bersih (DKB) Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil mencapai 1.961.977 jiwa, jika dibandingkan dengan jumlah penduduk Provinsi Maluku tahun 2024 yang mencapai 1.935.586 jiwa maka terdapat kenaikan sebanyak 26.391 jiwa.

Secara umum Provinsi Maluku masih dikatakan sebagai daerah yang jarang penduduknya dengan kepadatan penduduk Provinsi Maluku adalah $\pm 42,7$ jiwa tiap Km², oleh karenanya masih membutuhkan penambahan jumlah penduduk untuk mendukung serta mengisi pembangunan yang dilakukan. Untuk daerah Kota Ambon angka kepadatannya tertinggi yaitu mencapai ± 1.532 jiwa tiap Km² dan kepadatan terendah adalah Kabupaten Kepulauan Aru yaitu ± 13 jiwa tiap Km².

Tabel 2.94.
Jumlah Penduduk Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku
Tahun 2022 - 2025

No	Kabupaten/kota	2022	2023	2024	2025
1	Kabupaten Maluku Tengah	428.929	430.798	432.361	435.735
2	Kabupaten Maluku Tenggara	128.704	129.257	129.169	129.857
3	Kabupaten Kepulauan Tanimbar	128.753	130.278	132.337	134.293
4	Kabupaten Buru	137.570	139.408	142.347	144.998
5	Kabupaten Seram Bagian Timur	137.359	138.580	140.972	144.172
6	Kabupaten Seram Bagian Barat	213.115	214.979	217.389	220.619
7	Kepulauan Aru	108.086	109.947	112.531	115.511
8	Kabupaten Maluku Barat Daya	90.749	93.766	97.020	99.122
9	Kabupaten Buru Selatan	77.688	79.017	81.329	83.174
10	Kota Ambon	352.639	355.365	359.661	363.212
11	Kota Tual	89.732	90.548	90.470	91.284
MALUKU		1.893.324	1.911.943	1.935.586	1.961.977
Laju Pertumbuhan Penduduk		0,98%	1,24%	1,36%	

Sumber: Dinas Dukcapil Provinsi Maluku

Perangkat daerah yang bertanggungjawab atas pencapaian sasaran strategis “Terwujudnya Keserasian, Keselarasan, dan Keseimbangan Penduduk dengan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan dan Kondisi Sosial Budaya” adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Kesehatan, dan Sekretariat

Daerah Provinsi Maluku – Biro Kesejahteraan Rakyat. Sedangkan anggaran Program penunjang sasaran strategis ini adalah:

Tabel 2.95.

Anggaran dan Realisasi Program Penunjang Terwujudnya Kekeragaman, Keselarasan, dan Keseimbangan Penduduk dengan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan dan Kondisi Sosial Budaya

No	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Program Pengelolaan Profil Kependudukan	65,536,000.00	65,236,000.00	99.54
2	Program Pendaftaran Penduduk	19,007,000.00	16,275,000.00	85.63
3	Program Pencatatan Sipil	7,116,000.00	6,654,200.00	93.51
Jumlah		91,659,000.00	88,165,200.00	96.19

(data sementara)

SASARAN 16

Meningkatnya Penyelenggaraan Birokrasi Pemerintah yang Profesional Karakteristik, Berintegritas Guna Mewujudkan Pelayanan Publik yang Berkualitas

Sasaran Strategis ini merupakan penjabaran terhadap Tujuan “Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Dinamis, Inovatif dan Berprinsip Good Governance”. Hasil pengukuran Sasaran Meningkatkan Penyelenggaraan Birokrasi Pemerintah yang Profesional Karakteristik, Berintegritas Guna Mewujudkan Pelayanan Publik yang Berkualitas dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.96.

Capaian Sasaran Meningkatkan Penyelenggaraan Birokrasi Pemerintah yang Profesional Karakteristik, Berintegritas Guna Mewujudkan Pelayanan Publik yang Berkualitas Tahun 2025

Indikator Kinerja		Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Indeks Reformasi Birokrasi	BB (75,00)	B (65,11)*	86,81
Rata-Rata Capaian Kinerja				86,81

* Indeks RB Tahun 2024

Tabel 2.97.

Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Sasaran 16 antara Tahun 2024 s/d Tahun 2025

Kinerja		2024		2025	
		Real. Kinerja	Cap. Kinerja	Real. Kinerja	Cap. Kinerja
1	Indeks Reformasi Birokrasi	B (65,11)	89,8%	B (65,11)*	86,81

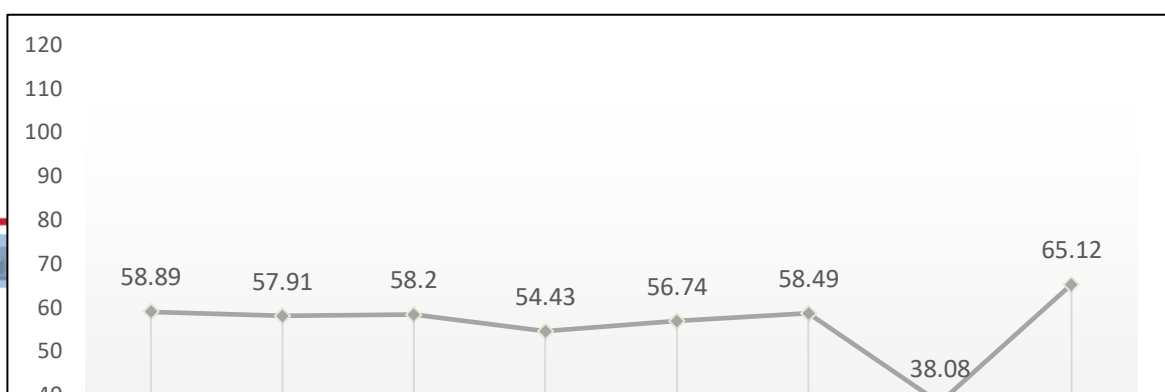
Tabel 2.98.
Perbandingan Realisasi Sasaran 16
Tahun 2024 s/d 2025 dengan Tahun Akhir periode RPD

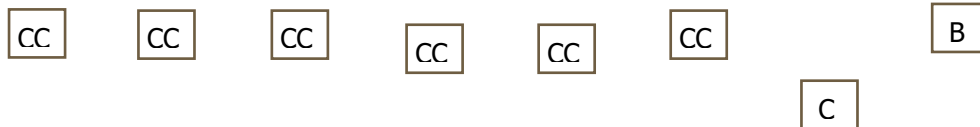
Kinerja		Realisasi 2024	Realisasi 2025	Target Tahun Akhir RPD
1	Indeks Reformasi Birokrasi	B (65,11)	B (65,11)*	BB (77,50)

Target kinerja “Indeks Reformasi Birokrasi (IRB)” yang ingin dicapai ditahun 2025 adalah Kategori BB dengan Nilai 75,00, dikarenakan sampai dengan saat ini belum terdapat Hasil Evaluasi Reformasi Birokrasi Tahun 2025 sehingga perhitungan kinerja sasaran menggunakan IRB Tahun 2024. IRB Provinsi Maluku Tahun 2024 berada pada Katogori B dengan Nilai 65,11 sehingga capaiannya adalah 86,81%, atau dengan skala nilai peringkat kinerja masuk kedalam kategori “Memuaskan”.

Berdasarkan tabel diatas capaian Indeks Reformasi Birokrasi (RB) Provinsi Maluku sampai dengan tahun 2024 belum berhasil mencapai target yang diharapkan, walau demikian capaian RB tersebut merupakan ketegori tertinggi yang pernah dicapai Pemerintah Provinsi Maluku sejak Indeks RB dijadikan tertinggi dalam bidang pemerintahan yang dimulai pada tahun 2014.

Agenda Reformasi Birokrasi di Provinsi Maluku seperti mengalami stagnansi hal ini terlihat pada Nilai/Predikat Indeks RB Provinsi Maluku yang konsisten memperoleh Predikat “CC” sejak tahun 2017, dan pernah mencapai titik nadir ditahun 2023 dengan Predikat “C”. Kondisi ini disebabkan oleh lemahnya komitmen dalam pelaksanaan RB sehingga Pemerintah Provinsi Maluku acap kali terlambat dalam mengimplementasikan kebijakan-kebijakan RB nasional yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah, selain itu masih terdapatnya budaya silo sehingga sinergi dalam mereformasi birokrasi kian semakin sulit. Berikut adalah Hasil Evaluasi RB Provinsi Maluku sejak tahun 2017 sampai dengan tahun 2024.





Gambar 2.55. Hasil Evaluasi RB Pemerintah Provinsi Maluku dari Tahun 2017 s./d. Tahun 2024

Pelaksanaan RB Tahun 2025 merupakan periode transisi dari grand design RB 2010 – 2024 (Perpres 81 Tahun 2010 tentang Grand Design RB) ke perodesasi grand design RB 2025 – 2045 yang sampai dengan saat ini masih belum ditetapkan secara resmi oleh Pemerintah Pusat. Oleh karena itu, dikeluarkan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2025 Tentang Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pada Periode Transisi Tahun 2025, yang menerangkan bahwa pelaksanaan RB Tahun 2025 masih berpedoman pada agenda-agenda RB yang tertuang pada Road Map RB 2020-2024 yang mana pelaksanaan RB difokuskan kedalam 2 (dua) fokus yakni RB General (Fokus Hulu/aspek pemerintahan umum) dan RB Tematik (Fokus Hilir/aspek kemasyarakatan).

Agenda RB General tetap dengan pelaksanaan 21 (dua puluh satu) Kegiatan Utama, RB Tematik hanya difokuskan pada pelaksanaan tematik Pengentasan Kemiskinan dan Peningkatan Investasi sedangkan Digitalisasi Administrasi Pemerintahan fokus Penanganan Stunting, Aktualisasi Prioritas Presiden Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN), dan Aktualisasi Prioritas Presiden Pengendalian Inflasi tidak dilagi dimasukkan dalam agenda RB Tematik Tahun 2025.

Pelaksanaan RB General dan RB Tematik telah dijalankan dan dievaluasi pelaksanaannya selama dua tahun, Pemerintah Provinsi Maluku juga telah mengubah Road Map nya sesuai dengan PermenPANRB Nomor 3 Tahun 2023 melalui Peraturan Gubernur Nomor 38 Tahun 2024 tentang Perubahan Pergub 61 Tahun 2022 tentang Road Map Birokrasi Provinsi Maluku Tahun 2022-2024. Adapun hasil Hasil Evaluasi Pelaksanaan RB Provinsi Maluku Tahun 2023 dan 2024 sebagai berikut:

Tabel 2.99.
Indeks Reformasi Birorkasi Provinsi Maluku Tahun 2023 & 2024

No	Penilaian	Bobot	Nilai	
			2023	2024
A	RB General	100	37,68	58,5

B	RB Tematik	20	0,4	6,62
C	Indeks RB	120	38,08	65,12
Kategori			C	B

Capaian diatas merupakan suatu keberhasilan yang cukup menggembirakan mengingat kategori "B" merupakan kategori tertinggi yang pernah dicapai oleh Pemerintah Provinsi Maluku, walaupun jika kita membandingkan dengan target Tujuan Indeks RB "BB" ditahun 2024 hal tersbut masih belum dapat dicapai atau dapat dikatakan gagal dalam mencapai target yang ditetapkan.

Predikat "C" ditahun 2023 membuat Provinsi Maluku berbenah dalam pelaksanaan RB, pelaksanaan RB yang dilakukan Provinsi Maluku ditahun 2024 adalah menetapkan Perubahan Road Map RB; menetapkan perangkat daerah penanggung jawab RB General dan RB Tematik; rapat koordinasi penyusunan Rencana Aksi RB General dan RB Tematik; melakukan penginputan pelaksanaan Rencana Aksi RB General dan RB Tematik pada Portal RB sesuai dengan waktu yang ditentukan serta pelaksanaan agenda RB lainnya dalam rangka menindaklanjuti rekomendasi evaluasi RB tahun 2023. Berikut adalah perangkat daerah penanggung jawab RB General dan RB Tematik sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 38 Tahun 2024.

Tabel 2.100. Susunan Penanggung Jawab RB General

No	Perangkat Daerah	Kedudukan
1	Sekretaris Daerah Provinsi Maluku	Ketua
2	Inspektorat	Wakil Ketua I
3	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Wakil Ketua II
4	Biro Organisasi	Sekretaris
5	Dinas Komunikasi dan Informasi	Anggota
6	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	Anggota
7	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Anggota
8	Badan Kepegawaian Daerah	Anggota
9	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Anggota
10	Biro Hukum	Anggota
11	Biro Administrasi Pembangunan	Anggota
12	Biro Pengadaan Barang dan Jasa	Anggota

Tabel 2.101. Susunan Penanggung Jawab RB Tematik

No	Perangkat Daerah	Kedudukan
1	Sekretaris Daerah Provinsi Maluku	Ketua
2	Inspektorat	Wakil Ketua I
3	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Wakil Ketua II
4	Biro Organisasi	Sekretaris

No	Perangkat Daerah	Kedudukan
Tematik Penanggulangan Kemiskinan		
5	Dinas Sosial	Koordinator
Tematik Peningkatan Investasi		
6	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Koordinator
Tematik Digitalisasi Pemerintahan (Penanganan <i>Stunting</i>)		
7	Dinas Kesehatan	Koordinator
Tematik Percepatan Prioritas Aktual Presiden Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN)		
8	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Koordinator
Tematik Percepatan Prioritas Aktual Presiden Pengendalian Inflasi		
9	Biro Perekonomian Daerah	Koordinator

Untuk pelaksanaan RB Tahun 2025, Provinsi Maluku tetap berupaya semaksimal mungkin menjalankan agenda RB General dan RB Tematik prioritas ditengah kondisi pemotongan anggaran transfer ke Daerah oleh Pemerintah Pusat yang sangat berdampak pada pelaksanaan rencana aksi RB General dan Tematik yang telah direncanakan. Berikut adalah rekapitulasi pelaksanaan RB Tahun 2025 yang telah disampaikan ke Kementerian PANRB melalui laman: <https://www.portalrb.id>.

Tabel 2.102. Rekapitulasi Realisasi Rencana Aksi RB General Tahun 2025

No	Kegiatan Utama		Jumlah Renaksi	Status	Keterangan
1	Pelaksanaan Sistem Kerja Baru dengan model fleksibel bagi Pegawai ASN	Tingkat Capaian Sistem Kerja untuk Penyederhanaan Birokrasi	1 renaksi	Selesai	-
2	Pelaksanaan SPBE Arsitektur Nasional	Indeks SPBE	8 renaksi	Selesai	-
		Arsitektur SPBE	Tidak ada renaksi	Selesai	Arsitektur SPBE belum disusun karena belum terdapat Peta Proses Bisnis Arsitektur SPBE
3	Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang terintegrasi	Indeks Perencanaan Pembangunan	1 renaksi	Selesai	-
		Nilai SAKIP	5 renaksi	Selesai	-
4	Pembangunan Zona Integritas di unit kerja	Tingkat Keberhasilan Pembangunan ZI	Tidak ada renaksi	Selesai	Belum ada PD yang direncanakan untuk pembangunan ZI
5	Penguatan implementasi sistem	Tingkat Maturitas SPIP	4 renaksi	Selesai	-

No	Kegiatan Utama		Jumlah Renaksi	Status	Keterangan
	pengendalian intern pemerintah (SPIP)				
6	Penguatan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat	Tingkat Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat (LAPOR) yang Sudah Diselesaikan	5 renaksi	Selesai	-
7	Penguatan Upaya Pencegahan Korupsi	Survei Penilaian Integritas	1 renaksi	Selesai	-
8	Pelaksanaan Tata Kelola Kebijakan Publik	Indeks Kualitas Kebijakan	Tidak ada renaksi	Selesai	Tidak mengikuti penilaian IKK
9	Pelaksanaan Pembentukan Peraturan Perundangan-undangan	Indeks Reformasi Hukum	3 renaksi	Selesai	-
10	Pelaksanaan Arsip Digital	Tingkat Digitalisasi Arsip	4 renaksi	Selesai	-
11	Pelaksanaan Data Statistik Sektoral	Indeks Pembangunan Statistik	11 renaksi	Selesai	-
12	Penguatan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	Indeks Tata Kelola Pengadaan	3 renaksi	Selesai	-
13	Penguatan Pengelolaan Keuangan dan Aset	Opini BPK	4 renaksi	Selesai	-
		Tindaklanjuti Rekomendasi BPK	1 renaksi	Selesai	-
14	Penguatan Sistem Merit	Indeks Sistem Merit	29 renaksi	Selesai	-
15	Pelaksanaan Core Values ASN	Indeks BerAKHLAK	3 renaksi	Selesai	-
16	Pelaksanaan Pelayanan Publik Prima	Survei Kepuasan Masyarakat	2 renaksi	Selesai	-
		Indeks Pelayanan Publik	4 renaksi	Selesai	-
		Tingkat Kepatuhan Pelayanan Publik	1 renaksi	Selesai	-

Tabel 2.103. Rekapitulasi Realisasi Rencana Aksi RB Tematik Tahun 2025

No	Tematik	Fokus Pengentasan Masalah Utama	Jumlah Renaksi	Status	Keterangan
1	Penanggulangan Kemiskinan	Peningkatan Infrastruktur	5 renaksi	Selesai	-
		Peningkatan Kualitas SDM	14 renaksi	Selesai	-

No	Tematik	Fokus Pengentasan Masalah Utama	Jumlah Renaksi	Status	Keterangan
		Peningkatan Pendapatan Masyarakat/ Pengurangan Pengeluaran Masyarakat	30 renaksi	Selesai	-
2	Peningkatan Investasi	Pembaharuan Regulasi	2 renaksi	Selesai	-
		Peningkatan Pelayanan Perizinan	3 renaksi	Selesai	-
		Peningkatan Promosi	3 renaksi	Selesai	-
		Peningkatan Kepatuhan Pelaku Usaha terhadap Regulasi	3 renaksi	Selesai	-

Pelaksanaan RB Tahun 2025 menghadapi tantangan terbesar yakni pemangkasan dana transfer Daerah oleh Pemerintah Pusat, oleh karena itu penetapan prioritas kegiatan RB menjadi hal yang tidak dapat dihindari mengingat kondisi yang dihadapi. Namun Pemerintah Provinsi Maluku akan terus berupaya meningkatkan penyusunan Rencana Aksi RB General dan Rencana Aksi RB Tematik; pelaksanaan dan monitoring Rencana Aksi RB General dan Rencana Aksi RB Tematik; dan penginputan realisasi pelaksanaan Rencana Aksi RB General dan Rencana Aksi RB Tematik Tim RB Provinsi serta menindaklanjuti seluruh rekomendasi yang telah disampaikan.

Selain dari pada faktor terknis tersebut faktor utama keberhasilan RB adalah komitmen yang kuat untuk mereform dari pimpinan tertinggi serta kerja kolaborasi antar pihak, nihilnya perbaikan di kedua faktor tersebut maka pelaksanaan RB hanya akan berjalan secara formalitas dengan melengkapi bukti administrasi tanpa adanya birokrasi yang bersih, efektif dan berdaya saing mendorong pembangunan nasional dan pelayanan publik.

Perangkat daerah yang bertanggungjawab atas pencapaian sasaran strategis “Meningkatnya Meningkatkan Penyelenggaraan Birokrasi Pemerintah yang Profesional Karakteristik, Berintegritas Guna Mewujudkan Pelayanan Publik yang Berkualitas” adalah seluruh Perangkat Daerah Lingkup Provinsi Maluku terkhusus pada beberapa Perangkat Daerah penanggungjawab RB. Sedangkan anggaran Program penunjang sasaran strategis ini adalah:

Tabel 2.104.
Anggaran dan Realisasi Program Penunjang Sasaran
Meningkatnya Meningkatkan Penyelenggaraan Birokrasi Pemerintah yang Profesional
Karakteristik, Berintegritas Guna Mewujudkan Pelayanan Publik yang Berkualitas

No	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Program Pengelolaan Perbatasan	166,216,500.00	159,421,266.00	95.91
2	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	1,195,173,200.00	671,492,807.00	56.18

No	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
3	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	2,895,253,248.00	1,491,907,336.00	51.53
4	Program Perencanaan Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah	3,904,086,380.00	3,143,291,360.00	80.51
5	Program Penyelenggaraan Pengawasan	1,721,493,000.00	1,709,880,525.00	99.33
6	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	665,304,677.00	647,408,660.00	97.31
7	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	65,958,330,700.00	56,469,007,473.00	85.61
8	Program Kepegawaian Daerah	2,103,511,955.00	1,965,656,212.00	93.45
9	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	4,863,160,000.00	4,367,929,034.00	89.82
10	Program Pengelolaan Arsip	181,999,218.00	62,314,400.00	34.24
11	Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	69,200.00	67,000.00	96.82
12	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	2,707,286,400.00	2,644,271,936.00	97.67
13	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	2,043,351,459.00	1,852,326,414.00	90.65
14	Program Penyelenggaraan Statistik Sektor	269,441,800.00	269,419,012.00	99.99
15	Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	128,545,000.00	127,244,000.00	98.99
16	Program Penataan Organisasi	440,596,700.00	440,596,700.00	100.00
17	Program Pemerintah dan Otonomi Daerah	9,650,552,130.00	4,770,141,535.00	49.43
18	Program Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	771,304,388.00	767,047,058.00	99.45
19	Program Kebijakan dan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa	693,627,160.00	638,292,768.00	92.02
20	Program Kebijakan Administrasi Pembangunan	538,807,000.00	487,119,536.00	90.41
21	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	240,612,343,556.24	237,842,935,616.00	98.85
22	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	717,427,400.00	688,948,734.00	96.03
23	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	253,424,658,334.24	245,635,081,947	96.93
24	Program Pelayanan Penghubung	735,968,753.00	704,336,971.00	95.70
25	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	382,439,778,921.00	329,761,231,641.00	86.23

No	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
	Jumlah	978,828,287,079.48	897,317,369,941.00	91.67

(data sementara)

B. Akuntabilitas Capaian Keuangan Pemerintah Provinsi Maluku (Status s/d Desember 2025)

Akuntabilitas keuangan merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan yang digunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan dalam rangka mewujudkan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan. Adapun Realisasi keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Maluku Tahun 2025 (status s/d Desember 2025) dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.105.
Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Provinsi Maluku Tahun Anggaran 2025

URAIAN	Anggaran	Realisasi	(%)
PENDAPATAN DAERAH	3.005.907.591.007,038	2.710.293.720.212,53	90,16
PENDAPATAN ASLI DAERAH	846.271.289.007,38	627.644.845.092,53	74,16
Pajak Daerah	474.167.049.624,00	444.707.643.805,28	93,78
Retribusi Daerah	55.224.245.600,00	30.731.886.451,00	55,64
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	63.000.000.000,00	42.740.575.496,00	67,84
Lain-Lain PAD yang Sah	253.879.993.784,38	109.464.739.340,25	43,11
PENDAPATAN TRANSFER	2.159.310.634.000,00	2.082.323.207.120,00	96,43
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	2.159.310.634.000,00	2.082.323.207.120,00	96,43
Dana Bagi Hasil	80.541.509.000,00	61.117.023.331,00	75,88
Dana Alokasi Umum	1.584.180.021.000,00	1.576.603.799.814,00	99,52
Dana Alokasi Khusus	494.589.104.000,00	444.280.577.475,00	89,82
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	325.668.000,00	325.668.000,00	100,00
Pendapatan Hibah	325.668.000,00	325.668.000,00	100,00
BELANJA DAERAH	2.874.698.276.310,38	2.566.511.393.581,54	89,27
BELANJA OPERASI	2.371.524.381.647,54	2.151.711.590.909,73	90,73
Belanja Pegawai	1.260.056.177.736,54	1.184.179.890.621,00	93,97
Belanja Barang dan Jasa	879.011.095.333,00	760.547.150.298,73	86,52
Belanja Bunga	605.687.134,00	526.757.283,00	86,96
Belanja Subsidi	609.644.090,00	452.023.150,00	74,14
Belanja Hibah	224.334.288.577,00	199.130.296.505,00	88,76

URAIAN	Anggaran	Realisasi	(%)
Belanja Bantuan Sosial	6.907.488.777,00	6.875.473.052,00	99,53
BELANJA MODAL	270.529.603.013,60	184.045.774.678,81	68,03
Belanja Modal Tanah	3.718.310.129,60	105.338.000,00	2,83
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	106.870.004.118,00	73.852.007.088,00	69,10
Belanja Modal Bangunan dan Gedung	113.641.758.702,00	79.714.955.992,81	70,14
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	43.376.483.613,00	27.658.976.868,00	63,76
Belanja Aset Tetap Lainnya	1.673.046.400,00	1.470.566.350,00	87,89
Belanja Aset Lainnya	1.250.000.051,00	1.243.930.380,00	99,51
BELANJA TAK TERDUGA	5.500.000.000,00	3.748.128.096,00	68,14
Belanja Tak Terduga	5.500.000.000,00	3.748.128.096,00	68,14
BELANJA TRANSFER	227.144.291.649,24	227.005.899.897,00	99,93
Belanja Bagi Hasil	225.144.291.649,24	225.005.899.897,00	99,93
Belanja Bantuan Keuangan	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	100,00
SURPLUS/DEFISIT	131.209.314.697,00	143.782.326.630,99	109,58
PEMBIAYAAN DAERAH	(131.209.314.697,00)	(131.209.314.696,89)	99,99
PENERIMAAN PEMBIAYAAN	5.462.310.935,00	5.462.310.935,11	100,00
Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA)	5.462.310.935,00	5.462.310.935,11	100,00
PENGELUARAN PEMBIAYAAN	136.672.225.632,00	136.672.225.632,00	100
Pembayaran Pokok Utang	136.672.225.632,00	136.672.225.632,00	100
PEMBIAYAAN NETTO	(131.209.314.697,00)	(131.209.314.696,89)	99,99
SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN	0,00	12.573.011.834,10	0,00

(data sementara)

Keseluruhan jabaran APBD Provinsi Maluku Tahun 2025 sebagaimana tersebut di atas, selanjutnya diimplementasikan lebih lanjut dalam bentuk program/kegiatan penunjang sasaran strategis Pemerintah Daerah yang tertuang dalam Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA) Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Maluku Tahun 2025. Gambaran anggaran belanja dan realisasi anggaran belanja APBD Provinsi Maluku Tahun 2025 penunjang sasaran strategis Pemerintah Daerah yang dikelola oleh Perangkat Daerah Provinsi Maluku dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.106.
**Rincian Anggaran dan Realisasi Anggaran Penunjang Sasaran Strategis
Pemerintah Daerah Provinsi Maluku Tahun 2025 yang Bersumber dari Dana APBD**

No	Sasaran Strategis	Anggaran	Realisasi	%
1	Meningkatnya Askes Masyarakat Kepulauan Terhadap Pelayanan Pendidikan yang Berkualitas	339,803,052,403.00	302,912,488,778.00	89.14
2	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat Kepulauan yang Dilaksanakan secara Inklusif dan Terjangkau	167,059,816,635.00	41,757,442,912.00	25.00
3	Meningkatnya Peran Pemuda dalam Pembangunan dan Peningkatan Prestasi Olahraga	31,959,519,520.00	30,290,784,732.00	94.78
4	Mewujudkan Pembangunan Daerah Berbasis Kebudayaan	6,926,456,020.00	2,908,253,119.00	41.99
5	Meningkatnya Pembangunan SDM yang Berkeadilan	1,092,770,050.00	784,336,870.00	71.78
6	Meningkatnya Produktivitas dan Nilai Tambah Produk	82,523,398,281.00	66,161,989,476.50	80.17
7	Meningkatnya Pertumbuhan Usaha dan Nilai Investasi	13,297,253,629.00	11,432,452,898.00	85.98
8	Meningkatnya Konektivitas antar Wilayah dan Pembangunan Infrastruktur yang Berkualitas dan Merata	142,170,521,101.00	102,671,238,053.00	72.22
9	Meningkatnya Pembangunan Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Berdaya Saing dan Berkelanjutan	2,267,986,726.00	1,903,527,030.00	83.93
10	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan dan Ketahanan Bencana	2,156,565,300.00	1,802,017,271.00	83.56
11	Meningkatnya Ketahanan Pangan Daerah	1,413,084,560.00	1,273,734,423.00	90.14
12	Berkurangnya Beban Pengeluaran Penduduk Miskin	18,716,933,269.00	17,167,418,274.00	91.72
13	Meningkatnya Kualitas dan Penyerapan Tenaga Kerja	498,358,000.00	496,680,987.00	99.66
14	Terwujudnya Kerukunan antar Masyarakat yang Damai dan Harmonis	168,099,805,215.00	156,677,736,698.00	93.21



No	Sasaran Strategis	Anggaran	Realisasi	%
15	Terwujudnya Keserasian, Keselarasan, dan Keseimbangan Penduduk dengan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan dan Kondisi Sosial Budaya	91,659,000.00	88,165,200.00	96.19
16	Meningkatnya Penyelenggaraan Birokrasi Pemerintah yang Professional Karakteristik, Berintegritas Guna Mewujudkan Pelayanan Publik yang Berkualitas	978,828,287,079.48	897,317,369,941.00	91.67
Jumlah		1,956,905,466,788.48	1,635,645,636,662.50	83.58

(data sementara)





BAB III

CAPAIAN KINERJA

PELAKSANAAN TUGAS

PEMBANTUAN

BAB III

CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN

TUGAS PEMBANTUAN

1. DASAR HUKUM PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
5. Undang-undang Nomor 62 Tahun 2024 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 Tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2022 Tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.07/2008 Sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 248/PMK.07/2010 Tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
11. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 15/PRT/M/2011 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Kementerian Pekerjaan Umum yang Merupakan Kewenangan Pemerintah dan dilaksanakan Melalui Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 208/PMK.02/2019 Tentang Petunjuk dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
14. DIPA Dinas Pertanian Provinsi Maluku :
 - 1) Nomor : SP DIPA-018.03.4.219090/2025 Program Tanaman Pangan;

- 2) Nomor : SP DIPA-018.06.4.219093/2025 Program Peternakan dan Kesehatan Hewan;
- 3) Nomor : SP DIPA-018.08.08.3.219004/2025 Prasarana Dan Sarana Pertanian;
- 4) Nomor : SP DIPA-018.13.4.691747/2025 Program Lahan dan Irigasi Pertanian;
15. DIPA Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Maluku:
 - 1) Nomor : SP DIPA – 145.03.4.694102/2024 Bidang Sumber Daya Air;
 - 2) Nomor : SP DIPA - 145.04.4.693771/2024 Bidang Bina Marga.
16. DIPA Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor : SP DIPA – 032.01.4.690945 / 2024.

2. GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN DI PROVINSI

Bahwa selain melaksanakan urusan Pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan Provinsi, Pemerintah Provinsi Maluku juga melaksanakan sebagian urusan pemerintahan tertentu melalui tugas pembantuan yang diberikan oleh level pemerintahan di atasnya, yakni pemerintah pusat. Penyelenggaraan tugas pembantuan merupakan penugasan dari pemerintah pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan pemerintah pusat atau dari pemerintah daerah provinsi kepada daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan urusan provinsi yang disertai dengan kewajiban melaporkan pelaksanaannya serta mempertanggungjawabkannya kepada yang memberi penugasan. Sebagian urusan pemerintahan yang ditugaskan kepada pemerintah daerah Provinsi Maluku tersebut dilaksanakan oleh perangkat daerah sesuai dengan urusan pemerintahan yang ditugaskan.

Tugas pembantuan diselenggarakan karena tidak semua wewenang dan tugas pemerintahan dapat dilakukan dengan menggunakan asas desentralisasi dan asas dekonsentrasi. Kewenangan ini diberikan kepada daerah agar dapat ikut serta membantu Pemerintah Pusat dalam melaksanakan kewenangannya di daerah dengan maksud untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan dan pelayanan umum.

Tugas pembantuan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Maluku berasal dari 3 (Tiga) Kementerian yaitu :

1. Kementerian Pertanian Republik Indonesia;
2. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia;
3. Kementerian Transmigrasi Republik Indonesia.

Dengan Rincian Pengalokasian Dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada Tahun 2025 sebagai berikut : 1) Kementerian Pertanian sebesar Rp. 7.779.412.000,- 2) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebesar Rp. 16.513.241.000,00,- 3) Kementerian Transmigrasi sebesar Rp. 2.055.598.000,-.

3. CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN

Sebagaimana melaksanakan Tugas Pembantuan yang diterima dari Kementerian Pertanian Republik Indonesia, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia, serta Kementerian Transmigrasi Republik Indonesia maka realisasi capaian kinerja Pemerintah Provinsi pada tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3
Laporan Pagu dan Realisasi Tahun 2025

NO.	NAMA DEPARTEMEN	NAMA SATUAN KERJA	PAGU	REALISASI	%
1.	KEMENTERIAN PERTANIAN	DINAS PERTANIAN PROVINSI MALUKU	Rp. 7.779.412.000,00	Rp. 7.692.474.985,00	98
2.	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Rp. 16.513.241.000,00	Rp. 16.491.049.000,00	99
3.	KEMENTERIAN TRANSMIGRASI	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	Rp. 2.055.598.000,00	Rp. 1.420.848.459,00	69

Sumber : Kanwil Perbendaharaan Promal

3.1 Tugas Pembantuan Pusat yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Maluku

Tugas Pembantuan dari Kementerian/Lembaga yang ditugaskan kepada Provinsi Maluku pada tahun 2025 yang dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Maluku dapat dilihat pada tabel program kegiatan sebagai berikut :

Tabel 3.1
Kementerian Pemberi Tugas, Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana Program/Kegiatan Serta Anggaran

NO	KEMENTERIAN PEMBERI TUGAS PEMBANTUAN	OPD PELAKSANA TUGAS PEMBANTUAN	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN (RP)	URUSAN
1.	KEMENTERIAN PERTANIAN	Dinas Pertanian Provinsi Maluku	Program Dukungan Manajemen Tanaman Pangan	267.905.000,00	
			➤ Pengelolaan Produksi Tanaman Sereal dan Tanaman Pangan	15.000.000,00	
			➤ Dukungan Manajemen dan teknis Lainnya pada Ditjen Tanaman Pangan	252.905.000,00	



			Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas	2.997.000.000,00
			➤ Penyediaan Benih dan Bibit Serta Peningkatan Produksi Ternak	2.997.000.000,00
			Program Dukungan Manajemen Peternakan	87.681.000,00
			➤ Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Peternakan	87.681.000,00
			Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas	1.054.030.000,00
			➤ Pengelolaan Sistem Penyediaan dan Pengawasan Alat Mesin Pertanian	150.000.000,00
			➤ Fasilitas Pupuk dan Petisida	904.030.000,00
			Program Dukungan Manajemen Prasarana dan Sarana	550.000.000,00
			➤ Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian	550.000.000,00
			Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas	2.822.796.000,00
			➤ Perlindungan dan Penyediaan Lahan	2.808.756.000,00
			Program Dukungan Manajemen	14.040.000,00
			➤ Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya pada Ditjen LIP	14.040.000,00
2.	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Provinsi Maluku	Program Ketahanan Sumber Daya Air	9.512.450.000,00
			Operasi dan Pemeliharaan Sarana Prasarana SDA serta Penanggulangan Darurat Bencana	9.412.730.000,00
			OM Prasarana Jaringan Sumber Daya Air	9.412.730.000,00
			Operasi Rutin	



				3.934.324.000,00
			➤ Operasi Rutin Jaringan Irigasi D.I Way Geren	737.066.000,00
			➤ Operasi Rutin Jaringan Irigasi D.I. Way Apu	1.285.866.000,00
			➤ Operasi Rutin Jaringan Irigasi D.I Samal	901.126.000,00
			➤ Operasi Rutin Jaringan Irigasi D.I Kobi	1.010.266000,00
			Pemeliharaan Berkala	2.336.666.000,00
			➤ Pemeliharaan Berkala Jaringan irigasi Sekunder D.I Way Green	533.037.000,00
			➤ Pemeliharaan Berkala Jaringan irigasi Sekunder D.I Way Apu	651.383.000,00
			➤ Pemeliharaan Jaringan irigasi Sekunder D.I. Samal	590.981.000,00
			➤ Pemeliharaan Berkala Jaringan Irigasi Sekunder D.I. Kobi	561.265.000,00
			Pemeliharaan Rutin	3.141.740.000
			➤ Pemeliharaan Rutin Saluran Primer D.I Way Geren	59.170.000,00
			➤ Pemeliharaan Rutin Jaringan Irigasi Sekunder D.I Way Geren	638.500.000,00
			➤ Pemeliharaan Rutin Jaringan irigasi Primer D.I Way Apu	213.330.000,00
			➤ Pemeliharaan Rutin Jaringan Irigasi Sekunder D.I Way Apu	732.705.000,00
			➤ Pemeliharaan Rutin Jaringan irigasi Primer D.I Samal	57.790.000,00
			➤ Pemeliharaan Rutin Jaringan irigasi Sekunder D.I Samal	707.115.000,00
			➤ Pemeliharaan Rutin Jaringan irigasi Primer D.I Kobi	57.460.000,00
			➤ Pemeliharaan Rutin Jaringan irigasi Sekunder D.I Kobi	675.670.000,00
			Program Dukungan Manajemen Ditjen SDA	99.720.000,00
			➤ Honorarium Satuan Kerja	99.720.000,00
			BIDANG BINA MARGA	7.000.791.000,00



			Program Infrastruktur Konektifitas	6.936.497.000,00
			Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional	6.936.497.000,00
			➤ Dukungan Teknis	145.778.000,00
			➤ OM Prasaranan Bidang Konektivitas Darat (Jalan)	3.296.892.000,00
			➤ OM Prasaranan Bidang Konektivitas Darat (Jembatan)	2.104.575.000,00
			➤ OM Prasaranan Bidang Konektivitas Darat (Jalan)	1.269.153.000,00
			➤ OM Prasaranan Bidang Konektivitas Darat (Jembatan)	210.099.000,00
			Program Dukungan Manajemen	64.294.000,00
			Layanan Umum	8.549.000,00
			➤ Pengelolaan Perbendaharaan	8.549.000,00
			Layanan Perkantoran	55.745.000,00
			➤ Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran	55.745.000,00
3.	KEMENTERIAN TRANSMIGRASI	Dinas Kerja Tenaga dan Transmigrasi	Pogram Transmigrasi	1.975.118.000,00
			➤ Perencanaan dan Penyiapan Kawasan Transmigrasi	665.410.000,00
			➤ Pembangunan Kawasan Transmigrasi	1.309.708.000,00
			Layanan Dukungan Manajemen Internal	80.480.000,00
			➤ Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	51.520.000,00

3.1.1 Target Kinerja

Berdasarkan pelaksanaan tugas pembantuan yang telah diterima dari Kementerian kepada Pemerintah Provinsi Maluku pada Tahun 2025 untuk melaksanakan program kegiatan dari anggaran yang sudah ditetapkan maka target kinerja selama satu tahun yang diperoleh dapat diuraikan sebagai berikut :

Tabel 3.1.1
Target Kinerja Kementerian terhadap Pemerintah Provinsi Maluku

No	Program	Anggaran (Rp)	Ket
1.	KEMENTERIAN PERTANIAN		
	Program Dukungan Manajemen Tanaman Pangan	267.905.000,00	APBN
	Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas	2.997.000.000,00	APBN
	Program Dukungan Manajemen Peternakan	87.681.000,00	APBN
	Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas	1.054.030.000,00	APBN
	Program Dukungan Manajemen Prasarana dan Sarana Pertanian	550.000,00	APBN
	Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas	2.808.756.000,00	APBN
	Program Dukungan Manajemen LIP	14.040.000,00	APBN
2.	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT		
	Program Infrastruktur Konektivitas Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Jalan Nasional dan Program Dukungan Manajemen	7.000.791.000,00	APBN
	Program Ketahanan Sumber Daya Air dan Program Dukungan Manajemen	9.512.450.000,00	APBN
3.	KEMENTERIAN TRANSMIGRASI		
	Program Transmigrasi	2.055.598.000,00	APBN

3.1.2 Realisasi

NO.	NAMA DEPARTEMEN	NAMA SATUAN KERJA	PAGU	REALISASI	%
1.	KEMENTERIAN PERTANIAN	DINAS PERTANIAN PROVINSI MALUKU	Rp. 7.779.412.000,00	Rp. 7.692.474.985,00	82
2.	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Rp. 16.513.241.000,00	Rp. 16.491.049,000,00	99
3.	KEMENTERIAN TRANSMIGRASI	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	Rp. 2.055.598.000,00	Rp. 1.420.848.459	69

Tabel 3.1.2
Capaian Program/Kegiatan Pelaksanaan Tugas Pembantuan dan Realisasi Anggaran Tahun 2025

NO	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	PERSENTASE (%)
1.	KEMENTERIAN PERTANIAN			
	Program Dukungan Manajemen	267.905.000,00	267.905.000,00	100
	➤ Pengelolaan Produksi Tanaman Sereal dan Tanaman Pangan	15.000.000,00	15.000.000,00	100
	➤ Dukungan Manajemen dan teknis Lainnya pada Ditjen Tanaman Pangan	252.905.000,00	252.905.000,00	100
2.	Program Ketersediaan, Akses dan Komsumsi Pangan Berkualitas	2.997.000.000,00	2.981.138.985,00	99
	➤ Penyediaan Benih dan Bibit Serta Peningkatan Produksi Ternak	2.997.000.000,00	2.981.138.985,00	99
	Program Dukungan Manajemen	87.681.000,00	86.359.000,00	98
	➤ Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Peternakan	87.681.000,00	86.359.000,00	98
	Program Ketersediaan, Akses dan Komsumsi Pangan Berkualitas	1.054.030.000,00	984.450.000,00	93



➤ Pengelolaan Sistem Penyediaan dan Pengawasan Alat Mesin Pertanian	150.000.0000,00	150.000.000,00	100
➤ Fasilitas Pupuk dan Pestisida	904.000.000,00	834.450.000,00	92
Program Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian	550.000.000,00	550.000.000,00	100
➤ Dukungan manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian	550.000.000,00	550.000.000,00	100
Program Ketersediaan, Akses dan Komsumsi Pangan Berkualitas	2.822.796.000,00	2.822.622.000,00	99
➤ Perlindungan dan Penyediaan Lahan	2.808.756.000,00	2.808.582.000,00	99
Program Dukungan Manajemen	14.040.000,00	14.040.000,00	100
➤ Dukungan Manajemen dan Dukungan teknis Lainnya pada Ditjen LIP	14.040.000,00	14.040.000,00	100
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT			
BIDANG SUMBER DAYA AIR	9.512.450.000,00	9.504.385.000,00	99
Program Ketahanan Sumber Daya Air	9.412.730.000,00	9.404.665.000,00	99
Operasi dan Pemeliharaan Sarana Prasarana SDA serta Penanggulangan Darurat Bencana	9.412.730.000,00	9.404.665.000,00	99
OM Prasarana Jaringan Sumber Daya Air	9.412.730.000,00	9.404.665.000,00	99
➤ Operasi Rutin Jaringan Irigasi D.I Way Geren	737.066.000,00	736.966.000,00	100
➤ Operasi Rutin Jaringan Irigasi D.I. Way Apu	1.285.866.000,00	1.285.857.000,00	99
➤ Operasi Rutin Jaringan Irigasi D.I Samal	901.126.000,00	901.126.000,00	100
➤ Operasi Rutin Jaringan Irigasi D.I Kobi	1.010.266.000,00	1.010.202.000	99
➤ Pemeliharaan Berkala Jaringan Irigasi Sekunder D.I Way Green	533.037.000,00	533.037.000,00	100
➤ Pemeliharaan Berkala Jaringan Irigasi Sekunder D.I Way Apu	651.383.000,00	651.383.000,00	100
➤ Pemeliharaan Berkala Jaringan Irigasi Sekunder	590.981.000,00	590.981.000,00	100

3.	D.I. Samal			
	➤ Pemeliharaan Berkala Jaringan Irigasi Sekunder D.I Kobi	561.265.000,00	561.265.000,00	100
	➤ Pemeliharaan Rutin Saluran Primer D.I Way Geren	59.170.000,00	59.170.000,00	99
	➤ Pemeliharaan Rutin Jaringan Irigasi Sekunder D.I Way Geren	638.500.000,00	634.930.000,00	99
	➤ Pemeliharaan Rutin Jaringan Irigasi Primer D.I Way Apu	213.330.000,00	213.330.000,00	99
	➤ Pemeliharaan Rutin Jaringan Irigasi Sekunder D.I Way Apu	732.705.000,00	732.251.000,00	99
	➤ Pemeliharaan Rutin Jaringan Irigasi Primer D.I Samal	57.790.000,00	57.790.000,00	100
	➤ Pemeliharaan Rutin Jaringan Irigasi Sekunder D.I Samal	707.115.000,00	704.485.000,00	99
	➤ Pemeliharaan Rutin Jaringan Irigasi Primer D.I Kobi	57.460.000,00	57.460.000,00	100
	➤ Pemeliharaan Rutin Rutin Jaringan Irigasi Sekunder D.I Kobi	675.670.000,00	674.432.000,00	100
2.	Program Dukungan Manajemen	99.72.000,00	99.72.000,00	100
	Dukungan Manajemen Ditjen Sumber Daya Air	99.72.000,00	99.72.000,00	100
3.	Layanan Dukungan Manajemen Internal	99.72.000,00	99.72.000,00	100
	➤ Honorarium Satuan Kerja	99.72.000,00	99.72.000,00	100
	BIDANG BINA MARGA	7.000.791.000,00	6.986.719.000,00	99
	Program Infrastruktur Konektifitas	6.936.497.000,00	6.925.103.834,00	99
	Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional	6.936.497.000,00	6.925.103.834,00	99
	➤ Dukungan Teknis	145.778.000,00	134.387.534,00	92
	➤ OM Prasaranan Bidang Konektivitas Darat (Jalan)	3.296.892.000,00	3.296.892.000,00	100
	➤ OM Prasaranan Bidang Konektivitas Darat (Jembatan)	2.104.575.000,00	2.104.575.000,00	100
	➤ OM Prasaranan Bidang Konektivitas Darat (Jalan)	1.269.153.000,00	1.269.150.000,00	100
	➤ OM Prasaranan Bidang Konektivitas Darat (Jembatan)	210.099.000,00	210.098.700,00	100
	Program Dukungan	64.294.000,00	61.615.215,00	96



Manajemen			
Layanan Dukungan Manajemen Internal	64.294.000,00	61.615.215,00	96
➤ Layanan Umum	8.549.000,00	8.544.500,00	99
➤ Layanan Perkantoran	55.745.000,00	53.070.715	78
KEMENTERIAN TRANSMIGRASI			
Program Transmigrasi	1.975.118.000,00	1.340.434.459,00	68
➤ Perencanaan dan Penyiapan Kawasan Transmigrasi	665.410.000,00	47.084.000,00	7
➤ Pembangunan Kawasan Transmigrasi	1.309.708.000,00	1.293.350.459,00	98
Dukungan Manajemen Internal	80.480.000,00	80.414.000,00	99
➤ Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	51.520.000,00	51.510.000,00	99
➤ Layanan Perkantoran	28.960.000,00	28.904.000,00	99

Matriks Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan Pusat yang dilaksanakan oleh Daerah Provinsi

No	K/LPNK	DASAR PELAKSANAAN TP	PROGRAM, KEGIATAN, OUTPUT DAN RINCIAN KEGIATAN	LOKASI	PERANGKAT PELAKSANA TP	ALOKASI ANGGARAN (RP)	REALISASI ANGGARAN (RP)	(%)	REALISASI CAPAIAN KEGIATAN (%)	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1.	KEMENTERIAN PERTANIAN RI	SP DIPA. 018.03.4. 219090/2 025	Program Dukungan Manajemen		Dinas Pertanian Provinsi Maluku	267.905.000,00	267.905.000,00		100	Sangat Baik
			Pengelolaan Produksi Tanaman Sereal dan Tanaman Pangan		Dinas Pertanian Provinsi Maluku	15.000.000,00	15.000.000,00		100	Sangat Baik
			Dukungan Manajemen dan teknis Lainnya pada Ditjen Tanaman Pangan		Dinas Pertanian Provinsi Maluku	252.905.000,00	252.905.000,00		99	Sangat Baik
		SP DIPA. 018.06. 4.21909 3/2025	Program Ketersediaan Akses dan Komsumsi Pangan Berkualitas		Dinas Pertanian Provinsi Maluku	2.997.000.000,00	2.981.138.985,00		99	Sangat Baik
			Penyediaan Benih dan Bibit Serta Peningkatan Produksi		Dinas Pertanian Provinsi Maluku	2.997.000.000,00	2.981.138.985,00		99	Sangat Baik



			Ternak							
			Program Dukungan Manajemen		Dinas Pertanian Provinsi Maluku	87.681.000,00	86.359.000,00		98	Sangat Baik
		SP DIPA. 018.03. 219004/2 025	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Peternakan		Dinas Pertanian Provinsi Maluku	87.681.000,00	86.359.000,00		99	Sangat Baik
			Program Ketersediaan, Akses dan Komsumsi Pangan Berkualitas		Dinas Pertanian Provinsi Maluku	1.054.030.000,00	984.450.000,00		93	Sangat Baik
			Pengelolaan Sistem Penyediaan dan Pengawasan Alat Mesin Pertanian		Dinas Pertanian Provinsi Maluku	150.000.000,00	150.000.000,00		100	Sangat Baik
			Fasilitasi Pupuk dan Petisida		Dinas Pertanian Provinsi Maluku	904.030.000,00	834.450.000,00		93	Sangat Baik
			Program Dukungan Manajemen		Dinas Pertanian Provinsi Maluku	550.000.000,00	550.000.000,00		100	Sangat Baik
			Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis lainnya Ditjen Prasarana dan saran Pertanian		Dinas Pertanian Provinsi Maluku	550.000.000,00	550.000.000,00		100	Sangat Baik
		SP DIPA. 018.13. 4.691747 0/2025	Program Ketersediaan, Akses dan Komsumsi Pangan Berkualitas		Dinas Pertanian Provinsi Maluku	2.822.796.000,00	2.822.622.000,00		99	Sangat Baik
			Dukungan Manajemen dan Perlindungan dan Penyediaan Lahan		Dinas Pertanian Provinsi Maluku	2.808.756.000,00	2.808.582.000,00		99	Sangat Baik
			Program Dukungan Manajemen		Dinas Pertanian Provinsi Maluku	14.040.000,00	14.040.000,00		100	Sangat Baik
			Dukungan Manajemen dan Dukungan teknis Lainnya pada Ditjen LIP		Dinas Pertanian Provinsi Maluku	14.040.000,00	14.040.000,00		100	Sangat Baik
2.	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT RI	SP DIPA- 145.04.4. 69377/20 25	BIDANG SUMBER DAYA AIR		Dinas PUPR Provinsi Maluku	9.512.450.000,00	9.504.385.000,00		98	Sangat Baik
			Program Ketahanan Sumber Daya Air		Dinas PUPR Provinsi Maluku	9.412.730.000,00	9.404.665.000,00		100	Sangat Baik
			Operasi Rutin Jaringan Irigasi D.I Way Geren	Buru	Dinas PUPR Provinsi Maluku	737.066.000,00	736.966.000,00		100	Sangat Baik



		Operasi Rutin Jaringan Irigasi D.I. Way Apu	Buru	Dinas PUPR Provinsi Maluku	1.285.866.000,00	1.285.857.000,00	99	Sangat Baik
		Operasi Rutin Jaringan Irigasi D.I Samal	Maluku Tengah	Dinas PUPR Provinsi Maluku	901.126.000,00	901.126.000,00	100	Sangat Baik
		Operasi Rutin Jaringan Irigasi D.I Kobi	Maluku Tengah	Dinas PUPR Provinsi Maluku	1.066.191.000,00	1.010.202.000,00	99	Sangat Baik
		Pemeliharaan Berkala Jaringan Irigasi Sekunder D.I Way Green	Buru	Dinas PUPR Provinsi Maluku	533.000.000,00	533.037.000,00	100	Sangat Baik
		Pemeliharaan Berkala Jaringan Irigasi Sekunder D.I Way Apu	Buru	Dinas PUPR Provinsi Maluku	651.383.000,00	651.383.000,00	100	Sangat Baik
		Pemeliharaan Berkala Jaringan Irigasi Sekunder D.I. Samal	Maluku Tengah	Dinas PUPR Provinsi Maluku	590.981.000,00	590.981.000,00	100	Sangat Baik
		Pemeliharaan Berkala Jaringan Irigasi Sekunder D.I Kobi	Maluku Tengah	Dinas PUPR Provinsi Maluku	561.265.000,00	561.265.000,00	100	Sangat Baik
		Pemeliharaan Rutin Saluran Primer D.I Way Geren	Buru	Dinas PUPR Provinsi Maluku	59.170.000,00	59.170.000,00	100	Sangat Baik
		Pemeliharaan Rutin Jaringan Irigasi Sekunder D.I Way Geren	Buru	Dinas PUPR Provinsi Maluku	638.500.000,00	634.930.000,00	100	Sangat Baik
		Pemeliharaan Rutin Jaringan Irigasi Primer D.I Way Apu	Buru	Dinas PUPR Provinsi Maluku	213.330.000,00	213.330.000,00	99	Sangat Baik
		Pemeliharaan Rutin Jaringan Irigasi Sekunder D.I Way Apu	Buru	Dinas PUPR Provinsi Maluku	732.705.000,00	732.251.000,00	100	Sangat Baik
		Pemeliharaan Rutin Jaringan Irigasi Primer D.I Samal	Maluku Tengah	Dinas PUPR Provinsi Maluku	57.790.000,00	57.790.000,00	100	Sangat Baik
		Pemeliharaan Rutin Jaringan Irigasi Sekunder D.I Samal	Maluku Tengah	Dinas PUPR Provinsi Maluku	707.115.000,00	704.485.000,00	99	Sangat Baik
		Pemeliharaan Rutin Jaringan Irigasi Primer D.I Kobi	Maluku Tengah	Dinas PUPR Provinsi Maluku	57.460.000,00	57.460.000,00	100	Sangat Baik
		Pemeliharaan Rutin Jaringan Irigasi Sekunder D.I Kobi	Maluku Tengah	Dinas PUPR Provinsi Maluku	675.670.000,00	674.432.000,00	100	Sangat Baik
		Dukungan Manajemen Ditjen Sumber Daya Air		Dinas PUPR Provinsi Maluku	99.720.000,00	99.720.000,00	100	Sangat Baik
		Layanan Dukungan Manajemen Internal		Dinas PUPR Provinsi Maluku	99.720.000,00	99.720.000,00	100	Sangat Baik
		Honorarium Satuan Kerja		Dinas PUPR Provinsi Maluku	99.720.000,00	99.720.000,00	100	Sangat Baik
		SP DIPA-145.04.4.6 93771/2025	BIDANG BINA MARGA	Dinas Provinsi Maluku	7.000.791.000,00	6.986.719.049,00	99	Sangat Baik
		Program Infrastruktur		Dinas PUPR Provinsi Maluku	6.936.497.000,00	6.925.103.834,00	99	Sangat Baik



3.	KEMENTERIAN TRANSMIGRASI RI		Konektivitas							
			Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional	P. Buru Dan P. Ambon	Dinas PUPR Provinsi Maluku	6.936.497.000,00	6.925.103.834,0 0	99		Sangat Baik
			Dukungan Teknis		Dinas PUPR Provinsi Maluku	145.778.000,00	134.387.534,00	92		Baik
			OM Prasaranan Bidang Konektivitas Darat (Jalan)		Dinas PUPR Provinsi Maluku	3.296.892.000,00	3.296.892.000,0 0	100		Sangat Baik
			OM Prasaranan Bidang Konektivitas Darat (Jembatan)		Dinas PUPR Provinsi Maluku	2.104.575.000,00	2.104.575.000,0 0	100		Sangat Baik
			OM Prasaranan Bidang Konektivitas Darat (Jalan)	P. Buru	Dinas PUPR Provinsi Maluku	1.269.153.000,00	1.269.150.000,0 0	100		Cukup Baik
			OM Prasaranan Bidang Konektivitas Darat (Jembatan)	P. Buru	Dinas PUPR Provinsi Maluku	210.099.000,00	210.098.700,00	100		Sangat Baik
			Program Dukungan Manajemen	P. Ambon		64.294.000,00	64.294.000,00	100		Sangat Baik
			Layanan Dukungan Manajemen Internal		Dinas PUPR Provinsi Maluku	64.294.000,00	64.294.000,00	100		Sangat Baik
			Layanan Umum		Dinas PUPR Provinsi Maluku	8.549.000,00	61.625.215,00	96		Sangat Baik
			Layanan Perkantoran		Dinas PUPR Provinsi Maluku	55.745.000,00	53.070.715,00	78		Baik
			Program Transmigrasi		Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	1.975.118.000,0 0	1.340.434.459,0 0	68		Cukup Baik
			Perencanaan dan Penyiapan Kawasan Transmigrasi	Kec. Seram Utara Barat Kab. Maluku Tengah	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	665.410.000,00	47.084.000,00	7		
			Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Kec. Seram Utara Kawasan Sapalewa Kab. Maluku Tengah	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	1.309.708.000,00	1.293.350.459,00	98		Sangat Baik
			Layanan Dukungan Manajemen Internal		Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	80.480.000,00	80.414.000,00	99		Sangat Baik
			Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal		Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	51.520.000,00	51.510.000,00	99		Sangat Baik
			Layanan Perkantoran		Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	28.960.000,00	28.904.000,00	99		Sangat Baik

3.2. PERMASALAHAN DAN KENDALA

Kondisi yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas pembantuan menunjukkan bahwa belum adanya satu persepsi atau pemahaman yang jelas terhadap tugas-tugas pembantuan yang harus dilaksanakan pemerintah daerah melalui APBN.

Dinas Pertanian

- Program Ketersediaan, Akses dan Tanaman Pangan Berkualitas Ditjen Lahan dan Irigasi Pertanian : Perubahan Peta Kerja Cetak Sawah yang Diusulkan oleh Kabupaten;
- Program Ketersediaan, Akses dan Tanaman Pangan Berkualitas Ditjen Prasarana dan Sarana : Kurangnya Pengecer Pupuk Di Kab. Aru.

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Beberapa permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Maluku khususnya Bidang Bina Marga dalam melaksanakan Tugas Pembantuan yang diberikan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat terkait kegiatan pada Bidang Bina Marga pada Program Infrastruktur Konektivitas adalah sebagai berikut:

- Dukungan Teknis yang berlokasi di Pulau Buru dan Pulau Ambon adalah : Tidak terserap 100% karena saat revisi KPA, pagu paket terkunci sehingga tidak bisa bergeser ke paket lain sehingga penyerapan tidak mencapai 100%;
- OM Prasarana Bidang Konektivitas Darat (Jalan) yang berlokasi di Pulau Buru: Masih perlu dilakukan evaluasi terkait pelaporan hasil pekerjaan yang terintegrasi dengan e-Monitoring karena data-data yang diperlukan seperti jumlah tenaga kerja, hari orang kerja, besaran upah, jenis peralatan dan material yang digunakan serta dokumentasi pelaksanaan pekerjaan kurang tersampaikan dengan baik;
- OM Prasarana Bidang Konektivitas Darat (Jembatan) yang berlokasi di Pulau Buru : Masih perlu dilakukan evaluasi terkait pelaporan hasil pekerjaan yang terintegrasi dengan e-Monitoring karena data-data yang diperlukan seperti jumlah tenaga kerja, hari orang kerja, besaran upah, jenis peralatan dan material yang digunakan serta dokumentasi pelaksanaan pekerjaan kurang tersampaikan dengan baik;
- OM Prasarana Bidang Konektivitas Darat (Jalan dan Jembatan) yang berlokasi di Pulau Buru : Pekerjaan dilakukan sesuai nilai Kontrak. Realisasi keuangan dibayarkan sesuai dengan nilai kontrak namun ada selisih di 2 ribuan dikarenakan penginputan pada aplikasi SAKTI hanya diizinkan pembulatan 3 desimal;
- Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya yang berlokasi di Pulau Ambon : Efisiensi anggaran menyebabkan pelaksanaan kegiatan tidak maksimal sesuai rencana.

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Beberapa permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Maluku dalam melaksanakan Tugas Pembantuan yang diberikan oleh Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi terkait kegiatan Perencanaan dan Penyiapan Kawasan Transmigrasi adalah

- Terdapat perbedaan Subjek dan Objek SHM antara Kantor Pertanahan Kabupaten Seram Bagian Timur dan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Seram Bagian Timur;
- Rentang waktu penyelesaian kegiatan yang singkat mengakibatkan Pihak KANTAH menolah untuk melakukan kegiatan.

3.3 SARAN DAN TINDAK LANJUT

Terkait dengan permasalahan yang dihadapi, maka solusi yang harus ditempuh adalah sebagai berikut :

Dinas Pertanian

- Program Ketersediaan, Akses dan Tanaman Pangan Berkualitas Ditjen Lahan dan Irigasi Pertanian : Pembuatan Peta Kerja yang Baru;
- Program Ketersediaan, Akses dan Tanaman Pangan Berkualitas Ditjen Prasarana dan Sarana : Kurangnya Pengecer Pupuk Di Kabupaten Kepulauan Aru.

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

- Dukungan Teknis yang berlokasi di Pulau Buru dan Pulau Ambon adalah : Perencanaan yang baik dalam pengelolaan keuangan sehingga tidak perlu direvisi anggaran;
- OM Prasarana Bidang Konektivitas Darat (Jalan) yang berlokasi di Pulau Buru: Melakukan evaluasi menyeluruh terhadap mekanisme pelaporan hasil pekerjaan yang terintegrasi dengan e-Monitoring untuk memastikan seluruh data yang dipersyaratkan dapat terinput secara lengkap dan akurat dan Menegaskan kewajiban Tim Pelaksana untuk mendokumentasikan setiap tahapan pekerjaan secara tertib dan berkelanjutan, PPK melakukan review rutin atas dokumentasi hasil pekerjaan untuk memastikan kesesuaian antara perencanaan, pelaksanaan, dan realisasi, Melaksanakan monitoring lapangan berkala disertai verifikasi dokumentasi;
- OM Prasarana Bidang Konektivitas Darat (Jembatan) yang berlokasi di Pulau Buru : Melakukan evaluasi menyeluruh terhadap mekanisme pelaporan hasil pekerjaan yang terintegrasi dengan e-Monitoring untuk memastikan seluruh data yang dipersyaratkan dapat terinput secara lengkap dan akurat dan Menegaskan kewajiban Tim Pelaksana untuk mendokumentasikan setiap tahapan pekerjaan secara tertib dan berkelanjutan, PPK melakukan review rutin atas dokumentasi hasil pekerjaan untuk memastikan kesesuaian antara perencanaan, pelaksanaan, dan realisasi, Melaksanakan monitoring lapangan berkala disertai verifikasi dokumentasi.;
- OM Prasarana Bidang Konektivitas Darat (Jalan dan Jembatan) yang berlokasi di

Pulau Buru : Realisasi keuangan dibayar sesuai nilai kontrak;

- Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya yang berlokasi di Pulau Ambon :
Memanfaatkan anggaran efisiensi dengan strategi yang lebih baik dan efektif.

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Maluku akan berupaya mengusulkan kembali terkait permasalahan yang dihadapi pada tahun 2027 melalui jasa konsultan untuk pra pensertipikan.



BAB IV

PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

BAB IV

PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

4.1 Urusan Pendidikan

4.1.1 Jenis Pelayanan Dasar

Jenis pelayanan dasar adalah jenis pelayanan dalam rangka penyediaan barang dan/atau jasa kebutuhan dasar yang berhak diperoleh oleh setiap Warga Negara secara minimal yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah. Jenis Pelayanan Dasar pada SPM Urusan Pendidikan di Provinsi Maluku sesuai Permendikbudriset Nomor 32 Tahun 2022 adalah meliputi :

- Pendidikan Menengah, dengan indikator capaian jumlah warga negara usia 16-18 tahun yang berpartisipasi pada Sekolah Menengah Atas dan Kejuruan (SMA/SMK).
- Pendidikan Khusus, dengan indikator capaian jumlah warga negara usia 4-18 tahun yang termasuk dalam Penduduk Disabilitas.

4.1.2 Target Pencapaian SPM Oleh Daerah

Target pencapaian SPM adalah target yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dalam mencapai SPM selama kurun waktu tertentu, termasuk penghitungan pembiayaannya. Berdasarkan hasil penghitungan kebutuhan layanan pendidikan sebagaimana ditampilkan Tabel 4.1 di bawah ditetapkan target pencapaian penerima layanan dasar dan penyediaan layanan dasar sebagai berikut :

Tabel 4.1
Target Pencapaian SPM Urusan Pendidikan Tahun 2025

Jenis Pelayanan Dasar	Mutu Pelayanan Dasar	Satuan	Target Pencapaian
Pendidikan Menengah Atas	I. Jumlah Penerima Yang Harus Dilayani :	Orang	94.346
	II. Jumlah Mutu (Barang/Jasa /SDM)		
	SMA		
	1. Kemampuan literasi	Nilai	60.52
	2. Kemampuan numerasi	Nilai	52.45
	3. Indeks iklim keamanan	Nilai	69,76
	4. Indeks iklim kebhinekaan	Nilai	70.76
	5. Indeks iklim inklusivitas	Nilai	56,64

	SMK		
	1. Kemampuan literasi	Nilai	58.53
	2. Kemampuan numerasi	Nilai	51.07
	3. Tingkat penyerapan lulusan SMK	Persentase	68.56
	4. Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK	Persentase	63.37
	5. Indeks iklim keamanan	Nilai	66.87
	6. Indeks iklim kebhinekaan	Nilai	68,68
Pendidikan Khusus	7. Indeks iklim inklusivitas	Nilai	54,4
	1. Jumlah Penerima Yang Harus Dilayani :	Orang	815
	Jumlah Mutu (Barang/Jasa /SDM)		
	SDLB		
	1. Indeks iklim keamanan	Nilai	71,2
	2. Indeks iklim kebhinekaan	Nilai	66,79
	3. Indeks iklim inklusivitas	Nilai	53,2
	4. Kemampuan literasi	Nilai	40
	5. Kemampuan numerasi	Nilai	34,92
	SPMLB		
	1. Indeks iklim keamanan	Nilai	71,14
	2. Indeks iklim kebhinekaan	Nilai	64,85
	3. Indeks iklim inklusivitas	Nilai	67
	4. Kemampuan literasi	Nilai	69,18
	5. Kemampuan numerasi	Nilai	54,35
	SMALB		
	1. Kemampuan literasi	Nilai	54,1
	2. Kemampuan numerasi	Nilai	48,36
	3. Indeks iklim keamanan	Nilai	50,5
	4. Indeks iklim kebhinekaan	Nilai	64,32
	5. Indeks iklim inklusivitas		55,67

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku

Berdasarkan dokumen pelaksanaan anggaran Tahun Anggaran 2025, Pemerintah Daerah telah menetapkan alokasi anggaran untuk pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Urusan Pendidikan sebesar Rp30.777.615.217 (Tiga puluh miliar tujuh

ratus tujuh puluh tujuh juta enam ratus lima belas ribu dua ratus tujuh belas rupiah). Anggaran tersebut direncanakan untuk mendukung penyediaan layanan dasar pendidikan sesuai dengan target kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan daerah.

4.1.3 Realisasi

Realisasi target pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) urusan pendidikan merupakan gambaran tingkat keberhasilan pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan dasar pendidikan kepada masyarakat sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Target pencapaian tersebut disusun berdasarkan indikator pelayanan pendidikan yang harus dipenuhi oleh pemerintah daerah guna menjamin terpenuhinya hak setiap warga negara untuk memperoleh layanan pendidikan yang layak dan berkualitas. Adapun rincian target dan realisasi capaian pelayanan dasar pada urusan pendidikan selama tahun anggaran disajikan pada tabel berikut :

Tabel 4.2
Realisasi Pencapaian SPM Urusan Pendidikan Tahun 2025

Jenis Pelayanan Dasar	Mutu Pelayanan Dasar	Satuan	Target Pencapaian	Realisasi Capaian	Total Capaian (%)
Pendidikan Menengah Atas	I. Jumlah Penerima Yang Harus Dilayani :	Orang	94.346	94.346	100 %
	II. Jumlah Mutu (Barang/Jasa /SDM)				
	SMA				
	1. Kemampuan literasi	Nilai	60.52	60.52	100 %
	2. Kemampuan numerasi	Nilai	52.45	52.45	100 %
	3. Indeks iklim keamanan	Nilai	69,76	69,76	100 %
	4. Indeks iklim kebhinekaan	Nilai	70.76	70.76	100 %
	5. Indeks iklim inklusivitas	Nilai	56,64	56,64	100 %
	SMK				
	1. Kemampuan literasi	Nilai	58.53	58.53	100 %
	2. Kemampuan numerasi	Nilai	51.07	51.07	100 %
	3. Tingkat penyerapan lulusan SMK	Persentase	68.56	68.56	100 %
	4. Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK	Persentase	63.37	63.37	100 %
	5. Indeks iklim keamanan	Nilai	66.87	66.87	100 %

	6. Indeks iklim kebinekaan	Nilai	68,68	68,68	100 %
	7. Indeks iklim inklusivitas	Nilai	54,4	54,4	100 %
Pendidikan Khusus	I. Jumlah Penerima Yang Harus Dilayani :	Orang	815	815	100 %
	II. Jumlah Mutu (Barang/Jasa /SDM)				
	SDLB				
	1. Indeks iklim keamanan	Nilai	71,2	71,2	100 %
	2. Indeks iklim kebhinekaan	Nilai	66,79	66,79	100 %
	3. Indeks iklim inklusivitas	Nilai	53,2	53,2	100 %
	4. Kemampuan literasi	Nilai	40	40	100 %
	5. Kemampuan numerasi	Nilai	34,92	34,92	100 %
	SPMLB				
	1. Indeks iklim keamanan	Nilai	71,14	71,14	100 %
	2. Indeks iklim kebhinekaan	Nilai	64,85	64,85	100 %
	3. Indeks iklim inklusivitas	Nilai	67	67	100 %
	4. Kemampuan literasi	Nilai	69,18	69,18	100 %
	5. Kemampuan numerasi	Nilai	54,35	54,35	100 %
	SMALB				
	1. Kemampuan literasi	Nilai	54,1	54,1	100 %
	2. Kemampuan numerasi	Nilai	48,36	48,36	100 %
	3. Indeks iklim keamanan	Nilai	50,5	50,5	100 %
	4. Indeks iklim kebhinekaan	Nilai	64,32	64,32	100 %
	5. Indeks iklim inklusivitas	Nilai	55,67	55,67	100 %

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku

4.1.4 Alokasi Anggaran

Anggaran adalah alokasi jumlah belanja langsung dan tidak langsung yang ditetapkan ke dalam APBD dalam rangka penerapan dan pencapaian SPM oleh Pemerintah Daerah yang bersumber dari APBD, APBN dan sumber lain yang sah. Besaran anggaran Standar Pelayanan Minimal (SPM) Tahun Anggaran 2025 bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Maluku.

Alokasi khusus untuk penerapan SPM pada Satker Perangkat Daerah ditetapkan sebesar Rp338.672.210.203 (Tiga ratus tiga puluh delapan miliar enam ratus tujuh puluh dua juta dua ratus sepuluh ribu dua ratus tiga rupiah) . Pendanaan SPM Urusan Pendidikan sebesar Rp30,777,615,217 (Tiga puluh miliar tujuh ratus tujuh puluh tujuh juta enam ratus lima belas ribu dua ratus tujuh belas rupiah) yang diperuntukkan bagi pemenuhan layanan dasar pendidikan.

4.1.5 Dukungan Personil

Dalam pelaksanaan SPM Urusan Pendidikan melibatkan seluruh urusan teknis, sub bagian dan kelompok jabatan fungsional dalam Lingkup Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku serta Cabang Dinas Pendidikan Menengah dan Khusus Kabupaten/Kota dengan rincian sebagai berikut :

- | | |
|--------------------------------|------------|
| 1. Pejabat Eselon II | : 1 Orang |
| 2. Pejabat Eselon III | : 6 Orang |
| 3. Pejabat Eselon IV | : 2 Orang |
| 4. Cabang Dinas Kabupaten/Kota | : 30 Orang |
| 5. Kelompok Jabatan Fungsional | : 9 Orang |

4.1.6 Permasalahan dan Solusi

Permasalahan

Beberapa Kendala dan permasalahan yang dihadapi dalam implementasi pencapaian penerapan SPM urusan pendidikan adalah sebagai berikut :

- Sebaran jumlah sekolah menyebabkan pemenuhan standar pelayanan minimal belum optimal disebabkan karena letak geografis sekolah yang berada didaerah kepulauan;
- Penyebaran guru belum merata;
- Belum meratanya pemenuhan sarana dan prasarana serta peningkatan kapasitas guru.

Solusi

Dalam rangka mengatasi permasalahan tersebut, pemerintah daerah perlu melakukan berbagai upaya strategis antara lain :

- Melakukan pemetaan kebutuhan layanan pendidikan berdasarkan wilayah kepulauan untuk menentukan prioritas pembangunan atau pengembangan sekolah;
- Mengembangkan model layanan pendidikan alternatif, seperti sekolah filial, kelas jauh, atau sekolah satu atap untuk wilayah yang sulit dijangkau;
- Melakukan penataan dan redistribusi guru berdasarkan kebutuhan riil tiap sekolah melalui analisis rasio guru dan siswa;
- Meningkatkan pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan secara bertahap melalui pemanfaatan berbagai sumber pendanaan serta mendorong kerja sama

dengan lembaga pendidikan, perguruan tinggi, dan organisasi profesi dalam pengembangan kapasitas guru.

4.2 Urusan Kesehatan

4.2.1 Jenis Pelayanan Dasar

Kesehatan merupakan kebutuhan dasar setiap manusia, seseorang tidak bisa memenuhi seluruh kebutuhan hidupnya jika berada dalam kondisi tidak sehat. Sehingga Kesehatan merupakan modal setiap individu untuk meneruskan kehidupannya secara layak. Pemerintah mempunyai tanggungjawab untuk menjamin setiap warga negara memperoleh pelayanan Kesehatan yang berkualitas sesuai dengan kebutuhan. Sesuai Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan, jenis layanan dasar SPM Urusan Kesehatan di tingkat Provinsi terdiri atas 2 (dua), yakni :

1. Pelayanan Kesehatan bagi penduduk terdampak krisis Kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi;
2. Pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa provinsi.

Pelayanan yang bersifat peningkatan/promotif dan pencegahan/preventif mencakup peningkatan kesehatan, perlindungan spesifik, diagnosis dini dan pengobatan tepat, pencegahan kecacatan dan rehabilitasi. Pelayanan dasar pada SPM Urusan Kesehatan dilaksanakan pada fasilitas pelayanan kesehatan baik milik pemerintah pusat, pemerintah daerah, maupun swasta. Pelayanan dasar dilaksanakan oleh tenaga kesehatan sesuai dengan kompetensi dan kewenangan. Selain oleh tenaga kesehatan untuk jenis pelayanan dasar tertentu dapat dilakukan oleh kader kesehatan terlatih di luar fasilitas pelayanan kesehatan di bawah pengawasan tenaga kesehatan. Capaian kinerja Pemerintah Daerah dalam pemenuhan mutu pelayanan setiap jenis pelayanan dasar pada SPM Urusan Kesehatan harus 100% (seratus persen).

4.2.2 Target Pencapaian SPM oleh Daerah

Target pencapaian SPM Urusan Kesehatan dapat diukur melalui pelaksanaan program, kegiatan/sub kegiatan serta pembiayaan tahun 2025 yang dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.3
Penapaian Target SPM Urusan Kesehatan Tahun 2025

Jenis Pelayanan Dasar	Mutu Pelayanan Dasar	Target Pencapaian
Pelayanan Kesehatan Bagi	PRA KRISIS KESEHATAN	
	1. Edukasi pengurangan risiko krisis	752 Orang

Jenis Pelayanan Dasar	Mutu Pelayanan Dasar	Target Pencapaian
Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Provinsi	kesehatan bagi penduduk yang tinggal di wilayah berpotensi bencana (peserta/masyarakat)	
	2. Tenaga medis, tenaga kesehatan, atau tenaga non kesehatan	11.000 Orang
	3. Sarana dan prasarana	2.913 Unit
	TAHAP TANGGAP DARURAT	
	1. Obat-obatan dan bahan medis habis pakai	752 Orang
	2. Pemberian Makan Bayi dan Anak (PMBA) meliputi pemberian ASI dan MPASI	5.000 Orang
	3. Makanan tambahan untuk ibu hamil Kekurangan Energi Kronis (KEK) dan balita bermasalah gizi	2.500 Orang
	4. Kelengkapan pendukung kesehatan perorangan (Individu Kit)	5 Orang
	5. Tenaga medis (Dokter)	727 Orang
	6. Tenaga kesehatan (Bidan)	3.722 Orang
	7. Tenaga kesehatan (Perawat)	7.532 Orang
	8. Tenaga kesehatan (Tenaga kefarmasian)	927 Orang
	9. Tenaga kesehatan (Tenaga Kesehatan masyarakat)	1.294 Orang
	10. Tenaga kesehatan (Tenaga kesehatan lingkungan)	678 Orang
	11. Tenaga kesehatan (Tenaga Gizi)	785 Orang
	12. Tenaga kesehatan terlatih di urusan kesehatan jiwa atau tenaga kesehatan yang memiliki kemampuan penanganan kesehatan jiwa	5 Orang
Pelayanan Kesehatan Bagi	BERPOTENSI KLB	

Jenis Pelayanan Dasar	Mutu Pelayanan Dasar	Target Pencapaian
Penduduk Pada Kondisi Kejadian Luar Biasa Provinsi dan atau Berpotensi KLB	1. Alat Perlindungan Diri (APD) sesuai dengan jenis penyakit	2000 Unit
	2. Profilaksis/Vitamin/Obat/Vaksin	1 Paket
	3. Wadah pengiriman spesimen/Specimen Carrie	17 Unit
	4. Tempat sampah biologis	5 Unit
	5. Formulir penyelidikan epidemiologi, form/lembar KIE, alat tulis yang diperlukan	560 Formulir
	6. Alat dan bahan pengambilan spesimen (Tabung, Pot, Media Amies, Reagen, tes diagnostik cepat, dll)	110 Unit
	7. Alat pemeriksaan fisik (Stetoskop, Termometer Badan, Tensimeter, Senter, dll)	8 Unit
	8. Tenaga medis (Dokter)	727 Orang
	9. tenaga kesehatan masyarakat yang mempunyai kemampuan di urusan epidemiologi	273 Orang
	10. Tenaga kesehatan masyarakat yang mempunyai kemampuan di urusan kesehatan lingkungan	678 Orang
	11. Tenaga kesehatan masyarakat yang mempunyai kemampuan di urusan entomologi	13 Orang
	12. Tenaga Laboratorium	616 orang
	13. Tenaga penyuluh/promosi kesehatan	317 orang
	14. etugas penanggung jawab program disesuaikan dengan jenis KLB yang terjadi	12 Orang
	KONDISI TERJADI KLB	
	1. Tata laksana kasus (Perawatan dan pengobatan) bagi penduduk yang terinfeksi KLB di Rumah	11 Orang

Jenis Pelayanan Dasar	Mutu Pelayanan Dasar	Target Pencapaian
	Sakit	

Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Maluku

Pembiayaan untuk pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Urusan Kesehatan sebesar Rp.313,254,000,- Anggaran tersebut direncanakan untuk mendukung penyediaan layanan kesehatan sesuai dengan target kinerja yang telah ditetapkan.

4.2.3 Realisasi

Realisasi target pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) pada urusan kesehatan merupakan gambaran tingkat keberhasilan pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan kesehatan dasar kepada masyarakat sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Pencapaian tersebut menunjukkan sejauh mana pelayanan kesehatan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah dapat dilaksanakan secara optimal selama 1 (satu) tahun anggaran. Rincian target dan realisasi capaian pelayanan dasar pada urusan disajikan pada tabel berikut :

Tabel 4.4
Realisasi Pencapaian SPM Urusan Kesehatan Tahun 2025

Jenis Pelayanan Dasar	Kategori Mutu Pelayanan Dasar	Target Pencapaian	Realisasi Capaian	Total Capaian (%)
Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Provinsi	PRA KRISIS KESEHATAN			
	1. Edukasi pengurangan risiko krisis kesehatan bagi penduduk yang tinggal di wilayah berpotensi bencana (peserta/masyarakat)	752 Orang	752 Orang	100 %
	2. Tenaga medis, tenaga kesehatan, atau tenaga non kesehatan	11.000 Orang	11.000 Orang	100 %
	3. Sarana dan prasarana	2.913 Unit	2.913 Unit	100 %
	TAHAP TANGGAP DARURAT			
	1. Obat-obatan dan bahan medis habis pakai	752 Orang	752 Orang	100 %
	2. Pemberian Makan Bayi dan Anak (PMBA) meliputi pemberian ASI dan MPASI	5.000 Orang	5.000 Orang	100 %
	3. Makanan tambahan untuk ibu hamil Kekurangan Energi Kronis (KEK) dan balita bermasalah gizi	2.500 Orang	2.500 Orang	100 %

Jenis Pelayanan Dasar	Kategori Mutu Pelayanan Dasar	Target Pencapaian	Realisasi Capaian	Total Capaian (%)
	4. Kelengkapan pendukung kesehatan perorangan (Individu Kit)	5 Orang	5 Orang	100 %
	5. Tenaga medis (Dokter)	727 Orang	727 Orang	100 %
	6. Tenaga kesehatan (Bidan)	3.722 Orang	3.722 Orang	100 %
	7. Tenaga kesehatan (Perawat)	7.532 Orang	7.532 Orang	100 %
	8. Tenaga kesehatan (Tenaga kefarmasian)	927 Orang	927 Orang	100 %
	9. Tenaga kesehatan (Tenaga Kesehatan masyarakat)	1.294 Orang	1.294 Orang	100 %
	10. Tenaga kesehatan (Tenaga kesehatan lingkungan)	678 Orang	678 Orang	100 %
	11. Tenaga kesehatan (Tenaga Gizi)	785 Orang	785 Orang	100 %
	12. Tenaga kesehatan terlatih di urusan kesehatan jiwa atau tenaga kesehatan yang memiliki kemampuan penanganan kesehatan jiwa	5 Orang	5 Orang	100 %
Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk Pada Kondisi Kejadian Luar Biasa Provinsi dan atau Berpotensi KLB	BERPOTENSI KLB			
	1. Alat Perlindungan Diri (APD) sesuai dengan jenis penyakit	2000 Unit	2000 Unit	100 %
	2. Profilaksis/Vitamin/Obat/Vaksin	1 Paket	1 Paket	100 %
	3. Wadah pengiriman spesimen/Specimen Carrier	17 Unit	17 Unit	100 %
	4. Tempat sampah biologis	5 Unit	5 Unit	100 %
	5. Formulir penyelidikan epidemiologi, form/lembar KIE, alat tulis yang diperlukan	560 Formulir	560 Formulir	100 %
	6. Alat dan bahan pengambilan spesimen (Tabung, Pot, Media Amies, Reagen, tes diagnostik cepat, dll)	110 Unit	110 Unit	100 %
	7. Alat pemeriksaan fisik (Stetoskop, Termometer Badan, Tensimeter, Senter, dll)	8 Unit	8 Unit	100 %
	8. Tenaga medis (Dokter)	727 Orang	727 Orang	100 %

Jenis Pelayanan Dasar	Kategori Mutu Pelayanan Dasar	Target Pencapaian	Realisasi Capaian	Total Capaian (%)
	9. enaga kesehatan masyarakat yang mempunyai kemampuan di urusan epidemiologi	273 Orang	273 Orang	100 %
	10.Tenaga kesehatan masyarakat yang mempunyai kemampuan di urusan kesehatan lingkungan	678 Orang	678 Orang	100 %
	11.Tenaga kesehatan masyarakat yang mempunyai kemampuan di urusan entomologi	13 Orang	13 Orang	100 %
	12.Tenaga Laboratorium	616 orang	616 orang	100 %
	13.Tenaga penyuluh/promosi kesehatan	317 orang	317 orang	100 %
	14.etugas penanggung jawab program disesuaikan dengan jenis KLB yang terjadi	12 Orang	12 Orang	100 %
	KONDISI TERJADI KLB			
	1. Tata laksana kasus (Perawatan dan pengobatan) bagi penduduk yang terinfeksi KLB di Rumah Sakit	11 Orang	11 Orang	100 %

Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Maluku

Berdasarkan tabel diatas, rata-rata capaian kinerja adalah 100%. Dengan demikian, program/kegiatan/sub kegiatan pendukung pencapaian urusan kesehatan yang dilaksanakan selama tahun 2025 tercapai sesuai target yang telah ditentukan.

4.2.4 Alokasi Anggaran

Alokasi anggaran pada urusan kesehatan sebesar Rp.313.254.000,- (tiga ratus tiga belas juta dua ratus lima puluh empat ribu rupiah).Anggaran tersebut dialokasikan untuk mendukung pelaksanaan Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat, khususnya melalui kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi. Dalam pelaksanaannya, kegiatan tersebut terbagi ke dalam dua sub kegiatan, yaitu Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana dengan alokasi anggaran sebesar Rp172.794.000,- (seratus tujuh puluh dua juta tujuh ratus sembilan puluh empat

ribu rupiah) serta Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa dengan alokasi anggaran sebesar Rp140.460.000,- (seratus empat puluh juta empat ratus enam puluh ribu rupiah).

4.2.5 Dukungan Personil

Sumber Daya Manusia (SDM) pada Dinas Kesehatan Provinsi Maluku di klasifikasikan menjadi 2 (dua) unsur yaitu Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Non ASN (Honorar). Komposisi pegawai berdasarkan kualifikasi pendidikan dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 4.5
Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan Pada Dinas Kesehatan Provinsi Maluku Tahun 2025

No	Jenis Pendidikan	Jumlah Definitif	Jumlah Titipan
1	SD	-	-
2	SMP/ SEDERAJAT	2	-
3	SMA/ SEDERAJAT	19	-
4	D1	-	-
5	D2	-	-
6	D3	11	-
7	S1	89	2
8	S2	15	-
9	S3	1	-
Jumlah		139	

Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Maluku

4.2.6 Permasalahan dan Solusi

Permasalahan

Beberapa Kendala dan permasalahan yang dihadapi dalam implementasi pencapaian penerapan SPM urusan kesehatan adalah sebagai berikut :

- Perlu adanya Pelatihan Penyusunan Dokumen Rencana Kontigensi Tingkat Kabupaten/Kota;
- Masyarakat menolak diimunisasi ketika terjadi KLB PD3I.

Solusi

Beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk permasalahan yang dihadapi yaitu:

- Perlu adanya peningkatan kapasitas dalam penyusunan rencana kontingensi

tingkat Kabupaten/Kota dan simulasi atau geladi lapang untuk Provinsi dan Kabupaten/Kota;

- b) Melakukan pendekatan dengan TOGA dan TOMAS untuk pemberian imunisasi akibat PD3I.

4.3 Urusan Pekerjaan Umum

4.3.1 Jenis Pelayanan Dasar

Jenis Pelayanan Dasar adalah jenis pelayanan dalam rangka penyediaan barang dan/ atau jasa kebutuhan dasar yang berhak diperoleh oleh setiap Warga Negara secara minimal. Jenis Pelayanan Dasar Urusan Pekerjaan Umum Pemerintah Provinsi sebagaimana tersebut dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2023 Tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Urusan Pekerjaan Umum dan Urusan Perumahan Rakyat, meliputi :

- Pemenuhan kebutuhan Air Minum Curah Lintas Kabupaten/Kota; dan
- Penyediaan pelayanan pengelolaan Air Limbah Domestik Regional lintas Kabupaten/Kota.

4.3.2 Target Pencapaian SPM oleh Daerah

Target pencapaian pelayanan dasar pada SPM Urusan Pekerjaan Umum Tahun 2025 tergambar pada tabel berikut ini :

Tabel 4.6
Target Pencapaian SPM Urusan Pekerjaan Umum
Tahun 2025

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Target Capaian	
1	Pemenuhan Kebutuhan Air Minum Curah Lintas Kabupaten/Kota	Pemberian bantuan Keuangan oleh Pemerintah Daerah Provinsi kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pembinaan Pengelolaan dan Pengembangan SPAM Kabupaten/Kota	Rp.3.328.446.314	

		Rekapitulasi SPAM Kabupaten/Kota pembinaan pengelolaan dan pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Kabupaten/Kota (pendataan, penghitungan kebutuhan dan perencanaan)	11 Kab/Kota	
2	Penyediaan Pelayanan Pengelolaan Air Limbah Domestik Regional Lintas Kabupaten/Kota	Rekapitulasi SPALD Kabupaten/Kota pembinaan pengelolaan dan pengembangan Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Kabupaten/Kota (pendataan, penghitungan kebutuhan dan perencanaan)	100 %	

Sumber : Dinas PUPR Provinsi Maluku

Pada Tahun Anggaran 2025, pembiayaan untuk pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) urusan pekerjaan umum sebesar Rp.5,725,210,114,-.

4.3.3 Realisasi

Realisasi target pencapaian pada urusan Pekerjaan Umum merupakan gambaran kinerja pemerintah daerah dalam memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang berkaitan dengan penyediaan pelayanan dasar infrastruktur kepada masyarakat. Pelayanan pada urusan ini umumnya mencakup pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat terhadap akses air minum yang layak serta pengelolaan air limbah domestik yang memadai. Pemerintah daerah telah melaksanakan berbagai program dan kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan cakupan pelayanan serta kualitas infrastruktur dasar pada sektor pekerjaan umum sebagai berikut :

Tabel 4.7
Realisasi Pencapaian SPM Urusan Pekerjaan Umum
Tahun 2025

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Target Capaian	Realisasi Capaian	Total Capaian (%)
1	Pemenuhan Kebutuhan Air Minum Curah Lintas Kabupaten/Kota	Pemberian bantuan Keuangan oleh Pemerintah Daerah Provinsi kepada	Rp.3.328.446.314	Rp.3.328.446.314	100 %

		Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pembinaan Pengelolaan dan Pengembangan SPAM Kabupaten/Kota			
		Rekapitulasi SPAM Kabupaten/Kota pembinaan pengelolaan dan pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Kabupaten/Kota (pendataan, penghitungan kebutuhan dan perencanaan)	11 Kab/Kota	11 Kab/Kota	100 %
2	Penyediaan Pelayanan Pengelolaan Air Limbah Domestik Regional Lintas Kabupaten/Kota	Rekapitulasi SPALD Kabupaten/Kota pembinaan pengelolaan dan pengembangan Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Kabupaten/Kota (pendataan, penghitungan kebutuhan dan perencanaan)	100 %	100 %	100 %

Sumber : Dinas PUPR Provinsi Maluku

4.3.4 Alokasi Anggaran

Adapun program dan kegiatan pada tahun 2025 yang mendukung pelayanan dasar pemenuhan kebutuhan pelayanan air minum curah lintas Kabupaten/Kota pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Maluku yakni Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum – Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota dengan anggaran sebesar Rp.5,725,210,114,-.

4.3.5 Dukungan Personil

Jumlah ASN yang terlibat dalam proses penerapan dan pencapaian SPM dengan jumlah ASN sebanyak 22 orang. Data Pegawai ASN menurut jabatan dan golongan adalah sebagai berikut :

Tabel 4.8
Jumlah ASN SPM Urusan Pekerjaan Umum Tahun 2025

NO	JABATAN	PANGKAT/ GOLONGAN	JUMLAH
1.	Kepala Urusan Cipta Karya	Penata Tk. I, III/d	1 orang
2.	Kepala Seksi Penataan Bangunan dan Lingkungan Permukiman	Pembina, IV.a	1 orang
3.	Kepala Seksi Perencanaan dan Pengendalian	Penata Tk.I, IV/a	1 orang
4.	Staf Seksi Tata Bangunan dan Lingkungan Permukiman	Golongan II	10 orang
		Golongan III	2 orang
5.	Staf Perencanaan dan Pengendalian	Golongan II	5 orang
		Golongan III	2 orang

Sumber : Dinas PUPR Provinsi Maluku

4.3.6 Permasalahan dan Solusi

Permasalahan

SPM Bidang Air Minum Indikator capaian SPM bidang air minum sesuai kewenangan Pemerintah Provinsi adalah "Persentase kapasitas yang dapat terlayani melalui penyaluran air minum curah lintas kabupaten/kota". Yang menjadi tantangan dan permasalahan bagi Dinas PUPR Provinsi Maluku dalam pencapaian SPM ini adalah :

1. Kondisi geografis wilayah Provinsi Maluku adalah wilayah dengan karakteristik kepulauan, sehingga menjadi kendala dalam capaian SPM skala regional;
2. Minimnya ketersediaan dokumen perencanaan di daerah, terkait dengan pengembangan SPAM regional;
3. Berdasarkan kewenangan pengembangan SPAM regional, diperlukan keterpaduan lintas sektor, dimana pembangunan bendungan untuk sumber air baku menjadi kewenangan Bidang Sumber Daya Air/BWS, sedangkan pengembangan jaringan air minum merupakan kewenangan

Bidang Cipta Karya;

4. Membutuhkan anggaran yang cukup besar untuk pembangunan infrastruktur SPAM regional.

SPM Bidang Sanitasi Indikator capaian SPM bidang sanitasi sesuai kewenangan pemerintah provinsi adalah "Persentase rumah tangga yang mendapat akses layanan pengolahan air limbah domestik melalui SPALD regional". Tantangan dan permasalahan dalam pencapaian SPM ini adalah :

1. Kondisi geografis wilayah Provinsi Maluku adalah wilayah dengan karakteristik kepulauan, sehingga menjadi kendala dalam capaian SPM skala regional;
2. Belum adanya dokumen perencanaan di daerah, terkait dengan pengembangan SPALD regional;
3. Infrastruktur pengolahan air limbah domestik skala regional belum pernah di bangun.

Solusi

Upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi permasalahan terkait SPM

Bidang Air Minum dan sanitasi sebagai berikut :

1. Mengembangkan sistem penyediaan air minum regional dengan pendekatan klaster wilayah atau pulau untuk menyesuaikan dengan kondisi geografis Provinsi Maluku yang berciri kepulauan;
2. Mendorong penyusunan dokumen perencanaan pengembangan SPAM regional dan SPALD regional, seperti masterplan, studi kelayakan (FS), dan Detail Engineering Design (DED) sebagai dasar pelaksanaan pembangunan infrastruktur air minum dan pengolahan air limbah domestik;
3. Meningkatkan koordinasi dan keterpaduan lintas sektor antara Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, dan Balai Wilayah Sungai (BWS) dalam penyediaan sumber air baku dan pembangunan jaringan distribusi air minum;
4. Mengupayakan dukungan pendanaan dari berbagai sumber, baik melalui APBD, APBN, Dana Alokasi Khusus (DAK), maupun sumber pendanaan lainnya guna mendukung pembangunan infrastruktur sanitasi regional serta kemungkinan kerja sama dengan pihak lain.

4.4 Urusan Perumahan Rakyat

4.4.1 Jenis Layanan Dasar

Jenis Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam PermenPupr Nomor 23 Tahun 2023 dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a pada SPM Urusan Perumahan Rakyat Daerah provinsi sebagai berikut :

Tabel 4.9
Target Pencapaian SPM Urusan Perumahan Rakyat Tahun 2025

No	Jenis Layanan Dasar	Indikator
1.	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana provinsi	a) Rehabilitasi rumah; b) Pembangunan kembali rumah; c) Pemukiman kembali; atau d) Bantuan akses rumah sewa layak huni.
2.	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah provinsi	a) Subsidi uang sewa b) Akses tinggal rumah sewa layak huni milik pemerintah daerah.

Sumber : Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Maluku.

4.4.2 Target Pencapaian

Target pencapaian pelayanan dasar pada SPM Urusan Perumahan Rakyat Tahun 2025 tergambar pada tabel berikut :

Tabel 4.10
Target Pencapaian SPM Urusan Pekerjaan Umum Tahun 2025

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Target Capaian
1	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana provinsi	1. Rehabilitasi rumah bagi korban bencana	746 Unit Rumah
		2. Pembangunan kembali rumah bagi korban bencana	43 Unit Rumah
		3. Pemukiman kembali bagi korban bencana	7 Unit Rumah
		4. Bantuan akses rumah sewa layak huni bagi korban bencana	0
2	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana provinsi	1. Fasilitasi penggantian Hak Atas Penguasaan Tanah dan/atau Bangunan	204 Unit Rumah
		2. Bantuan akses Rumah Sewa Layak Hunina	0

Sumber : Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Maluku

Pada urusan perumahan rakyat, pemerintah telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp22.831.366.000,- (dua puluh dua miliar delapan ratus tiga puluh satu juta tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah).

4.4.3 Realisasi

Selama tahun anggaran berjalan, pemerintah daerah melaksanakan berbagai program dan kegiatan yang mendukung pemenuhan SPM pada urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman, khususnya yang berkaitan dengan peningkatan kualitas rumah tidak layak huni serta penyediaan prasarana, sarana, dan utilitas umum permukiman. Berikut realisasi capaian target urusan perumahan rakyat :

Tabel 4.11
Realisasi Pencapaian SPM Urusan Pekerjaan Umum Tahun 2025

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Target Capaian	Realisasi Capaian	Total Capaian (%)
1	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana provinsi	1. Rehabilitasi rumah bagi korban bencana	746 Unit Rumah	746 Unit Rumah	100 %
		2. Pembangunan kembali rumah bagi korban bencana	43 Unit Rumah	43 Unit Rumah	100 %
		3. Pemukiman kembali bagi korban bencana	7 Unit Rumah	7 Unit Rumah	100 %
		4. Bantuan akses rumah sewa layak huni bagi korban bencana	0	0	-
2	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana provinsi	1. Fasilitas penggantian Hak Atas Penguasaan Tanah dan/atau Bangunan	204 Unit Rumah	204 Unit Rumah	100 %
		2. Bantuan akses Rumah Sewa Layak Hunina	0	0	-

Sumber : Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Maluku

4.4.3 Alokasi Anggaran

Alokasi anggaran untuk SPM Urusan Perumahan Rakyat di Provinsi Maluku tahun anggaran 2025 yang bersumber dari APBD sebesar Rp.22.831.366.000,- (Dua puluh dua miliar delapan ratus tiga puluh satu juta tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah). Di samping sumber pendanaan dari APBD, pelaksanaan program pada urusan perumahan rakyat juga didukung oleh anggaran yang bersumber dari APBN sebesar Rp6.018.000.000,- (enam miliar delapan belas juta rupiah). Anggaran tersebut dialokasikan untuk mendukung pelaksanaan program pengembangan perumahan.

4.4.4 Dukungan Personil

Berdasarkan data kepegawaian per Desember 2025 pegawai di lingkungan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Maluku berjumlah 149 orang terdiri dari :

- a) ASN sebanyak 54 orang;
- b) Tenaga Harian sebanyak 87 orang.

4.4.5 Permasalahan dan Solusi

Permasalahan

1. Permasalahan terkait urusan wajib di sektor Perumahan, antara Dokrenda dan keterbatasan Fiskal sehingga akses layanan SPM tidak maksimal ke penerima layanan, kemudian konflik sosial di Maluku cukup tinggi seharusnya di cover juga dalam Penerima layanan SPM Perumahan Rakyat.

Solusi

1. Perlu melakukan penguatan sinkronisasi antara perencanaan dan penganggaran dengan menetapkan skala prioritas program yang secara langsung mendukung pemenuhan indikator SPM. Selain itu, diperlukan optimalisasi berbagai sumber pendanaan baik dari APBD, APBN, maupun sumber pendanaan lain yang sah, serta peningkatan koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah kabupaten/kota dalam pelaksanaan program perumahan rakyat;
2. Pemerintah daerah juga perlu melakukan pemutakhiran data penerima manfaat agar bantuan perumahan lebih tepat sasaran serta mempertimbangkan masyarakat terdampak konflik sosial sebagai bagian dari prioritas penerima layanan SPM perumahan rakyat, sehingga akses layanan perumahan yang layak bagi masyarakat dapat terpenuhi secara lebih optimal.

4.5 Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat

4.5.1 Jenis Layanan Dasar

Jenis Pelayanan Dasar adalah jenis pelayanan dalam rangka penyediaan barang dan/atau jasa kebutuhan dasar serta pemenuhannya. Jenis Pelayanan Dasar yang dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja adalah jenis pelayanan dasar pada pelayanan ketentraman dan ketertiban umum Provinsi. Dalam mengukur Jenis pelayanan dasar ketentraman dan ketertiban umum, adapun indikator yang dapat digunakan yaitu jumlah warga negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan Perkada di Provinsi. Berikut Tabel jenis pelayanan dasar Ketentraman dan Ketertiban Umum Provinsi.

Tabel 4.12
Tabel Jenis Pelayanan Dasar Ketentraman dan Ketertiban Umum Provinsi

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Target Capaian	Batas Waktu
1.	Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum Provinsi.	Jumlah Warga Negara Yang Memperoleh Layanan Akibat dari Penegakan Perda dan Perkada di Provinsi	100%	Setiap Tahun

Sumber : Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Maluku

4.5.2 Target Pencapaian SPM oleh Daerah

Target pencapaian SPM Urusan Trantibumlinmas Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Provinsi pada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Maluku adalah target yang hendak dicapai pada indikator kinerja sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 Tentang Penerapan Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota, yang dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Maluku di tahun 2025. Berikut adalah tabel target pencapaian SPM Urusan Trantiubumlinmas Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum Provinsi.

Tabel 4.13
Pencapaian SPM Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum Provinsi

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Target Capaian
1	Pelayanan ketenteramandan ketertiban Umum Provinsi	1. Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkada di Provinsi	13 Orang
		Jumlah Mutu (Barang/Jasa/Sdm) Yang Harus Dilayani/Dipenuhi	
		1. Pemenuhan standar sarana prasarana Satpol PP yang digunakan sebagai penunjang proses penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta penegakan Perda dan Perkada yang dilaksanakan oleh Satpol PP	23 Unit
		2. Pemenuhan Standar Operasional Prosedur (SOP) Satpol PP dalam rangka penegakan perda/perkada serta penyelenggaraan Tibumtranmas sesuai	6 Dokumen

		Permendagri 16 Tahun 2023	
		3. Pemenuhan standar peningkatan kapasitas anggota Satpol PP dan anggota Perlindungan masyarakat dalam rangka penegakan perda/perkada serta penyelenggaraan Tibumtranmas atau ASN yang telah lulus diklat dasar Satpol PP dan satlinmas yang telah mengikuti peningkatan kapasitas SDM	52 Orang
		4. Pemenuhan standar pelayanan yang terkena dampak gangguan Trantibum akibat penegakan hukum pelanggaran Perda/Perkada terhadap pelayanan kerugian material	2 Dokumen
		5. Warga negara yang memperoleh pelayanan kerugian materil	1 Orang
		6. Warga negara yang memperoleh pelayanan pengobatan	1 Orang

Sumber : Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Maluku

Pada urusan ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, anggaran yang dialokasikan untuk penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) sebesar Rp119.869.400,- (seratus sembilan belas juta delapan ratus enam puluh sembilan ribu empat ratus rupiah).

4.5.3 Realisasi

Realisasi target pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) pada urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat menggambarkan tingkat keberhasilan pemerintah daerah dalam menyelenggarakan pelayanan dasar yang berkaitan dengan penegakan peraturan daerah, penyelenggaraan ketertiban umum, serta perlindungan masyarakat. Capaian tersebut merupakan hasil pelaksanaan program dan kegiatan selama 1 (satu) tahun anggaran yang kemudian dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan sebelumnya. Rincian target dan realisasi capaian SPM pada urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat disajikan pada tabel berikut :

Tabel 4.14
Pencapaian SPM Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum Provinsi

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Target Capaian	Realisasi Capaian	Capaian (%)
1	Pelayanan ketenteramandan ketertiban Umum Provinsi	1. Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkada di Provinsi	13 Orang	13 Orang	100 %
		Jumlah Mutu (Barang/Jasa/Sdm)			

	1. Pemenuhan standar sarana prasarana Satpol PP yang digunakan sebagai penunjang proses penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta penegakan Perda dan Perkada yang dilaksanakan oleh Satpol PP	23 Unit	23 Unit	100 %
	2. Pemenuhan Standar Operasional Prosedur (SOP) Satpol PP dalam rangka penegakan perda/perkada serta penyelenggaraan Tibumtranmas sesuai Permendagri 16 Tahun 2023	6 Dokumen	6 Dokumen	100 %
	3. Pemenuhan standar peningkatan kapasitas anggota Satpol PP dan anggota Perlindungan masyarakat dalam rangka penegakan perda/perkada serta penyelenggaraan Tibumtranmas atau ASN yang telah lulus diklat dasar Satpol PP dan satlinmas yang telah mengikuti peningkatan kapasitas SDM	52 Orang	52 Orang	100 %
	4. Pemenuhan standar pelayanan yang terkena dampak gangguan Trantibum akibat penegakan hukum pelanggaran Perda/Perkada terhadap pelayanan kerugian material	2 Dokumen	2 Dokumen	100 %
	5. Warga negara yang memperoleh pelayanan kerugian materil	1 Orang	1 Orang	100 %
	6. Warga negara yang memperoleh pelayanan pengobatan	1 Orang	1 Orang	100 %

Sumber : Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Maluku

4.5.4 Alokasi Anggaran

Pada urusan yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Maluku, pemerintah daerah mengalokasikan anggaran pada perangkat daerah sebesar Rp14.701.186.070 (empat belas miliar tujuh ratus satu juta seratus delapan puluh enam ribu tujuh puluh rupiah). Dari total alokasi tersebut, anggaran yang secara khusus mendukung

penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) pada perangkat daerah dialokasikan sebesar Rp119.869.400 (seratus sembilan belas juta delapan ratus enam puluh sembilan ribu empat ratus rupiah) yang bersumber dari APBD melalui Dana Alokasi Umum (DAU).

4.5.5 Dukungan Personil

Jumlah pegawai pada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Maluku berjumlah 237 orang yang terdiri dari 54 orang PNS dan 183 orang pegawai kontrak yang diperbantukan pada urusan teknis yaitu urusan pembinaan masyarakat berjumlah 2 orang, urusan perlindungan masyarakat berjumlah 2 orang, urusan penegakkan Perda berjumlah 3 orang dan urusan ketentraman dan ketertiban umum berjumlah 166 orang dan diperbantukan pada sekretariat berjumlah 10 orang. Sementara untuk PNS yang terqualifikasi PPNS sampai dengan akhir tahun 2025 berjumlah 5 orang, pegawai dengan jabatan fungsional berjumlah 11 orang dan yang telah mengikuti diklat dasar Polisi Pamong Praja adalah berjumlah 15 orang.

4.5.6 Permasalahan dan Solusi

- Permasalahan
 - a) Sebagian anggaran yang mendukung penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) pada tahun anggaran berjalan mengalami penyesuaian melalui kebijakan refocusing anggaran, sementara sebagian lainnya tetap dipertahankan untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan prioritas. Salah satu anggaran yang terdampak refocusing adalah anggaran untuk pelaksanaan kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Dasar (Diklat Dasar) bagi Satuan Polisi Pamong Praja yang sebelumnya dikelola oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM). Akibat kebijakan tersebut, kegiatan Diklat Dasar Satpol PP pada tahun anggaran berjalan belum dapat diselenggarakan sebagaimana yang telah direncanakan.
- Solusi
 - a) Mengusulkan kembali pengalokasian anggaran pelaksanaan Diklat Dasar Satpol PP pada dokumen perencanaan dan penganggaran tahun berikutnya;
 - b) Melakukan koordinasi antara perangkat daerah terkait, khususnya BPSDM dan Satuan Polisi Pamong Praja, untuk menetapkan jadwal pelaksanaan pelatihan pada tahun anggaran selanjutnya;
 - c) melakukan pemetaan kebutuhan kompetensi aparatur Satpol PP sebagai dasar dalam perencanaan pengembangan kapasitas sumber daya manusia guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Satpol PP

dalam pemenuhan Standar Pelayanan Minimal pada urusan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat.

4.6 Urusan Sosial

4.6.1 Jenis Pelayanan Dasar

Jenis pelayanan dasar yang berhubungan dengan SPM Urusan Sosial pada Dinas Sosial Provinsi Maluku dilakukan melalui program dan kegiatan, yaitu :

1. Program Rehabilitasi Sosial, yang terlaksana melalui kegiatan-kegiatan :
 - a) Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam panti;
 - b) Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti;
 - c) Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia di dalam Panti;
 - d) Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti;
 - e) Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam panti.
2. Program Penanganan Bencana, yang terlaksana melalui kegiatan :
 - Perlindungan Sosial Bencana Alam dan Sosial Provinsi.

4.6.2 Target Pencapaian SPM oleh Daerah

Target pencapaian pelayanan dasar pada SPM Urusan Sosial Tahun 2025 tergambar pada tabel berikut ini :

Tabel 4.15

Target Pencapaian SPM Urusan Sosial Tahun 2025

No	Jenis Layanan Dasar	Indikator	Target
1.	Rehabilitasi Sosial	1. Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti	157 Orang
		2. Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti	832 Orang
		3. Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti	32 Orang
		4. Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti	6 Orang
2.	Penanganan Bencana	1. Perlindungan dan Jaminan Sosial Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana Bagi Korban Bencana Provinsi	100 Persen

Sumber : Dinas Sosial Provinsi Maluku

4.6.3 Realisasi

Realisasi target pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) pada urusan sosial menggambarkan tingkat keberhasilan pemerintah daerah dalam

memberikan pelayanan dasar kepada masyarakat yang mengalami permasalahan sosial, khususnya bagi kelompok rentan dan masyarakat yang membutuhkan perlindungan sosial. Capaian tersebut merupakan hasil pelaksanaan program dan kegiatan selama 1 (satu) tahun anggaran yang kemudian dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan sebelumnya. Rincian target dan realisasi capaian SPM pada urusan sosial disajikan pada tabel berikut :

Tabel 4.16
Target Pencapaian SPM Urusan Sosial Tahun 2025

No	Jenis Layanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian	Realisasi Capaian	Total Capaian
1.	Rehabilitasi Sosial	5. Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti	157 Orang	157 Orang	100%
		6. Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti	832 Orang	832 Orang	100%
		7. Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti	32 Orang	32 Orang	100%
		8. Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti	6 Orang	6 Orang	100%
2.	Penanganan Bencana	2. Perlindungan dan Jaminan Sosial Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana Bagi Korban Bencana Provinsi	100 Persen	100 Persen	100%

Sumber : Dinas Sosial Provinsi Maluku

4.6.3 Alokasi Anggaran

Alokasi anggaran urusan sosial pada tahun 2025 sebesar Rp3.129.957.492 (tiga miliar seratus dua puluh sembilan juta sembilan ratus lima puluh tujuh ribu empat ratus sembilan puluh dua rupiah) untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan yang berkaitan dengan pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM). Dari total anggaran tersebut, salah satu program yang mendukung penerapan SPM adalah Program Rehabilitasi Sosial, dan penanganan bencana.

4.6.4 Permasalahan dan Solusi

- Permasalahan

Dalam penerapan SPM Urusan Sosial pada Dinas Sosial Provinsi Maluku

tahun 2025, ada permasalahan yang menjadi perhatian khusus, antara lain:

- a) Pada pelaksanaan SPM di Dinas Sosial Provinsi Maluku hanya menjalankan beberapa indikator saja, hal itu sesuai dengan hasil assesment dan anggaran yang tersedia;
 - b) Dampak Efisiensi mengakibatkan pemotongan anggaran pada beberapa indikator SPM Dinas Sosial Provinsi Maluku, bahkan salah satu Kegiatan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi untuk indikator Permakanan yang awalnya targetnya 1000 orang menjadi 0 Target;
 - c) Terdapat pergeseran anggaran pada UPTD Ina Kaka, dimana pada indikator Permakanan dialihkan anggarannya sebesar Rp 59.200.000 sehingga bertambah 5 Indikator SPM yaitu : - Penyediaan Perbekalan Kesehatan didalam panti Rp 10.000.000 - Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Rp 4.800.000 - Pemberian Aktivitas Hidup sehari-hari Rp 3.600.000 - Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga Rp 19.800.000 - Pemulasaraan Rp 21.000.000;
 - d) Pada UPTD PSBR Hiti-hiti Hala-hala terjadi pergeseran anggaran ke Dinas Sosial Provinsi sebesar Rp 279.374.550 (Di Alihkan ke Perjalanan Dinas.
- Solusi
- Untuk menjawab permasalahan yang dihadapi seperti yang dijelaskan di atas, maka solusi yang dapat dilakukan adalah :
- a) Terhadap dampak efisiensi anggaran yang mengakibatkan pemotongan anggaran pada beberapa indikator SPM, Dinas Sosial melakukan penyesuaian target penerima manfaat serta mengoptimalkan sumber daya yang tersedia untuk tetap memberikan pelayanan sosial secara efektif. Selain itu, pemerintah daerah juga berupaya mengusulkan kembali kebutuhan anggaran pada tahun anggaran berikutnya agar indikator pelayanan yang belum dapat dilaksanakan, seperti pelayanan permakanan bagi korban bencana alam dan sosial, dapat kembali diimplementasikan sesuai dengan target pelayanan;
 - b) Pemerintah daerah perlu melakukan penguatan perencanaan anggaran dan pengendalian pelaksanaan kegiatan agar alokasi anggaran yang mendukung indikator SPM tetap menjadi prioritas utama. Selain itu, koordinasi antara perangkat daerah dan unit pelaksana teknis juga akan ditingkatkan agar pelaksanaan program dan kegiatan yang berkaitan dengan pelayanan sosial dapat berjalan secara lebih efektif dan sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

4.7 Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan seluruh urusan Standar Pelayanan Minimal (SPM) menggambarkan berbagai program, kegiatan, dan sub kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah dalam rangka mendukung pemenuhan pelayanan dasar kepada masyarakat. Melalui program dan kegiatan serta realisasi dapat diketahui bahwa pelaksanaan SPM dilaksanakan melalui berbagai program dan kegiatan pada perangkat daerah yang membidangi urusan pelayanan dasar, yaitu urusan pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, ketenteraman dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat, serta urusan sosial.

Tabel berikut memuat informasi mengenai nama program dan kegiatan, sesuai dengan klasifikasi perencanaan dan penganggaran daerah, serta besaran anggaran yang dialokasikan dan realisasi anggaran yang telah dicapai pada tahun anggaran berjalan. Setiap program dan kegiatan yang tercantum merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah untuk memenuhi indikator kinerja SPM sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tabel 4.17
Program dan Kegiatan dalam Penerapan Standar Pelayanan Minimal
(SPM) Tahun 2025

No.			Program dan Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Persentase
A.			Urusan Pendidikan			
	I		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	30,777,615,217	0	0%
		1	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah (SMA)	0	0	0 %
		2	Pengelolaan	0	0	0 %

No.			Program dan Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Persentase
			Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)			
		3	Pengelolaan Pendidikan Khusus	0	0	0 %
		4	Penyelenggaraan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	0	0	0 %
		5	Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya Lintas Daerah	0	0	0 %
B.			Urusan Kesehatan			
	I		Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	313,254,000	0	0%
		1.	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	313,254,000	0	0%
C.			Urusan Pekerjaan Umum			
	I		Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum			
		1.	Pengelolaan dan	5,725,210,114	5,725,210,114	100%

No.			Program dan Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Persentase
			Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota			
	II		Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah			
		1	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik (SPALD) Regional	0	0	0%
D.			Perumahan Rakyat			
	I		Program Pengembangan Perumahan			
		1.	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	234,366,000	234,366,000	
		2.	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	22,597,000,000	13,318,000,000	58.94 %
E.			Urusan Trantibumlinmas			
	I		Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	119,869,400	98,581,800	82.24 %
		1.	Penanganan	79,024,300	74,844,300	94.71 %

No.			Program dan Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Persentase
			Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi			
		2.	Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur	0	0	0%
		3.	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi	0	0	0%
		4.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	40,845,100	23,737,500	58%
F.			Urusan Sosial			
	I		Program Rehabilitasi Sosial			
		1.	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti	231,201,000	227,341,430	98.33 %
		2.	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti	2,152,733,492	1,604,438,849	74.53 %
		3.	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti	716,695,000	673,082,000	93.91 %
		4.	Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti	29,328,000	29,219,753	99.63 %
	II		Program			

No.			Program dan Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Persentase
			Penanganan Bencana			
		1.	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi	0	0	0 %



BAB V

PENUTUP

BAB V PENUTUP

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Provinsi Maluku Tahun 2025 merupakan bentuk pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi Maluku atas pelaksanaan urusan pemerintahan daerah, pembangunan, serta pelayanan publik selama Tahun Anggaran 2025. Laporan ini memuat gambaran capaian kinerja pemerintah daerah yang dilaksanakan melalui berbagai kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025 serta arah kebijakan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Maluku Tahun 2025–2029.

Berdasarkan hasil evaluasi mandiri (*self assessment*), penyelenggaraan pemerintahan daerah selama Tahun 2025 secara umum menunjukkan capaian kinerja yang cukup baik pada berbagai urusan pemerintahan. Pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah telah diupayakan secara optimal oleh perangkat daerah sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan, dengan dukungan sinergi antara pemerintah daerah dan para pemangku kepentingan dalam mendorong pembangunan daerah serta peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

LPPD Provinsi Maluku Tahun 2025 ini selanjutnya menjadi bahan dalam pelaksanaan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD) Tahun 2026 oleh pemerintah pusat. Hasil evaluasi tersebut diharapkan dapat memberikan masukan yang konstruktif bagi Pemerintah Provinsi Maluku dalam meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, memperkuat tata kelola pemerintahan, serta mendukung pelaksanaan otonomi daerah secara efektif.

Ambon, 12 Maret 2026

GUBERNUR MALUKU



HENDRIK LEWERISSA, SH., LL.M

